



Peraturan Gubernur No. 031 Tahun 2022

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH
DAERAH
TAHUN 2023
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 031 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ menentukan bahwa Pemerintah Provinsi harus mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan perencanaan kerja pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/4809/Bangda tanggal 24 Juni 2022, perlu untuk ditindaklanjuti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
44. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
45. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 2

- (1) Program Pemerintah Daerah Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- (2) Rincian dari program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran umum kondisi Daerah;
- c. Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. Bab V Arah Kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- f. Bab VI Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- g. Bab VII Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- h. Bab VIII Penutup.

Pasal 5

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Renja PD ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 31

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar



RKPD
2023

KALIMANTAN SELATAN



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum	I-2
1.3	Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
1.4	Maksud Dan Tujuan	I-9
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I-10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi Dan Demografi	II-1
2.1.1	Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II-2
2.1.2	Topografi	II-5
2.1.3	Geologi	II-7
2.1.4	Hidrologi	II-10
2.1.5	Meteorologi dan Klimatologi.....	II-13
2.1.6	Penggunaan dan Tutupan Lahan.....	II-15
2.1.7	Demografi	II-19
2.1.7.1	Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan	II-20
2.1.7.2	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan	II-23
2.1.7.3	Penduduk Menurut Pekerjaan.....	II-24
2.1.7.4	Penduduk Menurut Agama.....	II-25
2.1.7.5	Penduduk Menurut Kepala Keluarga	II-26
2.1.7.6	Penduduk Menurut Usia Sekolah.....	II-27
2.1.7.7	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-28
2.1.8	Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-29
2.1.8.1	Daya Dukung Permukiman	II-30
2.1.8.1	Daya Dukung Lahan Pertanian	II-31
2.1.8.2	Daya Dukung Air	II-33
2.1.9	Potensi Pengembangan Wilayah	II-42
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-45
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-45
2.2.1.1	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-47
2.2.1.2	Struktur Perekonomian Wilayah.....	II-50
2.2.1.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-55
2.2.1.4	Inflasi	II-62
2.2.1.5	Gini Rasio	II-66
2.2.1.6	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)....	II-69
2.2.1.7	Angka Kemiskinan. Tingkat Kemiskinan. dan Garis Kemiskinan ...	II-71
2.2.1.8	Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan	II-75
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-76
2.2.2.1	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-76
2.2.2.1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	II-78
2.2.2.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	II-79
2.2.2.1.3	Angka Harapan Hidup (AHH).....	II-80
2.2.2.1.4	Rata rata Pengeluaran Perkapita	II-88
2.2.2.2	Ketenagakerjaan	II-88
2.2.2.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-88





2.2.2.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-90
2.2.2.2.3	Jumlah Penduduk Pengangguran Mencari Kerja	II-94
2.2.2.2.4	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja.....	II-95
2.2.2.2.5	Jumlah Penduduk Bekerja	II-95
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-96
2.3	Aspek Pelayanan Umum.....	II-98
2.3.1	Layanan Urusan Wajib	II-98
2.3.1.1	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar	II-98
2.3.1.1.1	Pendidikan.....	II-98
2.3.1.1.2	Kesehatan	II-104
2.3.1.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-111
2.3.1.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-125
2.3.1.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat..	II-130
2.3.1.1.6	Sosial	II-131
2.3.1.2	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar	II-134
2.3.1.2.1	Tenaga Kerja.....	II-134
2.3.1.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-135
2.3.1.2.3	Pangan	II-138
2.3.1.2.4	Lingkungan Hidup	II-140
2.3.1.2.5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-166
2.3.1.2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-168
2.3.1.2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-170
2.3.1.2.8	Perhubungan.....	II-172
2.3.1.2.9	Komunikasi dan Informatika	II-181
2.3.1.2.10	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	II-187
2.3.1.2.11	Penanaman Modal	II-190
2.3.1.2.12	Kepemudaan dan Olahraga	II-191
2.3.1.2.13	Statistik	II-193
2.3.1.2.14	Persandian	II-193
2.3.1.2.15	Kebudayaan	II-194
2.3.1.2.16	Perpustakaan dan Kearsipan.....	II-196
2.3.2	Layanan Urusan Pilihan	II-198
2.3.2.1	Pertanian	II-198
2.3.2.2	Kelautan dan Perikanan	II-208
2.3.2.3	Kehutanan	II-212
2.3.2.4	Energi dan Sumber Daya Alam.....	II-217
2.3.2.5	Pariwisata	II-219
2.3.2.6	Perdagangan.....	II-220
2.3.2.7	Industri.....	II-221
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-223
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-223
2.4.1.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-224
2.4.1.2	Nilai Tukar Petani	II-225
2.4.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-226
2.4.2.1	Energi	II-226
2.4.2.2	Hotel	II-227
2.4.3	Sumber Daya Manusia.....	II-228
2.4.3.1	Ketenagakerjaan	II-228





2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-229
2.5.1	Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2021	II-229
2.5.2	Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2016-2021	II-239
2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2021	II-241
2.6.1	Permasalahan Daerah Berkaitan Dengan Pandemi COVID-19 ...	II-242
2.6.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-250
2.6.3	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-261
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah.....	III-4
3.1.1.1	Produksi Domestik Regional Bruto	III-4
3.1.1.2	Inflasi	III-8
3.1.1.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	III-10
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	III-18
3.2	Arah Kebijakan Keuangan.....	III-25
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-27
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-32
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-34
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1	Tahapan Pembangunan Tahun 2023 Berdasarkan RPJPD 2005 – 2025.....	IV-1
4.1.2	Tahapan Pembangunan Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026 IV-2	
4.1.3	Tahapan Pembangunan Berdasarkan Dokumen Sustainable Development Goals (SDGs).....	IV-3
4.1.4	Tahapan Pembangunan Tahun 2023 Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2023.	IV-5
4.1.5	Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan	IV-6
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-9
4.2.1	Isu-Isu Strategis	IV-9
4.2.2	Tema, Fokus Dan Prioritas RKPD Tahun 2023	IV-12
4.2.3	Prioritas Dan Sasaran RKPD Tahun 2023.....	IV-14
4.3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Antara RKPD 2023 Dan RKP 2023	IV-19
4.4	Inovasi Pembangunan Daerah.....	IV-25
4.5	Tahapan Proses Perencanaan	IV-26
4.5.1	Forum Konsultasi Publik.....	IV-26
4.5.2	Forum Lintas Perangkat Daerah	IV-28
4.5.3	Musrenbang Penyusunan RKPD	IV-29
4.5.4	Trilateral Desk Provinsi Kalimantan Selatan	IV-30
4.5.5	Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD	IV-31
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
5.1	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan.....	V-1
5.1.1	Arah Kebijakan Kewilayahan	V-3
5.2	Gambaran Umum Kinerja Makro Daerah.....	V-5





5.2.1	Dimensi Perekonomian	V-6
5.2.2	Dimensi Pembangunan Manusia	V-7
5.3	Arah Kebijakan Kabupaten/Kota	V-12
5.3.1	Kota Banjarmasin	V-12
5.3.2	Kota Banjarbaru	V-13
5.3.3	Kabupaten Banjar	V-14
5.3.4	Kabupaten Tanah Laut	V-16
5.3.5	Kabupaten Tanah Bumbu	V-17
5.3.6	Kabupaten Kotabaru	V-18
5.3.7	Kabupaten Tapin	V-18
5.3.8	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	V-19
5.3.9	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	V-20
5.3.10	Kabupaten Hulu Sungai Utara	V-21
5.3.11	Kabupaten Balangan	V-23
5.3.12	Kabupaten Tabalong	V-24
5.3.13	Kabupaten Barito Kuala	V-25
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	VI-1
6.1	Prioritas Dan Sub Prioritas RKPD Tahun 2023	VI-1
6.2	Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaan	VI-20
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH...VII-1	
7.1	Indikator Kinerja Makro Daerah	VII-2
7.2	Indikator Kinerja Utama	VII-3
7.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VII-5
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

2023
KALIMANTAN SELATAN



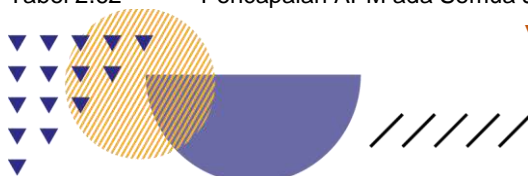
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021	II-3
Tabel 2.2	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut, 2021.....	II-6
Tabel 2.3	Potensi Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-8
Tabel 2.4	Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-11
Tabel 2.5	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata-rata Tekanan Udara, dan Rata-rata Penyinaran Matahari, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-13
Tabel 2.6	Kelembaban Udara (%) dan Temperatur (°C) Provinsi Kalimantan Selatan, 2021	II-15
Tabel 2.7	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2020.....	II-16
Tabel 2.8	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	II-16
Tabel 2.9	Luas Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2020.....	II-19
Tabel 2.10	Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2017-2021.....	II-20
Tabel 2.11	Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-22
Tabel 2.12	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2017-2021.....	II-23
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/Lapangan Usaha Tahun 2020.....	II-24
Tabel 2.14	Sebaran Penduduk Menurut Agama Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2021 ..	II-26
Tabel 2.15	Sebaran Penduduk Menurut Kepala Keluarga Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2021.....	II-26
Tabel 2.16	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-27
Tabel 2.17	Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2019 ..	II-32
Tabel 2.18	Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK	II-34
Tabel 2.19	Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis	II-35
Tabel 2.20	Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Administrasi Tahun 2019	II-38
Tabel 2.21	Kasus Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2021	II-44
Tabel 2.22	Data Bencana Banjir di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2021	II-46
Tabel 2.23	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Juta Rupiah)	II-48
Tabel 2.24	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Juta Rupiah).....	II-49
Tabel 2.25	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Triliun Rupiah) Menurut Pengeluaran.....	II-50
Tabel 2.26	Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021.....	II-52
Tabel 2.27	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan 2017 - 2021	II-55
Tabel 2.28	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kab/Kota Tahun 2017-2021.....	II-55
Tabel 2.29	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010	II-56



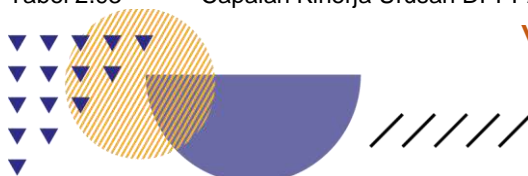


Tabel 2.30	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2017–2021 Menurut Pengeluaran	II-61
Tabel 2.31	Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2021	II-63
Tabel 2.32	Indeks Harga Konsumen Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2021.....	II-64
Tabel 2.33	Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional 2017-2021	II-66
Tabel 2.34	Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020.....	II-69
Tabel 2.35	Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2016-2020).....	II-70
Tabel 2.36	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.37	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2020-2021	II-72
Tabel 2.38	Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2017 s.d. 2021 (Rupiah).....	II-74
Tabel 2.39	Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2017 s.d. 2021 (Rupiah)...	II-74
Tabel 2.40	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2017 s.d. 2021 (Rupiah).....	II-74
Tabel 2.41	Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-75
Tabel 2.42	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2017-2021	II-77
Tabel 2.43	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. 2021	II-77
Tabel 2.44	Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2017-2021	II-79
Tabel 2.45	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2017-2021	II-79
Tabel 2.46	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2015-2021	II-81
Tabel 2.47	Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020 ...	II-84
Tabel 2.48	Penyakit Tidak Menular Tahun 2020.....	II-85
Tabel 2.49	Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.50	Jumlah Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-87
Tabel 2.51	Perkembangan pengularan perkapita di Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2.52	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2017-2021	II-91
Tabel 2.53	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020	II-91
Tabel 2.54	Lulusan SMK Kalimantan Selatan yang diterima Bekerja pada Tahun 2020-2021	II-92
Tabel 2.55	Sertifikasi Lulusan SMK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-93
Tabel 2.56	Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-94
Tabel 2.57	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-95
Tabel 2.58	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021.....	II-96
Tabel 2.59	Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan.....	II-97
Tabel 2.60	Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.61	Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.62	Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di	



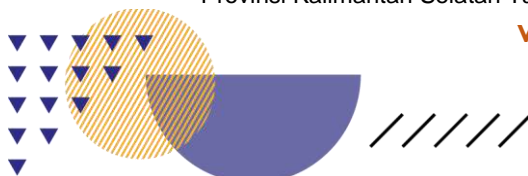


	Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-100
Tabel 2.63	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021	II-100
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan	II-103
Tabel 2.65	Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-104
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan	II-107
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan RS Ulin Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan	II-110
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan RS Ansari Saleh Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan	II-110
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan RSJ Sambang Lihum Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan	II-110
Tabel 2.70	Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2019	II-115
Tabel 2.71	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan Tahun 2019	II-116
Tabel 2.72	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan One Map Irigasi pada Tahun 2019	II-116
Tabel 2.73	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019	II-117
Tabel 2.74	Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan	II-120
Tabel 2.75	Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan	II-121
Tabel 2.76	Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-122
Tabel 2.77	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 sampai 2021	II-123
Tabel 2.78	Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan	II-124
Tabel 2.79	Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Kewenangan Penanganan	II-125
Tabel 2.80	Data Luasan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan	II-126
Tabel 2.81	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan	II-128
Tabel 2.82	Penangan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	II-129
Tabel 2.83	Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-129
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2022 Provinsi Kalimantan Selatan	II-130
Tabel 2.85	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan	II-130
Tabel 2.86	Capaian Kinerja Urusan BPBD Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-131
Tabel 2.87	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-131
Tabel 2.88	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan	II-133
Tabel 2.89	Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-135
Tabel 2.90	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Selatan 2011-2020	II-135
Tabel 2.91	Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2020	II-136
Tabel 2.92	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2020	II-137
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Urusan DPPPA Tahun 2016-2020	





	Provinsi Kalimantan Selatan	II-137
Tabel 2.94	Produksi Pangan Utama di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-138
Tabel 2.95	Capaian Kinerja Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-139
Tabel 2.96	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021	II-140
Tabel 2.97	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021	II-140
Tabel 2.98	Parameter Status Pencemar Udara Tahun 2020	II-141
Tabel 2.99	Perubahan Emisi GRK Tahun 2016-2020 di Kalimantan Selatan	II-142
Tabel 2.100	Luas dan Sebaran Indikator Fungsi Ekosistem Gambut per Kabupaten	II-145
Tabel 2.101	Sebaran Status Kerusakan Pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	II-146
Tabel 2.102	Sebaran Status Kerusakan Pada Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	II-146
Tabel 2.103	Kondisi Tutupan Lahan di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-148
Tabel 2.104	Timbulan Limbah Covid 19 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-152
Tabel 2.105	Timbulan Limbah Covid 19 Provinsi Kalimantan Selatan s.d Bulan Oktober 2021	II-153
Tabel 2.106	Tabel Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel Tahun 2021	II-155
Tabel 2.107	Parameter Indeks Kualitas Air (IKA)	II-157
Tabel 2.108	Capaian Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2027 Provinsi Kalimantan Selatan	II-165
Tabel 2.109	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-166
Tabel 2.110	Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan	II-166
Tabel 2.111	Pertumbuhan Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kalimantan Selatan dari Tahun 2015 - 2020	II-168
Tabel 2.112	Data Registrasi Bumdes Tahun 2020	II-169
Tabel 2.113	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-169
Tabel 2.114	Perkembangan Kepesertaan KB di Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-170
Tabel 2.115	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-171
Tabel 2.116	Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan	II-174
Tabel 2.117	Trayek dan Tarif Bus AKAP	II-176
Tabel 2.118	Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula	II-177
Tabel 2.119	Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan	II-179
Tabel 2.120	Aktivitas Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019	II-179
Tabel 2.121	Aktivitas Bandara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2019	II-180
Tabel 2.122	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-181
Tabel 2.123	Persebaran Desa Bebas Blank Spot dan Desa Blank Spot	II-182
Tabel 2.124	Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2019	II-182
Tabel 2.125	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa)	II-183
Tabel 2.126	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Keluarga Pelanggan Telepon Tetap Kabel Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa)	II-183
Tabel 2.127	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-184
Tabel 2.128	Rekapitulasi Data Aduan Masyarakat yang Masuk Melalui SP4N-LAPOR (LAPORPAMAN) Tahun 2017 - 2021	II-185
Tabel 2.129	Rekapitulasi Top Isu Publik yang Beredar di Masyarakat Tahun 2017 - 2021	II-185
Tabel 2.130	TABEL JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DISEBARLUASKAN	II-186
Tabel 2.131	Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2020	II-187

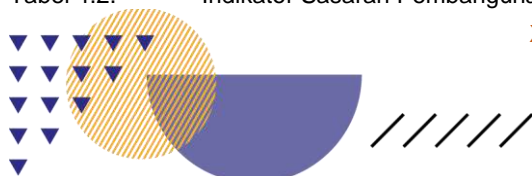


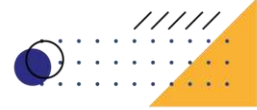


Tabel 2.132	Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-188
Tabel 2.133	Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-189
Tabel 2.134	Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-189
Tabel 2.135	Rekap Data UMKM Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-190
Tabel 2.136	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-190
Tabel 2.137	Jumlah Proyek. Rencana. dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2020 PMA dan PMDN	II-191
Tabel 2.138	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-191
Tabel 2.139	Atlet Dan Pelatih Tahun 2021	II-192
Tabel 2.140	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-192
Tabel 2.141	Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2020.....	II-195
Tabel 2.142	Perkembangan Indikator Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020.....	II-197
Tabel 2.143	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020.....	II-197
Tabel 2.144	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-198
Tabel 2.145	Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018-2020	II-199
Tabel 2.146	Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018 – 2020 (Dibuat Antar Wilayah).....	II-200
Tabel 2.147	Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018 - 2019.....	II-201
Tabel 2.148	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-201
Tabel 2.149	Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019.....	II-202
Tabel 2.150	Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018 - 2019.....	II-202
Tabel 2.151	Jumlah Ternak Besar. Ternak Kecil. dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008-2019.....	II-205
Tabel 2.152	Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2019.....	II-205
Tabel 2.153	Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-205
Tabel 2.154	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga. Produksi. dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2020	II-211
Tabel 2.155	Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-211
Tabel 2.156	Perkembangan Produksi Kayu Bulat (m ³) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020.....	II-213
Tabel 2.157	Kondisi Lahan Kritis dan sangat Kritis di Kalimantan Selatan Tahun 2019	II-215
Tabel 2.158	Kondisi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	II-215
Tabel 2.159	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-216
Tabel 2.160	Jumlah Produksi Batubara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020	II-217
Tabel 2.161	Data Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-217



Tabel 2.162	Jumlah IUP di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-217
Tabel 2.163	Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020.....	II-218
Tabel 2.164	Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2014 - 2020	II-219
Tabel 2.165	Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-219
Tabel 2.166	Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-220
Tabel 2.167	Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2020	II-221
Tabel 2.168	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-221
Tabel 2.169	Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020	II-222
Tabel 2.170	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan	II-223
Tabel 2.171	Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2020	II-229
Tabel 2.172	Jumlah SKPD Berdasarkan Kriteria Kinerja dan Kriteria Anggaran	II-231
Tabel 2.173	Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2020.....	II-232
Tabel 2.174	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2021	II-239
Tabel 2.175	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Pemprov Kalsel.....	II-250
Tabel 2.176	Data Perbandingan Kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan	II-264
Tabel 3.1.	PDRB Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2017 – 2021.....	III-4
Tabel 3.2.	PDRB Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2017–2021.....	III-6
Tabel 3.3.	Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2016–2021 (Triliun Rupiah) Menurut Pengeluaran.....	III-7
Tabel 3.4.	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017 – 2021.....	III-8
Tabel 3.5.	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan.....	III-12
Tabel 3.6.	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan.....	III-13
Tabel 3.7.	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2020–2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan	III-21
Tabel 3.8.	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2019–2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 Menurut Pengeluaran.....	III-22
Tabel 3.9.	LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2020–2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan	III-23
Tabel 3.10.	Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2020–2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 menurut Lapangan Usaha.....	III-24
Tabel 3.11.	Sasaran Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023	III-25
Tabel 3.12.	Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Tahun 2021-2023 (Rp).....	III-30
Tabel 3.13.	Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2021 (Dalam Miliar Rupiah).....	III-33
Tabel 3.14.	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (Rp)	III-33
Tabel 3.15.	Anggaran Pembiayaan Daerah TA 2016-2021 (Dalam Juta Rupiah).....	III-34
Tabel 3.16.	Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2022 dan 2023 (Rp)	III-35
Tabel 3.17.	Proyeksi Target RAPBD TA 2022 dan 2023 (Rp)	III-36
Tabel 4.1.	17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-4
Tabel 4.2.	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	IV-5





Tabel 4.3.	Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan yang terseleksi Tahun 2023	IV-6
Tabel 4.4.	Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023	IV-14
Tabel 4.5.	Sasaran prioritas dan subprioritas RKPD tahun 2023.....	IV-17
Tabel 4.6.	Sandingan Prioritas Nasional / Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2023.....	IV-20
Tabel 4.7.	Inovasi Daerah	IV-25
Tabel 5.1.	Capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021.....	V-8
Tabel 5.2.	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021	V-9
Tabel 5.3.	TPT Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021	V-10
Tabel 5.4.	Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021	V-11
Tabel 5.5.	Kinerja Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 Dan Target Kinerja Tahun 2022-2023.....	V-26
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Makro Daerah.....	VII-2
Tabel 7.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	VII-4
Tabel 7.3.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	VII-11



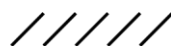
RKPD 2023

KALIMANTAN SELATAN



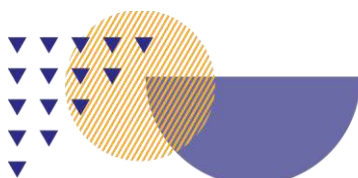
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi	I-2
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan	II-3
Gambar 2.2	Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (Km ²).....	II-4
Gambar 2.3	Peta Wilayah Kalimantan Selatan terhadap wilayah sekitar, ALKI 1, dan ALKI 2.....	II-5
Gambar 2.4	Peta Topografi Provinsi Kalimantan Selatan	II-6
Gambar 2.5	Peta Geologi Provinsi Kalimantan Selatan	II-10
Gambar 2.6	Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan	II-11
Gambar 2.7	Peta Klimatologi Provinsi Kalimantan Selatan	II-14
Gambar 2.8	Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan	II-18
Gambar 2.9	Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2021.....	II-21
Gambar 2.10	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	II-21
Gambar 2.11	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021 ..	II-23
Gambar 2.12	Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021	II-25
Gambar 2.13	Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2021	II-29
Gambar 2.14	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi	II-35
Gambar 2.15	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Administrasi.....	II-36
Gambar 2.16	Peta Status Pangan	II-39
Gambar 2.17	Peta Status Air	II-40
Gambar 2.18	Status Air Analisis	II-41
Gambar 2.19	Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan	II-43
Gambar 2.1	Pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB) 2019 – 2021 (Y-ON-Y) (Persen)	II-45
Gambar 2.20	Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021	II-51
Gambar 2.21	Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Pengeluaran Tahun 2021 ..	II-54
Gambar 2.22	Pertumbuhan PDRB ADHB 2010 Per Sektor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021	II-60
Gambar 2.23	Pertumbuhan PDRB ADHB 2010 Per Sektor Menurut Pengeluaran Tahun 2021	II-62
Gambar 2.24	Gini Ratio Indonesia Per Provinsi per September Tahun 2021	II-67
Gambar 2.25	Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Selatan per September 2021.....	II-68
Gambar 2.26	Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020.....	II-71
Gambar 2.27	Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021. Serta AHH	





	Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-80
Gambar 2.28	Angka Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2020	II-82
Gambar 2.29	Angka Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-83
Gambar 2.30	Angka Kematian Balita di Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-84
Gambar 2.31	Pekembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020	II-87
Gambar 2.32	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021	II-89
Gambar 2.33	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-90
Gambar 2.34	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022	II-105
Gambar 2.35	Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-105
Gambar 2.36	Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-106
Gambar 2.37	Jumlah Kefarmasian Dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2021	II-106
Gambar 2.38	Capaian Kondisi Jalan Mantap Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-113
Gambar 2.39	Wilayah Sungai di Kalimantan Selatan, a) WS Barito, b) WS Cengal – Batulicin, c) WS Pulau Laut	II-114
Gambar 2.40	Capaian Air Minum Kalimantan Selatan 2016 – 2021	II-118
Gambar 2.41	Capaian Air Minum Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020	II-119
Gambar 2.42	Capaian Air Minum Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2021 ...	II-120
Gambar 2.43	Data Luasan Kumuh yang Sudah di Tangani Tahun (2018–2021) ...	II-127
Gambar 2.44	Persentase Penganganan Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021	II-127
Gambar 2.45	Kerusakan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Selatan	II-128
Gambar 2.46	Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021	II-134
Gambar 2.47	Peta Fungsi ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan	II-144
Gambar 2.48	Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan	II-176
Gambar 2.49	Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020	II-220
Gambar 2.50	Pertumbuhan Produksi Industri Kecil dan Menengah serta Industri Besar dan Sedang Per Triwulan Tahun 2017 - 2019 (year to year)	II-223
Gambar 2.51	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020 dan Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	II-224
Gambar 2.52	Tukar Petani Kalimantan Selatan dan Rata-rata Nasional Tahun 2016-2020	II-226
Gambar 2.53	Peningkatan Jumlah dan Persentase Pengguna Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020	II-227
Gambar 2.54	Tingkat Penghunian Kamar per Bulan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Rata-rata Lama Menginap tamu Asing dan tamu Domestik	II-228
Gambar 2.55	Perkembangan Data Perkembangan Kasus Konfirmasi, Sembuh	



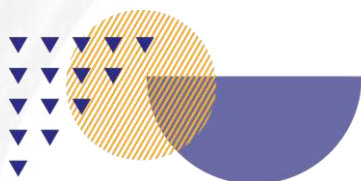


	dan Meninggal (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Selatan	II-263
Gambar 3.1	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	III-2
Gambar 3.2	Perbandingan Share PDRB ADHB Sektor Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2021	III-6
Gambar 3.3	Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2021	III-10
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2021	III-11
Gambar 3.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi di Kalimantan Tahun 2017-2021	III-12
Gambar 3.6	Share Perekonomian (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021	III-14
Gambar 3.7	Penopang Perekonomian (PDRB ADHB) Kabupaten/Kota Tahun 2021 berdasarkan 5 (lima) Sektor Lapangan Usaha terbesar	III-15
Gambar 3.8	Tipologi Klassen PDRB ADHB Kabupaten/Kota pada Tahun 2017-2021 di Kalimantan Selatan	III-17
Gambar 3.9	Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2023 ...	III-18
Gambar 4.1	Prioritas Pembangunan pada Dokumen RKPD 2023	IV-16
Gambar 4.2	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan FKP Tahun 2022	IV-27
Gambar 4.3	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	IV-28
Gambar 4.4	Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD	IV-29
Gambar 4.5	Dokumentasi Pelaksanaan Trilateral Desk Tahun 2022	IV-30
Gambar 4.6	Dokumentasi Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD	IV-31
Gambar 5.1	Diagram Pohon Sistem Perkotaan di Kalimantan Selatan	V-4
Gambar 5.2	Share dan Pertumbuhan PDRB Kab/Kota Tahun 2016-2019	V-6

2023
KALIMANTAN SELATAN

Bab-I

Pendahuluan



RKPD
2023

KALIMANTAN SELATAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Pemerintah Daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

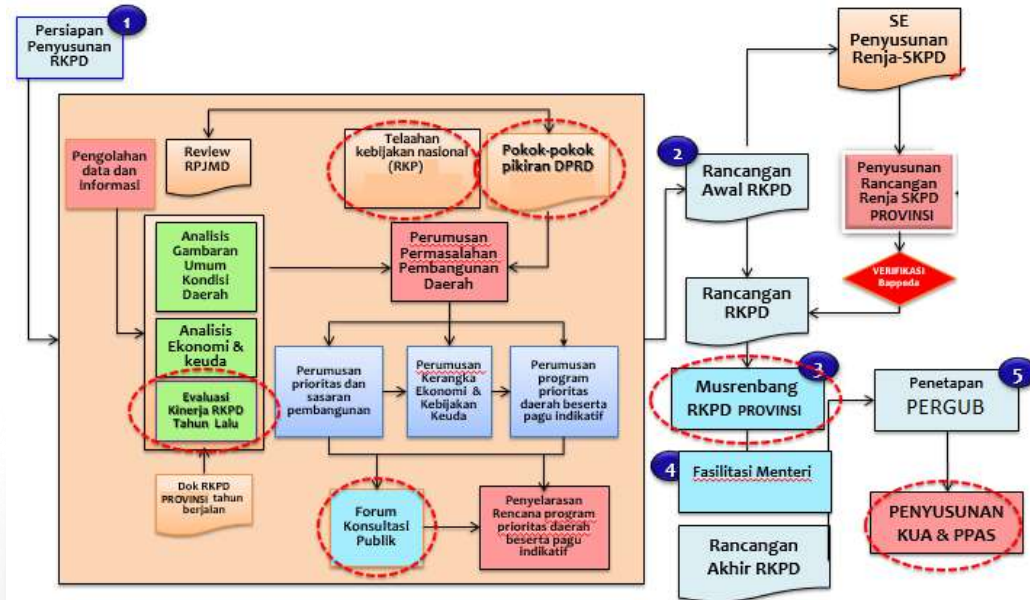
Salah satu Dokumen perencanaan yang wajib dibuat daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 selain dalam rangka memenuhi ketentuan regulasi sekaligus juga menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menjadi



pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 yang berpedoman pada PERMENDAGRI 86 Tahun 2017 dan akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal mekanisme proses penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi

1.2 Dasar Hukum

Peraturan dan perundangan yang terkait sebagai Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68,





- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779)
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- L9) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi





- Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Kedudukan
Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5107);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2017 Tentang
Sinkronisasi Proses
Perencanaan Dan
Penggangan Pembangunan
- Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 105);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52,
Tambah Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
6323);
25. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);





26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);





34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventrisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015–2035;





- | | |
|---|--|
| <p>44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi</p> | <p>Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);</p> <p>46. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;</p> <p>47. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.</p> |
|---|--|

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karena itu RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 merupakan bagian dari sistem Perencanaan Nasional dalam rangka untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional. Selanjutnya dokumen perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dan saling terkait dengan dokumen nasional dan dokumen yang ada di masing-masing daerah.

Sinkronisasi dan saling keterkaitan antara RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan RKP Nasional Tahun 2023

Dalam Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga terjadi sinergisitas antar dokumen nasional dan daerah.

2. RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan



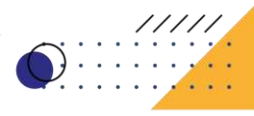
Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 khususnya dalam penetapan lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

3. RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan dalam tahun berjalan dan sekaligus merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Tahun 2021 - 2026. Sebagai penjabaran teknis RKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 adalah secara substansial untuk memberi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan, dan secara normatif dimaksudkan untuk menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 sebagai berikut:



Menyediakan satu acuan bagi seluruh Kepala SKPD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2022



Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022



Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan



Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Pemerintah Pusat.



Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target penetapan kinerja



Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan



Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan/Pengendalian



Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

1.5 **Sistematika Dokumen RKPD**

Penyusunan Dokumen RKPD tahun 2023 terdiri dari 8 bab yang sistematikanya dengan mengacu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negetri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang , Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan inilah selanjutnya RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB - 1. PENDAHULUAN,

Memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB - 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH,



Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB - 3. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH,

Memuat kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB - 4. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan dan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2023.

BAB - 5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA,

Memuat tentang arah kebijakan pemerintah provinsi dalam pembangunan kewilayahan secara terpadu melibatkan pemangku kepentingan yang ada di wilayah kabupaten/kota.

BAB - 6. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH,

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah Provinsi Kalimantan Selatan

BAB - 7. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Berisi tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB - 8. PENUTUP

Bab-II

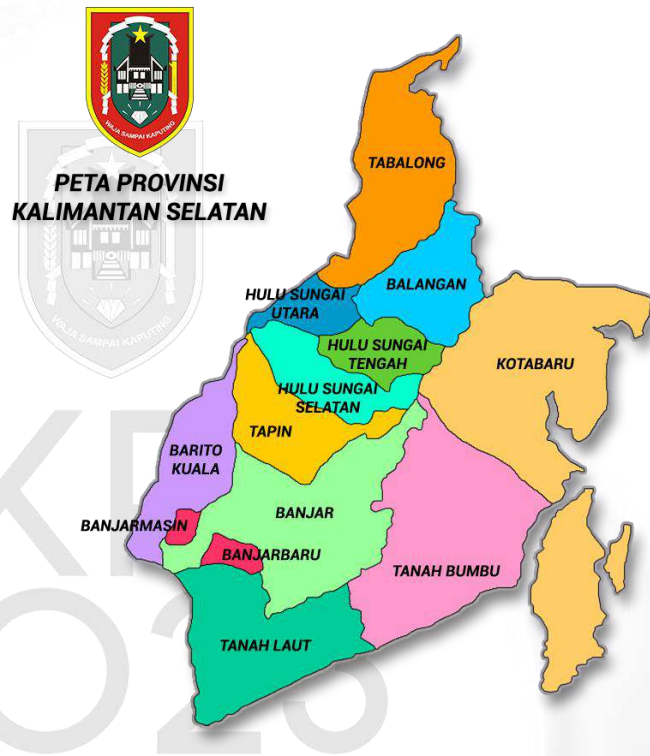
Gambaran Umum Kondisi Daerah



DKPD
2023

KALIMANTAN SELATAN

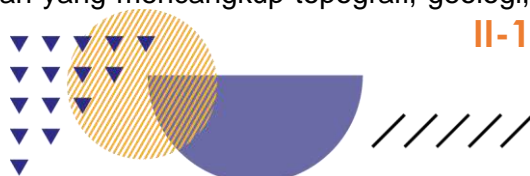
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Gambaran umum Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan tentang kondisi geografi, demografi, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun hal ini memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Aspek geografi pada bagian ini membahas lingkup geografi dari aspek fisik wilayah yang mencakup topografi, geologi, hidrologi, iklim, dan tutupan lahan.





Aspek fisik wilayah tersebut mengkaji fenomena alam yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dimana fenomena tersebut terjadi secara alamiah.

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan Ibu Kota Provinsi berada di Kota Banjarmasin dan pusat pemerintahan semenjak tahun 2015 sebagian besar aktivitasnya berpindah ke Kota Banjarbaru.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Sebagai tindak lanjut dalam pengembangan wilayah administrasi, maka dibentuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956.

- 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur
- 1°21' 49" hingga 4°10'14" Lintang Selatan

Adapun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara administratif berbatasan dengan :

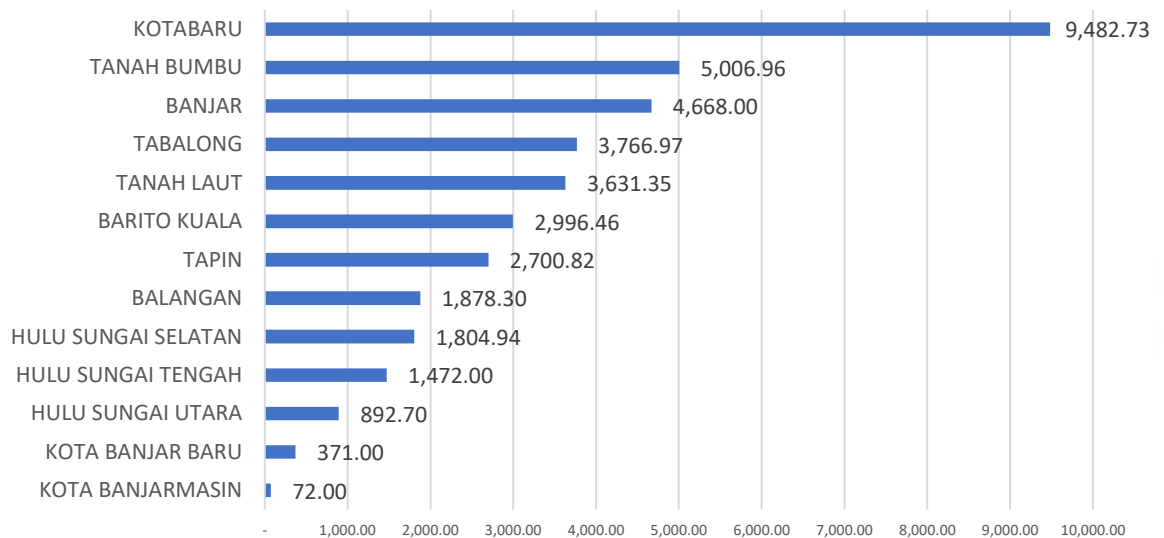
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 38.744,23 km² yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibu kota yakni Kota Banjarmasin. Adapun Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 156 kecamatan dan 1.943 desa/kelurahan dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2-1.

Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Barito Kuala	2.996,46	17	201	6
Tapin	2.700,82	12	135	9
Hulu Sungai Selatan	1.804,94	11	148	4
Hulu Sungai Tengah	1.472,00	11	169	8
Hulu Sungai Utara	892,7	10	219	5
Tabalong	3.766,97	12	131	10
Tanah Bumbu	5.066,96	12	157	5
Balangan	1.878,30	8	156	3
Banjarmasin	72,00	5	-	52
Banjarbaru	371,00	5	-	20
Kalimantan Selatan	38.744,23	156	1.943	144

Sumber: Permendagri no. 72 tahun 2019, Pergub Kalsel Tahun 2021 dan BPS Prov Kalsel Tahun 2022

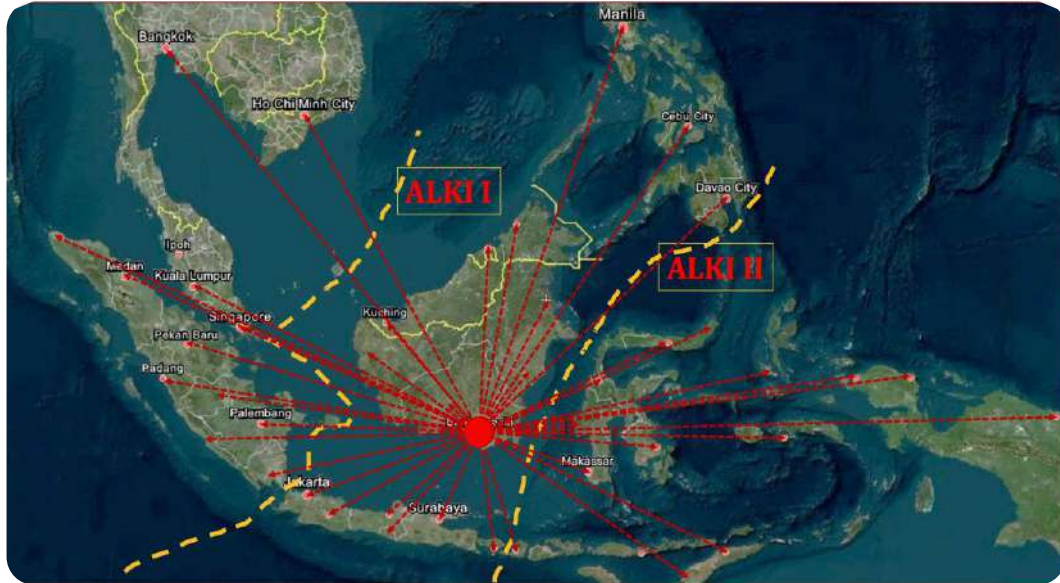
Kotabaru merupakan wilayah kab/kota dengan wilayah terluas di provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 9.482,73 Km² dan wilayah terkecil adalah Kota Banjarmasin sebesar 72 Km², Sebagaimana pada Gambar II-2.



Gambar 2.2 Luas Wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 (Km²)

Sumber : BPS Prov Kalsel Tahun 2022

Berdasarkan letak wilayah, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada posisi sentral atau di tengah – tengah Indonesia dan dilalui oleh ALKI II yang merupakan alur pelayaran internasional hal ini merupakan berpotensi besar terhadap perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan khususnya. Hal ini dapat terlihat pada gambar sebagai berikut ;

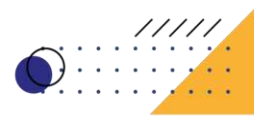


Gambar 2.3 Peta Wilayah Kalimantan Selatan terhadap wilayah sekitar, ALKI 1, dan ALKI 2
Sumber : Google Earth, diolah Tahun 2021

Dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah yang paling kecil, yakni hanya 6,98% dari luas pulau Kalimantan. Hal ini memudahkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sampai ke pelosok, sehingga memiliki peluang pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.2 Topografi

Kondisi topografi Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai (2-8%) pada bagian barat dan timurnya. Sementara kemiringan lahan yang terjal umumnya berada pada bagian tengah, yaitu disekitar Pegunungan Meratus dimana kemiringan lahan bisa >40%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah, 27,33% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut dan 23,57% wilayah berada pada ketinggian >100 meter di atas permukaan laut. Lebih jelasnya mengenai Klasifikasi topografi ini dapat dilihat pada Gambar II-4 dan Tabel 2-2.



KELERENGAN/KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
2-8	1.010.881	26,93
8-15	300.198	8,00
15-25	378.628	10,09
25-40	335.054	8,93
>40	231.195	6,16
Kelas Ketinggian (m)	3.753.052	100,00
0-7 m	888.171	23,66
> 7-25 m	954.322	25,43
> 25-100 m	1.025.655	27,33
> 100-500 m	675.254	17,99
> 500-1.000 m	165.905	4,42
> 1.000 m	43.745	1,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2020)

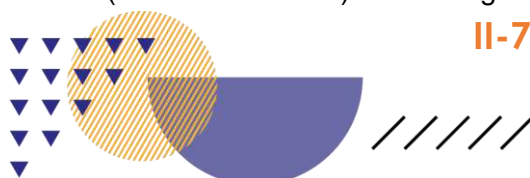
Wilayah Kalimantan Selatan banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan, dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.

Berdasarkan kondisi topografi yang relatif datar ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

2.1.3 Geologi

Bentang alam pegunungan di daratan Provinsi Kalimantan Selatan ini, didominasi oleh Pegunungan Meratus dengan puncak tertinggi dicapai oleh Gunung Batu Besar (1.892 mdpl), membentang dengan arah barat daya – timur laut mulai dari Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) di bagian barat daya hingga ke daerah Kabupaten Tabalong di bagian utara.

Selain itu, di Pulau Laut bentang alam pegunungan ini menempati Gunung Sebatung di Kotabaru yang mencapai ketinggian 676 mdpl. Sementara itu bentang alam dataran luas yang mendominasi Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di bagian barat (Dataran S. Barito) dan di bagian timur (Dataran Pagatan-Batulicin).



Dua dataran ini dipisahkan oleh jalur Pegunungan Meratus karena sungai-sungai beserta anak-anak sungai yang mengalir di kedua dataran tersebut berhulu di jalur Pegunungan Meratus.

Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia berskala 1 : 250.000, yang disusun dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 4 (empat) Lembar Peta Geologi, yaitu Peta Geologi Lembar Banjarmasin, Peta Geologi Lembar Amuntai, Peta Geologi Lembar Sampanahan, dan Peta Geologi Lembar Kotabaru, dengan daerah pemetaan disusun oleh berbagai jenis batuan berumur muda (Kuarter) hingga berumur tua (Yura).

Secara geologi, Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilalui jalur lempeng tektonik baik luar maupun dalam sehingga relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan bencana gunung berapi vulkanik, hal ini memberikan keamanan dalam berinvestasi di Kalimantan Selatan. Namun, walaupun relatif aman dari bencana vulkanologi, akan tetapi Provinsi Kalimantan Selatan tetap memiliki potensi terhadap kebencanaan lainnya. Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), tercatat 8 (delapan) jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit serta cuaca ekstrem. sebagaimana disajikan pada Tabel 2-3 berikut.

Tabel 2.3 Potensi Bencana Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

Jenis Bencana	Kategori			Persentase	
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total	Wilayah (%)
Banjir (Ha)	67.286,96	1.449.340,65	881.001,63	2.397.629,24	64,51
Banjir Bandang (Ha)	18.729,81	18.793,03	885,94	38.408,78	1,03
Karhutla (Ha)	694.336,45	1.052.473,81	5.609,30	1.752.419,55	47,15
Cuaca Ekstrim (Ha)	741.013,96	2.057.261,47	33.850,22	2.832.125,65	76,20
Kekeringan (Ha)	889.920,44	2.074.546,58	727.172,65	3.691.639,67	99,33
Tanah Longsor (Ha)	429.627,27	195.001,47	2.713,04	627.341,78	16,88

Sumber Data: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)

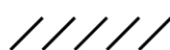
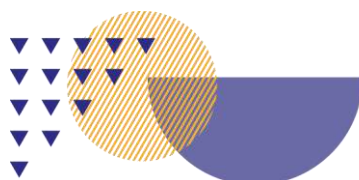
Bencana di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 menurut potensinya terjadinya secara persentase didominasi oleh kekeringan yang meliputi hampir

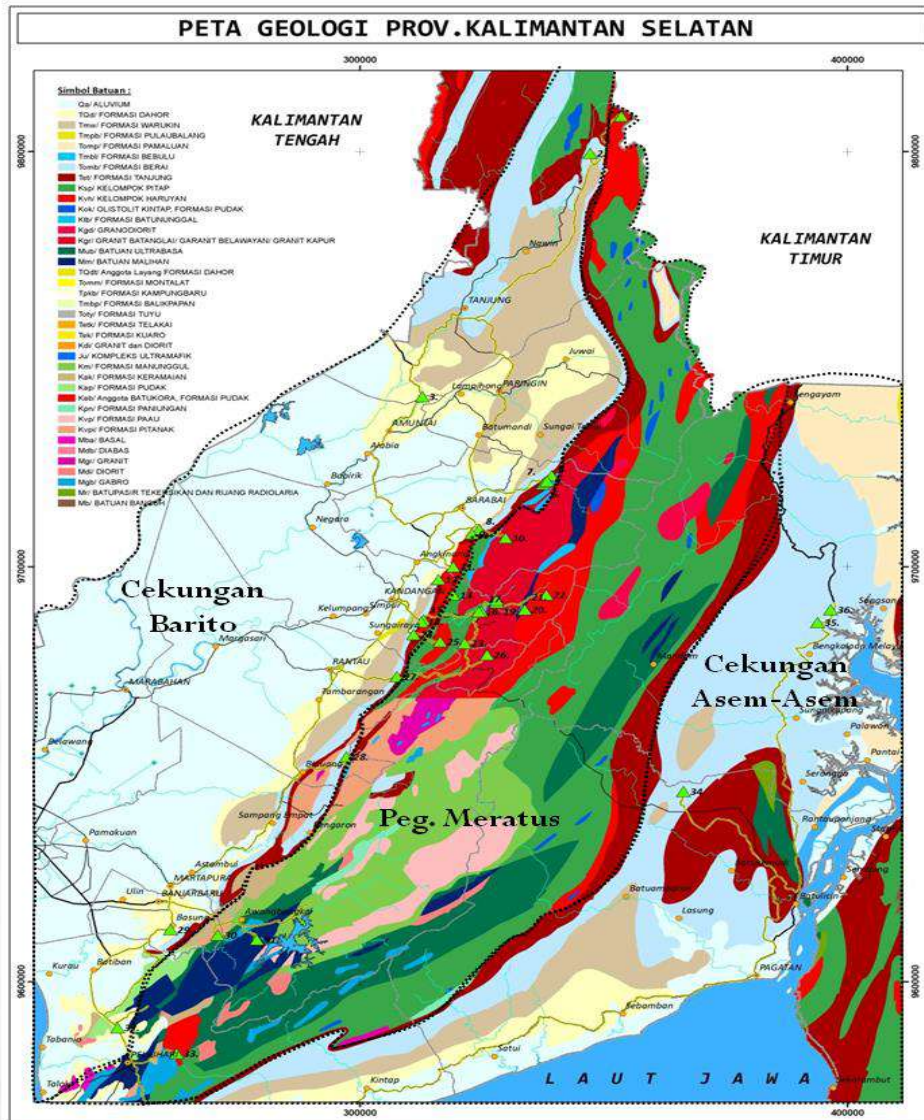


seluruh wilayah Kalimantan Selatan, yaitu 99,33%. Potensi bencana yang meliputi lebih dari setengah wilayah Kalimantan selatan yaitu Kekeringan, cuaca ekstrim dan Banjir, sedangkan Kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di hampir setengah wilayah Kalimantan Selatan, yaitu 47,15%. Adapun banjir bandang hanya berpotensi pada 1,03% wilayah di Kalimantan Selatan.

Hal lain terkait dengan kondisi Geologi di Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah, bahwa daerah ini sebagian besar merupakan daerah subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam (pertanian dan perkebunan). Pada wilayah cekungan Barito dan cekungan asam-asam juga memiliki potensi kekayaan sumberdaya mineral sehingga bisa dijadikan wilayah eksplorasi seperti untuk pertambangan maupun penggalian. Fenomena geologi di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga melahirkan batuan-batuan unik yang tersebar, sehingga memiliki potensi juga untuk dijadikan ekowisata atau geopark karena adanya keunikan akan batuan tersebut.

RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN



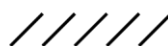
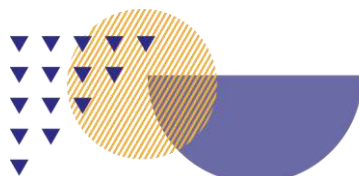


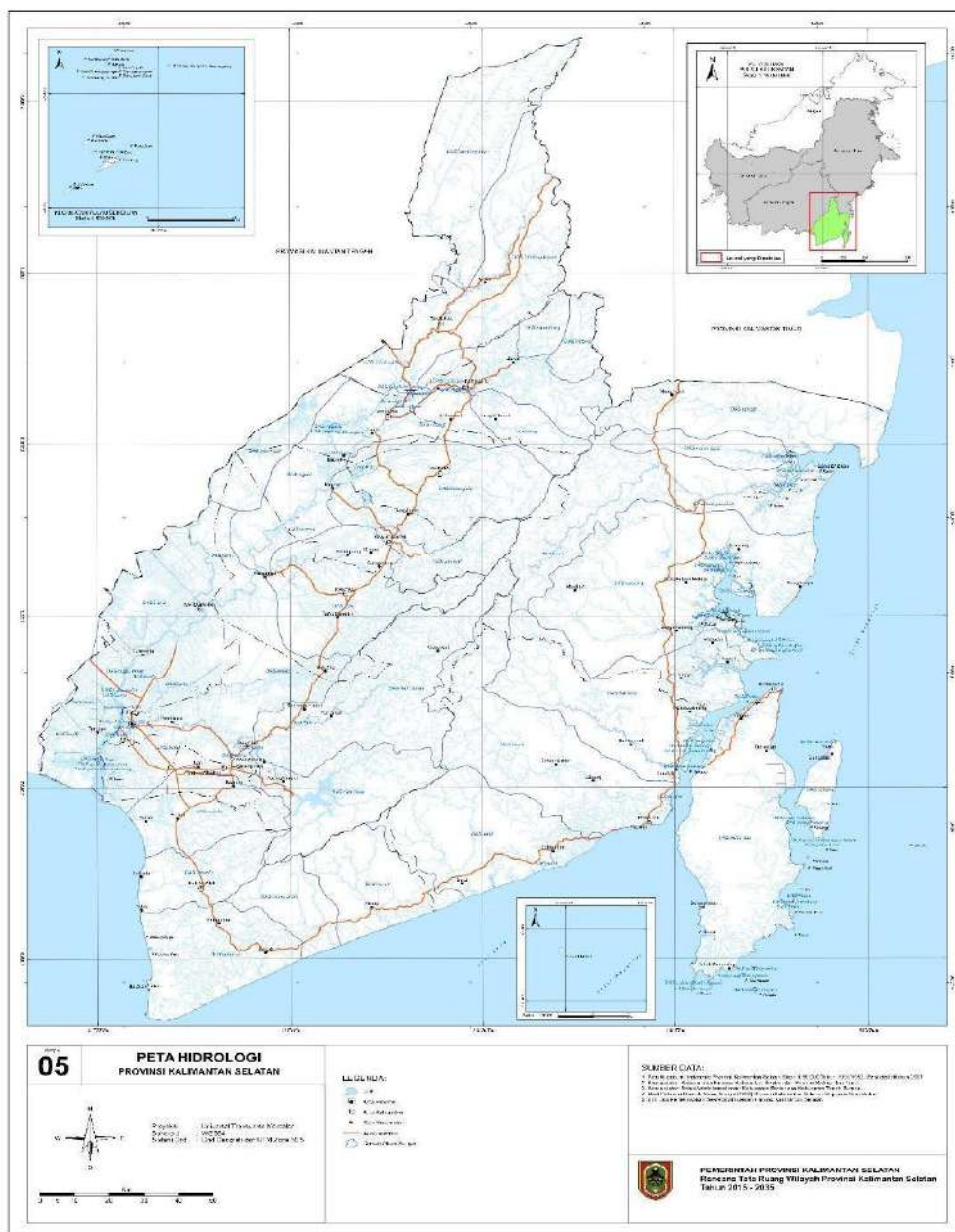
Gambar 2.5 Peta Geologi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Geopark Meratus (2020)

2.1.4 Hidrologi

Wilayah Kalimantan Selatan terbagi dalam 13 wilayah Daerah, Luas DAS Barito adalah ± 363.357.868 ha yang mencakup beberapa kabupaten/kota dan DAS terpanjang ada di Kabupaten Kotabaru sebesar 92,738,847 hadan di urutan kedua terpanjang adalah Kabupaten Tanah Bumbu 50,147,199 ha Tahun 2019 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seluas ± 3.753.052 Ha. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2-4 dan Gambar II-6.





Gambar 2.6 Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Tabel 2.4 Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Luas
Tanah Laut	38.050.887
Kotabaru	92.738.847
Banjarnegara	45.778.543



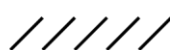
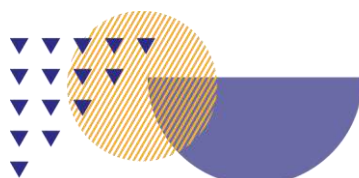
Kabupaten/Kota	Luas
Barito Kuala	22.640.090
Tapin	21.662.117
Hulu Sungai Selatan	17.225.787
Hulu Sungai Tengah	14.169.582
Hulu Sungai Utara	8.622.199
Tabalong	29.515.527
Tanah Bumbu	50.147.199
Balangan	18.519.277
Banjarmasin	995.388
Banjarbaru	3.292.425
Kalimantan Selatan	363.357.868

Sumber: BP DAS Barito (2020)

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Daya Dukung Air sebesar 2,61% atau kategori bersyarat atau sedang. Daerah Kabupaten/Kota yang masih memiliki Daya Dukung Air kategori buruk yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin.

Jasa lingkungan penyedia air bersih di Provinsi Kalimantan Selatan terbesar pada kategori sedang (37,26%), selanjutnya kategori tinggi (33,29%) dan dalam kategori kemampuan rendah hanya 25,95%. Untuk itu diperlukan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Air yang sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- a) Penyediaan sumber daya air yang dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kepentingan pertanian, perikanan darat dan kebutuhan air minum secara regional.
- b) pengelolaan sumber daya air melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan;
- c) pengadaan sumur-sumur bor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Mempertahankan dan menambah kawasan lindung;
- e) Mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa; dan
- f) Melarang kegiatan penambangan mineral dan batubara minimal dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari lokasi sarana dan prasarana sumber



daya air terdekat.

Dengan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Air tersebut maka penyediaan sumber daya air diharapkan dapat melimpah sebagai bahan baku air bersih, air irigasi, perikanan, pertanian dan pariwisata.

2.1.5 Meteorologi dan Klimatologi

Curah hujan tertinggi pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan (pada Stasiun Meteorologi Syamsuddin Noor Banjarbaru), terjadi pada bulan November dengan jumlah intensitas curah hujan 430 mm dan terendah pada bulan Agustus dengan jumlah intensitas curah hujan 80,5 mm dan temperatur udara sekitar 24,0°C hingga 33,9°C. Rincian lengkap terkait kondisi iklim di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabel 2-5 dan II.6.

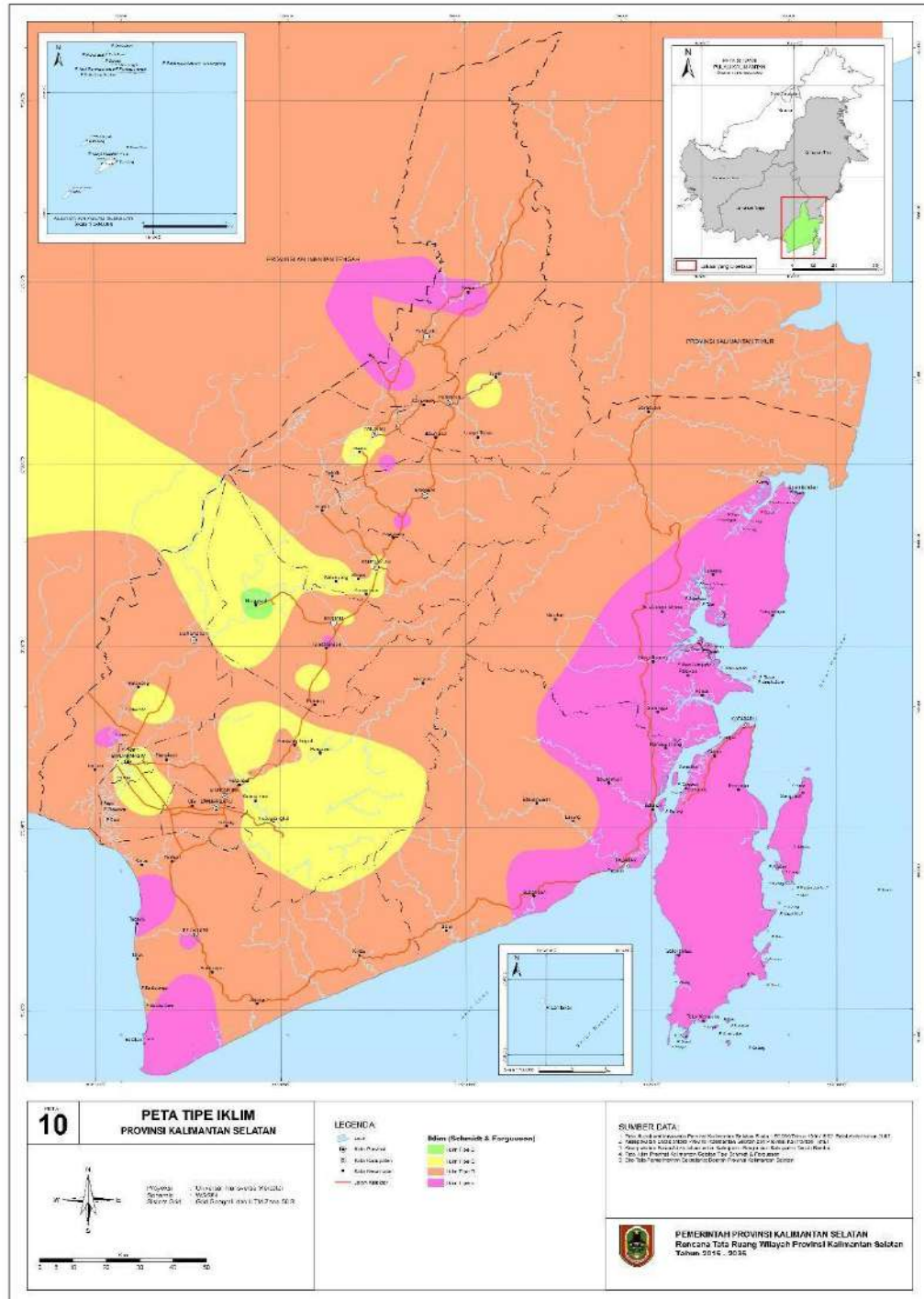
Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan, Rata-rata Tekanan Udara, dan Rata-rata Penyinaran Matahari, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

Bulan	Jumlah Intensitas Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Penyinaran Matahari
Januari	466,6	27	1.011,8	31,5 %
Februari	415,0	21	1.005,7	36,9 %
Maret	237,0	22	1.005,9	38,6 %
April	346,0	22	1.006,2	32,9 %
Mei	326,1	24	1.005,3	32,8 %
Juni	229,3	22	1.006,0	33,0 %
Juli	154,1	19	1.006,8	45,3 %
Agustus	103,8	11	1.006,0	39,4 %
September	90,5	10	1.006,1	48,0 %
Oktober	138,8	17	1.005,4	51,7 %
November	307,1	25	1.004,0	40,7 %
Desember	412,4	24	1.005,0	41,8 %

Sumber: BMKG Prov. Kalsel 2022

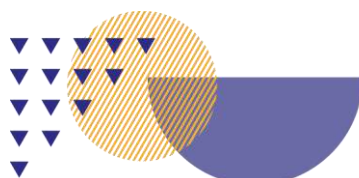
Secara umum Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi tipe iklim C2 (Schmidt & Ferguson) yang meliputi wilayah hampir seluruh Kabupaten/kota kecuali Kabupaten Tabalong, sebagian Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kelas tipe iklim yang agak basah, dipengaruhi oleh adanya vegetasi hutan rimba dan juga sedikit pengaruh dari angin laut. Menurut klasifikasi iklim oleh oldeman,

maka tipe iklim C lebih cocok untuk tanaman padi sekali dan tanaman palawija dua kali setahun untuk peta Peta Klimatologi bisa di lihat pada gambar II-7.



Gambar 2.7 Peta Klimatologi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018



Tabel 2.6 Kelembaban Udara (%) dan Temperatur (°C) Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Bulan	Kelembaban Udara (%)			Temperatur (°C)		
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
Januari	99	57	88	34,9	22,4	26,1
Februari	99	50	86	33,4	22,6	26,3
Maret	99	52	87	34,0	23,2	26,4
April	99	53	87	33,6	22,6	26,9
Mei	99	53	86	35,0	23,5	27,2
Juni	100	58	87	33,7	22,1	26,5
Juli	100	54	85	36,8	20,4	26,3
Agustus	100	52	83	34,0	21,6	26,4
September	99	44	80	35,8	20,4	27,2
Oktober	100	50	85	35,0	22,6	27,1
November	100	61	88	33,8	22,4	26,8
Desember	99	63	88	33,6	22,4	26,4

Sumber: BMKG Prov. Kalsel 2022

2.1.6 Penggunaan dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 12 jenis. Dengan jenis penggunaan lahan terluas adalah hutan seluas 1.109.500,41 ha (29,62 %), dan yang terkecil sungai/danau/waduk/telaga seluas 38.809,01 ha (1,04%). Persentase penggunaan lahan yang produktif pada tahun 2020 sekitar 60,26 % dari seluruh luas lahan, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 dengan luas lahan produktif sebesar 50,77%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar lahan di Kalimantan Selatan sudah termanfaatkan, dengan demikian dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung pengembangan wilayah. Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana pada Tabel 2-7.

Tabel 2.7 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 - 2020

Tahun	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
2019	Alang-Alang/Semak	244.398,79	7,47
	Hutan	1.131.895,16	34,58
	Kebun Campuran	389.158,00	11,89
	Perkebunan	589.961,80	18,02
	Pertambangan	54.245,87	1,66
	Perumahan	87.373,55	2,67
	Persawahan	412.107,08	12,59
	Rumput/Rawa	70.842,43	2,16
	Tambak	39.325,25	1,20
	Tegalan/Ladang	214.970,25	6,57
	Sungai/Danau/Waduk/Telaga	38.809,01	1,19
	Lain-lain	479.964,80	14,66
2020	Alang-Alang/Semak	216.873,07	5,79
	Hutan	1.109.500,41	29,62
	Kebun Campuran	391.651,64	10,46
	Perkebunan	645.218,36	17,22
	Pertambangan	58.162,82	1,55
	Perumahan	87.373,55	2,33
	Persawahan	417.681,25	11,15
	Rumput/Rawa	70.456,42	1,88
	Tambak	39.325,25	1,05
	Tegalan/Ladang	190.884,74	5,10
	Sungai/Danau/Waduk/Telaga	38.809,01	1,04
	Lain-lain	479.964,80	12,81

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.8 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

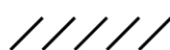
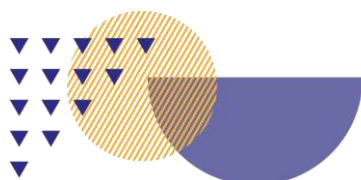
Kabupaten /Kota	Alang-Alang /Semak	Hutan	Kebun Campuran	Perkebunan	Pertambangan
Tanah Laut	2.087,94	99.808,93	55.709,99	113.115,65	12.256,92
Kotabaru	9.364,74	391.164,73	141.308,00	224.949,66	9.189,30
Banjar	56.755,29	118.337,04	51.504,41	38.896,30	3.227,74
Barito Kuala	4.048,60	8.010,62	23.038,23	21.390,55	-

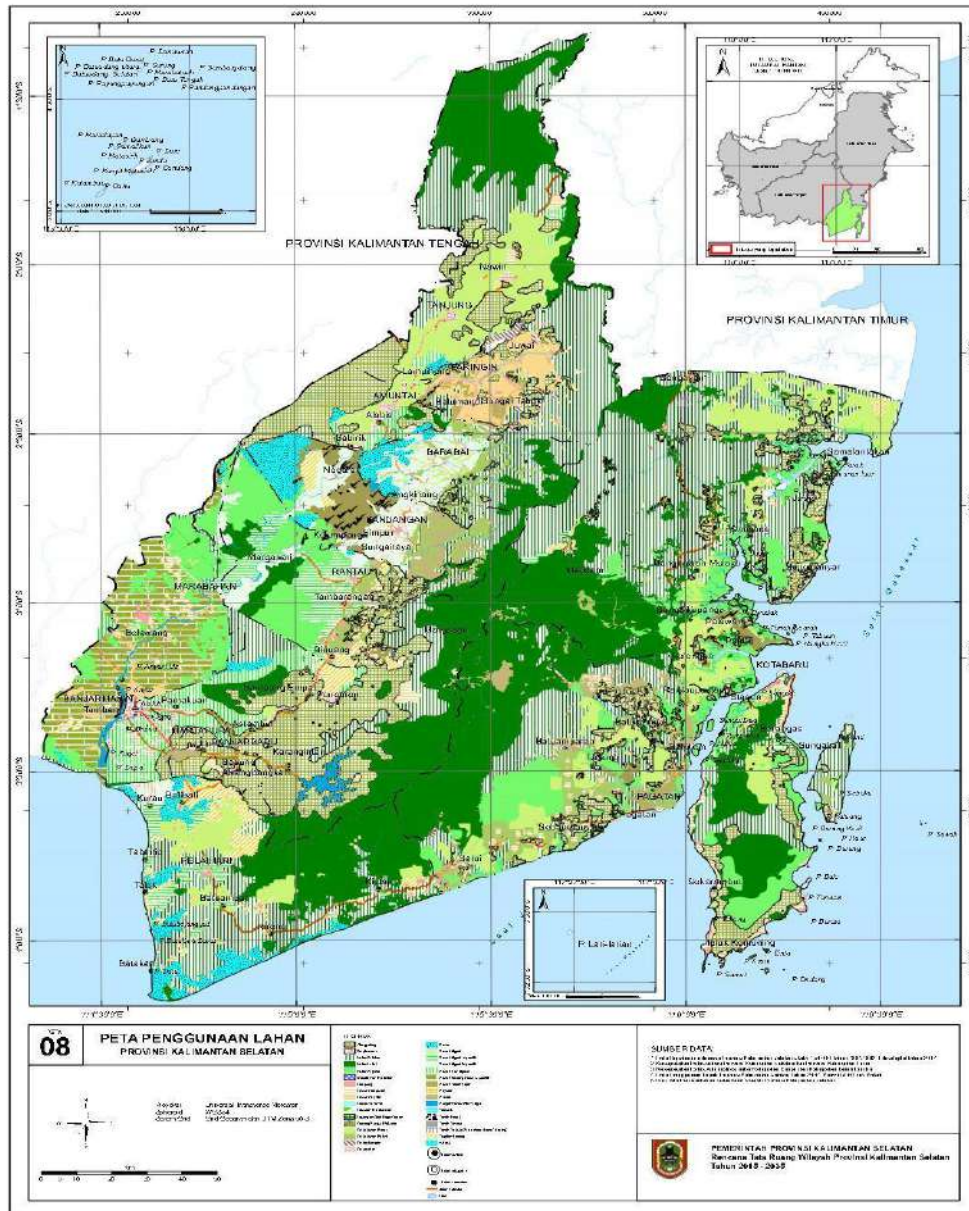


Kabupaten /Kota	Alang-Alang /Semak	Hutan	Kebun Campuran	Perkebunan	Pertambangan
Tapin	20.724,98	16.969,29	8.430,69	66.898,97	6.186,68
Hulu Sungai Selatan	53.829,44	52.317,96	1.744,24	10.896,60	-
Hulu Sungai Tengah	5.956,00	49.397,00	5.597,00	24.327,00	-
Hulu Sungai Utara	1.689,37	16.712,26	1.017,13	6.817,04	-
Tabalong	20.022,04	33.728,37	47.826,71	10.355,83	2.656,94
Tanah Bumbu	17.941,49	246.076,54	13.033,37	126.267,12	17.064,45
Balangan	24.453,18	76.977,67	22.414,57	1.303,64	7.580,79
Kota Banjarmasin	-	-	543,01	-	-
Kota Banjarbaru	-	-	19.484,29	-	-
Kalimantan Selatan	216.873,07	1.109.500,41	391.651,64	645.218,36	58.162,82

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan (2021)

RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN

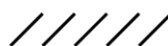
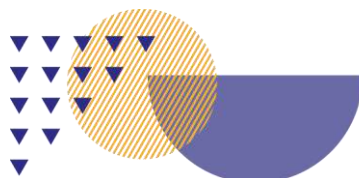




Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Berdasarkan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2020, diketahui bahwa tutupan lahan pada Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder (700,718.60) Pertanian Lahan Kering Campuran (586,262.71) Perkebunan (791,118.57) dan Sawah (381,030.06). Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya potensi terhadap pengembangan untuk produktivitas pertanian dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan.



Tabel 2.9 Luas Tutupan Lahan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2020

Penutupan Lahan	TOTAL			
	2017	2018	2019	2020
Badan Air	27,415.52	27,549.82	12,953.37	32,330.58
Bandara/Pelabuhan	573.29	613.52	659.33	707.07
Belukar	415,278.26	439,685.80	349,716.61	348,825.75
Belukar Rawa	149,075.75	166,684.10	155,232.93	189,020.38
Hutan Lahan Kering Primer	48,433.05	48,767.24	48,944.01	48,536.07
Hutan Lahan Kering Sekunder	635,448.84	635,902.89	679,691.19	700,718.60
Hutan Mangrove Primer	11,165.37	11,121.83	10,112.64	10,924.95
Hutan Mangrove Sekunder	47,165.30	44,372.23	40,490.82	47,945.11
Hutan Rawa Sekunder	6,920.78	5,644.18	2,802.21	3,657.41
Hutan Tanaman	140,246.96	141,612.28	120,971.17	129,890.26
Pemukiman	51,547.87	67,884.03	68,872.63	72,744.36
Perkebunan	653,622.52	687,987.66	640,140.00	791,118.57
Pertambangan	91,782.75	97,191.77	107,090.66	101,304.13
Pertanian Lahan Kering	270,195.21	259,505.37	246,915.09	165,010.83
Pertanian Lahan Kering Campur	653,860.46	623,020.89	647,405.90	586,262.71
Rawa	39,466.99	39,477.07	33,802.38	38,716.36
Sawah	389,737.55	393,592.22	391,718.74	381,030.06
Tambak	29,005.86	30,761.06	31,212.77	33,933.36
Tanah Terbuka	53,291.89	23,609.98	38,346.24	33,461.51
Transmigrasi	8,280.17	8,086.00	7,791.00	5,306.48
Total (Ha)	3,722,514.40	3,753,069.95	3,634,869.69	3,721,444.55

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021

2.1.7 Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi baik dari sisi kualitas maupun



kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

2.1.7.1 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Penduduk Kalimantan Selatan selama kurun waktu antara tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami perkembangan yang cukup variatif. Berdasarkan data BPS Hasil Sensus Penduduk tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021, penduduk Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 4.122.580 jiwa, sementara pada tahun 2017 berjumlah 4.119.794 jiwa yang diambil dari Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2035 BPS RI (2017-2021). Adapun rincian persebaran jumlah penduduk terdapat pada Tabel 2-10.

Tabel 2.10 Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Kab/Kota Tahun 2017-2021

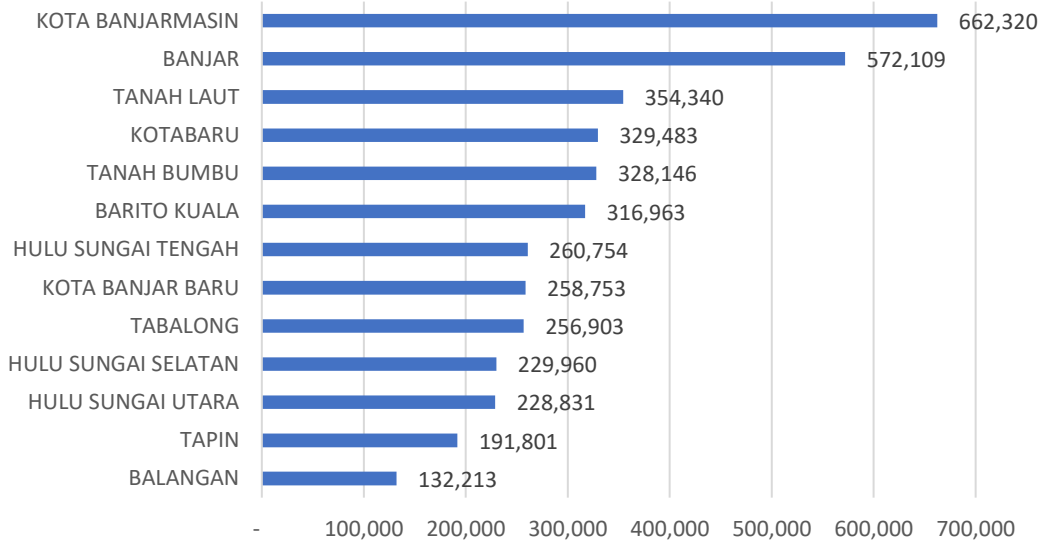
Kabupaten /Kota	JUMLAH PENDUDUK				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	334.328	339.195	343.890	348.966	354.340
Kotabaru	331.326	336.719	342.217	325.622	329.483
Banjjar	571.573	580.026	588.066	565.635	572.109
Barito kuala	306.195	310.016	313.595	313.021	316.963
Tapin	186.672	189.081	191.372	189.475	191.801
Hulu Sungai Selatan	232.587	235.217	237.702	228.006	229.960
Hulu Sungai Tengah	266.501	269.384	272.419	258.721	260.754
Hulu Sungai Utara	231.594	234.604	237.573	226.727	228.831
Tabalong	247.106	250.809	254.322	253.305	256.903
Tanah Bumbu	343.193	351.673	360.187	322.646	328.146
Balangan	127.503	129.505	131.428	130.355	132.213
Kota Banjarmasin	692.793	700.869	708.606	657.663	662.320
Kota Banjarbaru	248.423	255.597	262.719	253.442	258.753
Kalimantan Selatan	4.119.794	4.182.695	4.244.096	4.073.584	4.122.576

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Pada Tahun 2021 Kota Banjarmasin merupakan Kota / Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak sebesar 662.320 Jiwa dan Kabupaten Balangan

merupakan Kota/Kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 191.801 Jiwa. Sebagaimana pada Gambar II-9.

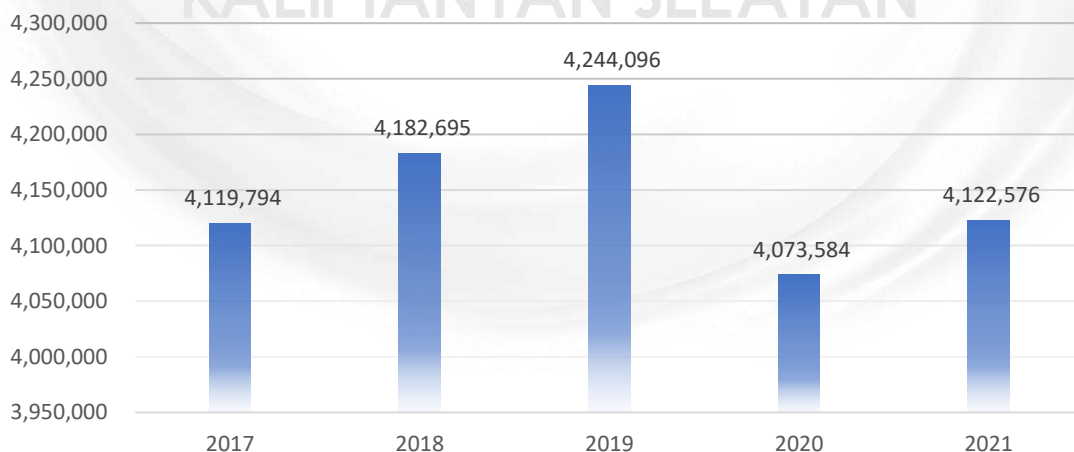
Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2021



Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten dan Kota Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN (JIWA) KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 - 2021



Gambar 2.10 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Jumlah penduduk pada tahun 2021 tertinggi berada di Kota Banjarmasin, yaitu 662.320 jiwa. dan terendah di Kabupaten Balangan yaitu 191.801 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan tahun 2021 mencapai 4.122.576 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021. Kepadatan Penduduk di 13 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Banjarmasin dengan kepadatan sebesar 9.134.21/km² dan terendah di Kabupaten Kotabaru sebesar 34,34 jiwa/km². Rincian jumlah penduduk menurut wilayah, jenis kelamin dan kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan seperti terlihat pada Tabel 2-11.

Tabel 2.11 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

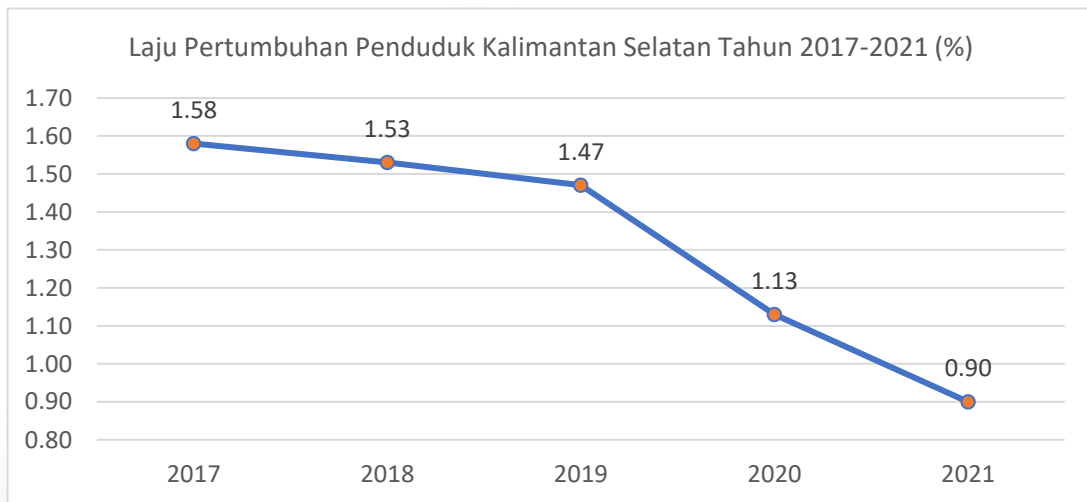
Kabupaten/ Kota	Penduduk (Jiwa)			Sex Ratio	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Total			
Tanah Laut	181,706	172,634	354,340	105,26	3.631,35	96,10
Kotabaru	170,261	159,222	329,483	106,93	9.482,73	34,34
Banjar	289,057	283,052	572,109	102,12	4.668,00	121,17
Barito Kuala	160,534	156,429	316,963	102,62	2.996,46	104,46
Tapin	96,952	94,849	191,801	102,22	2.700,82	70,15
Hulu Sungai Selatan	115,366	114,594	229,960	100,67	1.804,94	126,32
Hulu Sungai Tengah	131,045	129,709	260,754	101,03	1.472,00	175,76
Hulu Sungai Utara	114,211	114,620	228,831	99,64	892,70	253,98
Tabalong	130,327	126,576	256,903	102,96	3.766,97	67,24
Tanah Bumbu	168,407	159,739	328,146	105,43	5.006,96	64,44
Balangan	66,821	65,392	132,213	102,19	1.878,30	69,40
Kota Banjarmasin	331,640	330,680	662,320	100,29	72,00	9134,21
Kota Banjarbaru	130,176	128,577	258,753	101,24	371,00	683,13
Kalimantan Selatan	2,086,503	2,036,073	4,122,576	102,48	38.744,23	105,14

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2022)

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2021 hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 2.086.503 jiwa, sedangkan perempuan sebesar 2.036.073 jiwa. Angka tersebut menjadikan sex *ratio* penduduk mencapai 102,48 yang mengindikasikan bahwa di antara 100 penduduk berjenis kelamin perempuan, terdapat 102-106 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini disajikan pada Tabel 2-11.

2.1.7.2 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2017-2021 mengalami penurunan sebesar 1,58% pada tahun 2017 menjadi 0,90% pada tahun 2021 artinya dalam kurun waktu selama 5 tahun pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 0,68%.



Gambar 2.11 Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2022

Pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017-2021 didominasi oleh Kota Banjarbaru 1.57% dan Kabupaten Tanah Bumbu 1.27%, disusul Tanah Laut 1.15, sementara yang terendah adalah Kota Banjarmasin 0.53% dan Hulu Sungai Tengah 0.59% dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 0.64%.

Tabel 2.12 Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten Kota Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	1,53	1,46	1,38	1,59	1,15
Kotabaru	1,69	1,63	1,63	1,12	0,89
Banjar	1,51	1,48	1,39	1,07	0,88
Barito Kuala	1,29	1,25	1,15	1,22	0,94
Tapin	1,27	1,29	1,21	1,18	0,92
Hulu Sungai Selatan	1,17	1,13	1,06	0,68	0,64
Hulu Sungai Tengah	1,19	1,08	1,13	0,59	0,59
Hulu Sungai Utara	1,34	1,30	1,27	0,78	0,69
Tabalong	1,49	1,50	1,40	1,44	1,06

Tanah Bumbu	2,66	2,47	2,42	1,81	1,27
Balangan	1,57	1,57	1,48	1,44	1,06
Kota Banjarmasin	1,26	1,17	1,10	0,49	0,53
Kota Banjarbaru	2,92	2,89	2,79	2,34	1,57
Kalimantan Selatan	1,59	1,53	1,47	1,13	0,90

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2022)

Pada tahun 2021 pertumbuhan penduduk selama periode 2017-2021 di Kabupaten/ Kota terkoreksi berdasarkan hasil sensus Penduduk pada tahun 2020.

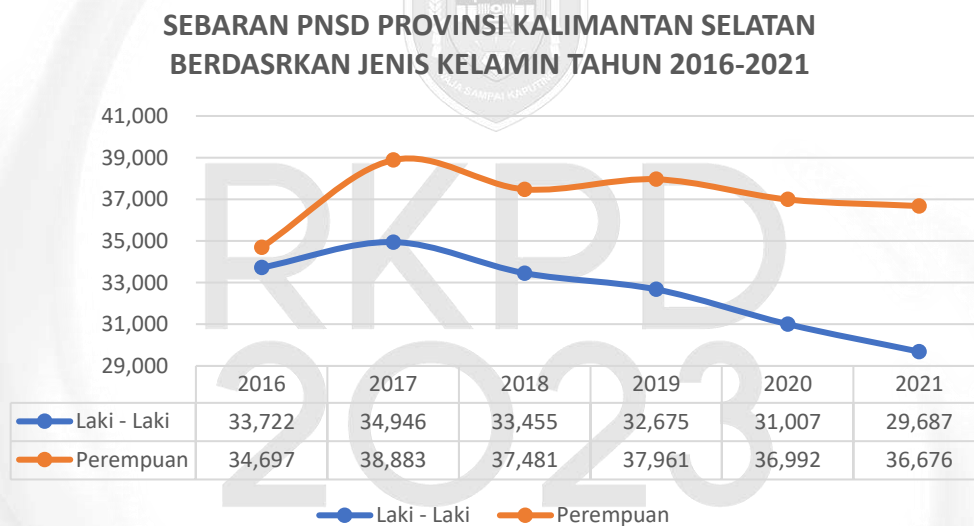
2.1.7.3 Penduduk Menurut Pekerjaan

Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Jenis Pekerjaan/Lapangan Usaha Tahun 2020

No	Jenis Lapangan Usaha	Tahun	
		2020	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	694.45	33,33
B	Pertambangan dan Penggalian	70.7	3,39
C	Industri Pengolahan	183.041	8,79
D	Pengadaan Listrik, Gas	3.474	0,17
E	Pengadaan Air	6.398	0,31
F	Konstruksi	109.031	5,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	412.249	19,79
H	Transportasi dan Pergudangan	82.39	3,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142.985	6,86
J	Informasi dan Komunikasi	13.429	0,64
K	Jasa Keuangan	16.109	0,77
L	Real Estate	2.912	0,14
M.N	Jasa Perusahaan	20.15	0,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	81.334	3,90
P	Jasa Pendidikan	109.137	5,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	32.014	1,54
R.S.T. U	Jasa lainnya	103.516	4,97
	Jumlah Penduduk Bekerja	2.083.319	51,14
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	2.186.967	53,69
	Jumlah Penduduk Pencari Kerja	103.648	4,74
	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja	1.886.617	46,31
	Jumlah Penduduk	4.073.584	100

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2021)

Jumlah PNS Daerah Se-Kalimantan Selatan dari Tahun 2016 sampai 2021 berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan di Tahun 2016 jumlah PNS berjumlah 68.419 orang, Peningkatan di Tahun 2017 menjadi 73.829 orang dan tahun 2018 menurun menjadi 70.936 orang, di tahun 2019 jumlah PNS tidak terlalu banyak mengalami penurunan menjadi 70.636 orang dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67.999 dan di tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 66.363 yang terdiri dari laki-laki 29.687 dan perempuan 36.676. Adapun rinciannya sebagaimana pada Gambar II-12.



Gambar 2.12 Perkembangan Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Sumber: BKD Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2.1.7.4 Penduduk Menurut Agama

Penduduk Kalimantan Selatan terdiri dari 6 Agama dan 1 Aliran Kepercayaan, dengan jumlah penganut agama terbanyak adalah Islam, dan terendah adalah Konghucu. Posisi ini selama terus berlanjut selama periode 2017-2021. Untuk lebih detail perkembangan sebaran penduduk menurut Agama dapat dilihat pada tabel II.14 berikut.

Tabel 2.14 Sebaran Penduduk Menurut Agama Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2021

No	Agama	2017	2018	2019	2020	2021
1	Islam	3.828.362	3.903.468	3.934.100	3.966.059	3.922.388
2	Kristen	54.035	53.501	54.051	54.382	53.689
3	Katolik	21.994	21.337	21.646	21.987	21.421
4	Hindu	23.437	22.993	23.529	23.798	23.252
5	Budha	12.644	12.458	12.433	12.337	12.412
6	Konghucu	358	266	233	222	258
7	Aliran Kepercayaan	10.005	9.026	9.414	9.109	9.145

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2021)

2.1.7.5 Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Jumlah kepala keluarga di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah 1.343.451, jumlah ini meningkat dari tahun 2018 sebanyak 1.253.890 atau bertambah sebanyak 89.561 kepala keluarga dan mengalami penurunan hanya ditahun 2019 sebesar (10,796) ditahun 2020 sebanyak 37,743 di tahun terakhir 2021 mengalami peningkatan 62,614 selama 4 Tahun terakhir, Perkembangan sebaran penduduk menurut kepala Keluarga sebagaimana Tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15 Sebaran Penduduk Menurut Kepala Keluarga Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2021

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kepala Keluarga			
		2018	2019	2020	2021
1	Tanah Laut	113.734	106.696	113.258	117.832
2	Kotabaru	96.258	91.115	94.012	100.156
3	Banjar	173.794	174.460	174.341	185.766
4	Barito Kuala	98.970	97.467	100.238	107.583
5	Tapin	60.338	61.293	63.266	64.656
6	Hulu Sungai Selatan	76.625	77.623	79.631	81.609
7	Hulu Sungai Tengah	85.878	86.290	88.551	90.383
8	Hulu Sungai Utara	69.562	70.159	71.422	74.502
9	Tabalong	74.246	74.272	78.301	80.404
10	Tanah Bumbu	96.201	94.956	97.875	103.648
11	Balangan	39.543	40.717	41.629	43.424

12	Kota Banjarmasin	199.554	196.673	203.578	213.643
13	Kota Banjarbaru	69.187	71.373	74.735	79.845
14	Kalimantan Selatan	1.253.890	1.243.094	1.280.837	1.343.451

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2022)

2.1.7.6 Penduduk Menurut Usia Sekolah

Penduduk usia sekolah yang menerima layanan pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,64% untuk usia 7-12 tahun, 92,43% untuk usia 13-15 tahun, 68,67% untuk usia 16-18 tahun, dan 23,82% untuk tingkat perguruan tinggi. Secara rinci Persentase penduduk menurut jenis kelamin yang menerima layanan pendidikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.16 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2021

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Tidak/ Belum Pernah Sekolah (%)	Masih Sekolah (%)	Tidak Sekolah lagi (%)
Laki-laki			
7-12	0,84	99,16	-
13-15	0,81	92,67	6,52
16-18	0,84	69,56	29,60
19-24	0,76	23,61	75,63
7-24	0,81	69,77	29,42
Perempuan			
7-12	0,39	99,61	-
13-15	0,46	94,40	5,14
16-18	0,37	69,03	30,60
19-24	0,28	25,81	73,91
7-24	0,36	70,34	29,30
Laki-laki dan Perempuan			
7-12	0,62	99,38	-
13-15	0,64	93,50	5,85
16-18	0,62	69,31	30,07
19-24	0,52	24,70	74,77
7-24	0,59	70,05	29,36

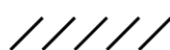
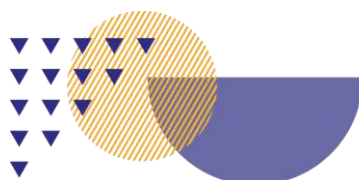
Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2022



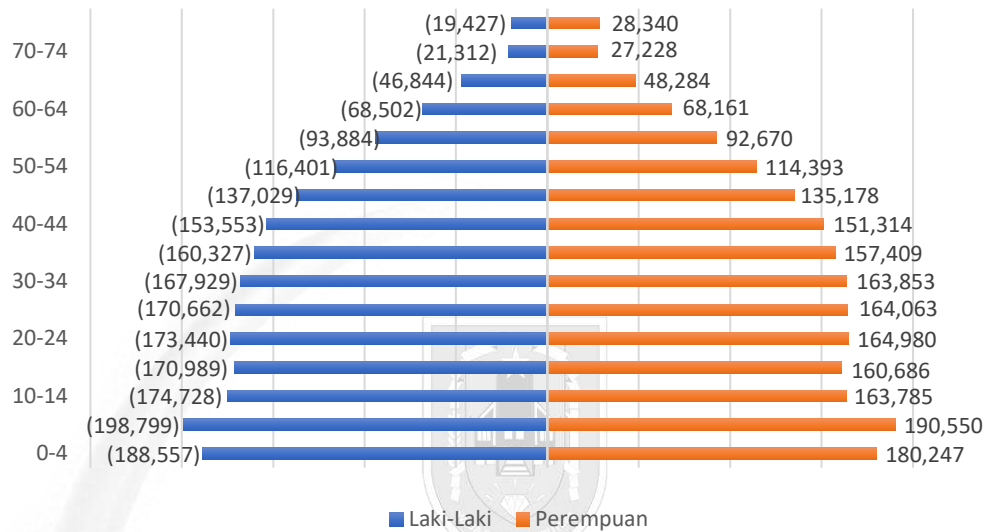
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tingkat sekolah dasar (7-12 tahun) hampir tidak terjadi perbedaan partisipasi baik laki-laki maupun perempuan demikian juga pada usia menengah pertama (13-15 tahun). Namun, pada usia sekolah menengah atas (16-18 tahun) terjadi disparitas antara laki-laki sebesar 69,56 dan perempuan sebesar 69,03, di mana persentase laki-laki yang sekolah lebih tinggi dari pada perempuan.

2.1.7.7 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran umum struktur umur penduduk. Piramida penduduk ini diantaranya berguna untuk menganalisis produktivitas penduduk dan bonus demografi. Piramida penduduk Kalimantan Selatan tahun 2020 memperlihatkan sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 70,92%. sedangkan penduduk lanjut usia (65 ke atas) sebesar 5,14%. dan penduduk usia 0-14 tahun sebesar 23,94%. Kondisi Penduduk Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa sebenarnya Provinsi Kalimantan Selatan telah berada pada posisi bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun.



PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN SELATAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021



Gambar 2.13 Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2022)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 1 orang usia non produktif ditanggung oleh 2 sampai 3 orang usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan akan mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan jika bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. pada sisi lain jika tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban.

Manfaat bagi perekonomian Kalimantan Selatan dengan usia produktif lebih banyak dari usia non produktif dalam bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik akan membuat jumlah tabungan dari penduduk produktif semakin besar. sehingga perekonomian daerah semakin bertumbuh. Manfaat lainnya adalah terbentuknya generasi emas yang diartikan sebagai penerus yang kreatif dan mampu memikul tanggung jawab serta membangun daerah yang diperoleh melalui pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

2.1.8 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung seperti yang

tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah:

- Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, dan /atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Dalam peraturan tersebut terdapat tiga pendekatan dalam menghitung daya dukung lingkungan hidup, yaitu:

1. Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang,
2. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan, dan
3. Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air.

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

2.1.8.1 Daya Dukung Permukiman

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman agar pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak huni dapat tercapai. Daya dukung lahan permukiman dihitung dengan formula yang menggunakan data luas lahan bangunan (permukiman), luas lahan infrastruktur (jalan, drainase, dll), koefisien lahan terbangun (terbagi menjadi perkotaan dan pedesaan), serta jumlah penduduk. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika $DDP > 1$, mampu menampung penduduk untuk bermukim, $DDP = 1$, terjadikeseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan $DDP < 1$,

tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Dari hasil analisis berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan daya dukung permukiman sebesar 1,6 atau dalam kategori mampu menampung penduduk untuk bermukim. Akan tetapi jika dilihat dari wilayah administrasi menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin statusnya tidakseimbang/tidak mampu menampung karena nilai DDP sebesar 0,7. Hasil analisis ini memperlihatkan persebaran konsentrasi permukiman yang belum merata di Kalimantan Selatan atau masih terpusat di perkotaan Banjarmasin, sehingga perlu adanya pusat-pusat konsentrasi penduduk di wilayah lain agar pemenuhan tempat tinggal yang layak di Banjarmasin masih dapat terjaga.

2.1.8.1 Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung lahan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Jumlah produksi padi dan jumlah penduduk dengan mengacu data dari BPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota dalam Angka 2020), untuk konversi gabah kering giling ke beras sebesar 58,86% (Kalimantan Selatan dalam angka 2020). Konsumsi beras mulai tahun 2017 berdasarkan hasil prognosaterkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Asumsi konsumsi beras ini akan dipergunakan untuk perhitungan indeks daya dukung lahan pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019.

Daya dukung lahan pertanian secara keseluruhan di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 adalah 2,86 atau surplus sebesar 936.428 ton. Dari surplus beras ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar

mampu bertahan atau memiliki stok selama 1,85 tahun. Akan tetapi berdasarkan administrasi terdapat dua wilayah yang telah mengalami defisit yakni Kota Banjarmasin (-78.992 ton) dan Kota Banjarbaru (-25.954 ton). Rendahnya stok pangan di wilayah ini karena secara eksisting wilayah ini merupakan daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan luas pertaniannya (lahan sawah). Selain itu untuk Kabupaten Kotabaru juga menunjukkan surplus pangan hanya 6.558 ton.

Beberapa Kabupaten yang memiliki produksi/surplus pangan terbesar seperti Barito Kuala (150.762 ton), Hulu Sungai Tengah (131.098 ton) dan Hulu Sungai Selatan (116.477 ton).

Tabel 2.17 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2019

Kabupaten	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GK G ke Beras	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Konsumsi Beras(kg/ perkapita /pertahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Balangan	170.233	100.204	131.234	124	16.273	6,16	83.931
Banjar	218.266	128.478	550.264	124	68.233	1,88	60.245
Banjarbaru	5.927	3.489	237.445	124	29.443	0,12	-25.954
Banjarmasin	6.949	4.090	670.015	124	83.082	0,05	-78.992
Barito Kuala	322.185	189.648	313.595	124	38.886	4,88	150.762
HSS	247.952	145.952	237.702	124	29.475	4,95	116.477
HST	280.104	164.878	272.419	124	33.780	4,88	131.098
HSU	143.403	84.411	230.410	124	28.571	2,95	55.841
Kotabaru	79.395	46.734	323.999	124	40.176	1,16	6.558
Tabalong	180.836	106.446	243.763	124	30.227	3,52	76.219
Tanah Bumbu	101.130	59.528	320.452	124	39.736	1,5	19.792
Tanah Laut	271.943	160.074	350.007	124	43.401	3,69	116.673
Tapin	419.823	247.121	188.262	124	23.344	10,59	223.776
Provinsi Kalimantan Selatan	2.448.146	1.441.054	4.069.567	124	504.626	2,86	936.428

Sumber: Hasil Analisis (2020)

Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini OPD terkait harus menyediakan dan meningkatkan melalui pencetakan sawah baru, serta

mengurangi konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RKPD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada berdasarkan hasil daya dukung ini.

Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RKPD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan, dengan cara membuat lahan sawah baru serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada.

2.1.8.2 Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RKPD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangkaian penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

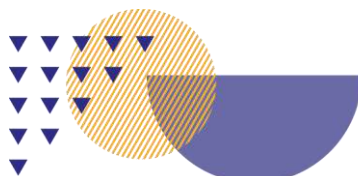
Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*water supply*) dan kebutuhan air (*water demand*) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik.

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) (Permen LH No. 17/2009).

- Bila $SA > DA$, daya dukung air dinyatakan surplus.
- Bila $SA < DA$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), membagi menjadi:

- $DDA < 1$: Daya dukung air terlampaui atau buruk
- $DDA 1-3$: Daya dukung air bersyarat atau sedang
- $DDA > 3$: Daya dukung air aman atau baik



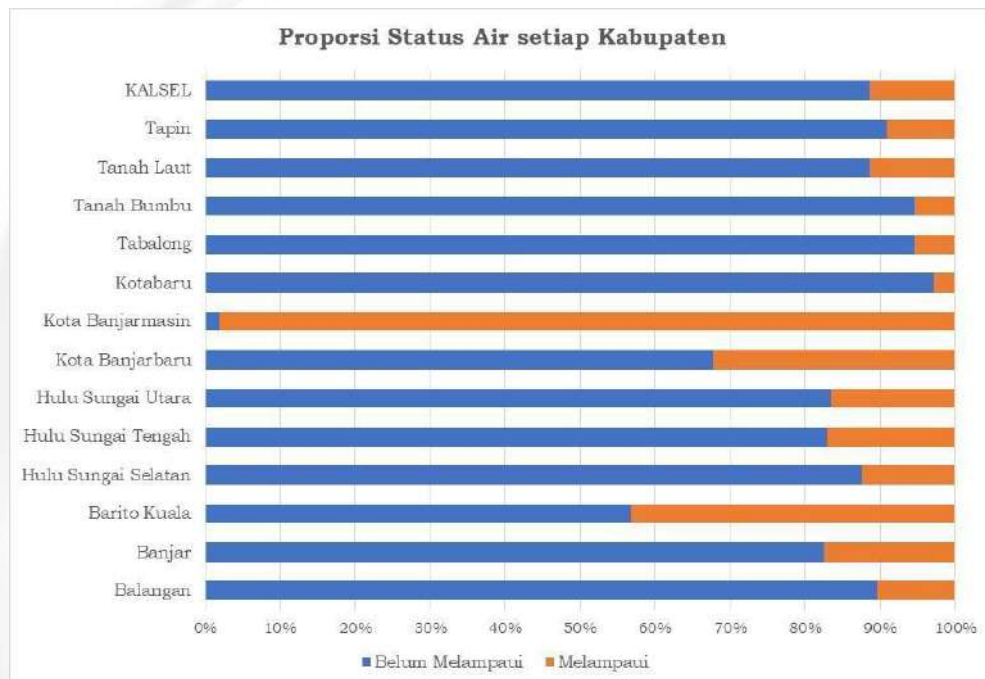
Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 3.316.423,81 Ha atau 88,73% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 421.277,86 Ha atau 11,27%, sebagaimana disajikan pada di bawah:

Tabel 2.18 Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK

Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Balangan	170.402,98	19.768,37
Banjar	387.831,60	81.757,61
Barito Kuala	131.316,56	99.944,77
Hulu Sungai Selatan	148.814,78	21.047,17
Hulu Sungai Tengah	138.878,15	28.592,42
Hulu Sungai Utara	77.445,08	15.320,22
Kota Banjarbaru	22.004,96	10.449,64
Kota Banjarmasin	171,93	9.270,02
Kotabaru	896.465,56	26.324,66
Tabalong	350.399,74	19.762,32
Tanah Bumbu	450.442,59	25.546,36
Tanah Laut	342.468,64	43.630,44
Tapin	199.781,25	19.863,86
KALSEL	3.316.423,81	421.277,86
Persentase (%)	88,73	11,27

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (98,18%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (43,22%) dan Kota Banjarbaru (32,20%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Kotabaru (97,15%), selanjutnya Kabupaten Tabalong (94,66%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (94,63%), sebagaimana disajikan pada Gambar di Bawah.

Selain berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 juga dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air dari data curah hujan Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) tahun 1998-2017 dan koefisien limpasan masing-masing tutupan lahan di Kalimantan Selatan mengacu peta RBI 2018-2019. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa yang melampai sebesar 26,37% dan yang Belum Melampai sebesar 73,67%, sebagaimana disajikan pada Tabel 2-19 dan Gambar II-14.



Gambar 2.14 Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi

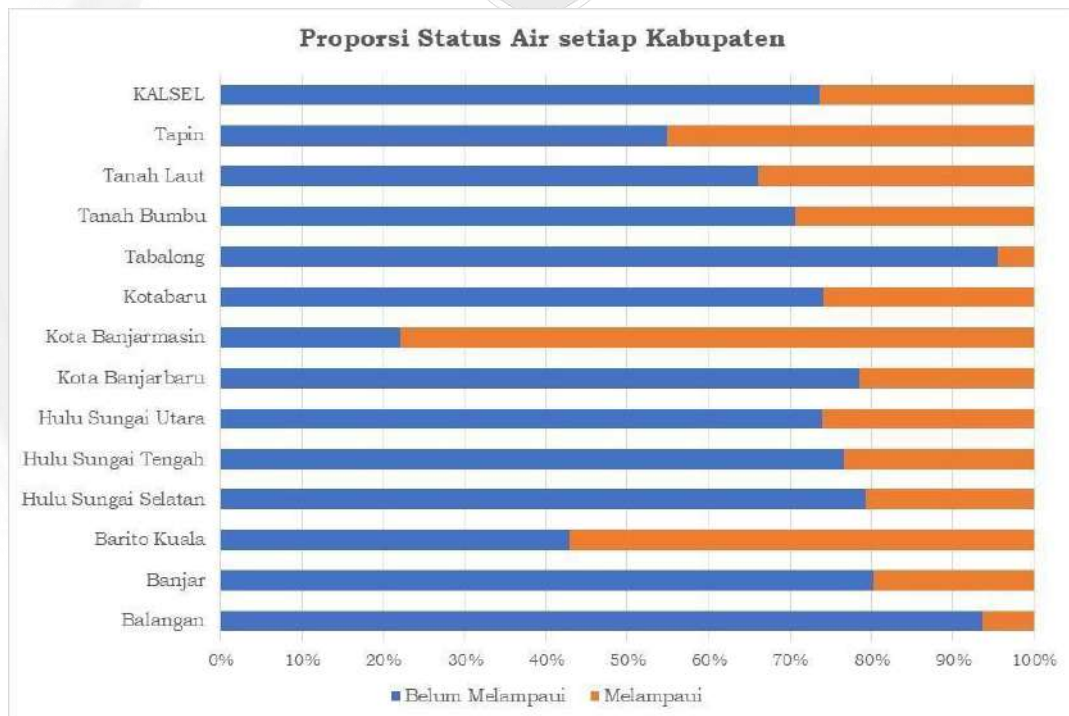
Tabel 2.19 Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis

Kabupaten/Kota	Status Air (Ha)	
	Belum Melampai	Melampai
Balangan	171.132,47	11.706,31
Banjar	367.262,34	90.692,07
Barito Kuala	108.218,73	144.510,57
Hulu Sungai Selatan	136.706,67	35.634,33
Hulu Sungai Tengah	111.604,87	34.027,10
Hulu Sungai Utara	68.305,81	24.045,24
Kota Banjarbaru	25.828,65	7.095,60
Kota Banjarmasin	2.176,57	7.671,06
Kotabaru	703.900,93	246.401,37

Tabalong	331.881,88	15.852,60
Tanah Bumbu	343.142,10	142.368,38
Tanah Laut	251.420,34	129.175,79
Tapin	118.979,71	97.637,31
KALSEL	2.744.452,71	982.926,09
Persentase (%)	73,67	26,37

Sumber: Hasil Analisis 2020.

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (77,90%), selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (57,18%) dan Kabupaten Tapin (45,07%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Tabalong (95,44%), selanjutnya Kabupaten Balangan (93,60%) dan Kabupaten Banjar (80,20%), sebagaimana disajikan pada Gambar II-15.



Gambar 2.15 Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Administrasi

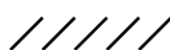
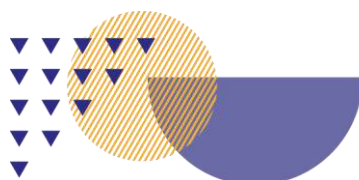
Untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan volume air, maka hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 57.054.478.190 m³/tahun. Kebutuhan air total sebesar



21.850.342.888 m³/tahun yang terdiri atas domestik sebesar 118.831.356 m³/tahun dan 21.731.511.531 m³/tahun, sehingga diperoleh selisih 35.204.135.302 m³/tahun.

Dengan membandingkan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) menunjukkan bahwa masih dalam posisi surplus, akan tetapi jika mengacu pendapat Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), menunjukkan bahwa status air di Kalimantan Selatan hanya sebesar 2,61 atau berada pada interval DDA 1-3 atau termasuk daya dukung air bersyarat atau sedang.

Secara administrasi 3 wilayah yang telah melewati daya dukung atau status defisit Kabupaten Barito Kuala (-2.032.973.657 m³/tahun), Kabupaten Tapin (- 452.872.271 m³/tahun) dan Kota Banjarmasin (-16.497.858 m³/tahun), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.37. Dari tabel tersebut juga, menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten/kota dalam kategori bersyarat atau sedang dan 4 kabupaten dalam kategori aman atau baik. Jika dikaitkan dengan kejadian bencana banjir tahun 2021 di DAS Barito dimana limpasan air sangat tinggi dan tidak dapat dimanfaatkan, maka kedepan perlu penambahan area resapan untuk me-recharge (mengisi kembali) air tanah dangkal dan penyediaan infrastruktur air untuk menampung limpasan air dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku baru sekaligus mengurangi risiko bencana banjir. Hal tersebut dapat dilihat terutama pada beberapa kabupaten (tujuh kabupaten/kota) yang berada di bagian tengah dan hilir DAS Barito yang memiliki status daya dukung air bersyarat dan terlampaui.



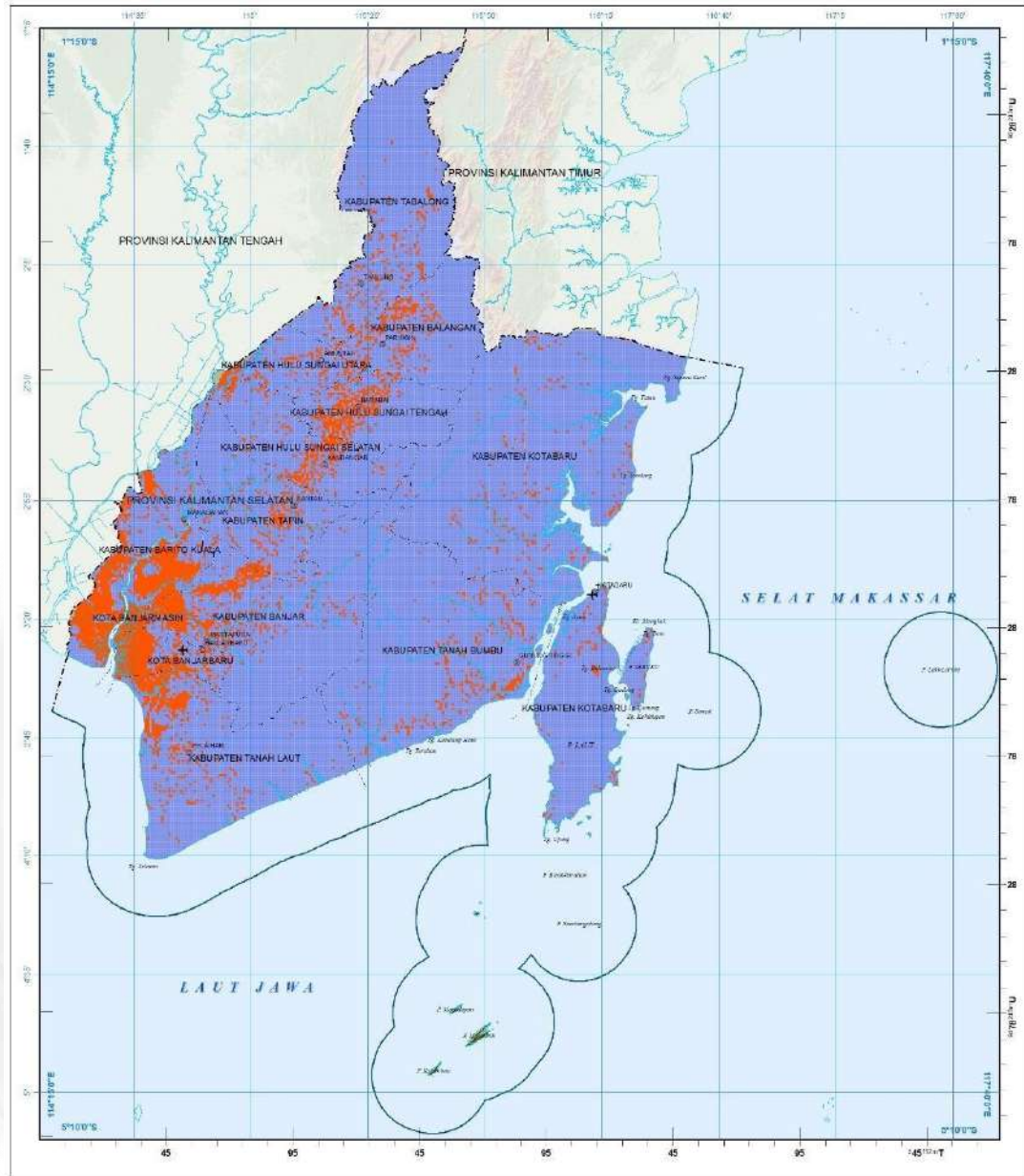


Tabel 2.20 Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Administrasi Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)		Total	Selisih (m ³ /tahun)	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik				
Balangan	2.488.622.632	3.832.033	201.110.663	204.942.696	2.283.679.936	12,14	Aman atau Baik
Banjar	6.403.353.583	16.067.709	2.618.607.329	2.634.675.038	3.768.678.545	2,43	Bersyarat atau Sedang
Banjarbaru	267.034.708	6.933.394	122.034.057	128.967.451	138.067.257	2,07	Bersyarat atau Sedang
Banjarmasin	62.984.689	19.564.438	59.918.108	79.482.546	-16.497.858	0,79	Terlampau atau Buruk
Barito Kuala	2.254.090.692	9.156.974	4.277.907.375	4.287.064.349	-2.032.973.657	0,53	Terlampau atau Buruk
Hulu Sungai Selatan	1.838.948.146	6.940.898	812.337.904	819.278.803	1.019.669.343	2,24	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Tengah	2.321.514.402	7.954.635	408.652.369	416.607.004	1.904.907.398	5,57	Aman atau Baik
Hulu Sungai Utara	781.135.157	6.727.972	443.209.116	449.937.088	331.198.069	1,74	Bersyarat atau Sedang
Kotabaru	24.281.980.291	9.460.771	4.793.274.889	4.802.735.660	19.479.244.631	5,06	Aman atau Baik
Tabalong	4.608.696.906	7.117.880	440.811.834	447.929.713	4.160.767.192	10,29	Aman atau Baik
Tanah Bumbu	6.118.251.680	9.357.198	2.671.111.647	2.680.468.845	3.437.782.835	2,28	Bersyarat atau Sedang
Tanah Laut	3.904.895.902	10.220.204	2.712.191.816	2.722.412.020	1.182.483.882	1,43	Bersyarat atau Sedang
Tapin	1.722.969.404	5.497.250	2.170.344.425	2.175.841.675	-452.872.271	0,79	Terlampau atau Buruk
KALSEL	57.054.478.190	118.831.356	21.731.511.531	21.850.342.888	35.204.135.302	2,61	Bersyarat atau Sedang

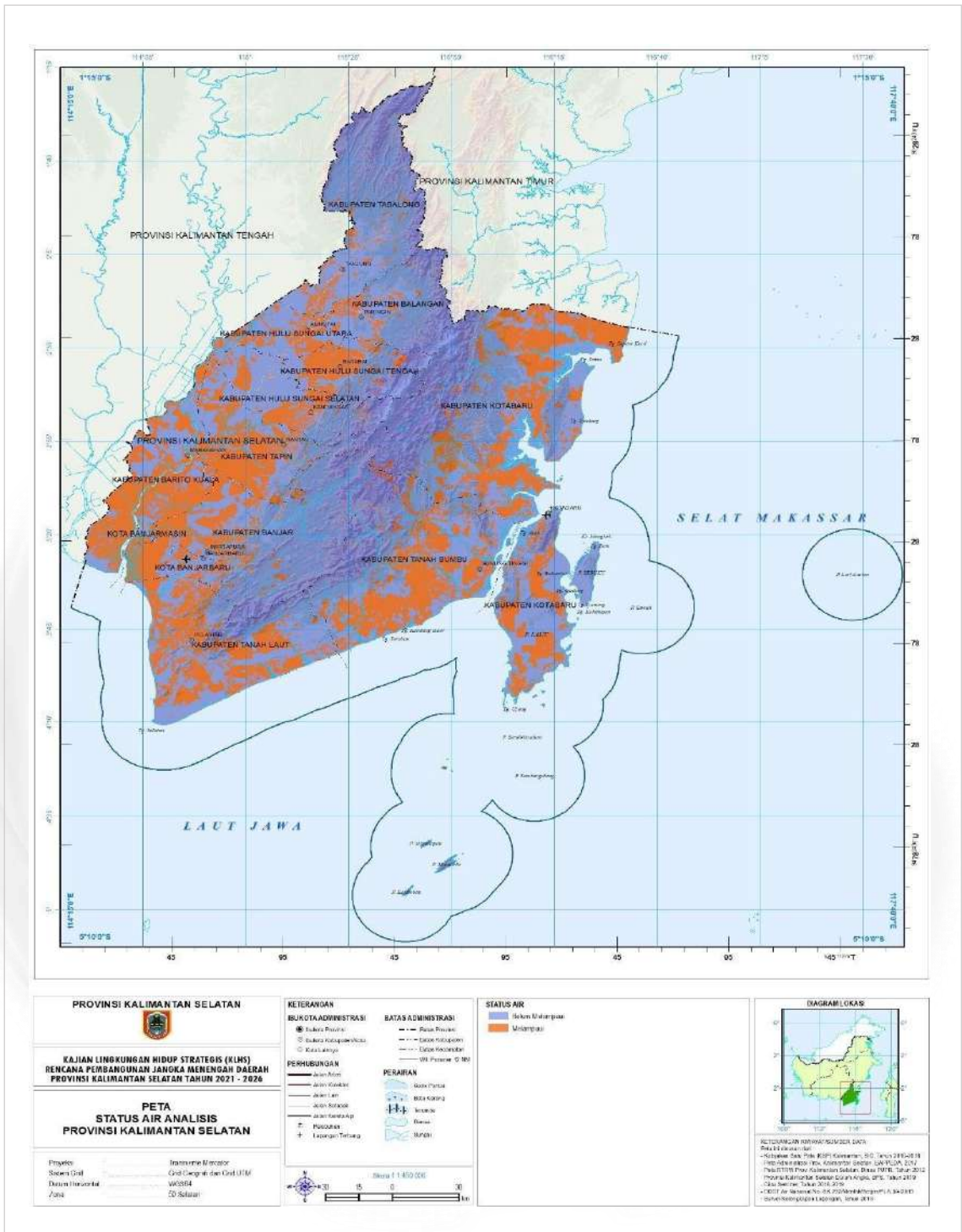
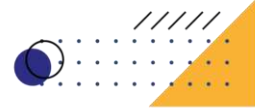
Sumber: Hasil Analisis 2020.



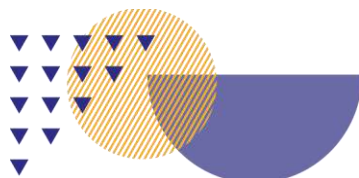


<p>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 - 2026</p> <p>PETA STATUS AIR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</p> <p>Proyeksi: Transverse Mercator Datum: Geoid Zona: 50 Selatan</p>	<p>KETERANGAN</p> <p>IBUKOTA/ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none">● Ibu Kota Provinsi○ Ibu Kota Kabupaten/Kota□ Kabupaten/Kota <p>PERUBAHAN</p> <ul style="list-style-type: none">— Air Asli— Air Bekas— Air Limbah— Air Bersih— Perikanan— Perikanan Tangkap <p>GATAS ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none">— Batas Provinsi— Batas Kabupaten— Batas Kecamatan— Batas Desa/RT/RW <p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none">— Gula Paku— Seka Rukung— Sungai— Perairan— Sungai	<p>STATUS AIR</p> <ul style="list-style-type: none">Fit (M) MELAYUNELAYAN	<p>DIAGRAM LOKASI</p> <p>KETOSANGAN SUMBER DATA</p> <ul style="list-style-type: none">— Data sekunder dari:— Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026— Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026— Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026— Data Sekunder Tahun 2019-2021— BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021— BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021
---	--	---	--

Gambar 2.17 Peta Status Air



Gambar 2.18 Status Air Analisis



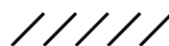


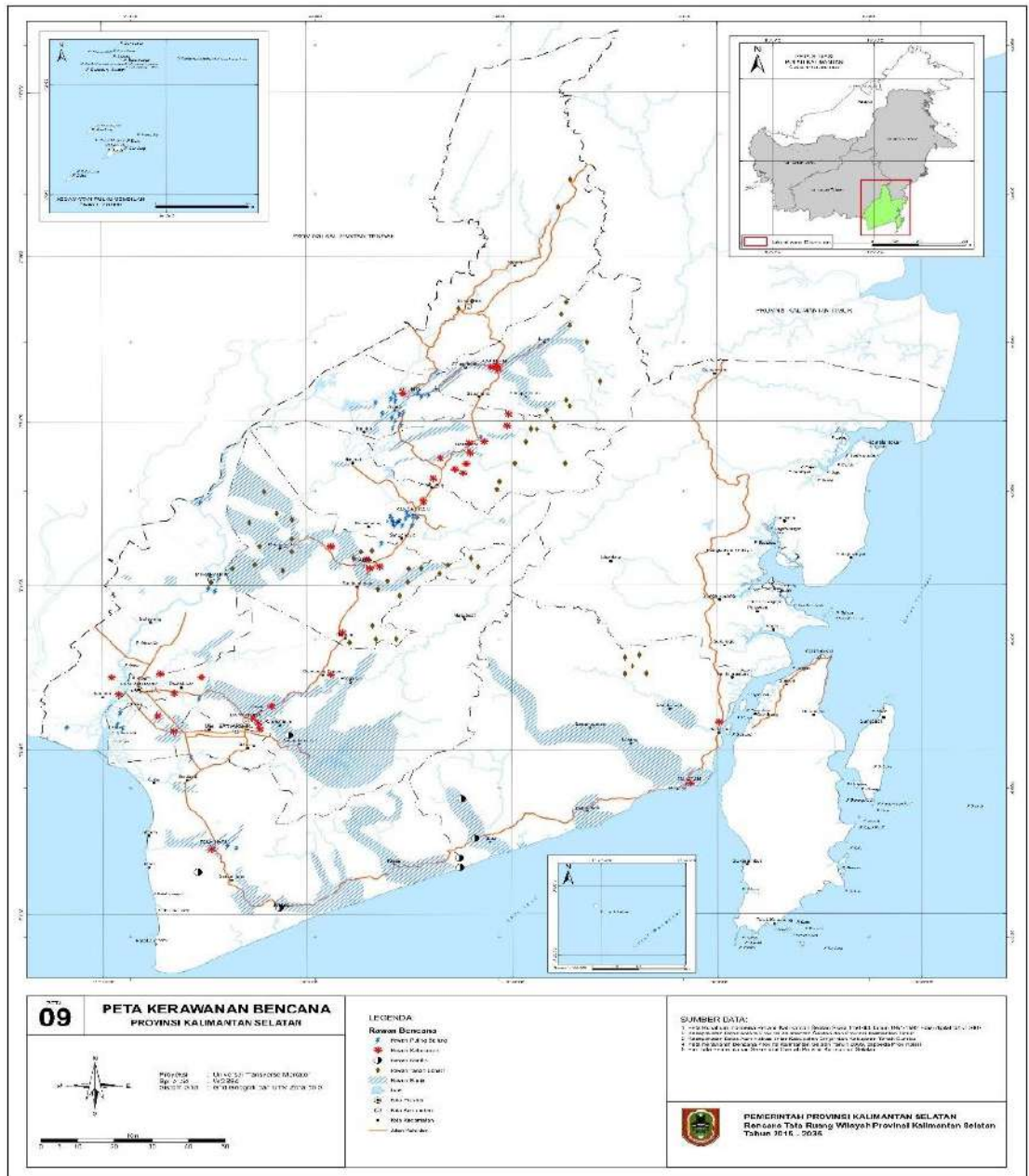
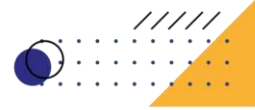
2.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah khususnya di daerah rawan dan berisiko. Bencana tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat, pemerintah ataupun swasta, bahkan tidak sedikit jiwa yang terancam. Dengan demikian, perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari bencana yang pernah terjadi ataupun yang belum pernah terjadi. Berdasarkan DIBI tercatat 8 (delapan) jenis kejadian bencana yang pernah terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit serta cuaca ekstrem.

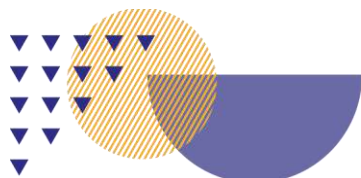
RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN





Gambar 2.19 Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Selain bencana alam, dimulai pada triwulan I tahun 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan bencana wabah kesehatan dengan adanya pandemi penyebaran virus





Covid-19. Pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan ancaman Kesehatan kini berkembang menjadi ancaman bagi pergerakan perekonomian serta menjadi bencana sosial.

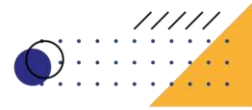
Hingga saat ini Triwulan I 2022, jumlah kasus penyebaran pandemic Covid-19 di Kalimantan Selatan masih ada meskipun jumlah kasus baru yang terjangkiti virus Covid-19 sudah mulai melandai namun pandemic covid-19 terbukti merupakan bencana kesehatan besar yang mengancam keberlangsung hidup manusia.

Berdasarkan data WHO (per tanggal 22 Februari 2022), sebanyak 228 negara telah terjangkit pandemic Covid-19. Total pasien yang terkonfirmasi Covid-19 di dunia sebanyak 424.822.073 orang.

Di Indonesia, berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikutip dari website resmi <https://covid-19.go.id> per tanggal 22 Februari 2022 bahwa jumlah kasus sebanyak 5.289.414 kasus dengan total jumlah kematian sebanyak 146.798 kasus dan yang dapat disembuhkan sebanyak 4.593.185 kasus. Adapun rincian jumlah kasus di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 - 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.21 Kasus Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2021

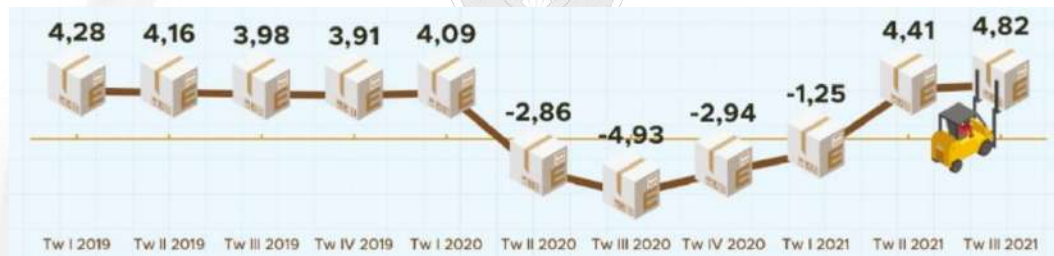
NO.	KABUPATEN/ KOTA	POSITIF		SEMBUH		DIRAWAT		MENINGGAL	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	TANAH LAUT	1,486	8,143	1,311	7,904	137	-	38	239
2	KOTABARU	673	3,206	613	3,067	36	-	24	139
3	BANJAR	1,115	6,046	952	5,878	104	1	59	167
4	BARITO KUALA	952	4,540	843	4,483	96	1	13	56
5	TAPIN	530	2,469	478	2,369	35	2	17	98
6	HULU SUNGAI SELATAN	712	2,225	628	2,151	40	-	44	74
7	HULU SUNGAI TENGAH	751	3,225	666	3,064	25	-	60	161
8	HULU SUNGAI UTARA	649	2,919	589	2,800	31	-	29	119
9	TABALONG	530	2,223	514	2,172	6	1	10	50
10	TANAH BUMBU	1,104	6,175	980	5,893	96	-	28	282
11	BALANGAN	1,139	2,764	1,106	2,667	15	1	18	96
12	KOTA BANJARMASIN	4,025	15,876	3,670	15,328	177	4	178	544



NO.	KABUPATEN/ KOTA	POSITIF		SEMBUH		DIRAWAT		MENINGGAL	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
13	KOTA BANJARBARU	1,634	10,143	1,456	9,777	111	-	67	366
JUMLAH		15,300	69,954	13,806	67,553	909	10	585	2,391

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020-2021

Berikut adalah data Pertumbuhan Perekonomian Kalimantan Selatan per Triwulan dari tahun 2019 sampai 2021. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan mulai TW II Tahun 2020 dimana kasus pertama Covid-19 pertama kali terdeteksi di Kalimantan Selatan pada akhir bulan maret 2020.



Gambar 2.1

Pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB) 2019 – 2021 (Y-ON-Y) (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub Bab Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Sub bab ini menjelaskan perkembangan kesejahteraan masyarakat dalam dua fokus, yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sub bab fokus kesejahteraan dan pemerataan menyajikan data yang memuat indikator-indikator perekonomian. Tujuan sajian data tersebut adalah untuk menggambarkan secara makro kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta kondisi pemerataan-ketimpangan perekonomian daerah.



Tabel 2.22 Data Bencana Banjir di Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2021

KAB/KOTA	2018				2019				2020				2021			
	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam	Frekuensi Kejadian	TERDAMPAK		Rumah Terendam
		KK	JIWA			KK	JIWA			KK	JIWA			KK	JIWA	
		L	L			L	L			L	L			L	L	
BARITO KUALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1.835	671
BANJARMASIN	2	-	-	-	1	2	9	2	-	-	-	-	33	57.884	185.756	58.644
BANJARBARU	3	55	330	53	3	64	253	64	14	861	1.861	1.04	21	2.981	8.609	3.072
BANJAR	2	-	-	199	-	-	-	-	22	1.451	4.61	1.422	53	56.096	157.743	52.66
TAPIN	4	79	373	128	17	877	3.295	877	11	601	2.041	623	4	392	1.797	430
HULU SUNGAI SELATAN	-	-	-	-	4	38	132	38	2	10	56	10	11	5.063	67.583	4.938
HULU SUNGAI TENGAH	-	-	-	-	1	2	7	2	10	336	904	333	21	12.091	31.382	9.455
HULU SUNGAI UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	32	1.843	6.118	1.838	12	11.155	33.576	10.085
BALANGAN	7	38	148	38	13	939	3.777	962	58	3.662	12.002	3.508	89	15.876	52.233	14.599
TABALONG	3	23	77	23	5	110	293	110	119	10.371	4.641	10.751	13	619	2.027	73
TANAH LAUT	3	26	90	163	2	253	839	207	44	4.2	3.614	3.652	37	14.578	45.687	3.984
TANAH BUMBU	5	2.151	575	470	19	6.419	23.284	6.52	34	5.516	18.72	5.538	33	6.643	22.229	6.562
KOTABARU	3	90	185	16	2	15	38	15	3	198	606	198	-	-	-	-
TOTAL	32	2.462	5.778	1.09	67	8.719	31.927	8.797	349	29.049	95.173	28.913	334	83.378	10.457	175.873





2.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu, yang dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam data PDRB dapat tergambar ukuran ekonomi dan pasar suatu wilayah serta potensi dan kesehatan ekonomi. Data PDRB kemudian dapat diturunkan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pasar di suatu wilayah serta menggambarkan ukuran relatif dengan wilayah lain.

Informasi yang didapat dari sajian data PDRB dapat digunakan sebagai dasar penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi serta kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat mengendalikan dan mengarahkan pembangunan ekonomi melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Secara sekuensial, sajian data PDRB kemudian juga dapat menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengendalikan dan mengarahkan pembangunan ekonomi.

Tabel 2-20 dan Tabel 2-21 menyajikan data PDRB dengan rincian sektoral dalam 6 tahun terakhir, dari Tahun 2016 sampai Tahun 2021. Pada Tahun 2016-2021 perekonomian Kalimantan Selatan terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kalimantan Selatan pada tahun 2016 hanya tercatat senilai Rp. 115.74 Triliun, kemudian pada tahun 2021 nilai tersebut naik hingga Rp. 135.41 Triliun.

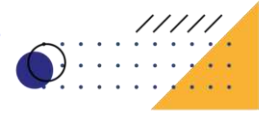
Namun demikian, seiring dengan hantaman Pandemi COVID-19, perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2020 mengalami penyusutan. Nilai PDRB Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 hanya Rp 130.87 Triliun (Atas Dasar Harga Konstan 2010). Lebih kecil Rp 2.45 Triliun jika dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2021 Nilai PDRB Kalimantan Selatan (Atas Dasar Harga Konstan 2010) dapat tumbuh positif menjadi Rp 135,41 Triliun atau naik sekitar Rp 4,5 Triliun.



Tabel 2.23 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.280.423,11	17.925.111,06	18.568.350,40	18.390.799,75	18.606.671,67
Pertambangan dan Penggalian	31.641.061,04	32.940.944,71	33.412.746,09	31.920.344,87	33.295.012,43
Industri Pengolahan	15.936.387,11	16.627.550,28	16.868.962,35	16.298.968,71	17.314.000,46
Pengadaan Listrik dan Gas	138.778,16	149.293,39	156.342,18	163.758,05	171.396,94
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	479.849,66	512.638,14	541.310,42	572.856,46	601.689,42
Konstruksi	9.086.567,33	9.621.524,89	10.206.761,40	10.075.347,02	10.364.042,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.726.031,89	11.534.598,52	12.390.882,70	11.972.118,93	12.235.516,97
Transportasi dan Pergudangan	7.246.427,21	7.751.309,67	8.210.077,15	7.773.286,96	7.913.714,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.333.899,28	2.497.506,12	2.682.547,57	2.628.485,40	2.688.918,48
Informasi dan Komunikasi	4.474.496,43	4.782.740,28	5.133.111,39	5.510.897,83	5.908.863,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.018.163,31	4.188.555,39	4.258.124,99	4.316.334,66	4.367.684,62
Real Estate	2.720.392,59	2.856.690,92	3.026.703,54	3.144.114,02	3.310.575,97
Jasa Perusahaan	712.080,99	766.722,50	822.583,45	806.228,01	835.413,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.315.380,91	6.553.664,37	6.989.221,96	7.045.528,54	7.138.270,02
Jasa Pendidikan	5.230.245,23	5.597.185,79	6.019.490,93	6.117.205,36	6.211.319,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.180.392,36	2.309.803,15	2.445.832,58	2.613.229,33	2.916.029,55
Jasa lainnya	1.337.946,79	1.436.738,77	1.538.502,49	1.516.091,10	1.533.732,06
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	121.858.523,39	128.052.577,95	133.271.551,61	130.865.594,99	135.412.851,11

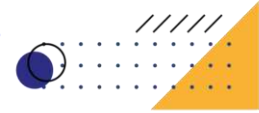
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021



Tabel 2.24 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.171.075,68	24.458.195,87	25.837.804,20	25.786.221,51	26.827.758,81
Pertambangan dan Penggalian	33.121.191,74	35.461.568,39	34.453.278,87	32.759.686,03	37.308.542,70
Industri Pengolahan	22.951.175,97	24.081.103,07	24.635.649,84	24.215.498,24	26.862.852,21
Pengadaan Listrik dan Gas	206.862,36	237.105,73	255.041,40	274.729,38	294.965,21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	645.162,44	709.004,04	754.901,68	805.799,91	855.212,11
Konstruksi	12.393.793,73	13.675.860,55	14.910.490,27	14.803.229,09	15.742.374,26
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.483.032,37	17.220.840,88	19.031.697,30	18.731.969,68	19.798.253,90
Transportasi dan Pergudangan	10.345.465,56	11.387.097,79	12.469.229,87	11.796.543,93	12.116.837,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.143.536,27	3.463.666,12	3.834.598,98	3.846.302,13	4.006.240,17
Informasi dan Komunikasi	5.535.375,12	6.065.457,61	6.570.311,90	7.032.160,26	7.586.349,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.738.713,61	6.207.185,67	6.450.604,51	6.569.432,47	6.933.859,50
Real Estate	3.531.104,38	3.795.365,92	4.118.667,03	4.352.929,63	4.676.170,96
Jasa Perusahaan	1.053.373,87	1.175.720,32	1.305.731,84	1.309.540,08	1.379.195,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.485.821,33	10.222.282,09	11.103.082,37	11.416.985,01	11.722.823,68
Jasa Pendidikan	7.278.689,44	8.008.698,52	8.816.478,94	9.093.591,09	9.464.282,02
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.078.924,32	3.364.770,60	3.628.089,76	3.959.497,72	4.543.250,64
Jasa lainnya	1.941.256,78	2.150.132,72	2.384.995,97	2.396.997,57	2.457.612,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	159.104.554,99	171.684.055,90	180.560.654,72	179.151.113,73	192.576.581,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021



Tabel 2.25 PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017–2021 (Triliun Rupiah) Menurut Pengeluaran

Komponen	ADHK Tahun 2010					ADHB				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1 Konsumsi Rumah tangga	56,82	59,68	62,07	61,91	62,40	74,55	80,47	86,96	87,61	90,01
2 Konsumsi LNPRT	1,09	1,18	1,28	1,25	1,26	1,57	1,75	1,96	1,94	2,01
3 Konsumsi Pemerintah	13,03	13,36	13,74	13,38	13,87	19,76	21,25	22,16	21,95	23,14
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	26,55	28,68	30,5	30,07	30,30	36,56	40,8	44,99	44,86	46,34
5 Perubahan Inventori	0,29	0,92	0,49	0,05	0,07	0,36	1,21	0,68	00,07	0,10
6 Ekspor Barang dan Jasa	92,46	97,98	100,06	89,24	106,23	113,41	139,67	124,74	100,65	147,96
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	68,38	73,75	74,87	65,04	78,72	87,11	113,46	100,95	77,94	116,98
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	121,86	128,05	133,27	130,87	135,41	159,1	171,68	180,56	179,15	192,58

Sumber: BPS (2021)

Pada sisi pengeluaran, PDRB Kalimantan Selatan masih ditopang dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), baik untuk ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2021, komposisi PDRB ADHB yakni konsumsi rumah tangga 46,74 %, konsumsi non rumah tangga 1,04 %, konsumsi pemerintah 12,02 %, PMTB 24,06 % dan Nett Ekspor-Impor 16,09 %. Sedangkan komposisi PDRB ADHK yakni konsumsi rumah tangga 46,08 %, konsumsi non rumah tangga 0,93%, konsumsi pemerintah 10,24 %, PMTB 22,38 % dan Nett Ekspor-Impor 20,32 %.

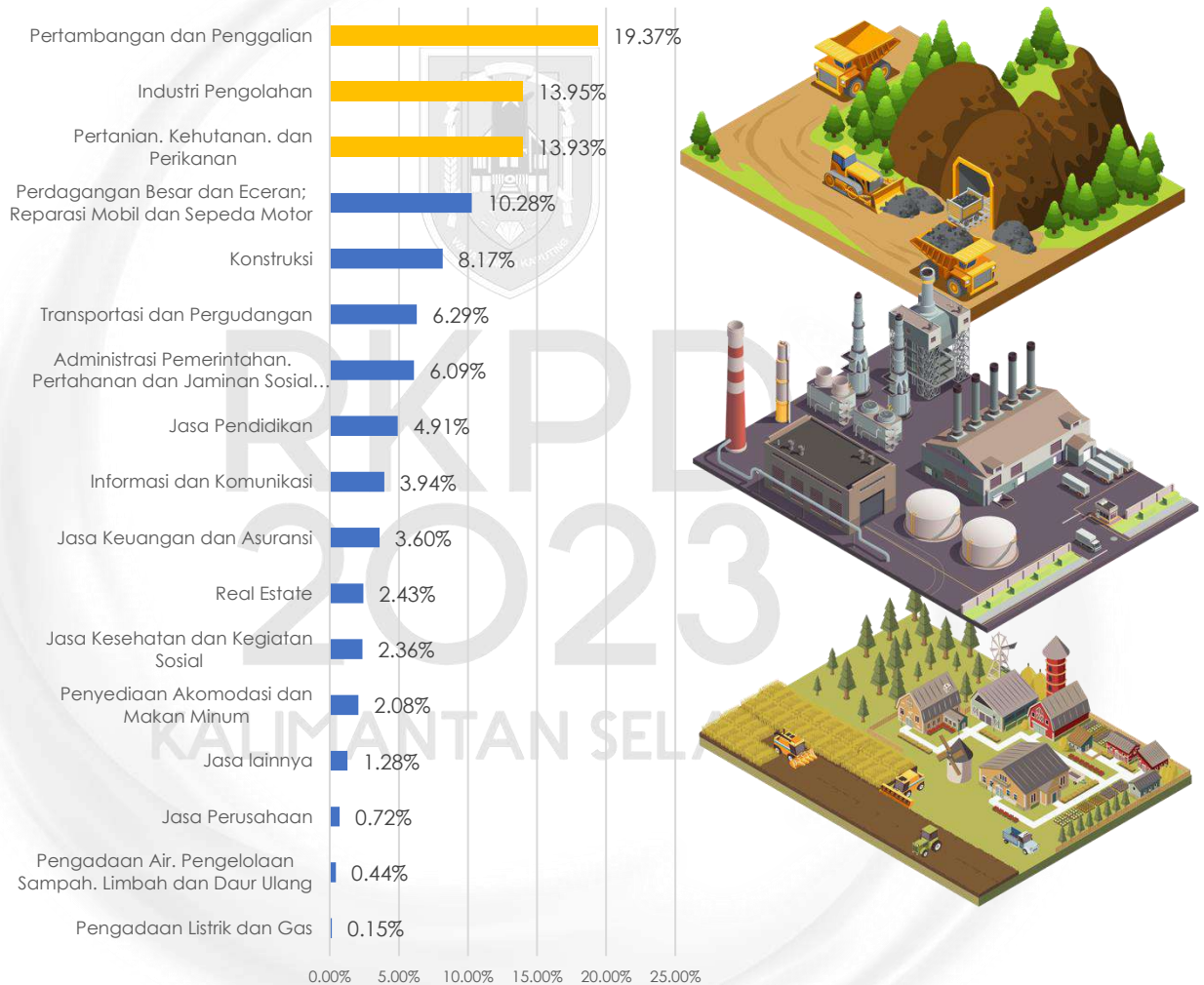
2.2.1.2 Struktur Perekonomian Wilayah

Tabel 2-24 di bawah memperlihatkan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Struktur perekonomian yang dimaksud kemudian dapat menggambarkan kontribusi sektor-sektor tertentu dalam membentuk keseluruhan nilai produk yang dihasilkan di Kalimantan Selatan.





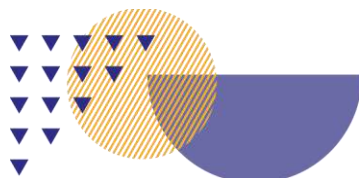
Berdasarkan tabel tersebut, ada tiga sektor yang sangat mendominasi PDRB di Kalimantan Selatan dengan mencatatkan nilai produk lebih dari Rp 20 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021. Tiga sektor tersebut adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



Gambar 2.20 Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Sementara itu, ada dua sektor yang mencatatkan nilai produk di atas Rp. 10 Triliun pada Tahun 2016, yaitu sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor yang mencatatkan nilai produk di atas Rp. 10 Triliun kemudian bertambah menjadi empat sektor di Tahun





2021. Dua sektor tambahan tersebut adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan wajib sosial, serta sektor transportasi dan pergudangan.

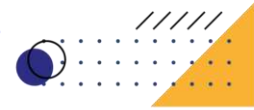
Jika diperhatikan lebih dalam, data pada tabel tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak ada perubahan struktur perekonomian yang signifikan. Tidak adanya perubahan struktur ekonomi yang dimaksud dapat diartikan bahwa urutan kontribusi sektoral tidak berubah, kecuali yang dicatatkan oleh sektor informasi dan komunikasi yang nilai produknya dapat mengungguli sektor jasa keuangan dan asuransi sejak Tahun 2019.

Selain itu, analisis terhadap kontribusi sektoral pada tahun pengamatan 2016-2021 memperlihatkan bahwa tiga sektor dominan mengalami kecenderungan penurunan kontribusi. Tiga sektor yang dimaksud adalah sektor pertambangan dan galian, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.

Empat sektor lain yang nilainya di atas Rp. 10 Triliun menunjukkan kecenderungan berbeda-beda. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor konstruksi selalu mengalami peningkatan kontribusi. Sektor transportasi dan pergudangan juga selalu mengalami peningkatan kontribusi pada tahun 2016-2021. Namun sektor ini mengalami penurunan nilai produksi pada tahun 2021. Sementara itu, kontribusi sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib cenderung berfluktuasi. Pengamatan ini dilakukan terhadap nilai produk sektoral atas dasar harga berlaku yang disajikan pada Tabel 2-24 berikut.

Tabel 2.26 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	14,56%	14,25%	14,36%	14,39%	13,93%
Pertambangan dan Penggalian	20,82%	20,65%	18,71%	18,29%	19,37%
Industri Pengolahan	14,43%	14,03%	13,63%	13,52%	13,95%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,13%	0,14%	0,14%	0,15%	0,15%
Pengadaan Air. Pengelolaan	0,41%	0,41%	0,42%	0,45%	0,44%

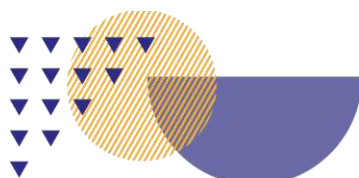


Lapangan Usaha	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
Konstruksi	7,79%	7,97%	8,25%	8,26%	8,17%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,73%	10,03%	10,60%	10,46%	10,28%
Transportasi dan Pergudangan	6,50%	6,63%	6,92%	6,58%	6,29%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,98%	2,02%	2,12%	2,15%	2,08%
Informasi dan Komunikasi	3,48%	3,53%	3,68%	3,93%	3,94%
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61%	3,62%	3,57%	3,67%	3,60%
Real Estate	2,22%	2,21%	2,28%	2,43%	2,43%
Jasa Perusahaan	0,66%	0,68%	0,72%	0,73%	0,72%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,96%	5,96%	6,30%	6,37%	6,09%
Jasa Pendidikan	4,57%	4,66%	4,92%	5,08%	4,91%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,94%	1,96%	2,06%	2,21%	2,36%
Jasa lainnya	1,22%	1,25%	1,32%	1,34%	1,28%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Dari uraian sebelumnya, maka dapat diambil poin-poin penting mengenai deskripsi struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Poin-poin tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

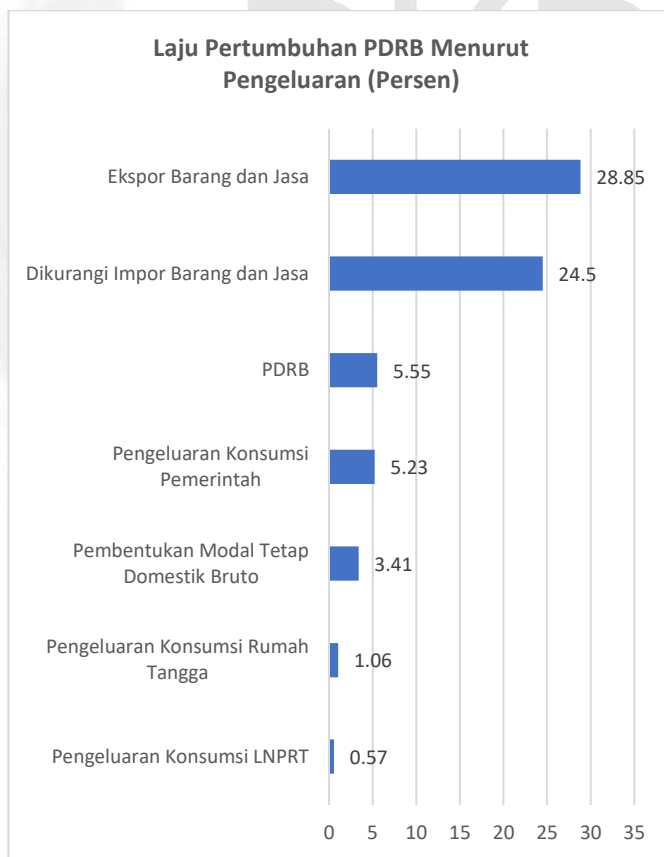
- 1) Sektor dominan dengan nilai lebih dari Rp. 20 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku adalah sektor pertambangan dan penggalan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.
- 2) Sektor yang mempunyai nilai lebih dari Rp. 10 Triliun Atas Dasar Harga Berlaku adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta sektor transportasi dan pergudangan.





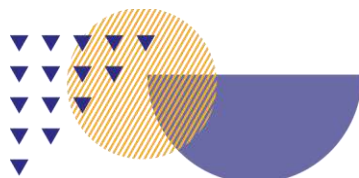
- 3) Tidak ada perubahan urutan kontribusi sektoral yang signifikan selama Tahun 2017-2021.
- 4) Terjadi penurunan kontribusi pada tiga sektor dominan.
- 5) Terjadi kecenderungan peningkatan kontribusi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan sektor transportasi dan pergudangan. Sementara itu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami fluktuasi kontribusi

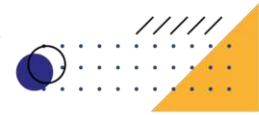
Pada posisi data terakhir yaitu PDRB ADHB menurut lapangan usaha TW 1 sampai 4 Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan, struktur PDRB Kalimantan Selatan yang terbesar masih sektor Pertambangan dan Pengalihan sebesar 28,85 % dan yang terendah adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas sebesar 0,57 %.



Gambar 2.21 Struktur PDRB ADHB Per Sektor Menurut Pengeluaran Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022





2.2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan barang dan jasa (produk) yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan peningkatan ukuran ekonomi, peningkatan ukuran pasar serta secara tidak langsung menggambarkan peningkatan kapasitas produksi.

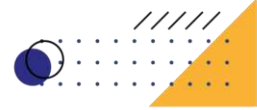
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan di bandingkan dengan pertumbuhan regional Kalimantan dan nasional yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.27 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan 2017 - 2021

Wilayah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kalbar	5.17	5.07	5.09	-1.82	4.78
Kaltim	3.13	2.64	4.70	-2.87	2.48
Kalsel	5.28	5.13	4.08	-1.81	3.48
Kalteng	6.73	5.61	6.12	-1.41	3.40
Kaltara	6.80	5.36	6.89	-1.09	3.98
Nasional	5.23	5.43	4.98	-2.03	3.70

Tabel 2.28 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Kab/Kota Tahun 2017-2021

PROV. KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	4.64	4.65	3.76	-1.99	3.47
Kota Baru	5.01	4.88	4.19	-1.87	3.36
Banjar	4.66	5.01	4.54	-1.96	3.21
Barito Kuala	5.77	5.21	5.06	-1.04	3.17
Tapin	5.12	5.01	4.26	-1.50	3.41
HSS	6.13	6.14	5.32	-1.19	4.18
HST	5.72	5.15	4.80	-1.01	3.01
HSU	5.77	5.81	5.54	-0.67	3.23



PROV. KAB/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tabalong	3.80	3.78	3.69	-2.62	3.28
Tanah Bumbu	4.14	4.14	3.64	-1.46	4.23
Balangan	2.90	3.11	3.18	-2.47	3.26
Banjarmasin	6.40	6.40	6.13	-1.91	3.41
Banjar Baru	6.96	6.90	6.93	-1.88	3.32
KALSEL	5.28	5.13	4.08	-1.81	3.48

Pertumbuhan ekonomi lazimnya diikuti dengan beberapa manfaat pembangunan sebagai berikut.

- 1) Peningkatan kesejahteraan ekonomi karena pada dasarnya terjadi peningkatan pendapatan per kapita.
- 2) Penurunan pengangguran karena terjadi peningkatan kapasitas produksi.
- 3) Peningkatan basis pendapatan asli daerah karena terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang mengikuti peningkatan konsumsi.

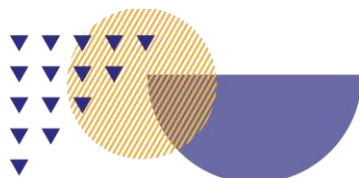
Adapun data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam Tabel 2-29 berikut.

Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010

[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.09	3.76	3.59	-0.95	1.16
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	3.38	2.62	3.55	-1.68	0.97
a. Tanaman Pangan	2.53	2.08	5.85	-4.07	-2.56
b. Tanaman Hortukultura	3.7	3.07	2.54	0.56	0.18
c. Tanaman Perkebunan	3.35	2.69	0.65	-0.36	4.41
d. Peternakan	6.65	4.02	5.75	1.76	1.81
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	2.39	3.5	3.24	-1.02	-0.98
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.98	1.19	0.32	-1.24	-1.69
3. Perikanan	7.75	7.93	4.17	1.23	2.04
B. Pertambangan dan Penggalian	4.09	4.21	1.36	-4.44	4.35
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	2.56	0.69	0.18	-4.16	-5.33
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	4.3	4.36	1.19	-4.65	4.98
3. Pertambangan Bijih Logam	3.45	-3.2	4.23	0.11	-9.97



[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2017	2018	2019	2020	2021
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	9.95	7.89	5.92	-1.3	2.65
C. Industri Pengolahan	5.69	4.34	1.72	-3.63	6.23
1. Industri Makanan dan Minuman	6.12	5.08	1.84	-5.68	5.89
2. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8.07	8.62	6.21	-1.01	1.75
3. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	2.32	5.76	0.61	0.56	-0.67
4. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.1	4.39	0.77	0.62	2.86
5. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	2.56	0.87	2.72	0.86	99.23
6. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6.86	0.31	1.79	-0.27	1.01
7. Industri Barang Galian bukan Logam	4.75	5.31	0.33	1.74	2.39
8. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	3.19	0.28	2.95	-1.52	-0.58
9. Industri Mesin dan Perlengkapan k	0.72	2.76	3.11	1.66	2.15
10. Industri Alat Angkutan	7.93	1.78	6.92	1.87	-0.96
11. Industri Furnitur	4.65	5.39	3.48	-2.82	1.25
12. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	6.21	1.98	4.58	0.46	1.12
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.6	7.58	4.72	4.74	4.66
1. Ketenagalistrikan	3.49	7.63	4.58	4.72	4.73
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	6.1	6.42	7.88	5.34	3.24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.74	6.83	5.59	5.83	5.03
F. Konstruksi	5.78	5.89	6.08	-1.29	2.87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.8	7.55	7.42	-3.38	2.2
1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.27	3.23	3.82	-2.1	2.57
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	8.77	8.26	7.99	3.57	2.14
H. Transportasi dan Pergudangan	6.86	6.97	5.92	5.32	1.81
1. Angkutan Darat	7.43	7.48	6.66	-3.73	2.37
2. Angkutan Laut	7.17	7.23	6.13	3.59	1.99
3. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	2.54	3.06	1.6	-4.06	3.72
4. Angkutan Udara	6.65	6.73	5.35	13.52	-0.51
5. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	6.79	6.88	5.65	6.45	0.58
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.84	7.01	7.41	2.02	2.3



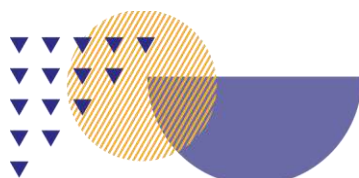


[Seri 2010] Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Penyediaan Akomodasi	7.04	7.17	7.09	3.67	2.25
2. Penyediaan Makan Minum	6.81	6.98	7.47	1.71	2.31
J. Informasi dan Komunikasi	7.94	6.89	7.33	7.36	7.22
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6	4.24	1.66	1.37	1.19
1. Jasa Perantara Keuangan	6.01	3.53	0.39	0.6	0.09
2. Asuransi dan Dana Pensiun	5.81	5.48	5.33	3.92	5.12
3. Jasa Keuangan Lainnya	6.2	6.15	6.82	1.62	1.07
4. Jasa Penunjang Keuangan	5.39	5.7	5.96	3.86	3.63
L. Real Estate	5.14	5.01	5.95	3.88	5.29
M,N. Jasa Perusahaan	7.14	7.67	7.29	1.99	3.62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.39	3.84	6.54	0.73	1.49
P. Jasa Pendidikan	6.61	7.02	7.54	1.62	1.54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.56	5.94	5.89	7.51	10.89
R,S,T,U. Jasa lainnya	6.59	7.38	7.08	1.46	1.16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5.28	5.12	4.09	1.82	3.48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Pada periode 2017-2021, perekonomian Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan. Pada periode tersebut hanya terjadi satu kali peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu pada tahun 2017. Pada tahun tersebut, ekonomi dapat tumbuh dengan nilai 5.28%. Lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan drastic di tahun 2020 1.82% dan mengkat lagi di tahun di 2021 menjadi 3.48%.

Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi bahkan menunjukkan nilai negatif sebesar -1,81%. Pertumbuhan negatif ini tidak lepas dari faktor hantaman Pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak global. Salah satu dampak global ini membuat terbatasnya potensi pasar untuk komoditas ekspor Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga terjadi penurunan ekspor. Disamping itu, terjadi penurunan kapasitas produksi karena adanya pembatasan-pembatasan mobilitas masyarakat.





2021 merupakan tahun dimana memperlihatkan terjadinya pemulihan perekonomian untuk Kalimantan Selatan. Hal terlihat dari Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan yang telah positif 3,48 % pada tahun 2021.

Jika diperhatikan lebih dalam, Tabel 2-29 menunjukkan bahwa tiga sektor dominan Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan. Sementara itu, empat sektor besar lainnya mengalami pertumbuhan yang variatif dengan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor konstruksi mengalami tren pertumbuhan meningkat.

Adapun poin-poin penting yang didapat dari pembahasan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

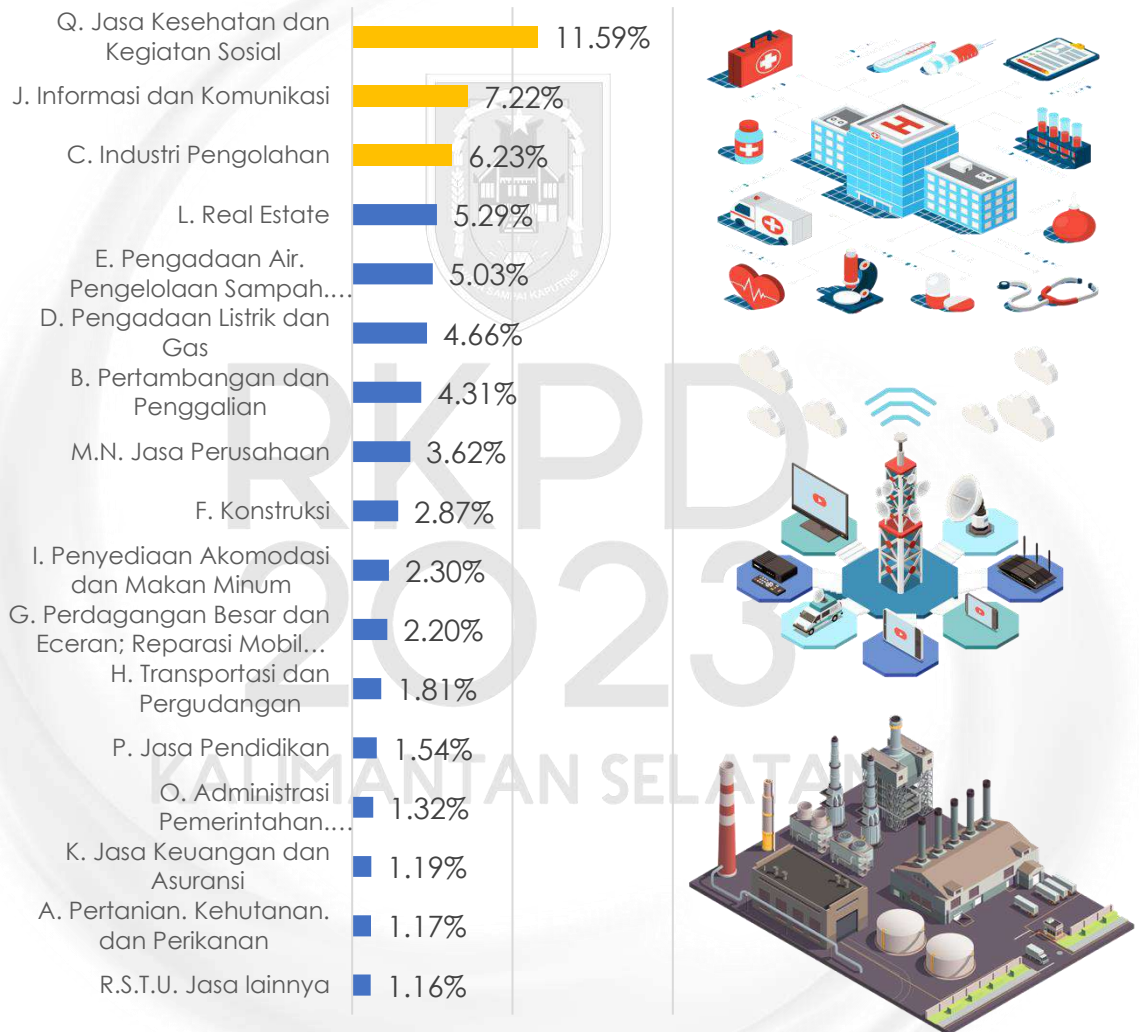
- 1) Pertumbuhan ekonomi pada 2 (dua) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan tingkat pertumbuhan
- 2) Pada Tahun 2020. ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan negatif. Kondisi ini tidak lepas dari faktor hantaman Pandemi COVID-19 yang mempunyai dampak secara global
- 3) Tiga sektor dominan. termasuk sektor pertambangan dan penggalian cenderung mengalami penurunan tingkat pertumbuhan.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha. bersumber dari sektor-sektor utama. Sebagaimana disajikan pada Tabel 2-29. di sisi pengeluaran sumber kontraksi terjadi pada komponen ekspor-impor, PMTB, serta konsumsi pemerintah. Sedangkan kontraksi pada konsumsi rumah tangga dapat tertahan seiring dengan kebijakan pemberian stimulus bantuan sosial kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19. Di sisi penawaran (lapangan usaha), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5, sumber kontraksi terbesar adalah di sektor pertambangan, Industri pengolahan, transportasi pergudangan, dan perdagangan. dimana sektor lapangan usaha tersebut menyumbang kontraksi terhadap LPE tahun 2020 masing-masing sebesar 1,12%, 0,43%, 0,33%, dan 0,31%.

Berdasarkan data terakhir PDRB (ADHK 2010) yang tersedia tahun 2021 Tw 1 sampai 4, pertumbuhan PDRB Kalimantan Selatan menurut Lapangan Usaha bila dibandingkan tahun sebelumnya, maka sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10.89 % dan yang terendah adalah penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini



memperlihatkan dimana pandemi Covid -19 masih berpengaruh dimana masyarakat Kalimantan Selatan lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial. Pada sisi lain juga, pandemi Covid-19 membatasi masyarakat melakukan aktivitas berkumpul atau acara bersama yang mana sehingga menyebabkan permintaan penyediaan akomodasi dan makan minum sangat menurun.



Gambar 2.22 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Per Sektor Menurut Lapangan Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Perbaiki pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha, bersumber dari sektor-sektor utama.



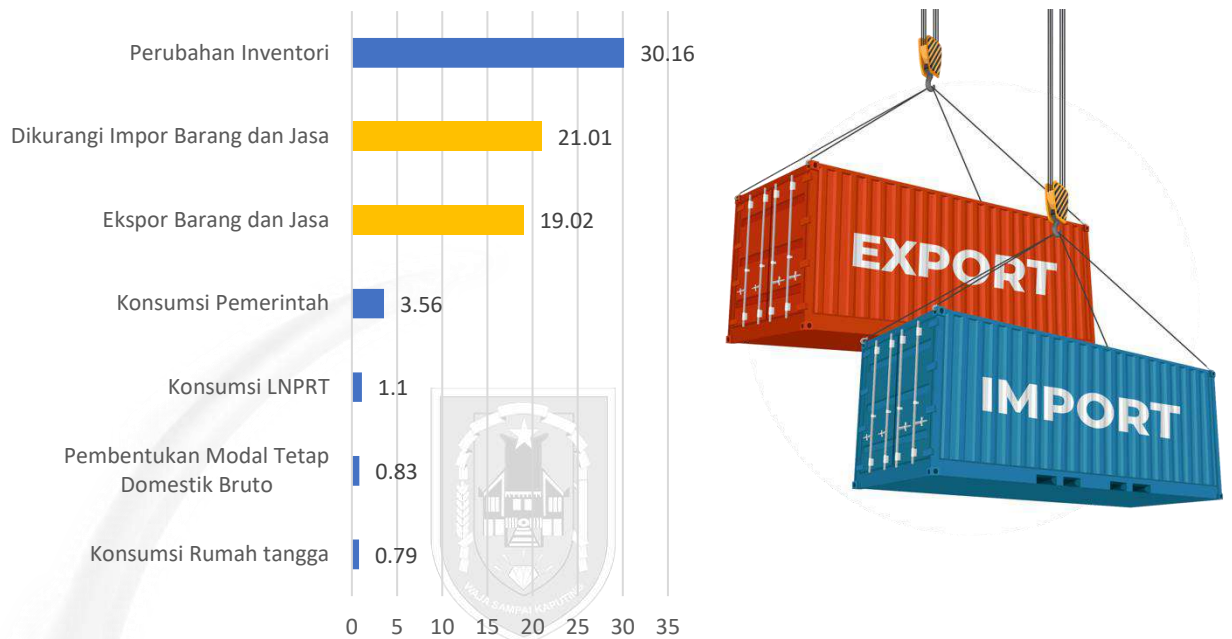
Sebagaimana disajikan pada Tabel 2-30. Pada sisi pengeluaran sumber perbaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh komponen ekspor-impor. Sedangkan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga dapat didorong dengan kebijakan pemberian stimulus bantuan sosial kepada masyarakat akibat pandemi Covid-19 serta dilakukan kebijakan gas dan rem oleh pemerintah yang mana tetap membuat masyarakat waspada terhadap covid-19 tetapi perekonomian tetap dapat berjalan meskipun belum berjalan 100 % seperti sebelum pandemi.

Tabel 2.30 LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2017–2021 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran		LPE (%) /				
		Growth (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Rumah tangga	4,82	5,03	4,01	-0,26	0,79
2	Konsumsi LNPRT	5,58	8,74	7,97	-2,4	1,1
3	Konsumsi Pemerintah	1,02	2,53	2,91	-2,63	3,56
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,3	8,01	6,37	-1,42	0,83
5	Perubahan Inventori	-145,44	215,36	-47,04	-89,3	30,16
6	Ekspor Barang dan Jasa	8,96	5,97	2,12	-10,81	19,02
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10,18	7,84	1,52	-13,13	21,01
PDRB ADHK		5,28	5,08	4,08	-1,81	3,48

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2022)

Berdasarkan data PDRB ADHK 2010 Kalimantan Selatan menurut pengeluaran tahun 2021, terdapat 3 sektor pertumbuhan pertumbuhannya cukup tinggi. 3 Sektor tersebut adalah perubahan inventori sebesar 30,16 %, Impor sebesar 21,01 %, dan Ekspor sebesar 19,02 %. Tetapi bila melihat dari nilainya, Perubahan Inventori nilainya cukup kecil walaupun persentase pertumbuhan paling besar, sehingga sektor pendorong utamanya adalah Ekspor dan Impor. Hal ini dapat dilihat pada Gambar II-24.



Gambar 2.23 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Per Sektor Menurut Pengeluaran Tahun 2021 (Y-ON-Y)

2.2.1.4 Inflasi

Pada Desember 2021 terjadi inflasi sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,49. Dari 3 kota IHK, seluruhnya mengalami inflasi yaitu Banjarmasin sebesar 0,80 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,41; Tanjung sebesar 0,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,38; dan Kotabaru mengalami inflasi sebesar 0,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 110,29.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran secara signifikan, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,15 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,68 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 0,44 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,33 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,22 persen; kelompok transportasi sebesar 2,52 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,35 persen; dan kelompok penyediaan makanan minuman/restoran sebesar 0,14 persen.



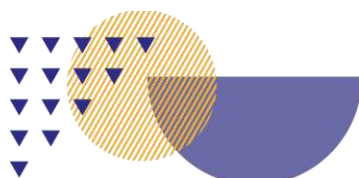
Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kalimantan Selatan, antara lain angkutan udara, cabai rawit, pepaya, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, cabai merah, telur ayam ras, baju muslim wanita dan terong.

Jika dihitung berdasarkan tahun kalender, pada Desember 2021 Kalimantan Selatan mengalami inflasi sebesar 2,55 persen sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,55 persen.

Tabel 2.31 Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2021

Kota Inflasi	Inflasi				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
Kalimantan Selatan	3.82	2.63	4.01	1.68	2.55
Kotabaru	-	-	-	1.44	2.68
Tanjung	2.40	2.60	2.15	2.05	2.43
Kota Banjarmasin	3.82	2.63	4.15	1.67	2.54

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022





Tabel 2.32 Indeks Harga Konsumen Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2021

Kota Inflasi	2017											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	127.54	127.81	127.84	128.17	128.54	129.78	130.38	130.39	130.46	129.91	130.02	131.11
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung	128.45	128.86	129.13	128.29	128.05	129.75	130.11	129.73	128.92	127.96	128.5	130.53
Kota Banjarmasin	127.47	127.73	127.74	128.16	128.58	129.78	130.4	130.44	130.58	130.06	130.13	131.11

Kota Inflasi	2018											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	131.46	131.27	131.73	131.88	132.09	133.33	133.27	133.31	133.24	133.37	133.59	134.52
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung	131.04	130.83	131.92	132.73	133.2	133.66	134.91	133.44	133.06	133.32	133.02	133.92
Kota Banjarmasin	131.49	131.3	131.72	131.82	132.01	133.31	133.15	133.3	133.24	133.37	133.63	134.56

Kota Inflasi	2019											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	135.61	135.45	135.79	137.07	138.3	138.67	138.57	138.61	138.63	138.85	139.17	139.92
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung	134.93	134.03	134.13	134.76	136.08	135.95	136.2	135.19	134.37	135.42	136.73	136.8
Kota Banjarmasin	135.66	135.56	135.92	137.24	138.47	138.87	138.75	138.87	138.95	139.11	139.35	140.15

Kota Inflasi	2020											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	104.62	105.41	105.12	104.81	104.94	105.33	105.04	105.3	104.98	105.21	105.94	106.77





Kotabaru	106.61	106.93	106.78	106.26	106.56	106.69	106.3	106.54	106.4	106.63	106.74	107.41
Tanjung	105.07	106.03	105.91	105.61	105.72	106.16	106.08	105.62	105.3	105.58	106.33	106.78
Kota Banjarmasin	105.21	105.19	104.87	104.58	104.7	105.11	104.82	105.14	104.8	105.03	105.82	106.7

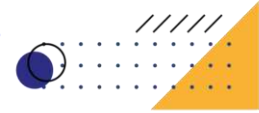
Kota Inflasi	2021											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	106.59	107.15	107.24	107.05	108.01	107.63	107.82	107.22	107.67	108.04	108.67	109.67
Kotabaru	107.68	107.78	108.51	108.75	109.5	109.04	109.17	109.52	109.32	109.24	109.61	110.29
Tanjung	106.81	107.16	107.38	107.31	107.64	108.03	108.16	108.17	108.13	108.48	108.89	109.38
Kota Banjarmasin	106.45	107.08	107.09	106.85	107.88	107.44	107.64	107.49	107.45	107.87	108.54	109.41

Kota Inflasi	2021											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	106.59	107.15	107.24	107.05	108.01	107.63	107.82	107.22	107.67	108.04	108.67	109.67
Kotabaru	107.68	107.78	108.51	108.75	109.5	109.04	109.17	109.52	109.32	109.24	109.61	110.29
Tanjung	106.81	107.16	107.38	107.31	107.64	108.03	108.16	108.17	108.13	108.48	108.89	109.38
Kota Banjarmasin	106.45	107.08	107.09	106.85	107.88	107.44	107.64	107.49	107.45	107.87	108.54	109.41

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

KALIMANTAN SELATAN





2.2.1.5 Gini Rasio

Koefisien Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Semakin tinggi nilai koefisien, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan, dan semakin tidak merata tingkat pengeluaran antar penduduk di suatu wilayah pengamatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien, maka semakin rendah tingkat ketimpangan dan semakin merata tingkat pengeluaran penduduk. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, sementara nilai 0 menunjukkan pemerataan pengeluaran sempurna.

Perkembangan tingkat ketimpangan di Kalimantan Selatan periode Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2-33 berikut.

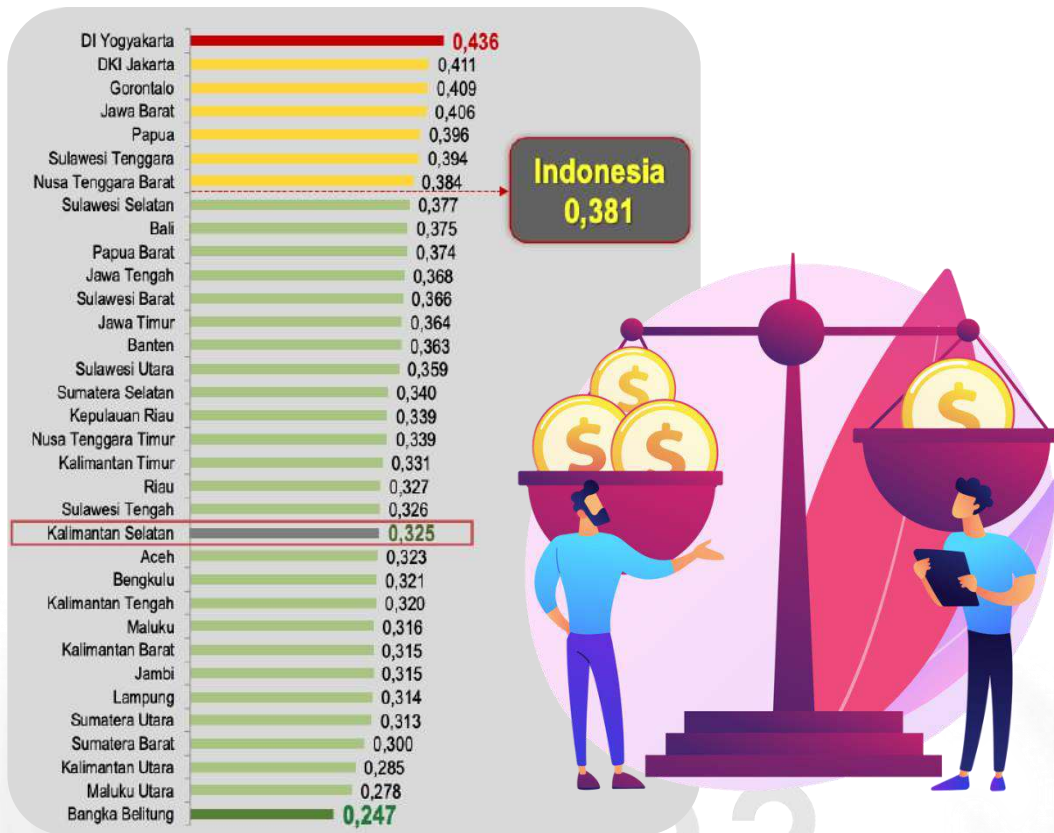
Tabel 2.33 Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. 2017-2021

Kabupaten/Kota	Gini Ratio				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	0,259	0,234	0,271	0,250	0.232
Kotabaru	0,326	0,337	0,335	0,287	0.306
Banjar	0,348	0,327	0,330	0,322	0.344
Barito Kuala	0,308	0,338	0,285	0,277	0.284
Tapin	0,331	0,281	0,268	0,274	0.289
Hulu Sungai Selatan	0,336	0,317	0,288	0,300	0.275
Hulu Sungai Tengah	0,302	0,320	0,288	0,285	0.331
Hulu Sungai Utara	0,309	0,325	0,327	0,319	0.378
Tabalong	0,328	0,305	0,306	0,346	0.288
Tanah Bumbu	0,295	0,332	0,346	0,300	0.281
Balangan	0,411	0,310	0,273	0,298	0.277
Kota Banjarmasin	0,333	0,377	0,326	0,342	0.350
Kota Banjarbaru	0,365	0,364	0,357	0,381	0.361
Kalimantan Selatan	0.347	0.344	0.334	0.332	0.325
Indonesia	0.393	0.389	0.380	0.385	0.381

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Tabel 2-33 ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah daripada tingkat ketimpangan Indonesia. Dengan kata lain, fakta ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung lebih merata daripada pengeluaran penduduk secara nasional. Berdasarkan data terakhir per September tahun 2021, posisi Kalimantan selatan

masih lebih baik di bandingkan Provinsi Sulawesi Tengah dan berada sedikit dibawah Provinsi Aceh. Hal ini dapat terlihat pada Gambar II – 25.



Gambar 2.24 Gini Ratio Indonesia Per Provinsi per September Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Tabel 2-33 juga menunjukkan nilai *gini ratio* di Provinsi Kalimantan Selatan yang cenderung stabil. titik tertinggi pada di tingkat 0,347 pada tahun 2017, *gini ratio* Provinsi Kalimantan Selatan pada tiga tahun selanjutnya ada di kisaran 0,332 di tahun 2020 dan 0,325 pada tahun 2021. *Gini Ratio* tidak mengalami naik turun dari tahun 2017 s/d 2021. Pada posisi *gini ratio* per September 2021 memperlihatkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kalimantan Selatan dalam kategori Ketimpangan Rendah.



Hal ini dikarenakan berdasarkan Ukuran Bank Dunia yang mana salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat yang rendah ketimpangan rendah. Hal ini dapat terlihat pada Gambar II-26 untuk provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data terakhir per September tahun 2021.



Gambar 2.25 Distribusi Pengeluaran Penduduk Kalimantan Selatan per September 2021

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Selain Gini Ratio, keadaan ketimpangan juga dapat ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Jika Gini Ratio menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk, maka Indeks Williamson dapat menyajikan tingkat ketimpangan regional. Dalam hal ini, Indeks Williamson menyajikan ketimpangan tingkat produksi antar wilayah, sehingga Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan ketimpangan PDRB antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi



Kalimantan Selatan. Indeks Williamson Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2015-2020 disajikan pada Tabel 2-34 berikut.

Tabel 2.34 Indeks Ketimpangan Regional (Indeks Williamson) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Provinsi	Indeks Williamson					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Selatan	0,446	0,423	0,415	0,407	0,399	0,391

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2021

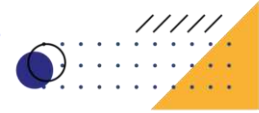
Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2-34 maka terlihat bahwa kondisi ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan semakin menurun. Dengan kata lain, semakin hari semakin terjadi perbaikan ketimpangan antar wilayah dan terjadi kecenderungan pemerataan PDRB di antara Kabupaten/Kota.

2.2.1.6 Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Selain Gini Ratio, keadaan ketimpangan juga dapat ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Jika Gini Ratio menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk, maka Indeks Williamson dapat menyajikan tingkat ketimpangan regional. Dalam hal ini, Indeks Williamson menyajikan ketimpangan tingkat produksi antar wilayah, sehingga Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan ketimpangan PDRB antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, digunakan Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kalimantan Selatan didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk di kabupaten/kota. Semakin Indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar. Hasil pengukuran dari Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Indeks Williamson $< 0,4$ = tingkat ketimpangan rendah
- b. $0,4 < \text{Indeks Williamson} < 0,5$ = tingkat ketimpangan sedang (moderat)
- c. Indeks Williamson $> 0,5$ = tingkat ketimpangan tinggi



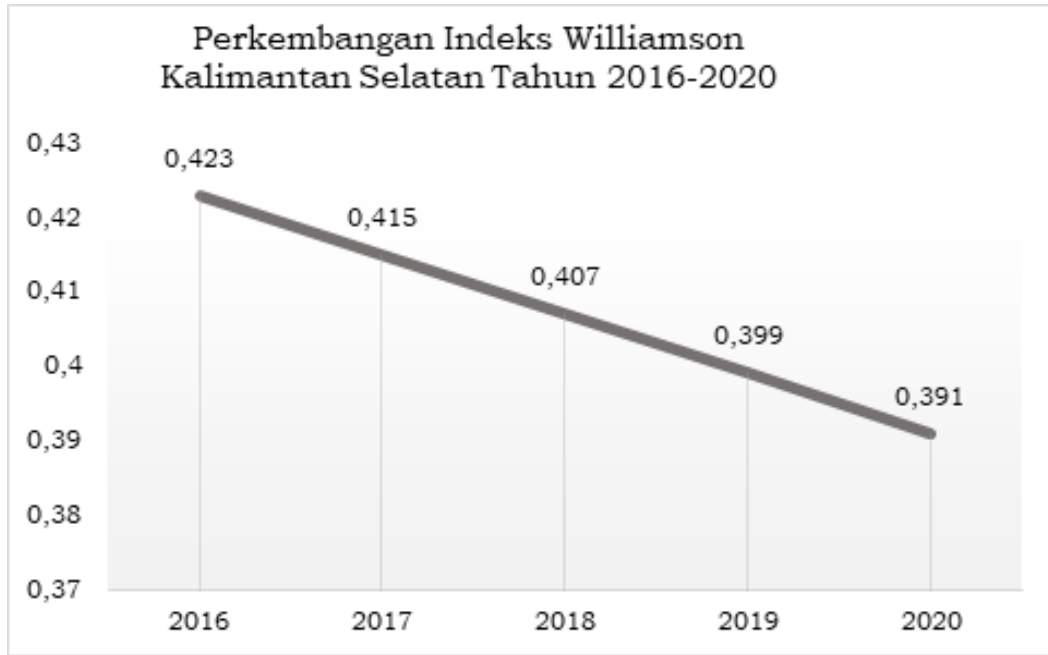
Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2016 – 2020, Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan semakin menurun yaitu dari 0,423 menjadi 0,391. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2016-2020 adalah -1,95%. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

Tabel 2.35 Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2016-2020)

Indikator	Indeks Williamson (%)					Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Indeks Williamson	0,423	0,415	0,407	0,399	0,391	-1,95
Kategori Ketimpangan	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	

Sumber : BPS, Data diolah (2021)

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang maju secara ekonomi tetapi masih terdapat daerah-daerah yang relative tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi dan dukungan sarana dan prasarana wilayah, sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin tidak melebar. Grafik perkembangan indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 pada Gambar II-21.



Gambar 2.26 Perkembangan Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS, Data diolah (2021)

2.2.1.7 Angka Kemiskinan. Tingkat Kemiskinan. dan Garis Kemiskinan

Jika dilihat dari Indikator kemiskinan, maka Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Semester II Tahun 2021 hanya berjumlah 197.760 jiwa atau setara dengan 4.56% dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Persentase penduduk miskin nasional pada Tahun 2021 mencapai 9,71%.

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 2-36 berikut.

Tabel 2.36 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	Semester I			Semester I	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2021	208.110	4.83	2021	27.542.770	10.14
2020	187.870	4.38	2020	26.424.020	9.78



TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	Semester I			Semester I	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase		Jumlah (Jiwa)	Persentase
2019	192.480	4.55	2019	25.144.720	9.41
2018	189.030	4.54	2018	25.949.800	9.82
2017	193.920	4.73	2017	27.771.220	10.64
	Semester II			Semester II	
2021	197.760	4.56	2021	26.503.650	9.71
2020	206.920	4.83	2020	27.549.690	10.19
2019	190.290	4.47	2019	24.785.870	9.22
2018	195.010	4.65	2018	25.674.580	9.66
2017	194.560	4.70	2017	26.582.990	10.12

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Tabel 2-29 tersebut juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin. Walaupun Tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun ada penurunan jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2017-2021.

Sementara itu, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2-30 berikut.

Tabel 2.37 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Semester I di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	2020		2021	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase	Jumlah (Jiwa)	Persentase
Tanah Laut	14.790	4,26	15.860	4.57
Kotabaru	14.600	4,22	16.830	4.86
Banjar	15.120	2,55	18.070	3.04
Barito Kuala	14.250	4,51	16.100	5.11
Tapin	5.900	3,06	6.930	3.60
Hulu Sungai Selatan	12.390	5,17	11.470	4.84
Hulu Sungai Tengah	15.470	5,64	16.770	6.18
Hulu Sungai Utara	14.720	6,14	16.190	6.83
Tabalong	14.700	5,72	16.130	6.27
Tanah Bumbu	16.830	4,60	18.920	4.82
Balangan	7.060	5,32	8.060	6.07
Kota Banjarmasin	31.310	4,39	34.840	4.89
Kota Banjarbaru	10.750	4,01	11.950	4.40
Kalimantan Selatan	187.890	4,38	208.110	4.83



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 34.840 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 6.930 jiwa.

Walaupun jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin adalah yang paling banyak, namun secara persentase, Kota Banjarmasin bukan wilayah yang persentase penduduk miskinnya terbesar. Persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin hanya 4.89 persen, jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Hulu Sungai Utara yang persentase penduduk miskinnya mencapai 6.83%. Adapun persentase penduduk miskin terkecil ada di Kabupaten Banjar dengan nilai 3.04%.

Jika membandingkan dengan persentase penduduk miskin secara provinsi yang mempunyai nilai 4.83 persen, maka hanya ada enam Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya lebih kecil dari nilai Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten/Kota yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Kabupaten Tanah Laut (4.57 %)
- 2) Kabupaten Kotabaru (4.86 %)
- 3) Kabupaten Banjar (3.04 %)
- 4) Kabupaten Tapin (3.60 %)
- 5) Kota Banjarmasin (4.89 %)
- 6) Kota Banjarbaru (4.40 %)

Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS, Garis Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Berdasarkan definisi tersebut, maka penduduk yang pengeluaran konsumsi per bulannya di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Adapun perkembangan Garis Kemiskinan di Kalimantan Selatan serta Garis Kemiskinan Berdasarkan Tempat Tinggal Penduduk dan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2-38,39 dan Tabel 2-40 berikut.



Tabel 2.38 Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2017 s.d. 2021 (Rupiah)

Tahun	Kalimantan Selatan	
	Garis Kemiskinan	Perubahan
2017	402.424	24.944
2018	427.774	25.350
2019	457.222	29.448
2020	497.262	40.040
2021	519.150	21.888

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

Tabel 2.39 Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2017 s.d. 2021 (Rupiah)

Tahun	Kalimantan Selatan		Indonesia	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
2017	412.452	393.097	385.621	361.496
2018	441.218	414.494	415.614	383.908
2019	470.293	443.928	442.062	404.398
2020	490.254	503.748	471.822	433.281
2021	536.041	517.293	502.730	464.474

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

Tabel 2.40 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2017 s.d. 2021 (Rupiah)

Kabupaten/Kota	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	425.152	447.212	480.010	522.845	537.854
Kotabaru	384.977	401.300	416.388	466.121	481.452
Banjarnegara	381.862	400.081	429.422	462.375	482.867
Barito Kuala	291.285	297.199	318.995	340.526	355.160
Tapin	390.488	405.591	406.367	446.577	459.160
Hulu Sungai Selatan	431.296	444.455	461.581	528.622	494.203
Hulu Sungai Tengah	341.024	354.214	365.008	417.778	425.438
Hulu Sungai Utara	407.608	420.783	436.997	488.237	501.994
Tabalong	430.129	446.765	463.980	531.180	542.800
Tanah Bumbu	427.852	451.714	475.763	513.803	530.568
Balangan	368.580	382.835	396.532	441.488	453.928
Kota Banjarmasin	445.428	477.210	509.773	543.546	606.330
Kota Banjarbaru	539.608	572.195	614.757	652.030	653.556
Kalimantan Selatan	457.222	427.774	419.974	389.273	519.150

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (Tabel Dinamis)

Tabel 2-40 menunjukkan bahwa garis kemiskinan kabupaten/kota yang lebih besar adalah tahun 2021 Kota Banjarbaru 653.556 sedangkan Garis Kemiskinan



yang paling rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala sebesar 355.160 pada tahun 2021.

2.2.1.8 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu. Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Suhariyanto dalam Mediaindonesia.com. 2020).

Dengan kata lain. Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan jarak pengeluaran penduduk untuk melepas kategorinya sebagai penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks. semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan semakin jauh juga pengeluaran yang harus ditambah agar penduduk tersebut mampu melepas kategori penduduk miskin.

Sementara itu. Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan terjadinya ketimpangan atau perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks. semakin timpang pengeluaran di antara penduduk miskin. dan semakin besar jurang perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Data mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan ditampilkan pada Tabel 2-41 berikut;

Tabel 2.41 Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1). dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2017	4,73	0,72	0,17
2018	4,54	0,69	0,18
2019	4,47	0,64	0,16
2020	4,83	0,76	0,18
2021	4,56	0,47	0.10

Sumber: BPS Indonesia 2022 (Semester II)

Secara sederhana. Tabel 2-34 menggambarkan indikator kemiskinan di Kalimantan Selatan yang semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan menurunnya tiga indikator kemiskinan dari Tahun 2015-2020.



Persentase penduduk miskin di Tahun 2015 yang mencapai 4,99 persen dapat turun sampai menjadi 4,47 persen di Tahun 2019 dan mengalami kenaikan menjadi 4,56 persen pada tahun 2021. Demikian pula Tingkat Kedalaman Kemiskinan yang pada Tahun 2015 tercatat mencapai 0,74 dapat turun sampai 0,47 di Tahun 2021. Hal yang sama juga tercatat di indikator Tingkat Keparahan Kemiskinan yang sebelumnya mencapai 0,30 di Tahun 2015. namun dapat turun menjadi 0,10 di Tahun 2021.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dari faktor-faktor kesejahteraan non-ekonomi. Salah satu indikator yang dapat mewakili kondisi kesejahteraan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan seluruh komponen-komponen penyusunnya. Dalam pembahasan IPM akan tergambar kondisi pendidikan, kondisi kesehatan serta kondisi daya beli yang secara kumulatif dapat mewakili kualitas sumber daya manusia. Namun demikian.. sub bab ini akan lebih fokus menggambarkan kondisi pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai tambahan. Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial juga menguraikan kondisi ketenagakerjaan.

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pembangunan yang mempunyai cakupan yang sangat luas dalam menunjukkan pencapaian pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain. IPM menjadi salah satu indikator yang cukup mewakili kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

IPM Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Nilai IPM selalu meningkat dari tahun 2017 yaitu 69,65 persen dan mencapai kategori tertinggi 70,91 persen di tahun 2020. saat nilai IPM Nasional tahun 2021 yaitu 71,28 persen. Adapun perkembangan nilai IPM Kalimantan Selatan dan Indonesia disajikan pada Tabel 2-42 berikut.



Tabel 2.42 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan dan Nasional Tahun 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Kalimantan Barat	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90
Kalimantan Tengah	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25
Kalimantan Selatan	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28
Kalimantan Timur	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88
Kalimantan Utara	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Meskipun sudah ada di kategori tinggi, nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional. Dengan kata lain, kondisi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan masih di bawah rata-rata masyarakat Indonesia pada umumnya.

Jika memperhatikan IPM berdasarkan wilayah, maka dapat dilihat bahwa di Tahun 2021 nilai IPM kedua kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten. Nilai IPM Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin adalah 79,26 dan 77,57. Sementara itu, hanya tiga kabupaten yang memiliki nilai IPM kategori tinggi.. yaitu Tapin (70,31), Tabalong (72,60) dan Tanah Bumbu (71,00) sedangkan delapan kabupaten lainnya masih di kategori sedang dan belum mencapai nilai 70. Adapun nilai IPM terendah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 66,12. Adapun rincian nilai IPM berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel 2-43 berikut.

Tabel 2.43 Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Tanah Laut	69,59	12,31	7,89	11.310	69,87
Kotabaru	69,32	11,95	7,46	11.720	69,13
Banjar	67,41	12,73	7,52	12.707	69,89
Barito Kuala	66,27	12,40	7,55	9.868	66,64
Tapin	70,57	11,95	7,77	11.952	70,31
Hulu Sungai Selatan	66,12	12,38	7,76	12.736	69,21
Hulu Sungai Tengah	66,20	12,21	8,01	12.280	69,05
Hulu Sungai Utara	64,10	12,92	7,75	9.644	66,12
Tabalong	70,57	12,89	9,11	11.470	72,60



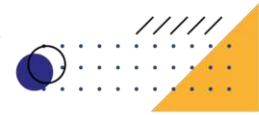
Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Tanah Bumbu	70,45	12,48	7,97	11.844	71,00
Balangan	67,85	12,47	7,69	11.500	69,11
Kota Banjarmasin	71,29	13,94	10,20	14.432	77,57
Kota Banjarbaru	72,10	14,82	10,96	13.789	79,26
Kalimantan Selatan	68,83	12,81	8,34	12.143	71,28

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

2.2.2.1.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah dimensi pendidikan. Ada berbagai indikator yang dapat mengukur kualitas sumber daya manusia dari segi dimensi pendidikan. salah satunya adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (Angka RLS). Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun objek pengukuran indikator ini adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Maka dari itu. Angka RLS dapat menunjukkan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menyoar peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2017 hingga 2021, HLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat sebesar 0,35 tahun, sementara RLS



meningkat juga sebesar 0,35 tahun. Selama periode 2017 hingga 2021, Meningkatnya HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang. Pada tahun 2021, HLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 12,81 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang D1.. Data perkembangan Angka RLS dan HLS di Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2-44 berikut.

Tabel 2.44 Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2017-2021

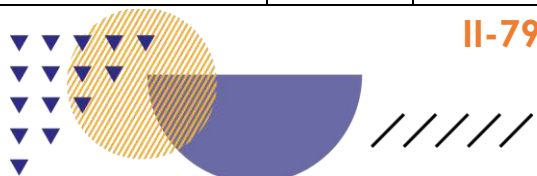
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	7,37	7,38	7,64	7,88	7,89
Kotabaru	7,18	7,19	7,42	7,43	7,46
Banjar	7,28	7,29	7,34	7,35	7,52
Barito Kuala	7,08	7,32	7,33	7,34	7,55
Tapin	7,53	7,54	7,75	7,76	7,77
Hulu Sungai Selatan	7,71	7,72	7,74	7,75	7,76
Hulu Sungai Tengah	7,79	7,80	7,99	8,00	8,01
Hulu Sungai Utara	7,19	7,36	7,37	7,53	7,75
Tabalong	8,56	8,57	8,78	9,10	9,11
Tanah Bumbu	7,67	7,70	7,71	7,96	7,97
Balangan	7,03	7,04	7,27	7,55	7,69
Kota Banjarmasin	9,92	9,93	9,94	9,95	10,20
Kota Banjarbaru	10,77	10,93	10,94	10,95	10,96
Kalimantan Selatan	7,99	8,00	8,20	8,29	8,34

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

2.2.2.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Tabel 2.45 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan. 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	11,82	11,95	11,96	12,01	12,31
Kotabaru	11,82	11,83	11,92	11,93	11,95
Banjar	11,76	11,99	12,28	12,44	12,73
Barito Kuala	12,08	12,37	12,38	12,39	12,40
Tapin	11,52	11,85	11,86	11,94	11,95
Hulu Sungai Selatan	12,05	12,07	12,10	12,17	12,38
Hulu Sungai Tengah	12,17	12,18	12,19	12,20	12,21
Hulu Sungai Utara	12,82	12,83	12,88	12,91	12,92
Tabalong	12,47	12,53	12,59	12,72	12,89
Tanah Bumbu	12,00	12,33	12,36	12,37	12,48



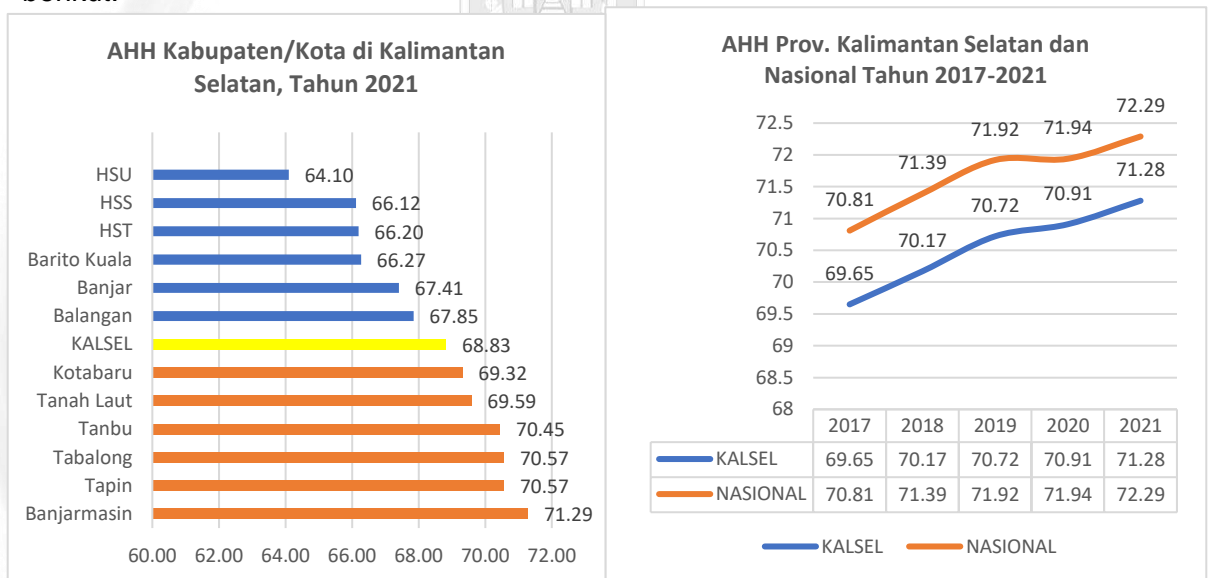


Balangan	12,07	12,36	12,37	12,46	12,47
Kota Banjarmasin	13,90	13,91	13,92	13,93	13,94
Kota Banjarbaru	14,78	14,79	14,80	14,81	14,82
Kalimantan Selatan	12,46	12,50	12,52	12,52	12,81

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2022

2.2.2.1.3 Angka Harapan Hidup (AHH)

Dimensi kesehatan yang menjadi Indikator pembangunan manusia adalah Angka Harapan Hidup (AHH). SIRUSA BPS menyebutkan bahwa AHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Adapun perkembangan AHH di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Grafik II.27 berikut.

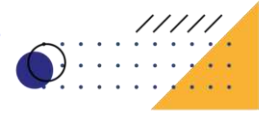


Gambar 2.27 Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021. Serta AHH Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber BPS Kalimantan Selatan 2022

Gambar II-27 menunjukkan bahwa AHH Kalimantan Selatan selalu mengalami peningkatan. Dengan kata lain, terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan selama periode Tahun 2017-2021. AHH Kalimantan Selatan dengan nilai 68,83 tahun ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada Tahun 2021 diharapkan dapat mempunyai peluang hidup hingga usia 68,83 tahun.

Namun demikian, Gambar II-28 juga menunjukkan bahwa AHH Kalimantan Selatan masih berada di bawah AHH nasional. Dengan kata lain, derajat



kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata seluruh penduduk Indonesia.

Gambar II-28 juga menyajikan data AHH berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa masyarakat di wilayah kota di Kalimantan Selatan memiliki derajat kesehatan yang lebih baik daripada masyarakat di kabupaten. Namun, perbedaan derajat kesehatan di wilayah kota dengan kabupaten tidak mencolok seperti perbedaan indikator pendidikan.

Kedua kota di Kalimantan Selatan memiliki nilai AHH lebih baik dibanding 11 kabupaten lain. Nilai AHH di Banjarbaru dan Banjarmasin adalah 72,10 tahun dan 71,29 tahun. Nilai tersebut tidak terlalu berjarak dibanding Kabupaten Tabalong dan Tapin yang memiliki AHH dengan nilai yang sama yaitu 70,57 dan 70,57. Adapun kabupaten yang memiliki nilai AHH paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 64,10.

Adapun perkembangan nilai AHH menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 2-46 berikut.

Tabel 2.46 Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan, 2015-2021

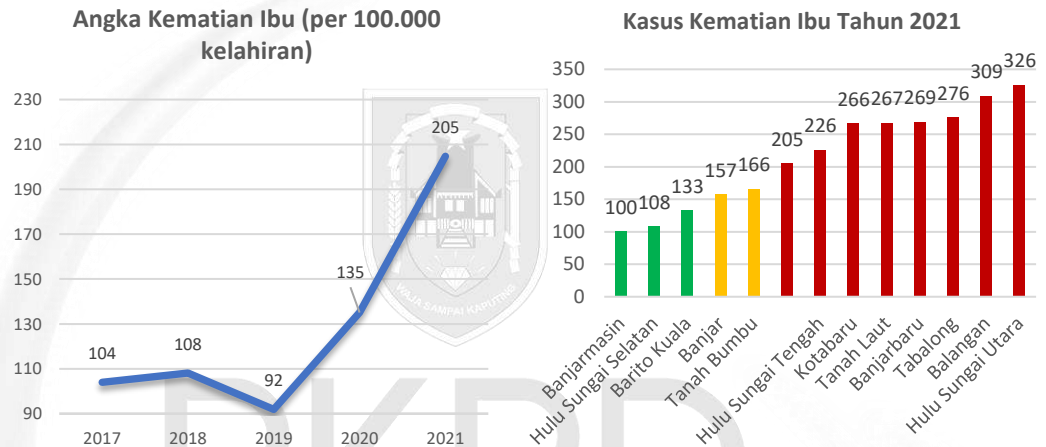
Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	68,62	68,76	68,89	69,08	69,31	69,45	69,59
Kota Baru	68,49	68,61	68,72	68,89	69,10	69,21	69,32
Banjar	65,97	66,17	66,38	66,66	66,97	67,21	67,41
Barito Kuala	64,94	65,14	65,33	65,59	65,88	66,09	66,27
Tapin	69,47	69,62	69,77	69,98	70,23	70,40	70,57
Hulu Sungai Selatan	64,14	65,38	65,39	65,59	65,82	65,97	66,12
Hulu Sungai Tengah	64,83	65,06	65,30	65,54	65,82	66,01	66,20
Hulu Sungai Utara	62,49	62,71	62,94	63,24	63,58	63,83	64,10
Tabalong	69,74	69,84	69,95	70,12	70,33	70,44	70,57
Tanah Bumbu	69,19	69,19	69,44	69,74	70,08	70,34	70,45
Balangan	66,95	67,07	67,19	67,37	67,59	67,72	67,85
Kota Banjarmasin	70,32	70,44	70,55	70,75	70,98	71,13	71,29
Kota Banjarbaru	71,36	71,43	71,50	71,67	71,87	71,99	72,10
Kalimantan Selatan	67,80	67,92	68,02	68,23	68,49	68,66	68,83

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022



A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan derajat kesehatan reproduksi masyarakat di suatu wilayah. Informasi yang didapat dari AKI dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi. Adapun data mengenai AKI di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Gambar berikut.

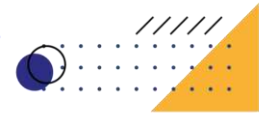


Gambar 2.28 Angka Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2020

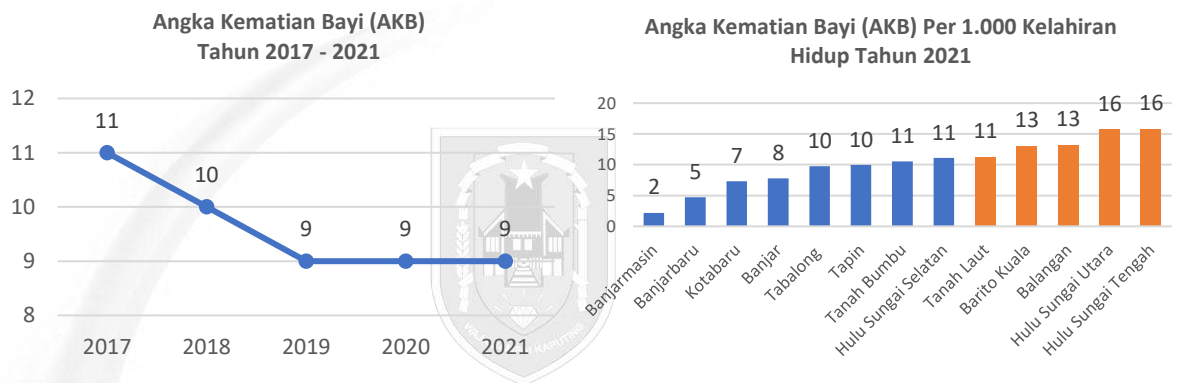
Gambar II-28 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi AKI di Kalimantan Selatan. Kondisi menguatirkan dengan AKI tertinggi dialami pada Tahun 2017 dengan nilai 104. artinya terdapat 104 kematian ibu dalam 100.000 kelahiran. Kondisi sempat membaik pada Tahun 2019. karena nilai AKI menurun sampai di tingkat 92. Setelah itu. AKI kembali meningkat pada Tahun 2021 saat nilainya mencapai 205. Indikator derajat kesehatan reproduksi masyarakat juga dilengkapi dengan informasi mengenai kasus kematian ibu yang juga tergambar pada Gambar II-23. Dari gambar tersebut terlihat bahwa kasus kematian ibu tertinggi pada Tahun 2021 yaitu kabupaten Hulu Sungai Utama yakni sebesar 326 Orang dan Kasus kematian paling rendah tercatat di Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dengan nilai 100 dan 108.

B. Angka Kematian Bayi dan Balita

Perkembangan AKB di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan tren menurun dari 11 per 1.000 kelahiran pada tahun 2017 menjadi 9 per 1.000 kelahiran pada tahun 2021. Beberapa penyebab kematian bayi di samping penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan akut).



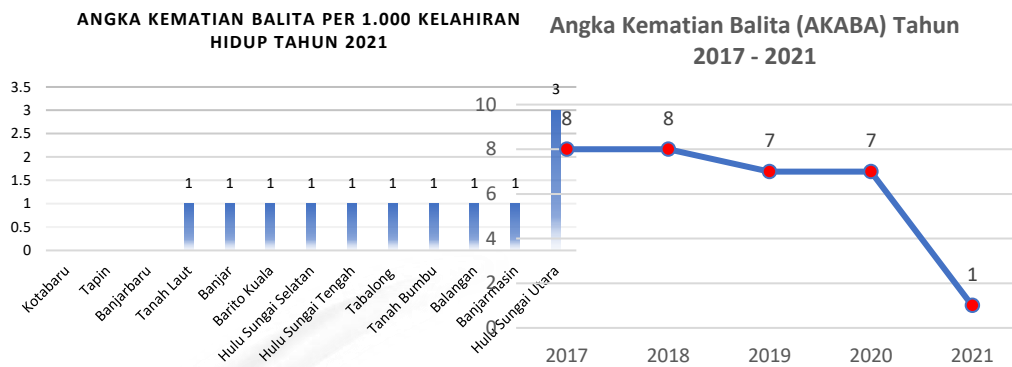
panas tinggi hingga diare antara lain disebabkan keracunan kehamilan, pendarahan saat persalinan, berat badan lahir rendah serta faktor lainnya. Pendampingan kelas ibu hamil di puskesmas dan rumah sakit, meningkatnya kunjungan pemeriksaan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi peran Posyandu berkontribusi dalam penurunan kasus kematian bayi di Kalimantan Selatan.



Gambar 2.29 Angka Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan, 2022

Perkembangan AKABA di Kalimantan Selatan selama tahun 2017-2021 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2017, AKABA sebesar 8 per 1.000 kelahiran, kemudian terus turun ditahun 2018 menjadi 8 per 1.000 kelahiran secara konsisten sampai tahun 2019 menurun dan menurun lagi menjadi 7 per 1.000 kelahiran ada tahun 2020 masih tetap 7 per 1.000 kelahiran pada Tahun 2021 turun menjadi 1 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian pada balita antara lain penyakit infeksi, ISPA dan diare pada balita, kurangnya pemahaman orang tua terkait pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada balita, serta rendahnya pemberian imunisasi pada balita. Selain itu kondisi pandemic covid 19 menyebabkan pelayanan posyandu yang kurang optimal pemantauan aki dan akaba ada kenaikan. Bisa dilihat pada gambar II-30 di bawah.



Gambar 2.30 Angka Kematian Balita di Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020 dan Kasus Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2021

C. Tingkat Kesakitan

Tingkat kesakitan terdiri dari akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ciri penyakit menular adalah dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Sedangkan Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Berikut perkembangan penyakit menular di Kalimantan Selatan dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.47 Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Case Detection Rate (CDR) TB	%	39	41	50	42	17
2	Succes Rate TB	%	92	91	98,8	86,3	64
3	Prevalensi HIV-Aids Kelompok Resiko Tinggi	angka	0,04	0,05	<1	0,07	0,04
4	Annual Paracite Incidence (API) Malaria < 1	angka	0,53	0,29	0,15	0,19	0,13
5	Prevalensi Kusta	angka	0	0,32	0,4	0,44	0,3
6	Persentase Kab/Kota yang eliminasi Rabies	%	85	92	92	30,8	15,4



NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis	%	91	93,1	96,3	92,5	96,9
8	Persentase Pasien Covid-19 Sembuh	%	0	0	0	0	0,90

Berbagai penyakit tidak menular (PTM) turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat, termasuk masyarakat Kalimantan Selatan. Ada 16 penyakit tidak menular yang tercatat diidap oleh masyarakat dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat meningkatkan risiko kematian akibat PTM. Adapun rincian PTM yang diidap oleh masyarakat Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 2-48 berikut:

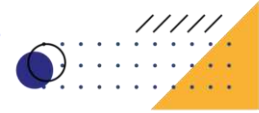
Tabel 2.48 Penyakit Tidak Menular Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH PENYAKIT TIDAK MENULAR				
	HIPERTENSI	STROKE	JANTUNG KORONER	GAGAL GINJAL KRONIK	DIABETES
Tanah Laut	7.436	296	364	26	4.170
Kotabaru	2.057	30	-	1	455
Banjar	43.423	1.226	1.239	357	15.054
Barito Kuala	388	5.765	273	681	5
Tapin	12.430	91	241	23	4.436
HSS	20.352	291	270	14	3.553
HST	19.029	136	580	30	6.643
HSU	9.633	610	3.893	62	3.962
Tabalong	11.089	512	846	32	6.276
Tanah Bumbu	4.775	104	36	8	1.166
Balangan	14.325	199	200	10	6.861
Banjarmasin	120.117	3.376	5.218	661	45.560
Banjarbaru	5.182	154	220	28	1.212
Kalimantan Selatan	270.236	12.790	13.380	1.933	99.353

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2021

D. Status gizi Masyarakat

Status gizi masyarakat Kalimantan Selatan yang perlu mendapat perhatian mencapai 32,03 % dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Angka ini terdistribusi dari anemia gizi, gizi kurang dan gizi buruk. Jika kondisi ini terjadi terus menerus dan terakumulasi maka akan meningkatkan prevalensi stunting. Anemia Gizi meskipun sudah mengalami penurunan namun masih menjadi masalah



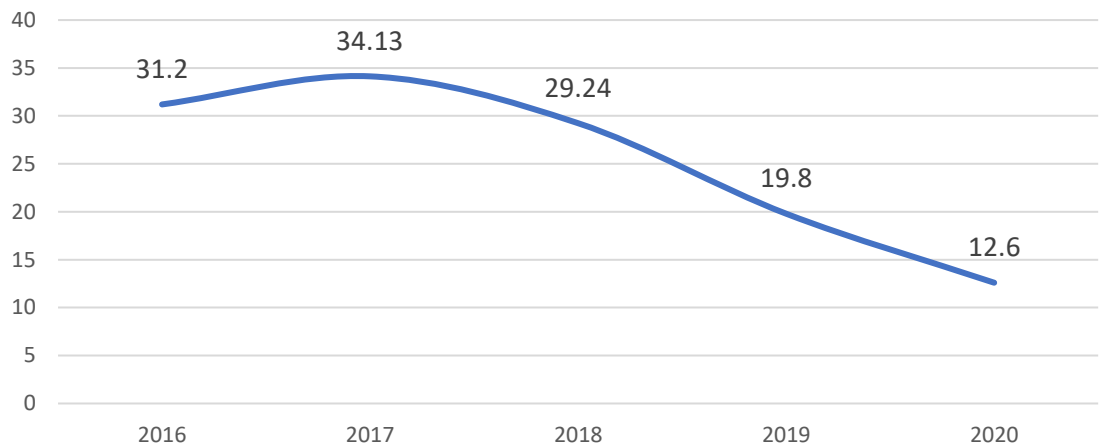
terbesar bagi perempuan khususnya remaja putri dan Ibu hamil. Sementara gizi kurang pada balita saja masih 10,45% pada tahun 2020, demikian juga gizi buruk pada balita masih 1,45% pada tahun 2020. Sementara gizi kurang dan buruk tidak hanya terjadi pada balita saja, tetapi juga terjadi pada anak dan usia di atas 5 tahun dan dewasa yang memiliki riwayat penyakit kronis. Tabel berikut menggambarkan status gizi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya berkaitan dengan remaja putri, ibu hamil dan balita.

Tabel 2.49 Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prevalensi anemia gizi	%	27,43	21,13	22,41	15,97	20,13
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	21,8	21	14,1	15,8	10,45
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	2,6	2,9	2,6	2,5	1,45
4	Prevalensi Stunting	%	31,12	34,13	29,24	19,8	12,6

Tumbuh kembang jasmani anak-anak dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu masalah yang berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang jasmani anak-anak adalah stunting, yaitu masalah nutrisi yang dialami sejak bayi.

Permasalahan stunting juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan berbagai program bidang kesehatan, prevalensi stunting di Kalimantan Selatan dapat menunjukkan grafik yang membaik. Ini tercermin dari tingkat prevalensi balita di Kalimantan Selatan yang nilainya menurun. bisa dilihat angka Stunting pada grafik berikut.



Gambar 2.31 Perkembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

Perkembangan nilai stunting berdasarkan Riskesdas dan e-PPBGM serta rinciannya berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2-50 berikut.

Tabel 2.50 Jumlah Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kabupaten/Kota	TB/U								Total	Stunting	%
	Sangat Pendek		Pendek		Normal		Tinggi				
	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln	0-23 Bln	0-59 Bln			
Kab Tanah Laut	162	386	447	1.124	5.890	14.431	124	147	16.088	1.510	9
Kab Kota Baru	194	500	426	1.257	3.226	9.144	70	188	11.089	1.757	16
Kab Banjar	719	1.509	1.241	3.296	7.178	18.815	119	186	23.806	4.805	20
Kab Barito Kuala	280	762	753	2.301	6.490	16.424	164	208	19.695	3.063	16
Kab Tapin	132	331	333	1.044	3.108	8.535	62	74	9.984	1.375	14
Kab Hulu Sungai Selatan	68	204	230	771	4.054	11.808	26	34	12.817	975	8
Kab Hulu Sungai Tengah	214	358	465	1.345	4.658	13.817	37	52	15.572	1.703	11
Kab Hulu Sungai Utara	262	656	776	2.529	4.662	11.725	29	37	14.947	3.185	21
Kab Tabalong	183	411	650	1.737	6.314	16.236	56	69	18.453	2.148	12
Kab Tanah Bumbu	125	307	455	1.281	9.165	23.293	77	100	24.981	1.588	6
Kab Balangan	307	643	525	1.653	2.452	6.440	12	20	8.756	2.296	26
Kota Banjarmasin	228	570	600	1.914	15.020	40.228	83	170	42.882	2.484	6
Kota Banjarbaru	136	257	290	622	1.924	4.129	38	62	5.070	879	17
Kalimantan Selatan	3.010	6.894	7.191	20.874	74.141	195.025	897	1.347	224.140	27.768	12



2.2.2.1.4 Rata rata Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita masyarakat di suatu daerah menentukan tingkat/kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada dasarnya angka pengeluaran tersebut bukan satu-satunya variabel penentu kesejahteraan, masih ada variabel lain seperti tingkat inflasi, ketersediaan produksi lokal dan ketersediaan komponen produksi lokal. Selama periode 2017-2021 pengeluaran perkapita Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang meningkat dari Rp. 11.600.000 menjadi Rp. 12.143.000, mengalami peningkatan 4,47% atau sebesar Rp. 534.000. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51 Perkembangan pengeluaran perkapita di Provinsi Pulau Kalimantan Tahun 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
Kalimantan Barat	8.472	8.860	9.055	8.930	8.974
Kalimantan Tengah	10.492	10.931	11.236	11.154	11.182
Kalimantan Selatan	11.600	12.062	12.253	12.032	12.143
Kalimantan Timur	11.612	11.917	12.359	11.728	12.116
Kalimantan Utara	8.643	8.943	9.343	8.756	9.075
Indonesia	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

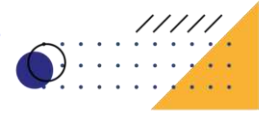
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata pengeluaran perkapita tertinggi selama kurun waktu 2017-2021 di Pulau Kalimantan adalah Provinsi Kalimantan Selatan disusul Kalimantan Timur, masing-masing Rp.12.143.000 dan Rp. 12.116.000. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita terendah adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, dengan angka masing-masing adalah Rp. 9.075.000 dan Rp. 8.974.000. Meskipun angka ini menunjukkan disparitas wilayah, namun belum tentu tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat lebih rendah dari pada Kalimantan Selatan, atau sebaliknya.

2.2.2.2 Ketenagakerjaan

2.2.2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

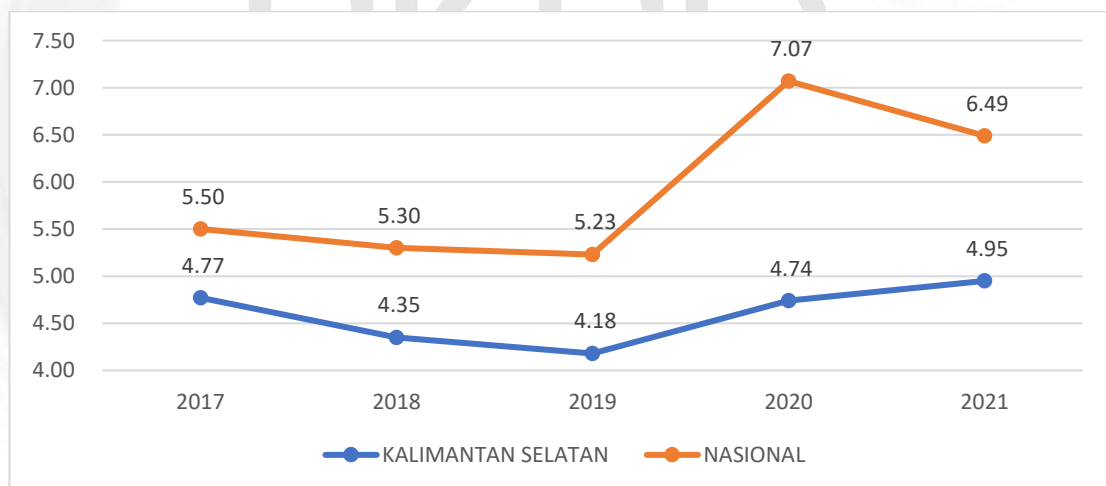
Salah satu isu yang mengemuka dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Di satu sisi pengangguran dapat terkait dengan masalah kualitas



sumber daya manusia. di sisi lain pengangguran juga dapat menggambarkan ketidakcocokan keterampilan dan kebutuhan industri. Selain itu, masalah pengangguran kemudian dapat mendorong ekspansi ekonomi. masalah ini menjadi krusial untuk dituntaskan karena berpotensi menimbulkan masalah sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas.

Tingkat pengangguran Kalimantan Selatan yang tergambar melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) relatif cukup baik. TPT Kalimantan Selatan selalu mengalami penurunan sejak Tahun 2017 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Selain itu, indikator utama pengangguran ini pun berada di bawah TPT nasional. Dengan kata lain, proporsi penduduk yang tercatat sebagai pengangguran terbuka di Indonesia secara keseluruhan lebih banyak daripada proporsi yang sama di Kalimantan Selatan.

Grafik perkembangan TPT Kalimantan Selatan serta perbandingannya dengan TPT Nasional disajikan pada Gambar II-33 berikut.



Gambar 2.32 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2021

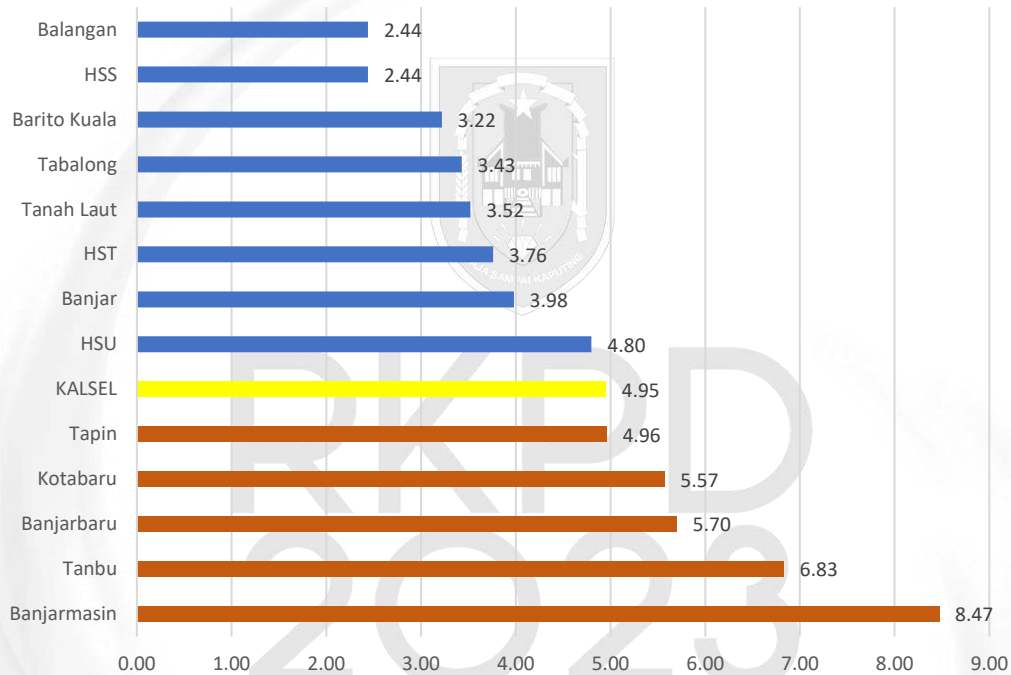
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

Pada Tahun 2021, indikator ketenagakerjaan memperlihatkan bahwa kedua kota di Kalimantan Selatan mempunyai TPT yang lebih buruk dibandingkan kabupaten-kabupaten di Kalimantan Selatan. Tiga daerah yang memiliki pengangguran terbesar diisi oleh Banjarmasin (berada di posisi teratas) dan Banjarbaru (di posisi ketiga). Sementara itu, Kabupaten Tanah Bumbu berada di posisi kedua. Secara berurutan, nilai TPT Banjarmasin, Tanah Bumbu dan



Banjarbaru adalah 8,47, 6,83, dan 5,70. Adapun daerah yang memiliki TPT terendah di wilayah Kalimantan Selatan adalah Balangan dengan nilai 2,44, keterangan lebih lanjut bisa di lihat di Gambar II.34 di bawah.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2021



Gambar 2.33 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2021

2.2.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Tingginya TPAK menunjukkan tingginya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Pada periode 2017-2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kalimantan Selatan tercatat berfluktuasi. TPAK tertinggi tercatat pada Tahun 2017 dengan nilai 71,57 persen. TPAK kemudian turun-naik hingga tercatat di tingkat 69,33 pada Tahun 2020.



TPAK di tingkat Kabupaten/Kota pun mengalami fluktuasi. TPAK tertinggi tercatat di Balangan pada Tahun 2020 dengan nilai 76,50 persen. Sementara itu TPAK terendah tercatat di Banjarmasin pada Tahun 2020 dengan nilai 62,07 persen.

Adapun rincian TPAK Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota pada periode 2017-2021 ditunjukkan pada Tabel 2-52 berikut.

Tabel 2.52 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	67,27	67,08	69,68	72,03	72,27
Kotabaru	68,90	70,25	68,03	64,68	67,50
Banjar	71,90	71,79	72,55	72,55	70,84
Barito Kuala	76,88	79,34	74,75	74,61	75,48
Tapin	71,92	70,05	69,83	70,17	70,31
HSS	71,38	72,15	71,49	73,15	69,25
HST	74,58	74,85	70,47	71,15	70,20
HSU	71,58	70,55	68,94	70,08	71,41
Tabalong	74,64	75,63	71,02	69,27	71,49
Tanah Bumbu	67,29	66,62	67,31	70,16	68,29
Balangan	79,03	77,54	71,99	76,50	75,38
Banjarmasin	65,68	65,28	66,15	62,07	63,19
Banjarbaru	60,98	63,51	63,46	66,82	65,95
Kalimantan Selatan	70,06	70,27	69,41	69,33	69,26

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

Rendahnya TPAK salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha. Tenaga kerja di Kalimantan Selatan dominan berada pada lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, masing-masing mencapai 694.450 (33,33%) dan 412.249 (19,79%) pada tahun 2020. Sementara lapangan usaha industri hanya 183.041 atau sebesar 8,79% dari total angkatan kerja yang bekerja. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.53 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan



Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

No	Jenis Lapangan Usaha	Tidak Tamat / Tamat SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Jumlah
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	459.994	130.608	96.003	7.845	694.450
B	Pertambangan dan Penggalian	20.402	10.261	33.599	6.438	70.700
C	Industri Pengolahan	76.685	39.600	57.783	8.973	183.041
D	Pengadaan Listrik, Gas		171	3.303		3.474
E	Pengadaan Air	2.687	705	2.232	774	6.398
F	Konstruksi	51.600	28.658	23.763	5.010	109.031
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	152.154	90.979	141.546	27.570	412.249
H	Transportasi dan Pergudangan	30.792	15.803	31.068	4.727	82.390
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	58.651	35.331	42.557	6.446	142.985
J	Informasi dan Komunikasi	1.091	1.152	7.214	3.972	13.429
K	Jasa Keuangan		438	7.363	8.308	16.109
L	Real Estate	1.057		1.330	525	2.912
M,N	Jasa Perusahaan	4.194	3.760	8.192	4.004	20.150
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.891	2.597	35.912	39.934	81.334
P	Jasa Pendidikan	2.843	4.368	19.050	82.876	109.137
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.822	931	6.907	22.354	32.014
R,S,T,U	Jasa lainnya	47.135	18.159	34.634	3.588	103.516
Jumlah		913.998	383.521	552.456	233.344	2.083.319

Terkait lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang masuk dalam dunia kerja masih relatif kecil. Pada tahun 2020 lulusan SMK yang terserap dalam dunia kerja hanya sebesar 32,59% dan 22,89% pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan data lulusan SMA sederajat yang bekerja di sektor industri mencapai 57.783 orang pada tahun 2020, maka lulusan SMK yang berkeja di sektor industri maksimal mencapai 10,89%. Selanjutnya lulusan SMK yang bekerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54 Lulusan SMK Kalimantan Selatan yang diterima Bekerja pada Tahun 2020-2021

No	Kab/Kota	Siswa Lulus		Lulus dan Bekerja	
		2020	2021	2020	2021

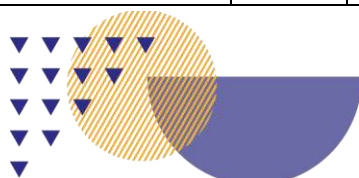


		Orang	Orang	Orang	Persen	Orang	Persen
1	Balangan	533	376	217	40,71	193	51,33
2	Banjar	1912	1807	551	28,82	209	11,57
3	Barito Kuala	584	551	157	26,88	96	17,42
4	Hulu Sungai Selatan	781	663	205	26,25	180	27,15
5	Hulu Sungai Tengah	867	674	324	37,37	221	32,79
6	Hulu Sungai Utara	1107	1037	241	21,77	173	16,68
7	Kotabaru	982	951	251	25,56	213	22,40
8	Tabalong	1868	1928	542	29,01	195	10,11
9	Tanah Bumbu	2552	2410	877	34,37	693	28,76
10	Tanah Laut	1401	1396	516	36,83	258	18,48
11	Tapin	777	725	127	16,34	71	9,79
12	Bajarbaru	1972	1853	694	35,19	575	31,03
13	Banjarmasin	3975	3763	1591	40,03	1073	28,51
Jumlah		19311	18134	6293	32,59	4150	22,89

Selain itu serapan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki setiap tenaga kerja. Kompetensi ini diukur berdasarkan sertifikasi dengan menggunakan empat kategori, yaitu 1) sertifikasi sekolah, 2) Sertifikasi yang diberikan oleh lembaga diklat (LSP-P1), 3) sertifikasi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kementerian (LSP-P2), dan 4) sertifikasi yang diberikan oleh asosiasi ahli (LSP-P3). Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55 Sertifikasi Lulusan SMK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Sertifikasi			
		Sekolah	LSP-P1 (Lembaga Diklat)	LSP-P2 (Departemen terkait)	LSP-P3 (Asosiasi Ahli)
1	Balangan	433			58
2	Banjar	695	698		347
3	Barito Kuala	478	90		
4	Hulu Sungai Selatan	698			35
5	Hulu Sungai Tengah	696	162		
6	Hulu Sungai Utara	651	358		
7	Kotabaru	792			
8	Tabalong	1659	217		
9	Tanah Bumbu	2113	264		
10	Tanah Laut	992	296		
11	Tapin	681			
12	Banjarbaru	890	595	112	212
13	Banjarmasin	2952	1714		52
Jumlah Siswa		13730	4394	112	704





Tabel di atas menunjukkan bahwa kompetensi tenaga kerja lulusan SMK masih rendah. Hal ini dapat dilihat pada sertifikasi yang dimiliki didominasi oleh sekolah sebesar 72,49%, dan 23,20% oleh lembaga profesi penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Sementara, sertifikasi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kementerian dan asosiasi profesi masing-masing sebesar 0,59% dan 3,72%.

2.2.2.2.3 Jumlah Penduduk Pengangguran Mencari Kerja

Di awal pandemi, banyak pekerja yang dirumahkan dan beberapa usaha yang gulung tikar, hingga menyebabkan banyak yang menganggur. Kemudian di awal tahun 2021, data BPS menyatakan ada penurunan pengangguran. Agustus 2020 jumlah pengangguran di kalsel mencapai 103.648 orang. Mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 109,968 orang, Pengangguran yang tercatat dimasyarakat masuk dalam penduduk usia kerja di atas 15 tahun. "Di usia itu berpotensi masuk pasar kerja. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, juga terjadi peningkatan penduduk usia kerja. Turunnya angka pengangguran. Karena semua lapangan pekerjaan mengalami kenaikan dalam menyerap tenaga kerja. Kecuali sektor pertanian, perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yang mengalami penurunan. Walau adanya peningkatan lapangan kerja dalam menyerap tenaga kerja, untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada Tabel 2-56.

Tabel 2.56 Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tanah Laut	5,932	5,373	5,827	6,490	6,506
Kotabaru	6,740	7,760	7,723	7,810	9,288
Banjar	9,212	8,812	8,953	12,317	12,568
Barito Kuala	6,745	5,108	4,078	5,046	5,684
Tapin	4,301	3,931	3,586	3,760	5,078
Hulu Sungai Selatan	2,443	2,911	3,032	2,903	3,030
Hulu Sungai Tengah	5,963	5,112	3,940	5,622	5,400
Hulu Sungai Utara	4,855	4,446	3,917	5,451	5,999
Tabalong	5,123	4,124	4,143	3,991	4,666
Tanah Bumbu	10,566	10,654	10,749	13,491	13,353
Balangan	1,345	1,598	1,517	1,789	1,768



Kabupaten	Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Kota Banjarmasin	29,646	26,942	25,812	27,595	28,920
Kota Banjar Baru	6,085	6,039	5,992	7,383	7,708
Kalimantan Selatan	98,956	92,810	89,269	103,648	109,968

2.2.2.2.4 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan Selatan. Penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 985,124 orang, naik sebanyak 17.692 orang dibanding Tahun 2020 sebanyak 967,432 orang. Untuk lebih detailnya dari tahun 2017 – 2021 bisa di lihat Tabel 2-57.

Tabel 2.57 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
TANAH LAUT	77,941	81,301	76,658	70,601	71,005
KOTABARU	71,007	70,769	77,835	85,915	80,329
BANJAR	115,925	121,350	121,022	120,461	129,838
BARITO KUALA	50,888	46,853	58,356	58,546	57,371
TAPIN	38,274	42,332	43,523	42,810	43,244
HULU SUNGAI SELATAN	48,484	49,058	51,337	47,609	55,062
HULU SUNGAI TENGAH	49,224	51,887	60,119	58,459	60,954
HULU SUNGAI UTARA	46,836	50,797	54,023	51,792	50,043
TABALONG	44,813	45,555	54,688	57,647	54,244
TANAH BUMBU	78,694	87,834	89,284	82,527	90,783
BALANGAN	18,802	20,771	26,871	22,341	23,676
KOTA BANJARMASIN	174,695	185,907	183,634	202,576	198,806
KOTA BANJAR BARU	70,701	70,501	72,297	66,148	69,769
KALIMANTAN SELATAN	886,284	924,915	969,647	967,432	985,124

2.2.2.2.5 Jumlah Penduduk Bekerja

Munculnya pandemi Covid-19 mengubah kondisi ketenagakerjaan menjadi era disrupsi terutama di wilayah Kalimantan Selatan, sebuah era dimana terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua



sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Pada Tahun 2021 Penduduk bekerja di Kalimantan Selatan yang tercatat bekerja ada 2.109.427 Orang, mengalami kenaikan di banding Tahun 2020 2.083.319 Orang. Lebih jelasnya bisa di lihat jumlah penduduk bekerja pada tahun 2017 sampai 2021 dilihat pada Tabel 2-48.

Tabel 2.58 Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk Bekerja (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
TANAH LAUT	154.233	158.596	166.334	175.337	178.543
KOTABARU	150.600	157.107	153.867	149.553	157.532
BANJAR	287.442	294.592	300.794	306.060	302.916
BARITO KUALA	162.497	174.040	166.335	167.010	170.889
TAPIN	93.726	93.739	94.660	96.936	97.354
HULU SUNGAI SELATAN	118.455	121.839	121.575	126.831	120.973
HULU SUNGAI TENGAH	138.463	141.582	136.525	138.546	138.204
HULU SUNGAI UTARA	113.133	113.926	113.165	115.837	118.972
TABALONG	126.767	132.994	126.057	125.937	131.366
TANAH BUMBU	151.301	159.614	167.067	180.538	182.149
BALANGAN	69.496	69.585	65.086	70.928	70.707
KOTA BANJARMASIN	304.650	309.316	318.725	303.967	312.415
KOTA BANJAR BARU	104.398	112.118	115.641	125.839	127.407
KALIMANTAN SELATAN	1.975.161	2.039.048	2.045.831	2.083.319	2.109.427

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya turut menghiasi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat ikut menangkal pengaruh buruk bebas dan pesatnya arus informasi serta globalisasi. Pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai luhur di dalam kandungannya diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Beberapa lembaga berperan dalam melestarikan nilai-nilai yang lahir dari seni dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Jenis Seni Budaya Provinsi Kalimantan Selatan.



Tabel 2.59 Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan

Jenis Seni Budaya	Seni Budaya di Kalimantan Selatan
Teater Tradisi/Teater Rakyat	Mamanda. Madihin. Wayang Gung. Abdul Mulik Loba. Kuda Gepang. Cerita Damarwulan. Tantayungan. Wayang Kulit. Teater Tutur.
Seni Musik	Kuriding. Karung-karung. Panting. Kintunglit. Bumbung. Suling Bambu. Musik Tiup. Salung Ulin. Kateng Kupak
Sinoman Hadrah dan Rudat	Sinoman Hadrah dan Rudat bersumber dari budaya yang dibawa oleh pedagang dan penda'wah Islam dari Arab dan Persia dan berkembang campur menjadi kebudayaan pada masyarakat pantai pesisir Kalimantan Selatan hingga timur
Seni Tari	Tari Tradisi : Balian. Gantar. Bakanjar. Babangai Tari Klasik : Baksa Kambang. Topeng. Radap Rahayu Tari Rakyat : Japin Sisit. Tirik Lalan. Gambut. Kuda Gepang. Rudat dll
Seni Sastra	Kuriding. Karung-karung Panting. Kintunglit. Bumbung. Suling Bambu. Musik Tiup. Salung Ulin. Kateng Kupak. Syair : Hikayat. Sejarah. Keagamaan Pantun : Biasa. Kilat. Bakait
Seni Rupa Keterampilan	Ornamen. Topeng dan Patung Maayam dinding palupuh. maulah atap. wantilan. maulah gula habang. maulah dodol kandangan. maulah apam barabai. maulah sasapu ijuk. manggangan. maulah wadai. maulah urung katupat. maayam janur banjar. dll

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas dan BPS. IPK ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah sesuai dengan amanat UU no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2019 IPK Kalimantan Selatan dengan IPK 53,79 %berada di urutan 13 dari 34 Provinsi, melampaui target IPK nasional yaitu 53,74 %. Namun ada beberapa indikator ada yang masih rendah atau belum mencapai target.

Dimensi Ekonomi Budaya Nilai Dimensi Ekonomi Budaya Kalimantan Selatan adalah 22,24 pada urutan ke 22 dari 34 provinsi, masih di bawah target nasional sebesar 30,55.

Dimensi Warisan Budaya Nilai Dimensi Warisan Budaya Kalimantan Selatan adalah 43,06 pada urutan ke 15 dari 34 provinsi di atas target nasional sebesar 41,11.

Dimensi Ekspresi Budaya Nilai Dimensi Ekspresi Budaya Kalimantan Selatan adalah 32,16 pada urutan ke 19 dari 34 provinsi di bawah target nasional sebesar 36,57.



Dimensi Budaya Literasi Nilai Dimensi Budaya Literasi Kalimantan Selatan adalah 60,28 pada urutan ke 7 dari 34 provinsi di atas target nasional sebesar 55,03.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai aspek sesuai dengan klasifikasi urusan yang tertera dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan. Sementara pelayanan non dasar sebagian besar belum menunjukkan kinerja yang membanggakan karena dalam beberapa urusan wajib non dasar ini belum memiliki NSPK.

2.3.1.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Capaian keberhasilan pendidikan di Kalimantan Selatan yang diukur berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kalimantan Selatan diukur berdasarkan capaian sebagai berikut:

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan perkembangan meningkat selama periode Tahun 2017-2021. APS untuk jenjang SD/MI/Paket A sudah hampir mencapai 100%, artinya hampir seluruh penduduk Kalimantan Selatan yang masuk dalam kelompok usia SD/MI/Paket A masih bersekolah atau tercatat sebagai peserta didik. Sementara APS untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sudah lebih 90%. Yang paling rendah adalah APS jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang masih di bawah 70%.



APS pada jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C belum sebaik APS pada jenjang SD/MI/Paket A. Namun demikian, APS pada kedua jenjang tersebut mengalami peningkatan nilai secara terus menerus pada periode Tahun 2017-2021. Adapun data rinci mengenai APS di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 2-60 berikut.

Tabel 2.60 Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI/Paket A	99,55	99,64	99,53	99,48	99,38
SMP/MTs/Paket B	92,33	92,43	92,83	93,04	93,50
SMU/SMK/MA/ Paket C	68,30	68,66	69,19	69,38	69,31

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Selatan 2022

B. Angka Partisipasi Kasar

Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kalimantan Selatan cukup baik dan terus mengalami peningkatan. Namun, nilai APK di jenjang SD/MI/Paket A yang menurun bukan mengindikasikan bahwa terjadi kemunduran kualitas sumber daya dan partisipasi penduduk usia SD/MI/Paket A. Penurunan nilai APK tersebut berpotensi terjadi karena semakin sesuainya usia penduduk saat menempuh pendidikan jenjang SD/MI/Paket A. Secara sederhana, bisa saja terjadi pengurangan anak-anak usia dini yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A atau terjadi pengurangan anak-anak yang mengalami pengulangan kelas. Adapun data APK Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2-61 berikut.

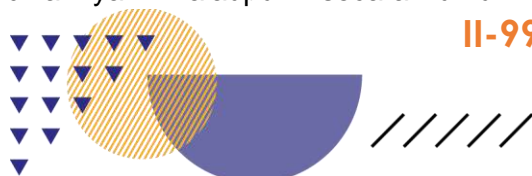
Tabel 2.61 Pencapaian APK pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI/Paket A	105,72	104,25	104,29	107,28	107,14
SMP/MTs/Paket B	98,41	96,13	97,40	86,31	86,04
SMU/SMK/MA/Paket C	83,54	88,18	91,05	79,10	80,77

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Selatan 2022

C. Angka Partisipasi Murni

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistika (SIRUSA) BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Walaupun secara umum nilai APM Kalimantan Selatan





berfluktuasi. namun nilai APM di jenjang SMU/SMK/MA/Paket C cukup menggembirakan karena selalu mengalami peningkatan cukup drastis. Adapun data APM Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2-62 berikut.

Tabel 2.62 Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

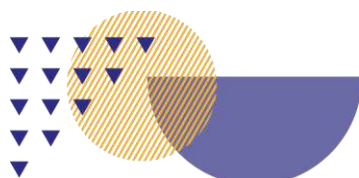
Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
SD/MI/Paket A	98,45	91,96	92,42	98,75	98.94
SMP/MTs/Paket B	73,37	71,03	69,56	75,51	74.88
SMU/SMK/MA/Paket C	57,15	63,92	65,17	58,25	58.37

Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Fasilitas dasar pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan lebih dari cukup dengan ketersediaan sekolah maupun kuantitas tenaga pengajar yang dapat dilihat pada Tabel 2-63.

Tabel 2.63 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2017-2021

Taman Kanak Kanak			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2017	2.225	105.535	9.251
2018	2.447	105.717	9.749
2019	2.448	101.777	10.641
2020	2.435	96.206	10525
2021	2.483	88.548	10.304
Sekolah Dasar			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2017	2.913	403.753	29.753
2018	2.911	381.207	27.806
2019	2.914	377.968	27.391
2020	2.929	376.084	30.685
2021	2.938	365.957	29.872
Sekolah Menengah Pertama			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2017	602	137.884	9.186
2018	598	120.803	8.859
2019	601	118.052	8.83





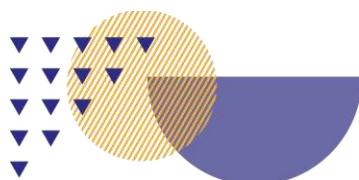
2020	615	112.479	9.724
2021	619	112.915	9.417
Sekolah Menengah Atas			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2017	192	67.068	4.404
2018	186	65.819	4.439
2019	190	67.588	4.529
2020	195	67.723	4.833
2021	202	66.914	4.789
Sekolah Menengah Kejuruan			
Tahun	Sekolah (Unit)	Murid (Orang)	Guru (Orang)
2017	122	55.851	3.515
2018	123	55.793	3.66
2019	122	57.485	3.706
2020	126	59.717	3.943
2021	127	61.515	4.039

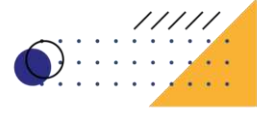
Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2022

Jika melihat analisis berikutnya berupa rasio murid terhadap guru, maka angka ini akan menggambarkan tingkat perbandingan murid terhadap guru sebagai asumsi dasar kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio murid terhadap guru maka beban mengajar guru semakin berat, sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.

Jika dilihat dari rasio murid terhadap guru secara umum, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup seperti yang terlihat pada Tabel 2-63. Namun dalam persebarannya perlu diperhatikan kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya agar kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dapat terealisasi.

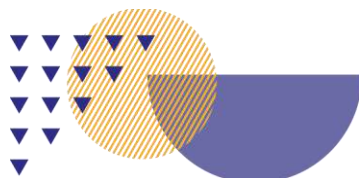
Pada jenjang yang lebih tinggi, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat perguruan tinggi negeri yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Politeknik Kesehatan (Poltekkes Banjarmasin), dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Selain itu, terdapat juga perguruan tinggi swasta sebanyak 23 unit dan akademi swasta sebanyak 22.





RKPD 2023

KALIMANTAN SELATAN

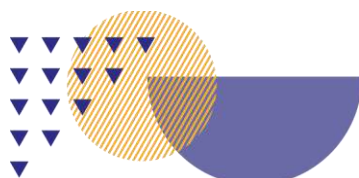




Tabel 2.64 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,99	8	8,2	8,29	8,34
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,46	12,5	12,52	12,68	12,81
3	Angka Putus Sekolah Pendidikan SMA	Persen	n/a	n/a	0,0043	0,0005	0,17
4	Angka Melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Persen	n/a	n/a	50,00	25,00	42,30
5	% Peserta Didik SMA khatam Qur'an	Persen	n/a	n/a	40,00	40,00	n/a
6	% SMA dengan sarpras yang memenuhi standar	Persen	n/a	n/a	60,00	62,28	73,40
7	Angka Putus Sekolah Pendidikan SMK	Persen	n/a	n/a	0,92	0,86	0,18
8	% Lulusan SMK yang diterima di Dunia Kerja	Persen	n/a	n/a	25,00	50,00	35,52
9	% Peserta Didik SMK khatam Qur'an	Persen	n/a	n/a	32,00	50,00	n/a
10	% SMK dengan sarpras yang memenuhi standar	Persen	n/a	n/a	55,00	42,00	42,24
11	% GTK bersertifikat Pendidik	Persen	n/a	n/a	78,65	80,00	58,44
12	% Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat Pendidik	Persen	n/a	n/a	100,00	100,00	n/a
13	Angka Putus Sekolah Pendidikan Khusus	Persen	n/a	n/a	0,4	0,0	0,52
14	% peserta didik Pendidikan Khusus yang mandiri	Persen	n/a	n/a	34,00	35,00	59,73
15	% sekolah penyelenggara pendidikan inklusi	Persen	n/a	n/a	156 Sekolah	156 Sekolah	n/a
16	% Siswa Pendidikan Khusus khatam Qur'an	Persen	n/a	n/a	10	40,00	n/a
17	% Pendidikan Khusus dengan sarpras yang memenuhi standar	Persen	n/a	n/a	55,00	50,00	58,33
18	Persentase Guru SMA setingkat Guru S2	Persen	9,90	6,65	n/a	n/a	n/a
19	Persentase Sekolah yang memiliki Sarpras memenuhi standar	Persen	49,81	51,00	n/a	n/a	n/a
20	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	n/a	n/a	100	100	100
21	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	Persen	n/a	n/a	100	100	100
22	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	Persen	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Disdikbud Prov. Kalimantan Selatan. 2021





2.3.1.1.2 Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan sedang dalam masa pengembangan dimana tahun 2021 telah ada 51 unit rumah sakit (dengan tempat tidur sebanyak 3.820 tempat tidur), 6 rumah sakit bersalin, 237 puskesmas, 3.076 Posyandu, 55 klinik kesehatan, 595 Polindes, dan 900 Posbindu. Meskipun begitu, kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal, sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kondisi prasarana kesehatan sebagaimana pada Tabel 2-65.

Tabel 2.65 Jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

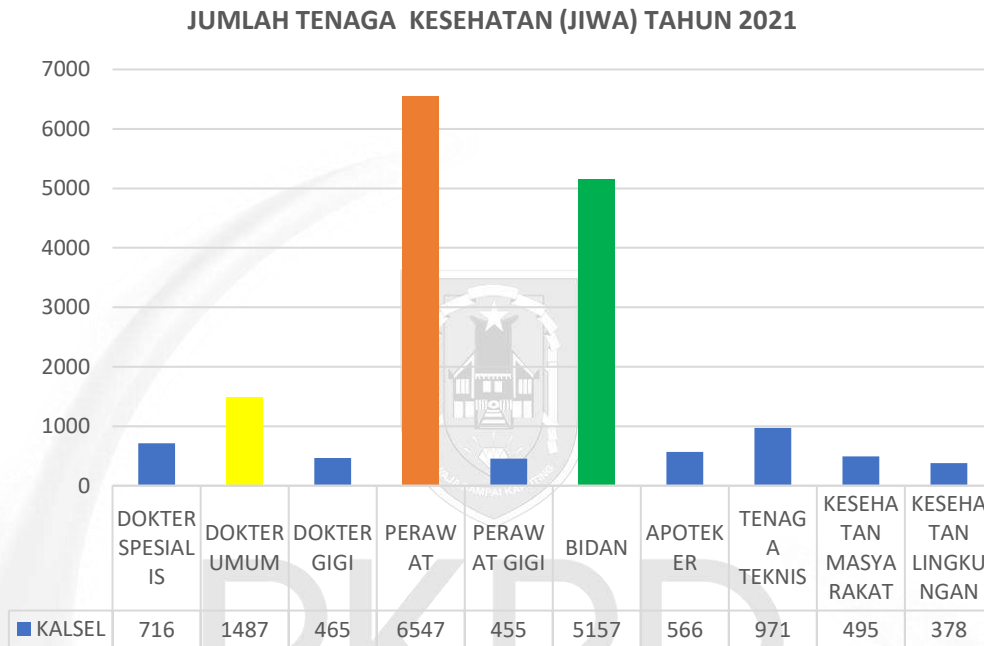
Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Tempat Tidur di RS	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Klinik Kesehatan	Polindes	Posbindu
Tanah Laut	5	189	2	19	271	6	84	88
Kotabaru	1	111	0	28	293	1	46	150
Banjar	7	798	1	25	562	4	111	235
Barito Kuala	1	135	0	19	386	1	135	21
Tapin	2	146	0	13	222	2	66	51
Hulu Sungai Selatan	5	239	0	21	301	1	113	49
Hulu Sungai Tengah	1	150	0	19	367	3	113	48
Hulu Sungai Utara	2	238	0	13	330	2	32	45
Tabalong	2	126	0	18	282	1	71	67
Tanah Bumbu	3	208	1	14	205	8	56	132
Balangan	1	138	0	12	196	1	55	42
Banjarmasin	12	1.060	1	26	395	18	-	52
Banjarbaru	9	282	1	10	166	7	18	15
Kalimantan Selatan	51	3.820	6	237	3.976	55	900	995

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2022

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya tenaga kesehatan yang mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang dapat membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 446 dokter spesialis, 792 dokter umum, 233 dokter gigi, 871 tenaga medis, 6.843 tenaga keperawatan, 4.535 tenaga kebidanan, 922 tenaga kefarmasian, dan 925

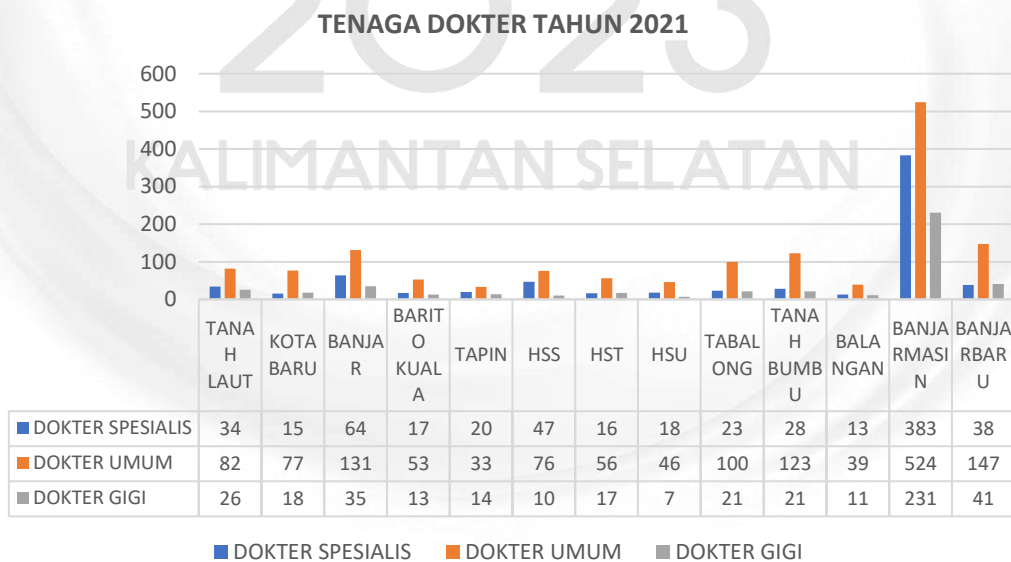


tenaga kesehatan lainnya yang sebarannya dapat dilihat pada Gambar II-34 sampai Gambar II-37.



Gambar 2.34 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2022

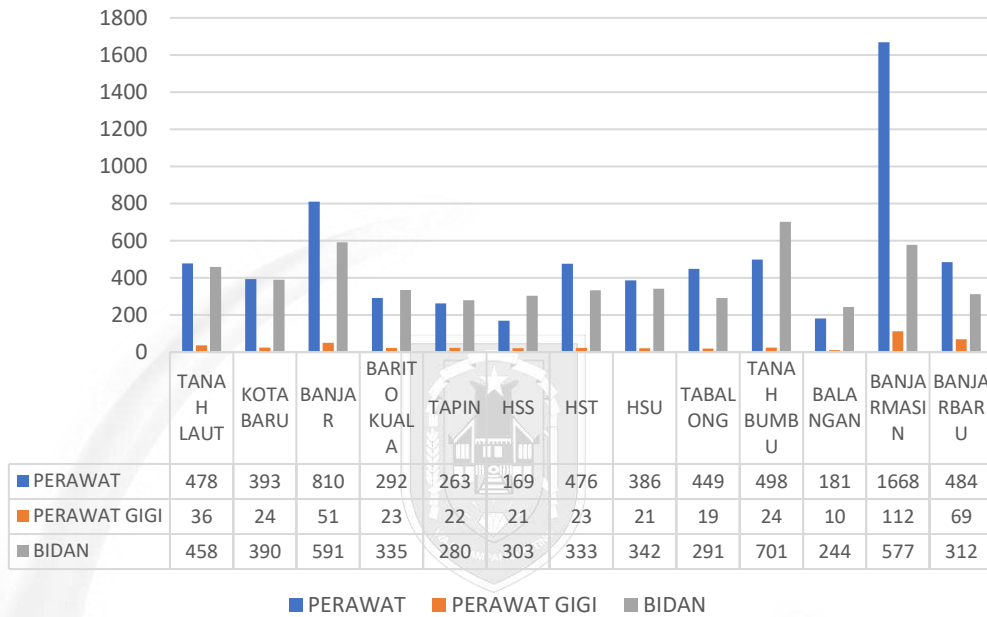
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2022



Gambar 2.35 Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2022

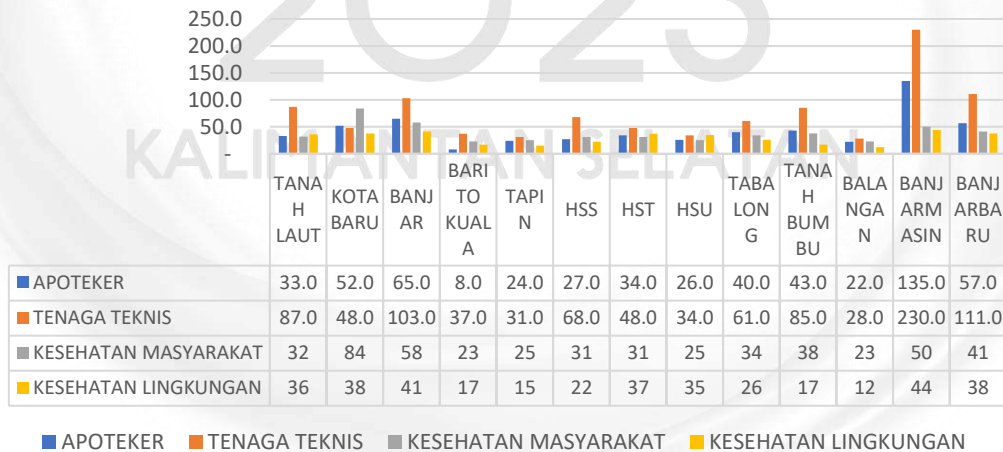
TENAGA KEPERAWATAN DAN BIDAN TAHUN 2021



Gambar 2.36 Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2022

TENAGA KEFARMASIAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2021



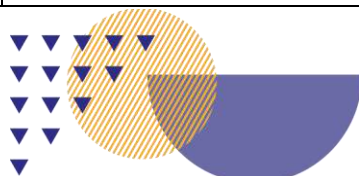
Gambar 2.37 Jumlah Kefarmasian Dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2021

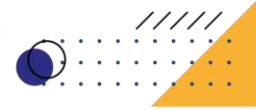
Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2022



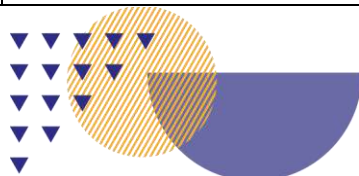
Tabel 2.66 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	103,90	112	92	135	205
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	10	10,4	9,1	9	9
3	Prevalensi Stunting	%	34,13	28,2	19	12,23	10,7
4	Konsistensi Kebijakan Perencanaan dan Anggaran Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100
5	Prevalensi anemia gizi	%	21,13	25,28	23,67	20,13	17,46
6	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	21	14,1	15,8	10,45	5,36
7	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	2,9	2,6	3,4	1,45	1,19
8	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan	%	73	62	75	81	91
9	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	69,1	73,1	79,8	88,6	93,18
10	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	66,1	77,2	89,4	90,1	41
11	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	58,3	73,8	69	58,3	71,29
12	Persentase Tempat Pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat Kesehatan	%	52	73,8	69	42,4	36,63
13	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan Kawasan Sehat	Kab/Kota	2	10	10	10	10
14	Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar	%	19,3	24,3	28,8	32,5	100
15	Persentase puskesmas/institusi yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan olahraga	%	68,83	67,23	75,57	79,57	83,4
16	Persentase Puskesmas/institusi yang melaksanakan Kesehatan Olahraga di wilayah kerjanya	%	74,47	70,64	74,89	76,6	78,72
17	Persentase Desa yang memanfaatkan Dana Desa untuk UKBM	%	31	35	70,5	100	100
18	Persentase Posyandu Aktif	%	28,59	30,27	35,37	57,8	50,1
19	Persentase kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS	%	23,64	40,77	72	100	100
20	Case Detection Rate (CDR) TB	%	41	50	54	17	23,76
21	Succes Rate TB	%	91	89	90	64	76,75
22	Prevalensi HIV-Aids Kelompok Resiko Tinggi	angka	0,051	<1	0,065	0,043	0,083
23	Annual Paracite Incidence (API) Malaria < 1	angka	0,29	0,17	0,2	0,13	0,09





24	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD <49/100.000 Penduduk	Per 100.000 pddk	13,49	53,8	51,9	84,61	100
25	Prevalensi Kusta	angka	0,32	0,40	0,41	0,3	0,22
26	Persentase Kab/Kota yang eliminasi Rabies	%	92	30,77	30,76	15,4	15,38
27	Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis	%	93,12	96,28	92,5	96,9	0
28	Persentase Kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan Pemeriksaan dan Tatalaksana Pneumonia sesuai Standar melalui Program ISPA/Pendekatan MTBS	%	61,21	61,54	54,58	30,77	61,54
29	Persentase Kabupaten/Kota dengan layanan rehidrasi oral aktif (LROA)	%	7,7	7,7	15,4	23	15
30	Persentase Puskesmas yang melaksanakan PTM terpadu	%	29,91	38,89	40	55	55,32
31	Persentase perempuan usia 30 sampai dengan 50 tahun yang di deteksi dini kanker serviks dan payudara	%	9,57	13,76	17,75	21,3	25
32	Persentase Kabupaten/Kota dengan pelayanan keswa	%	30,77	46,15	69,36	77,45	77,45
33	Persentase penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) tingkat Provinsi	%	100	100	100	100	100
34	Persentase Penanganan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	%	100	100	100	100	100
35	Persentase Kab / Kota yang melaksanakan Respon Dini Pada Penyakit yang bisa menimbulkan Wabah	%	42,01	47,98	69,23	76,2	79
36	Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	%	85	63,7	86,1	86,1	74
37	Persentase Puskesmas yang terakreditasi (Minimal Madya)	%	20	34	65	72	67
38	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	angka	0	0,176	0,177	0,187	0,19
39	Persentase Ketersediaan Jenis Layanan Laboratorium Kesehatan sesuai Standar	%	48	100	100	100	100
40	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu dan kriteria lainnya yang terpenuhi layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100
41	Persentase Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah dengan akreditasi Paripurna (17 RSUD)	%	20	27,9	42,50	40	80
42	Persentase faskes yang melaksanakan kesehatan tradisional	%	89,74	52,60	105	97	84



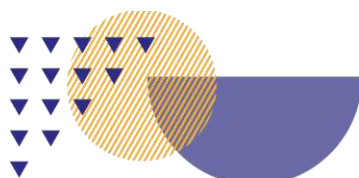


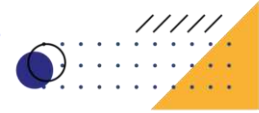
43	Persentase SDM Kesehatan Dengan Sertifikasi dan Kompetensi Sesuai Standar/Akreditasi Kedokteran	%	100	96	86	105	100
44	Persentase Fasyankes dengan Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	%	20	24	43	54	50
45	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas	%	92	93	99	98	99,6
46	Persentase fasyankes dengan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	35	40	70	63	79
47	Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan Pengelolaan obat, BMHP dan Vaksin sesuai standar	%	82	40	88	94	94
48	Persentase Fasyankes dengan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	%	25	27	38	52	70
49	Persentase PAK, PKRT dan Produk PIRT yang mempunyai ijin	%		80	85	95	96

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2021

Indikator AKI mengalami kenaikan akibat Pandemi Covid-19, dimana setiap fasilitas pelayanan kesehatan mengharuskan uji tes covid sebelum ibu hamil memasuki proses persalinan, dan ada beberapa kasus karena hasil uji belum keluar sementara kondisi ibu hamil yang sudah lemah masih menunggu hasil uji tes covid dan baru bisa dioperasi. Selain itu pelaksanaan Pembatasan kegiatan menyebabkan layanan pemantauan ibu hamil tidak berjalan optimal dan menyebabkan kematian Ibu Hamil. Data Angka prevalensi stunting yang digunakan adalah data dari EPPGBM yang diakui oleh kementerian kesehatan dengan data akurat by name by adres yang diinput oleh puskesmas, data ini digunakan karena merupakan data real di lapangan dan proses input data dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih oleh Kemenkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi.

Dibawah ini merupakan pencapaian dari beberapa rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan yaitu Rs.Ulis, Rs Ansari Saleh, dan RSJ Sambang Lihum dan di antara capaian di 3 RS tersebut meningkat dari tahun ke tahun secara spesifik bisa dilihat dari tabel dibawah:





Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan RS Ulin Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	AHH (Angka Harapan Hidup)	Tahun	10,76	10,93	10,94	10,95	10,95
2	Persentasi Pelayanan BLUD	%	100	100	100	100	100

Sumber: RS Ulin Prov. Kalimantan Selatan 2021

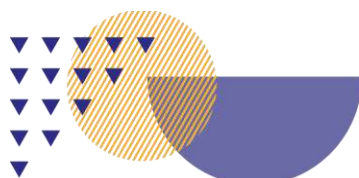
Tabel 2.68 Capaian Kinerja Urusan RS Ansari Saleh Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan BLUD	%	100	100	100	100	100

Sumber: RS Ansari Saleh Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan RSJ Sambang Lihum Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemenuhan Kebutuhan Obat	%	100	100	100	100	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Peralatan Kesehatan	%	100	100	100	100	100
3	Pemulangan Pasien dengan Remisi Sempurna	%	13	19	25	20	20
4	Pemulangan Pasien dengan Remisi Parsial	%	55	60	60	60	60
5	Masyarakat Miskin yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan	%	100	100	100	100	100
6	Tingkat Penilaian Proper lingkungan	%	Merah	Merah	Biru	Biru	Biru
7	Jumlah Pemenuhan perlengkapan Rumah Sakit (%)		50	70	80	90	90
8	Jumlah Pembangunan gedung Rumah Sakit (%)	Orang	50	70	80	90	90
9	Jumlah Rehabilitasi gedung Rumah Sakit (%)		50	70	80	90	90
10	Jumlah SDM Kesehatan RS yang ditinggalkan kapasitasnya	Nilai	5	11	14	6	6
11	Status Akreditasi RSJ Sambang Lihum	Dokumen	P	P	P	P	P





NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	90,88	90,28	90,56	92,87	92,87
13	Jumlah dokumen Perencanaan Tahunan yang disusun	Nilai	2	2	2	2	2
14	Jumlah dokumen Laporan yang disusun setiap tahun	Orang	3	3	3	3	3
15	Skor SAKIP RSJ Sambang Lihum		0	80,03	80,24		
16	Pemenuhan Kebutuhan Media untuk Promosi Kesehatan RS	%	100	100	100	100	100
17	Jumlah Pemenuhan Kendaraan Operasional RS (%)	%	45	65	90	100	100

Sumber: RSJ Sambang Lihum Prov. Kalimantan Selatan 2021

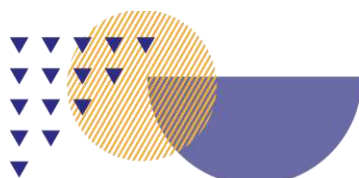
2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi pelaksanaan kegiatan pada bidang jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumberdaya air, air minum, sanitasi, bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, pertanahan, dan jasa konstruksi.

A. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Konektivitas merupakan hal penting yang mendukung daya tahan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konektivitas mencakup pada beberapa elemen yang salah satunya merupakan aksesibilitas. Ketersediaan infrastruktur konektivitas yang memadai memberikan implikasi dalam peningkatan mobilitas manusia dan barang, dimana aktivitas ini berpengaruh besar terhadap kelancaran pergerakan logistik. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pergerakan ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mempersempit ketimpangan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Penyediaan infrastruktur konektivitas pada sektor pekerjaan umum adalah penyelenggaraan jalan dan jembatan. Salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan tersebut adalah terkait proporsi kemantapan jalan yang memenuhi kualitas jalan baik dan sedang. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, yang dimaksud dengan jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Kategori jalan dalam kondisi

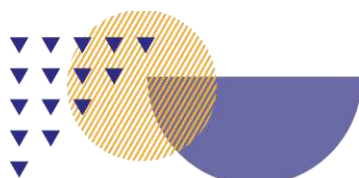


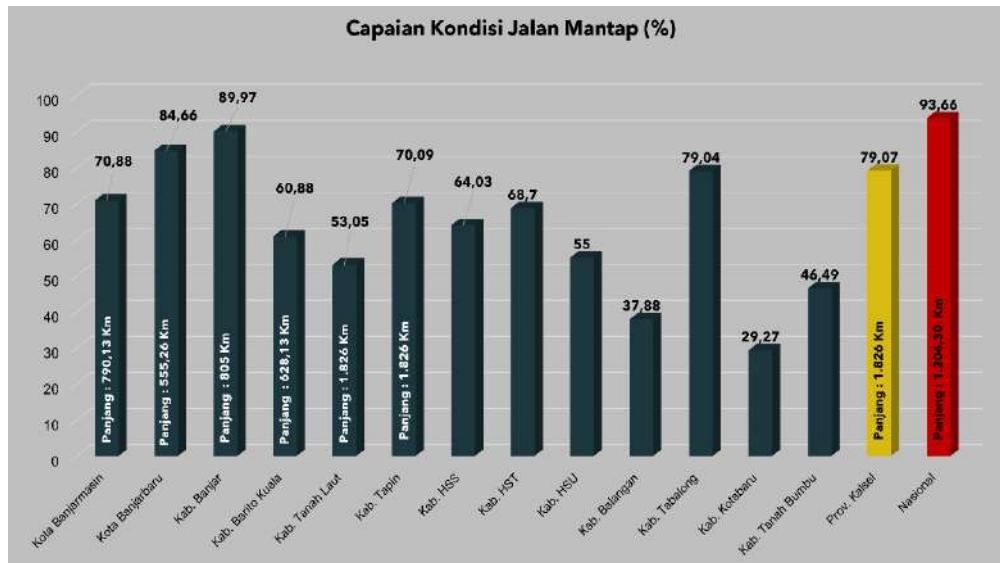


baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks IRI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km).

Penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248.KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), jalan nasional di Kalimantan Selatan memiliki total sepanjang 1.204,3 Km dengan kondisi mantap sebesar 93,66% pada tahun 2020. Jalan nasional ini terdiri dari Jalan Lintas Selatan sepanjang 474,75 Km, Jalan Penghubung Lintas sepanjang 283,97 Km, dan Bukan Jalan Lintas sepanjang 445,57 Km.

Adapun panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/030/KUM/2018 tentang Perubahan kelima atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2032 yang semula 762,61 km menjadi 756,12 km dengan kondisi mantap 80,50% pada Tahun 2021. Adapun capaian ini masih berada di bawah kondisi mantap jalan nasional.





Gambar 2.38 Capaian Kondisi Jalan Mantap Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Sumber Data :

1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248.KPTS/M/2015
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/030/KUM/2018 tentang Perubahan kelima atas Kepgub Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 – 2032
3. Perkada jaringan jalan kabupaten/kota

Jalan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan masing masing ditetapkan melalui peraturan kepala daerah dengan panjang total jalan kabupaten/kota adalah $\pm 11.174,59$ Km. Kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota tahun 2020 seperti pada Gambar II-39, menunjukkan bahwa masih terdapat 7 kabupaten dengan capaian kemantapan jalan di bawah target nasional.

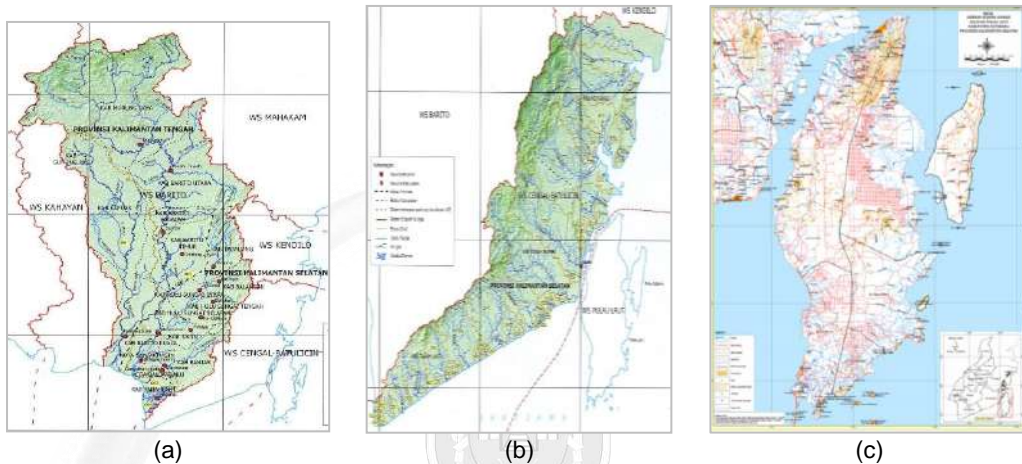
B. Sumber Daya Air

Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015, terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah sungai yaitu :

1. WS Barito, merupakan wilayah sungai kewenangan nasional yang dengan luas wilayah $80.370,98$ Km², terdiri dari DAS Kapuas, DAS Barito, DAS Maluka, dan DAS Tabanio.
2. WS Cengal – Batulicin, merupakan wilayah sungai kewenangan provinsi dengan luas wilayah $14.546,47$ Km², terdiri dari 62 Sub DAS dengan luas DAS terbesar adalah DAS Sampanahan.



3. WS Pulau Laut, merupakan wilayah sungai kewenangan kabupaten, dengan luas wilayah 2.023,76 Km², terdiri dari 71 Sub DAS.



Gambar 2.39 Wilayah Sungai di Kalimantan Selatan, a) WS Barito, b) WS Cengal – Batulicin, c) WS Pulau Laut

Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kondisi kestabilan pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk memberikan optimalisasi dalam pemenuhan infrastruktur dasar. Salah satu upaya pengelolaan adalah melalui pembangunan infrastruktur ketahanan kebencanaan yaitu pengelolaan pengendali daya rusak air sebagai salah satu upaya meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya bencana yang disebabkan oleh daya rusak air.

DAS Barito merupakan DAS terbesar di Kalimantan Selatan dengan luas sebesar 1.866.785 Ha atau 49,61% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. DAS ini terdiri dari 25 Sub DAS, dengan Sub DAS utama yaitu Sub DAS Barito Hilir Sub DAS Alalak Sub DAS Martapura Sub DAS Negara, Sub DAS Balangan Sub DAS Tabalong dan Sub DAS Batang Alai. Pada awal Tahun 2020, intensitas hujan yang tinggi sampai pada kategori ekstrim terjadi pada wilayah DAS Barito yang menyebabkan kenaikan genangan air dan kenaikan debit air sungai yang drastis, sehingga berdampak pada terjadinya banjir besar di 11 kabupaten/kota .

Pada DAS Cengal – Batulicin yang merupakan bagian dari WS kewenangan provinsi memiliki permasalahan dominan setiap tahunnya berupa kejadian banjir/genangan dengan ketinggian bervariasi pada wilayah hilir aliran sungai.



Adapun pada tahun 2019 kondisi banjir terparah terjadi di daerah Kecamatan Kusan Hulu yang mengalami genangan seluas 10.097 Ha, seperti yang terlihat pada Tabel 2-70.

Tabel 2.70 Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2019

Nama DAS	Luas DAS (Ha)	Genangan	
		Luas (Ha)	Kecamatan
DAS Swarangan	375,32	31,23	Jorong
DAS Asam-asam	512,83	1.371,08	Jorong, Batu Ampar
DAS Kintap	670,16	8.189,81	Jorong, Kintap
DAS Cuka	17,59	693,60	Satui
DAS Sebamban	337,96	3.760,37	Sungai Loban, Kuranji, Satui, Angsana
DAS Kusan	1.735,52	21.951,25	Sungai Loban, Kuranji, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Batulicin
DAS Batulicin	1.381,42	0,00	Mentewe, Batulicin, Simpang Empat, Karang Bintang
DAS Cantung	1.465,45	0,00	Kelumpang Hulu
DAS Sampanahan	1.791,97	0,00	Sungai Durian
DAS Cengal	1.177,74	0,00	Pamukan Utara, Pamukan Selatan
TOTAL	9.465,96	35.997,34	

Sumber: Kementerian PUPR, 2020

Adapun bentuk pengelolaan sumber daya air lainnya adalah terkait dengan pengelolaan irigasi dan daerah irigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Sedangkan, daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi dalam hal ini meliputi saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Adapun luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 995 DI/DIR dan luas total \pm 359.595 Ha,



dengan persentase 18,53% merupakan kewenangan pusat, 15,85% kewenangan provinsi, dan 55,62% merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.71 Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan Tahun 2019

Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Pusat	102.598	28,53%	23
Provinsi	57.003	15,85%	40
Kabupaten/Kota	199.989	55,62%	932
Total	359.595	100,00%	995

Sumber: Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III melaksanakan kegiatan *One Map* irigasi untuk mengidentifikasi kembali luas pengelolaan DI/DIR di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun luas DI/DIR berdasarkan hasil *One Map* irigasi sebesar ± 357.568 Ha. Adapun luas pembagian kewenangan DI/DIR disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.72 Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan *One Map* Irigasi pada Tahun 2019

Kewenangan	Luas Area (Ha)	Persentase	Jumlah DI/DR
Pusat	106.039	29,65%	22
Provinsi	56.295	15,74%	24
Kabupaten/Kota	195.234	54,60%	633
Total	357.568	100,00%	679

Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya kerusakan. Kerusakan irigasi ini antara lain disebabkan oleh usia infrastruktur irigasi, gangguan alam, maupun



pengelolaan irigasi yang kurang optimal. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena akan berdampak pada produksi pangan di Kalimantan Selatan.

Tabel 2.73 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019

Kewenangan	Utama	Tersier	Gabungan
Pusat	56,92	61,25	57,78
Provinsi	52,78	48,94	52,08

Sumber : ePAKSI, 2020

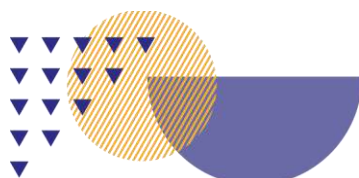
Sebagai upaya penyediaan sumber air baku di kabupaten/kota untuk menjaga keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih, diperlukan alternatif-alternatif penyediaan air baku, antara lain melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain bendungan/bendung, embung, dan tampungan-tampungan air lainnya.

C. Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

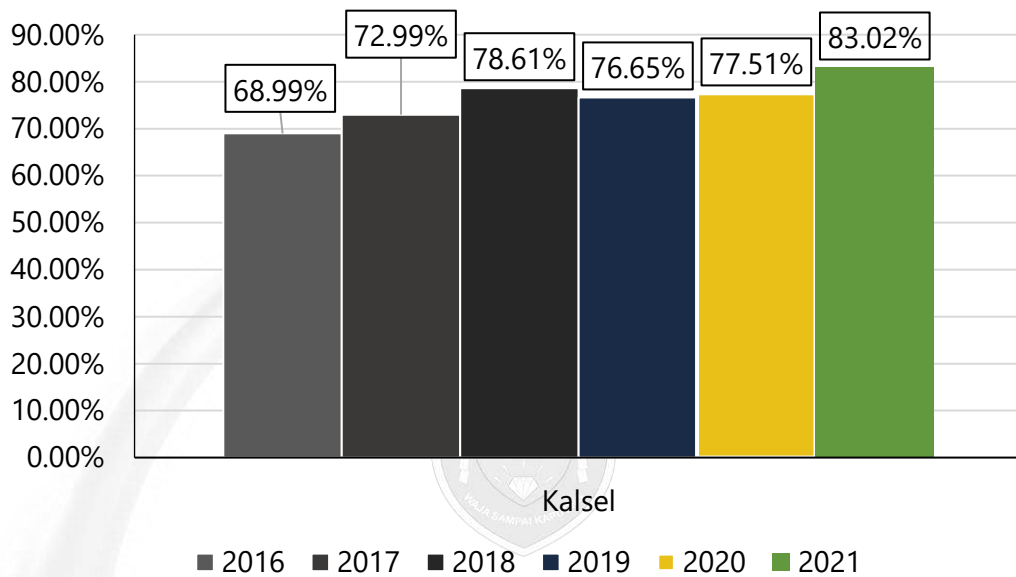
Penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan di Kalimantan Selatan mencakup pengelolaan pada skala provinsi dan skala kabupaten/kota. Adapun kondisi dan capaian pada masing-masing sektor ini adalah sebagai berikut:

- Pencapaian Akses Air Minum

Dalam rangka pencapaian *universal access* air minum, pemerintah pusat melalui RPJMN Tahun 2020 – 2024 telah menargetkan pencapaian air minum 100% pada Tahun 2024 untuk seluruh provinsi di Indonesia.



CAPAIAN AIR MINUM KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016 – 2021 (%)

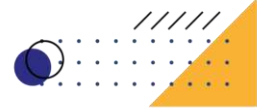


Gambar 2.40 Capaian Air Minum Kalimantan Selatan 2016 – 2021

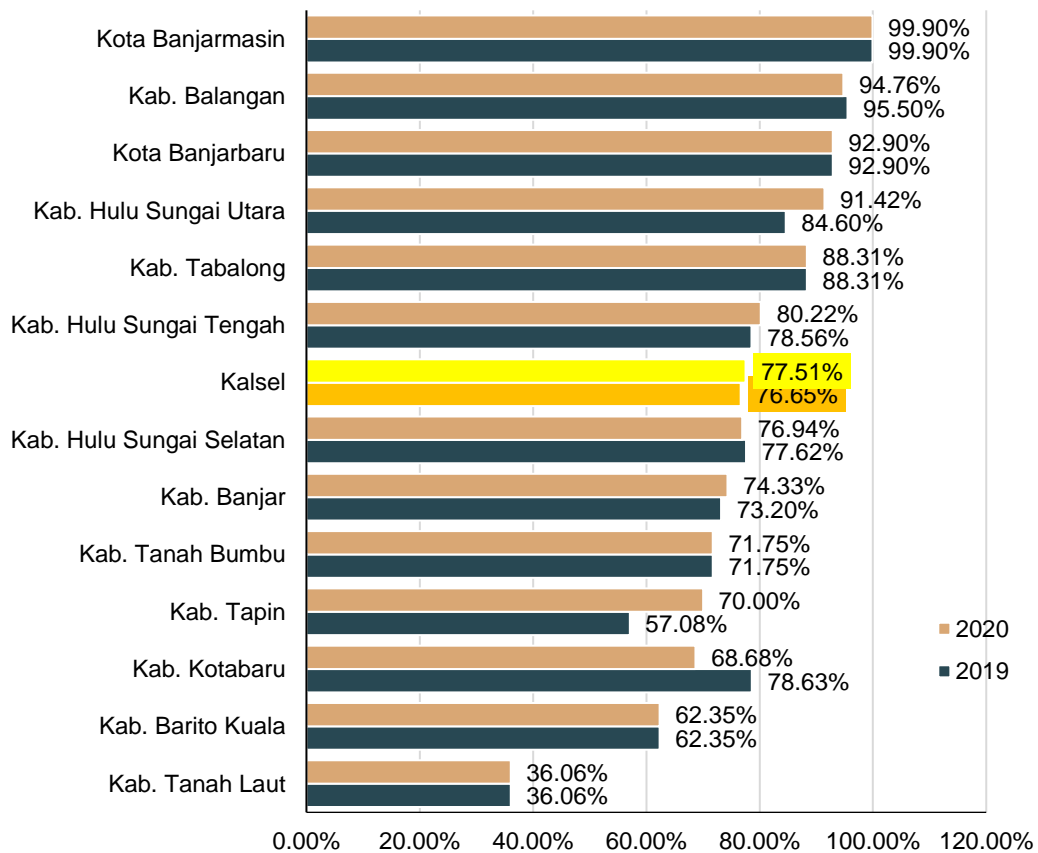
Sumber Data: Pamsimas dan Satu Wasaka Award, 2021

Berdasarkan Gambar II-40, capaian akses air minum Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 sebesar 76,65% dan tahun 2021 sebesar 83,02%, dimana capaian ini masih berada di bawah capaian nasional. Dari grafik dapat dilihat bahwa trend pencapaian akses air minum di Kalimantan Selatan menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, meskipun trend tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019.

Adapun capaian air minum kabupaten/kota pada tahun 2020 seperti disajikan pada Gambar II-27. Kota Banjarmasin sudah hampir mencapai 99,9% untuk akses air minum, diikuti Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru. Namun, masih ada 7 kabupaten yang capaiannya berada di bawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Bumbu, Tapin, Kotabaru, Barito Kuala, dan Tanah Laut.



CAPAIAN AIR MINUM KAB/KOTA SE-KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 dan 2020 (%)



Gambar 2.41 Capaian Air Minum Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2020

Sumber Data : Pamsimas dan Satu Wasaka Award, 2020

Adapun capaian air minum kabupaten/kota pada tahun 2020 seperti disajikan pada Gambar II-41. Kota Banjarmasin sudah hampir mencapai 99,9% untuk akses air minum, diikuti Kabupaten Balangan dan Kota Banjarbaru. Namun, masih ada 7 kabupaten yang capaiannya berada di bawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Banjar, Tanah Bumbu, Tapin, Kotabaru, Barito Kuala, dan Tanah Laut.

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengelola SPAM skala Regional pada kawasan metropolitan Banjarbakula. Dalam pelaksanaannya SPAM Banjarbakula telah membangun infrastruktur untuk kebutuhan air curah skala regional. Adapun infrastruktur yang terbangun sampai dengan saat ini dapat dilihat pada table berikut.



Tabel 2.74 Infrastruktur Penyediaan Air Minum di Provinsi Kalimantan Selatan

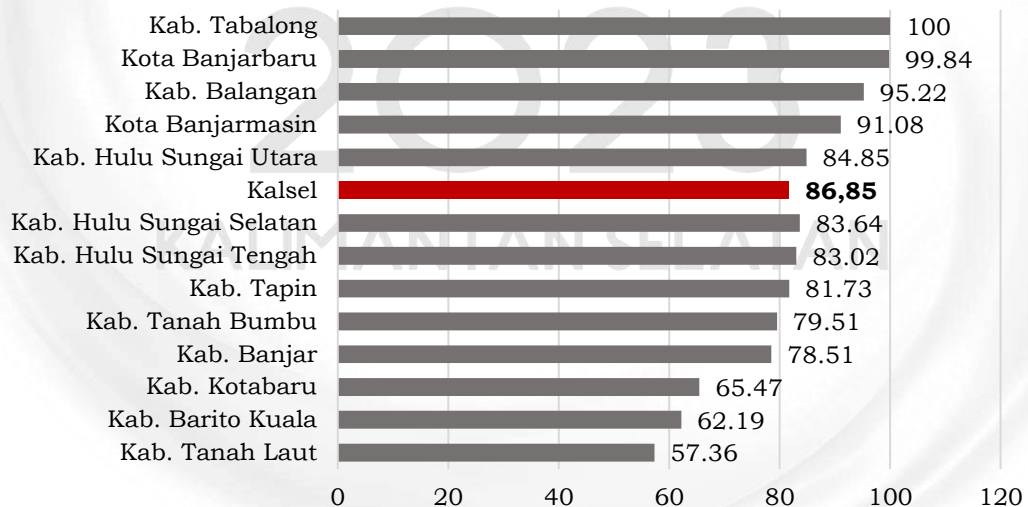
No	INFRASTRUKTUR	KAPASITAS
1	Intake Bendung Mandi Kapau	• 1200 L/detik
2	Pipa Transmisi	• Panjang 16,4 Km • Pipa Jenis HDPE Diameter 1206 mm
3	IPA II Pinus	• Tahap I : 250 L/detik • Tahap II : 500 L/detik
4	Reservoir di IPA II Pinus	• 2000 m ³

Sumber: Balai SPAM Banjarbakula, 2021

▪ Pencapaian Akses Sanitasi

Ruang lingkup sanitasi pada sektor pekerjaan umum meliputi pengelolaan limbah rumah tangga, sistem jaringan pengelolaan IPAL komunal, dan seterusnya. Pada sisi lingkungan, sanitasi juga terkait dengan persampahan mulai dari rumah tangga hingga TPST, dan lain-lain.

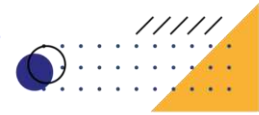
CAPAIAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK
TAHUN 2021 (%)



Gambar 2.42 Capaian Air Minum Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2021

Sumber Data : Pamsimas dan Satu Wasaka Award, 2022

Berdasarkan Gambar II-42, capaian akses air limbah domestik Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 86,85% dimana target, capaian ini masih berada di bawah capaian nasional. Dari grafik dapat dilihat bahwa trend



pencapaian akses air minum di Kalimantan Selatan menunjukkan perbaikan setiap tahunnya, meskipun trend tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019.

Khusus pada pencapaian cakupan air limbah domestik yang aman Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2021 sudah mendekati pencapaian target dari Nasional pada tahun 2024 sebesar 13%. Adapun kondisi pencapaian Kabupaten/Kota sebagai berikut :

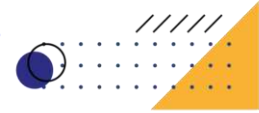
Tabel 2.75 Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE AKSES AMAN 2020 (%)
1	Banjarmasin	22,23
2	Banjar	6,13
3	Banjarbaru	6,41
4	Barito Kuala	2,4
5	Tanah Laut	1,23
6	Kotabaru	59,23
7	Balangan	1,23
8	Hulu Sungai Selatan	6,01
9	Hulu Sungai Utara	9,5
10	Hulu Sungai Tengah	8,92
11	Tapin	6,34
12	Tanah Bumbu	1,23
13	Tabalong	1,23
JUMLAH		10,16

Sumber: Data Capaian Akses Air Minum dan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

▪ **Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan**

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, antara lain adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan. Sehingga untuk melakukan pengelolaannya perlu didukung dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.



Tabel 2.76 Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2020

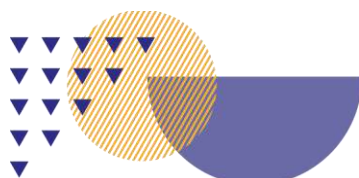
NO	KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN		TIDAK TERKELOLA
		TARGET	REALISASI	
1	Banjarmasin	97%	130%	0%
2	Banjarbaru	97%	98,96%	0,00%
3	Banjar	97%	97,44%	0,00%
4	Hulu Sungai Utara	97%	95,53%	1,47%
5	Tanah Bumbu	97%	97,46%	2,54%
6	Tabalong	97%	85,28%	14,72%
7	Hulu Sungai Tengah	97%	78,87%	18,13%
8	Balangan	97%	75,74%	24,26%
9	Barito Kuala	97%	73,35%	26,65%
10	Tapin	97%	70,35%	26,65%
11	Hulu Sungai Selatan	97%	69,46%	27,54%
12	Tanah Laut	97%	70,59%	29,41%
13	Kotabaru	97%	42,68%	57,32%
	Prov. Kalimantan Selatan	97%	80,18%	16,82%

Sumber : Pokja AMPL, 2020

Salah satu infrastruktur yang telah dibangun untuk mendukung akses persampahan adalah melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula yang merupakan pelayanan persampahan dengan sistem Sanitary Landfill yang melayani 2 Kota dan 3 Kabupaten yang tercakup di dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. TPA Regional Banjarbakula memiliki total luas area 32 Ha dan telah dikembangkan seluas 11 Ha. Kapasitas yang mampu ditampung oleh TPA ini sebesar 275 ton/hari. Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan persampahan terutama pada kawasan perkotaan Banjarbakula, direncanakan pembangunan incinerator.

D. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perkampungan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Data tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Jumlah bangunan gedung baik pemerintahan maupun yang non pemerintahan yang telah terbangun sampai saat ini berjumlah 32 bangunan.





Dan untuk memepertahankan bangunan gedung termasuk sarana prasaranya dalam kondisi baik Dinas PUPR telah melaksanakan pemeriharaan , rehabilitasi serta peningkatan sebanyak 67 bangunan.

Tabel 2.77 Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2018 sampai 2021

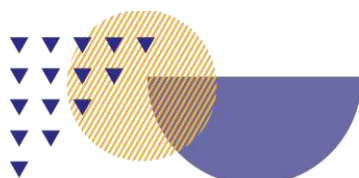
	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Pembangunan Baru	11	11	7	3
Rehabilitasi	9	18	6	34
Perencanaan	6	8	11	53

E. Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Pemerintah provinsi juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di wilayahnya, Sampai dengan tahun 2015 dari 13 Kabupaten/Kota yang telah menjadi Peraturan Daerah sebanyak 10 Kabupaten/kota dan masih terdapat 3 Kabupaten/Kota yang belum membuat peraturan daerah.





Pada Tahun 2020, RTRWP Kalimantan Selatan memasuki masa revisi dan pada Tahun 2021 masih dalam proses revisi, karena harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengacu sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

Tabel 2.78 Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan

No.	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Perda	Status
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	Perda Nomor 9 Tahun 2015	Persiapan
2.	Kota Banjarmasin	Perda Nomor 15 Tahun 2013	Proses Revisi
3.	Kota Banjarbaru	Perda Nomor 13 Tahun 2014	Proses Revisi
4.	Kabupaten Banjar	Perda Nomor 4 Tahun 2021	Perda
5.	Kabupaten Barito Kuala	Perda Nomor 6 Tahun 2012	Persiapan
6.	Kabupaten Tanah Laut	Perda Nomor 3 Tahun 2016	Perda
7.	Kabupaten Tanah Bumbu	Perda Nomor 5 Tahun 2017	Perda
8.	Kabupaten Kotabaru	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Proses Revisi
9.	Kabupaten Tabalong	Perda Nomor 19 Tahun 2014	Proses Rekomendasi Gubernur
10.	Kabupaten Balangan	Perda Nomor 24 Tahun 2013	Persiapan
11.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perda Nomor 12 Tahun 2012	Proses Revisi
12.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Perda Nomor 13 Tahun 2016	Perda
13.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Perda Nomor 3 Tahun 2014	Persiapan
14.	Kabupaten Tapin	Perda Nomor 10 Tahun 2014	Proses Revisi

F. Bina Konstruksi

Tantangan dunia jasa konstruksi adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dan berkualitas, sehingga diperlukan pengaturan, pemberdayaan serta pengawasan yang ketat dalam pelaku jasa konstruksi.

Pembinaan Jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan infrastruktur untuk meningkatkan mutu, standar dan fungsi serta meningkatkan Daya saing Tenaga Kerja Konstruksi terutama di Kalimantan Selatan.

Jumlah rata-rata paket pekerjaan konstruksi di pemerintahan se Kalimantan selatan 5.767 paket kegiatan, bila diasumsikan 1 pekerjaan konstruksi memerlukan 3 orang tenaga dengan lama pekerjaan 6 bulan maka diasumsikan dibutuhkan tenaga ahli sebanyak 8.651 orang, berdasarkan data LPJK (tahun 2020) Jumlah tenaga Ahli 1.158 Orang baik madya maupun muda yang terbagi dalam berbagai bidang keahlian, sedangkan tenaga terampil sebanyak 8.133



orang. Data terakhir yang terhimpun jumlah tenaga ahli jasa konstruksi di Kalimantan selatan sebanyak 879 orang pada tahun 2021.

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

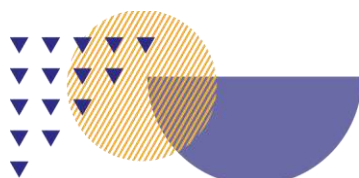
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

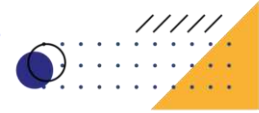
Tabel 2.79 Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Kewenangan Penanganan

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUASAN KUMUH (HA)			SUMBER DATA
		Kewenangan Kab./Kota (< 10 Ha)	Kewenangan Provinsi (10 - 15 Ha)	Kewenangan Pusat (> 15 Ha)	
1	Barito Kuala	23,8	186,64	19,21	SK Kumuh Tahun 2017
2	Banjarmasin	153,42	73,55	322,73	SK Kumuh Tahun 2015
3	Banjarbaru	26,7	59,01	147,01	SK Kumuh Tahun 2018
4	Banjar	115,76	60,08	430,6	SK Kumuh Tahun 2013
5	Tapin	14,62	12	-	SK Kumuh Tahun 2016
6	Hulu Sungai Selatan	7,266	54	31,72	SK Kumuh Tahun 2014
7	Hulu Sungai Tengah	13,72	47,82	20,91	SK Kumuh Tahun 2018
8	Hulu Sungai Utara	27,33	55,53	40,59	SK Kumuh Tahun 2017
9	Balangan	8,71	27,11	-	SK Kumuh Tahun 2014
10	Tabalong	120,63	129,4	49,041	SK Kumuh Tahun 2018
11	Tanah Laut	64,73	141,2	-	SK Kumuh Tahun 2018
12	Tanah Bumbu	34,11	68,88	119,05	SK Kumuh Tahun 2014
13	Kotabaru	18,49	48,99	-	SK Kumuh Tahun 2018
JUMLAH TOTAL : 2.774,36		629,29	964,21	1.180,86	

Sumber Data : SK Kumuh Kab./Kota dan Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan

Dalam pelaksanaannya dilakukan review terhadap kondisi kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 10-15 Ha. Terjadi pengurangan luasan kumuh sampai dengan tahun 2021 sebagai baseline dalam pelaksanaan





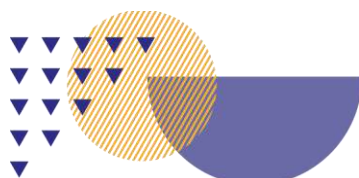
tahun – tahun berikutnya. Adapun data luasan kawasan permukiman dan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.80 Data Luasan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan

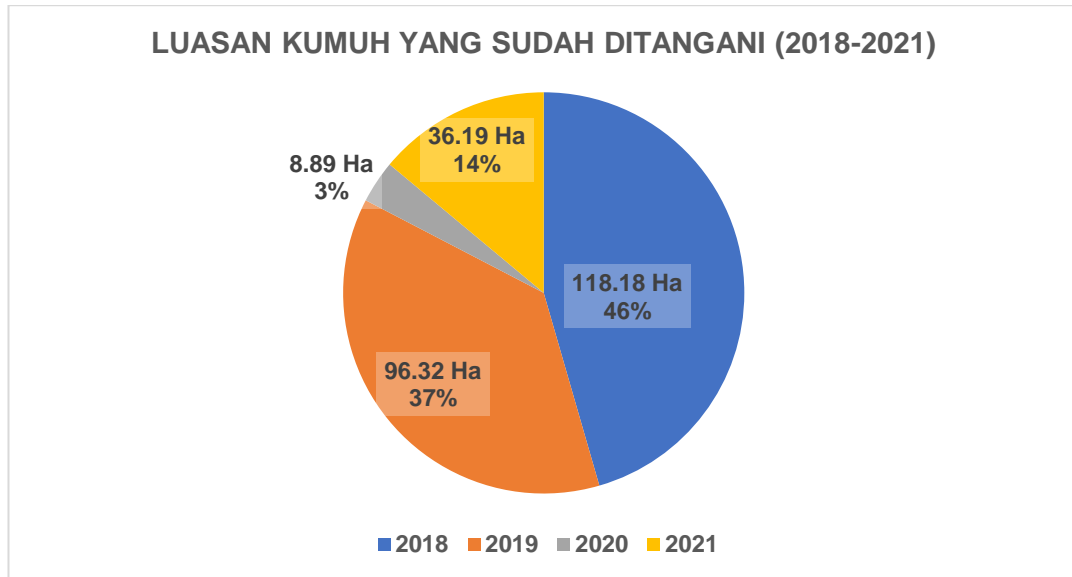
NO.	KAB./ KOTA	LUASA KAWASAN PERMUKIMAN PROV. KALSEL	LUASAN KUMUH KEWENANGAN PROVINSI (UPDATE)	CAPAIAN KUMULATIF DARI TAHUN 2017-2021	LUASAN KUMUH TARGET TAHUN 2022 S/D 2026	SISA TARGET KUMUH
1	Tanah Laut	27.870,13	33,93	28,84	33,84	0,09
2	Kotabaru	15.499,66	35,54	12,64	22,64	12,90
3	Banjar	5.369,45	92,67	24,52	35,25	57,42
4	Barito Kuala	6.529,42	60,77	34,48	34,48	26,29
5	Tapin	3.588,21	23,11	7,86	17,16	5,95
6	Hulu Sungai Selatan	4.316,51	64,50	24,14	35,14	29,36
7	Hulu Sungai Tengah	1.998,05	80,28	13,13	16,13	64,15
8	Hulu Sungai Utara	2.677,00	66,11	23,5	25,50	40,61
9	Tabalong	18.373,02	148,69	27,15	63,15	85,54
10	Tanah Bumbu	6.964,59	94,16	20,71	38,71	55,45
11	Balangan	5.310,77	14,85	19,11	10,60	4,25
12	Banjarmasin	4.006,27	41,46	16,1	40,50	0,96
13	Banjarbaru	3.642,35	35,44	7,4	7,40	28,04
	TOTAL (H A)	106.145,43	791,51	259,58	380,50	411,01

Sumber : Sumber Data : Renstra Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2022

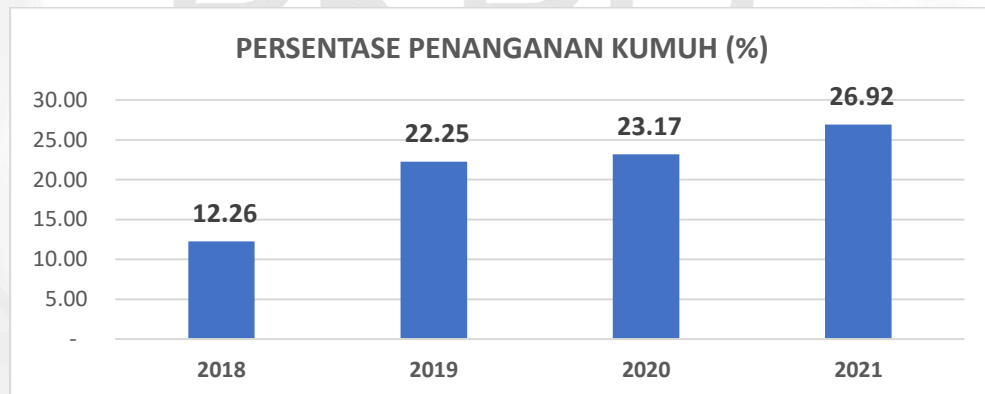
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha yang menjadi



kewenangan Provinsi sampai dengan tahun 2021 sudah mencapai 259,58 Ha, yang masih perlu ditangani sebesar 380,50 Ha.



Gambar 2.43 Data Luasan Kumuh yang Sudah di Tangani Tahun (2018–2021)
(Sumber Data: Renstra Dinas PRKP Prov. Kalsel tahun 2022)



Gambar 2.44 Persentase Penganganan Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018-2021

Rumah tidak layak huni atau yang biasa disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni. Biasanya, RTLH memiliki konstruksi bangunannya tidak handal, luasnya tidak sesuai standar hunian per orang, serta tidak menyehatkan dan/atau membahayakan bagi penghuninya. Dari data TNP2K sebagai acuan dalam penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2021 telah menangani sebanyak 32.102 unit dari total RTLH yang terdata sebanyak 76.023 unit. Data tersaji sebagai berikut :

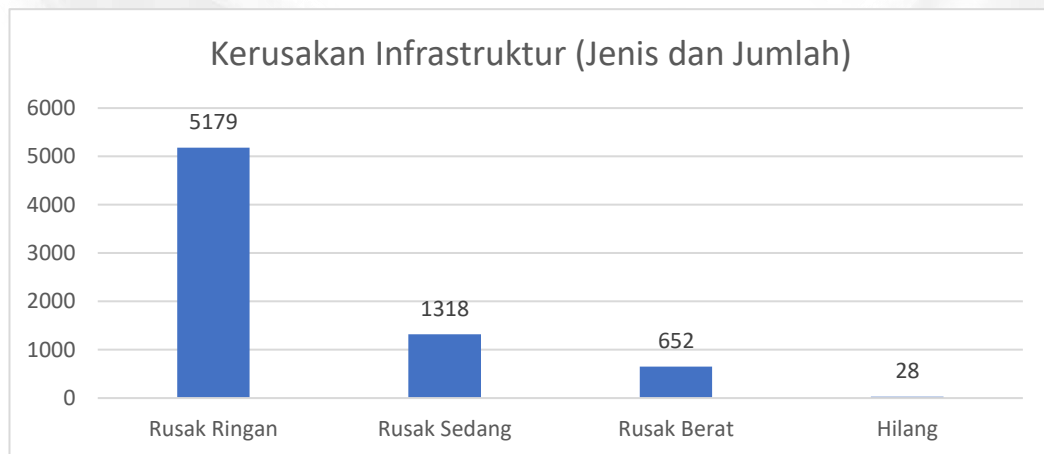


Tabel 2.81 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/Kota	Data Base	Jenis Penanganan					Jumlah 2015-2021	Sisa Penanganan
			BSPS	DAK	APBD I	APBD II	CSR		
1	Barito Kuala	12.035	1.467	1.127	94	519	-	3.207	8.828
2	Banjarmasin	6.352	1.504	147	18	-	6	1.675	4.677
3	Banjarbaru	1.212	200	250	72	179	-	701	511
4	Banjar	7.861	3.067	1.006	7	9	-	4.089	3.772
5	Tapin	1.725	998	65	59	9	-	1.131	594
6	Hulu Sungai Selatan	12.816	1.837	1.372	6	2.703	-	5.918	6.898
7	Hulu Sungai Tengah	9.523	2.544	1.48	250	1.115	2	5.391	4.132
8	Hulu Sungai Utara	3.621	485	345	40	109	-	979	2.642
9	Balangan	6.099	1.733	56	553	154	1	2.497	3.602
10	Tabalong	3.77	1.506	141	17	205	-	1.869	1.901
11	Tanah Laut	2.406	971	170	573	239	-	1.953	453
12	Tanah Bumbu	4.385	904	10	56	13	-	983	3.402
13	Kotabaru	4.218	927	561	17	204	-	1.709	2.509
	KALSEL	76.023	18.143	6.73	1.762	5.458	9	32.102	43.921

Sumber Data : Renstra Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2022

Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terkait urusan perumahan menangani perumahan terdampak bencana atau relokasi akibat program Pemerintah. Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 mengalami bencana banjir skala Provinsi yaitu bencana banjir yang mengakibatkan perumahan mengalami kerusakan. Data yang terekam terkait SPM adalah sebesar 7.177 unit rumah. Adapun pembagian kerusakan tersaji dalam gambar berikut :



Gambar 2.45 Kerusakan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Selatan





Sumber Data : Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan

Penanganan kerusakan perumahan terdampak banjir dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan.

Selain penanganan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh juga dilaksanakan penangan Prasaran Sarana Umum di Kawasan permukiman diluar Kawasan kumuh. Sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan penanganan PSU yang rata-rata adalah penangan jalan lingkungan. Data pelaksanaan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82 Penangan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

No	KABUPATEN/KOTA	JENIS KOMPONEN	SATUAN (Meter)	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DITANGANI (Unit)
1	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2018 s.d. 2019	Jalan	15.221,5	3.050
2	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2020	Jalan dan PSU	2.053,4	433
3	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2021	Jalan	3.908,52	867
TOTAL			21.183,42	4.350

Sumber: Disperkim Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. telah menunjukkan kemajuan. meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi saat ini sudah dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah. seperti yang terlihat pada Tabel 2-84.

Tabel 2.83 Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tindak pidana	7.336	8.036	7.021	6.275	5.870



Jumlah tindak pidana yang diselesaikan	6.011	6.350	5.250	5.511	4.780
Persentase tindak pidana diselesaikan	81,94	79,02	74,77	87,82	81,43
Jumlah resiko terkena tindak pidana	179	251	301		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2022

Tabel 2.84 Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017-2022 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
2	Menurunnya ancaman kriminal di prov. Kalimantan Selatan	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya peran Satlinmas dan Damkar	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang memperoleh	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2022

Tabel 2.85 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kelas Risiko
1	Tanah Laut	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	Tinggi
2	Banjar	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	Tinggi
3	Kotabaru	205,20	158,79	158,79	158,79	158,79	158,79	Tinggi
4	Tanah Bumbu	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	Tinggi
5	Barito Kuala	190,00	179,68	179,68	155,45	155,45	155,45	Tinggi
6	Hulu Sungai Selatan	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	Tinggi
7	Tabalong	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	Tinggi
8	Tapin	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	Sedang
9	Hulu Sungai Tengah	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	Sedang
10	Balangan	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	139,89	Sedang
11	Hulu Sungai Utara	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	Sedang
12	Banjarbaru	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	Sedang
13	Banjarmasin	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	Sedang
	Kalimantan Selatan	151,60	147,31	147,31	145,37	145,37	144,81	Tinggi

Sumber: BNPB (publish buku IRBI)



Tabel 2.86 Capaian Kinerja Urusan BPBD Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah kejadian bencana	%	0	0	82,61	82,61	100
2	Persentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang memperoleh informasi peringatan dinibencana	%	100	100	100	100	97,78
3	Persentase rencana Pemulihan Pasca Bencana yang berhasil direalisasikan	%	0	100	98,04	95	96,30
4	Persentase peningkatan informasi kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana kebakaran	%	100	0	0	0	0

Sumber: BPBD Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.1.6 Sosial

Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai program yang dikembangkan seperti peningkatan kapasitas pelayanan sosial dalam panti maupun di luar panti. pengembangan program Pembangunan Keluarga Harapan. pengembangan keberdayaan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Perkembangan penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat baik itu terkait anak/orang tua terlantar hingga tunawisma dapat dilihat dari perkembangan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Tabel 2-74 di mana terjadi peningkatan jumlah korban penyalahgunaan NAPZA. jumlah penderita HIV/AIDS. korban tindak kekerasan. korban bencana alam. fakir miskin dan jumlah keluarga bermasalah psikologis.

Tabel 2.87 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2017-2021

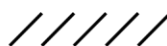
Bentuk Partispasi Masyarakat	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Anak Balita Terlantar	1.071	749	749	471	491
Anak Terlantar	9.039	6.882	6.882	8.822	4.419
Anak yang berhadapan dengan hukum	325	138	138	135	128
Anak Jalanan	134	121	121	163	163
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	838	1.568	1.568	1.533	1.823
Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan	57	22	22	30	70

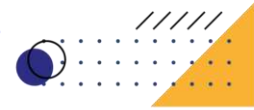


Bentuk Partisipasi Masyarakat	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	20	47	47	32	3.171
Lanjut Usia Terlanjar	29.048	25.731	25.731	67.740	44.284
Penyandang Disabilitas	14.986	15.678	15.678	14.097	11.392
Tuna Susila	654	162	162	68	88
Gelandangan	169	87	87	145	93
Pengemis	439	170	170	159	241
Pemulung	510	126	126	667	637
Kelompok Minoritas	12	22	22	30	123
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	1.408	1.094	1.094	731	667
Orang dengan HIV/AIDS	13	816	816	378	260
Korban Penyalahgunaan NAPZA	936	891	891	578	343
Korban Trafficking	1	-	-	-	7
Korban Tindak Kekerasan	133	97	97	38	80
Pekerjaan Migran Bermasalah Sosial	4	-	-	-	74
Korban Bencana Alam	19.119	17.123	17.123	23.187	789.607
Korban Bencana Sosial	1.383	122	122	949	5.592
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	16.296	23.187	23.187	12.971	33.582
Fakir Miskin	84.787	84.765	84.765	418.734	359.066
Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	7.832	1.143	1.143	187	2.928
Komunitas Adat Terpencil	5.409	659	659	8.546	8.194
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan	66.581	5.403	56.757	124.902	424.477
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	114.890	105.566	95.816	92.509	6.142
Jumlah	376.094	292.369	333.973	777.802	1.267.523

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2022

Jika melihat tabel diatas. terjadi peningkatan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2016. terdapat sebanyak 194.623 jiwa meningkat menjadi 295.000 jiwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di mana sebagian besar permasalahan merupakan permasalahan keluarga fakir miskin sebanyak 188.954 jiwa dan diikuti oleh permasalahan penduduk lanjut usia yang terlanjar sebanyak 29.001 jiwa dan korban bencana alam sebanyak 25.507 jiwa.

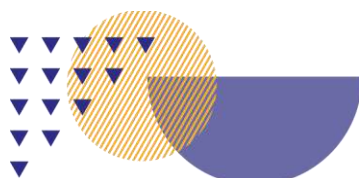




Tabel 2.88 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2017-2021 Provinsi Kalimantan Selatan

Bentuk Partisipasi Masyarakat	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Anak Balita Terlantar	1.071	749	749	471	491
Anak Terlantar	9.039	6.882	6.882	8.822	4.419
Anak yang berhadapan dengan hukum	325	138	138	135	128
Anak Jalanan	134	121	121	163	163
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	838	1.568	1.568	1.533	1.823
Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan	57	22	22	30	70
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	20	47	47	32	3.171
Lanjut Usia Terlantar	29.048	25.731	25.731	67.740	44.284
Penyandang Disabilitas	14.986	15.678	15.678	14.097	11.392
Tuna Susila	654	162	162	68	88
Gelandangan	169	87	87	145	93
Pengemis	439	170	170	159	241
Pemulung	510	126	126	667	637
Kelompok Minoritas	12	22	22	30	123
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	1.408	1.094	1.094	731	667
Orang dengan HIV/AIDS	13	816	816	378	260
Korban Penyalahgunaan NAPZA	936	891	891	578	343
Korban Trafficking	1	-	-	-	7
Korban Tindak Kekerasan	133	97	97	38	80
Pekerjaan Migran Bermasalah Sosial	4	-	-	-	74
Korban Bencana Alam	19.119	17.123	17.123	23.187	789.607
Korban Bencana Sosial	1.383	122	122	949	5.592
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	16.296	23.187	23.187	12.971	33.582
Fakir Miskin	84.787	84.765	84.765	418.734	359.066
Keluarga bermasalah Sosial Psikologis	7.832	1.143	1.143	187	2.928
Komunitas Adat Terpencil	5.409	659	659	8.546	8.194
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan	66.581	5.403	56.757	124.902	424.477
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	114.890	105.566	95.816	92.509	6.142
Jumlah	376.094	292.369	333.973	777.802	1.267.523

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan 2021

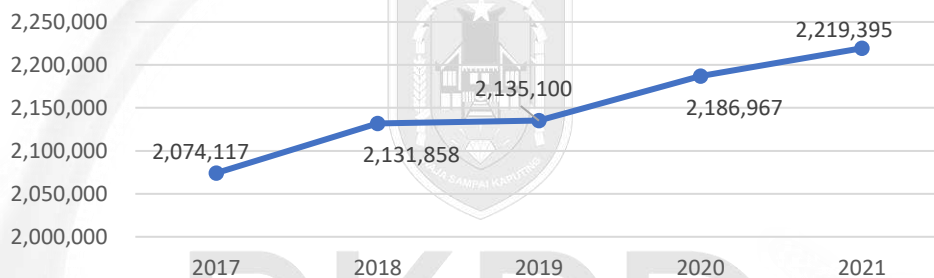




2.3.1.2 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan fokus pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja. Berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (PAK). dan menekan usia penduduk usia 15 tahun hingga 24 tahun masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar II.46 dan Tabel 2-89.

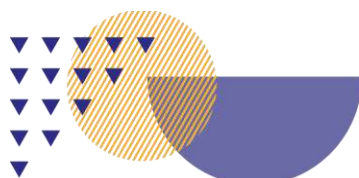


Gambar 2.46 Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan. 2017-2021

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara konsisten dari tahun 2017-2021 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.074.117 jiwa meningkat pada tahun 2021 menjadi sebanyak 2.219.395 jiwa. Terjadi peningkatan sebanyak 145.278 jiwa selama kurun waktu tahun 2017-2021. atau tumbuh rata-rata sebesar 50 ribu jiwa per tahunnya. Meskipun demikian pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan yang tidak terlalu besar yaitu dari 2.131.858 jiwa menjadi 2.135.100 jiwa dan pertumbuhan cukup kecil yaitu 3.242 jiwa Periode Agustus dari tahun 2018-2019.

Jika dilihat perkembangan kabupaten/kota. maka angkatan kerja terbanyak ada di Kota Banjarmasin yang mencapai 341.335 jiwa pada tahun 2021. kemudian Kabupaten Banjar dengan 315.484 jiwa dan Kabupaten Barito Kuala dengan 176.573 jiwa. sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Balangan dengan 72.475 jiwa. kemudian Kabupaten Tapin dengan jumlah 102.432 jiwa. dan Kota Banjarbaru dengan 135.115 jiwa. Lebih lanjut gambaran berikut ini adalah perkembangan angkatan kerja Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021.





Tabel 2.89 Perkembangan Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	160.165	162.348	171.565	181.827	185.049
Kota Baru	157.340	163.498	161.409	157.363	166.820
Banjar	296.654	301.194	309.609	318.377	315.484
Barito Kuala	169.242	177.257	169.540	172.056	176.573
Tapin	98.027	96.890	98.115	100.696	102.432
HSS	120.898	123.949	124.906	129.734	124.003
HST	144.426	146.855	140.332	144.168	143.604
HSU	117.988	118.105	117.284	121.288	124.971
Tabalong	131.890	136.373	129.924	129.928	136.032
Tanah Bumbu	161.867	164.725	170.814	194.029	195.502
Balangan	70.841	70.364	66.621	72.717	72.475
Banjarmasin	334.296	336.792	346.184	331.562	341.335
Banjarbaru	110.483	118.594	122.163	133.222	135.115
Kalimantan Selatan	2.074.117	2.116.944	2.128.466	2.186.967	2.219.395

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2022

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan pemberdayaan perempuan sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu penyetaraan gender merupakan bentuk kebijakan yang berupaya untuk diterapkan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa permasalahan gender yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Selatan adalah terjadinya gap yang besar antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat upah yang diukur dengan pengeluaran riil. di mana rata-rata penghasilan perempuan masih sekitar 50% nya dari rata-rata penghasilan laki-laki. Kondisi ini konsisten terjadi dari tahun 2011 hingga tahun 2020 dan bahkan cenderung makin melebar selisihnya. sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2-90.

Tabel 2.90 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Selatan 2011-2020

Tahun	Uraian	AHH	AHLS (th)	RRLS	Peng Riil%	Nilai IPG
2011	Perempuan	65,48	-	7,1	3.447	88,09
	Laki-Laki	69,34	-	8,1	6.553	



Tahun	Uraian	AHH	AHLS (th)	RRLS	Peng Riil%	Nilai IPG
2012	Perempuan	65,58	-	7,2	3.448	88,33
	Laki-Laki	69,45	-	8,16	6.552	
2013	Perempuan	65,76	-	7,3	5.886	88,33
	Laki-Laki	61,96	-	8,27	12.979	
2014	Perempuan	73,31	12,12	7,5	7.888	88,46
	Laki-Laki	69,40	11,81	8,38	16.311	
2015	Perempuan	73,55	12,10	7,65	8.668	88,55
	Laki-Laki	69,60	11,90	8,53	16.544	
2016	Perempuan	69,84	12,41	7,40	8.403	88,86
	Laki-Laki	65,92	12,16	8,38	17.107	
2017	Perempuan	69,95	12,42	7,52	8.564	88,60
	Laki-Laki	65,98	12,53	8,45	17.402	
2018	Perempuan	70,19	12,43	7,53	8.867	88,61
	Laki-Laki	66,16	12,69	8,46	17.938	
2019	Perempuan	70,45	12,51	7,70	8.986	88,61
	Laki-Laki	66,55	12,70	8,68	18.204	
2020	Perempuan	70,62	12,67	7,88	8.777	88,86
	Laki-Laki	66,76	12,71	8,7	17.969	

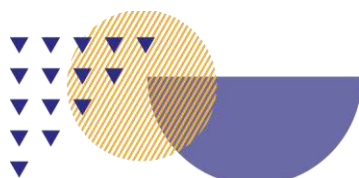
Sumber: DPPPA Anak Prov. Kalimantan Selatan 2021

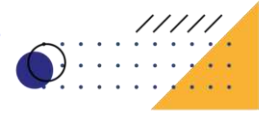
Sementara dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2012-2020 mengalami kecenderungan yang meningkat. meskipun pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan dengan angka 71,31 menjadi 74,60. namun masih jauh berada dari kondisi tahun 2016 yang sebesar 67,56. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2-92.

Tabel 2.91 Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2020

IDG	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perempuan di parlemen (%)	13,13	16,36	14,55	15,10	-	16,36	18,18	20,00	19,59
Perempuan Pekerja Profesional/Teknisi / Kepemimpinan/ Ketatalaksanaan (%)	43,23	42,16	44,32	44,95	-	67,00			
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja (%)	35,43	36,35	34,90	35,25	-	64,36			62,06
IDG	68,40	65,60	68,22	70,05	67,40	67,56	71,31	74,60	

Sumber: DPPPA Prov. Kalimantan Selatan 2020





Perkembangan angka indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender yang terus meningkat disebabkan dengan adanya ketersediaan layanan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas berbagai bentuk lembaga sesuai dengan Tabel 2-93.

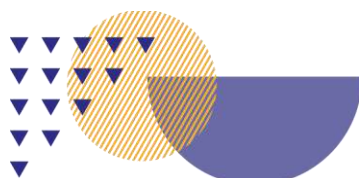
Tabel 2.92 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016 - 2020

Lembaga Penyedia Layanan PPPA	2016	2017	2018	2019	2020
UPPA	-	-	-	14	3
P2TP2A	14	14	14	14	9
WCC	-	-	-	1	-
LBH	-	-	9	11	11
Puskesmas	-	-	-	230	-
RPSA	-	-	-	16	-
Kejaksaan	14	14	14	14	14
Pengendalian	14	14	14	14	14
BP4	-	-	-	153	-
PIK Keluarga	-	-	-	217	-
RS	-	-	-	17	-
RPTC	-	-	-	1	1
LPA	2	2	5	5	5
Ruman Aman	-	-	-	2	2

Sumber: DPPPA Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.93 Capaian Kinerja Urusan DPPPA Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	88,86	88,6	88,61	88,61	88,86
2	IDG	Indeks	67,40	67,56	71,31	74,6	74,48
3	Persentase Pernikahan Anak	%	22,26	23,12	17,63	21,18	16,24
4	Persentase Anggaran Responsif Gender di Provinsi Kalimantan Selatan	%	N/A	N/A	N/A	3	4
5	Persentase perempuan yang duduk di lembaga legislatif	%	N/A	12,73	16,36	20	20
6	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) Perempuan	%	N/A	N/A	N/A	55	62,06
7	Persentase Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	%	20		30	N/A	N/A
8	Persentase Kelembagaan Gender dan Anak	%			50	N/A	N/A





NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Persentase Perempuan yang Duduk di Lembaga Legislatif	%			69	N/A	N/A
10	IKM (Indikator Kepuasan Masyarakat) tentang Lembaga Pelayanan P2TP2A	%	76	80	72,09	N/A	N/A
11	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%					70

Sumber: DPPPProv. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.3 Pangan

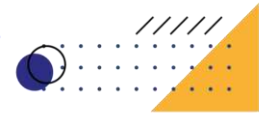
Berdasarkan data dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat bahwa untuk produksi pangan secara keseluruhan mengalami peningkatan. Produksi tanaman pangan meningkat menjadi 1.298.223 ton. produksi daging dari tahun 2017 sampai 2021 meningkat menjadi 79.706,85 ton. produksi telur menurun dibanding 2021 menjadi 108.242,94 ton. Produksi susu menurun dibanding 2021 sebesar 72.950,17 ton. Lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 2-94.

Tabel 2.94 Produksi Pangan Utama di Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Peningkatan produksi	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tanaman Pangan	Ton	2.452.366	1.922.795	2.116.367	1.556.560	1.298.223
Daging	Ton/Th	92.481,40	98.931,80	84.422.01	79.129,83	79.706,85
Telur	Ton/Th	113.376,62	122.231,82	102.269.52	114.882,40	108.242,94
Susu	liter/Th	112.411,80	252.009,00	202.271.00	111.635,87	72.950,17
Ikan Lokal	Ton/Th	155.054,00	3.990,69	349.94	-	-
Ikan Nila	Ton/Th	239.277,50	24.489,60	407.24	-	-
Ikan Tangkap	Ton	253,90	262,15	212.649.43	-	-

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Prov. Kalimantan Selatan 2022

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. melalui program kemandirian pangan. peningkatan ketahanan pangan dapat dilihat dari jumlah lumbung pangan yang tersebar di 11 Kabupaten di Kalimantan Selatan adalah sebanyak 129 lumbung pangan. desa yang sudah mandiri pangan di Kalimantan Selatan sebanyak 194 desa. dan jumlah cadangan pangan sebanyak 173.190 kg.



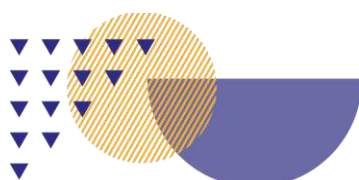
Tabel 2.95 Capaian Kinerja Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan desa rawan pangan yang menjadi desa mandiri pangan	%	-	1,57	5,15	3,77	4,19
2	Persentase Peningkatan lumbung pangan masyarakat	%	-	2,86	4,76	3,05	4,09
3	Koefisien variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen	< ... %	-	8	1,81	5,72	7,94
4	Penurunan konsumsi beras	kg/kap/thn	-	97	93,8	94,66	96,1
5	Peningkatan konsumsi pangan lokal	kg/kap/thn	-	9,6	13,1	11,7	19,25
6	Persentase komoditas pangan yang aman dikonsumsi	%	-	86,59	94,29	80	81,36
7	Persentase Peningkatan Desa Mandiri Pangan	%	-	1,57	5,15	3,77	4,19
8	Persentase Peningkatan lumbung pangan masyarakat	%	-	2,86	4,76	3,05	4,09
9	Peningkatan skor PPH Ketersediaan	Skor	-	81,28	86,5	85,1	86,3
10	Penurunan Konsumsi Beras	kg/kap/thn	-	97	93,8	94,66	96,1
11	Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal	kg/kap/thn	-	9,6	13,1	11,7	19,25
12	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	%	-	86,59	94,29	80	81,36

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.4 *Lingkungan Hidup*

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling pengaruh mempengaruhi. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, aktifitas yang dilakukan manusia terhadap alam selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan itu sendiri. Tingginya laju pertumbuhan penduduk, membuat kebutuhan akan penyokong kehidupan semakin tinggi, sebagai contoh adalah kebutuhan akan





ruang. Hal ini menimbulkan terjadinya perubahan atau dampak terhadap kondisi lingkungan hidup.

Menurunnya kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk. Hal yang sering sulit untuk dijawab adalah apakah kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi baik, sedang, atau buruk. Sejak tahun 2009, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. Berikut ini klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka indeks lingkungan hidup.

Tabel 2.96 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
SANGAT BAIK	$90 \leq x < 100$
BAIK	$70 \leq x < 90$
SEDANG	$50 \leq x < 70$
KURANG	$25 \leq x < 50$
SANGAT KURANG	$0 \leq x < 25$

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasarkan pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Kategori penjelasan kualitatif ini dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami bagi publik. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan hidup.

Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.97 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Jenis	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kualitas LH	58,74	62,07	61,47	61,94	68,43	71,03



Tutupan Lahan	44	49,21	49,29	46,78	48,48	50.26
Kualitas Air	51,56	52,25	51,43	55,31	51,67	54.75
Kualitas Udara	85,60	89,02	87,75	88,78	88,93	89.15

Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2022

Pada tahun 2019 terjadi kabut asap di Kalimantan Selatan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, dari data pengukuran ISPU tahun 2019 di Kota Banjarmasin dan Kab. Banjar untuk Status ISPU masuk dalam kategori sedang dan Tidak Sehat. Sedangkan dari data hasil pemantauan dengan metode manual aktif 1 jam di beberapa Kab/Kota jika untuk hasil pemantauan parameter SO₂ dan NO₂ tahun 2021,2020 dan 2019 berfluktuatif naik dan turun namun tetap memenuhi Baku Mutu/Ambang Batas Sesuai peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien atau PP RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengukuran ISPU pada tahun 2020 mengacu pada peraturan terbaru yaitu Permen LH Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Standar Pencemar Udara dengan Kategori sebagai berikut :

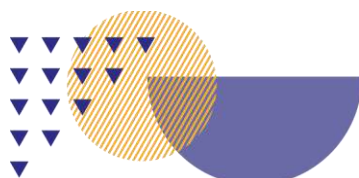
Tabel 2.98 Parameter Status Pencemar Udara Tahun 2020

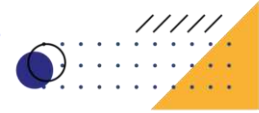
Kategori	Angka Rentang
Baik	1 – 50
Sedang	52 – 100
Tidak Sehat	101 – 200
Sangat Tidak Sehat	201 – 300
Berbahaya	≥ 300

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Menurut Laporan Inventarisasi GRK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, analisis kategori kunci yang mempengaruhi emisi GRK di Kalimantan Selatan pada total agregat terdiri dari 13 sub-sektor, yaitu:

- a. Sisa hutan (FLRemaining)
- b. Pembangkit listrik,
- c. Produksi kapur (Lime Production),
- d. Dekomposisi gambut,
- e. Transportasi,
- f. Lahan dikonversi ke lahan pertanian (Land Converted to CL),





- g. Produksi semen (Cement Production),
- h. Lahan dikonversi ke lainnya (Land Converted to OL Mineral),
- i. Emisi N₂O langsung dari tanah yang dikelola (Direct N₂O Emissions from Managed Soils),
- j. Penambangan dan penanganan batubara bawah tanah dan permukaan (Underground and surface coal mining and handling),
- k. Sisa lahan pertanian (CL Remaining CL Mineral),
- l. Budidaya padi emisi CH₄ dari padi (Rice Cultivation CH₄ Emission from Rice), dan
- m. Emisi N₂O tidak langsung dari tanah yang dikelola (Indirect N₂O Emissions from Managed Soils).

Data perubahan emisi GRK yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2016 s.d 2020 terlampir di dalam table II.100.

Tabel 2.99 Perubahan Emisi GRK Tahun 2016-2020 di Kalimantan Selatan

	2016	2017	2018	2019	2020
Historis (Gg CO ₂ -eq)	16.429	17.168	16.983	15.564	-
BAU (Gg CO ₂ -eq)	18.238	19.250	20.317	21.571	22.971
Mitigasi (Gg CO ₂ -eq)	17.003	17.476	17.984	18.583	19.182
Realisasi penurunan dari masing-masing sektor					
Energi	-4,0%	-4,0%	-5,7%	-7,6%	-
Pertanian	-19,0%	-19,3%	-32,4%	-34,2%	-
Kehutanan	-18,6%	-24,7%	-31,6%	-118,3%	-
Limbah	-14,0%	-16,9%	-23,8%	-26,5%	-
Agregat	-9,9%	-10,8%	-16,4%	-27,8%	-

Sumber: Laporan Inventarisasi GRK Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan emisi GRK terutama pada tahun 2019, dipicu oleh perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan di masa mendatang berkontribusi sangat penting dalam hal penurunan emisi GRK agregat di Kalimantan Selatan.

Ekosistem gambut menjadi isu penting dalam permasalahan Perubahan tutupan lahan, sehubungan nilai dan fungsi lingkungannya antara lain sebagai pengendali perubahan iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Gambut Indonesia menyimpan karbon sebesar 46 GT (atau 46x10⁹ ton), sehingga memiliki peran yang cukup besar sebagai penjaga iklim

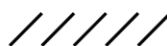
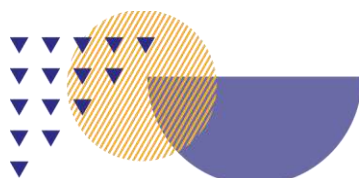


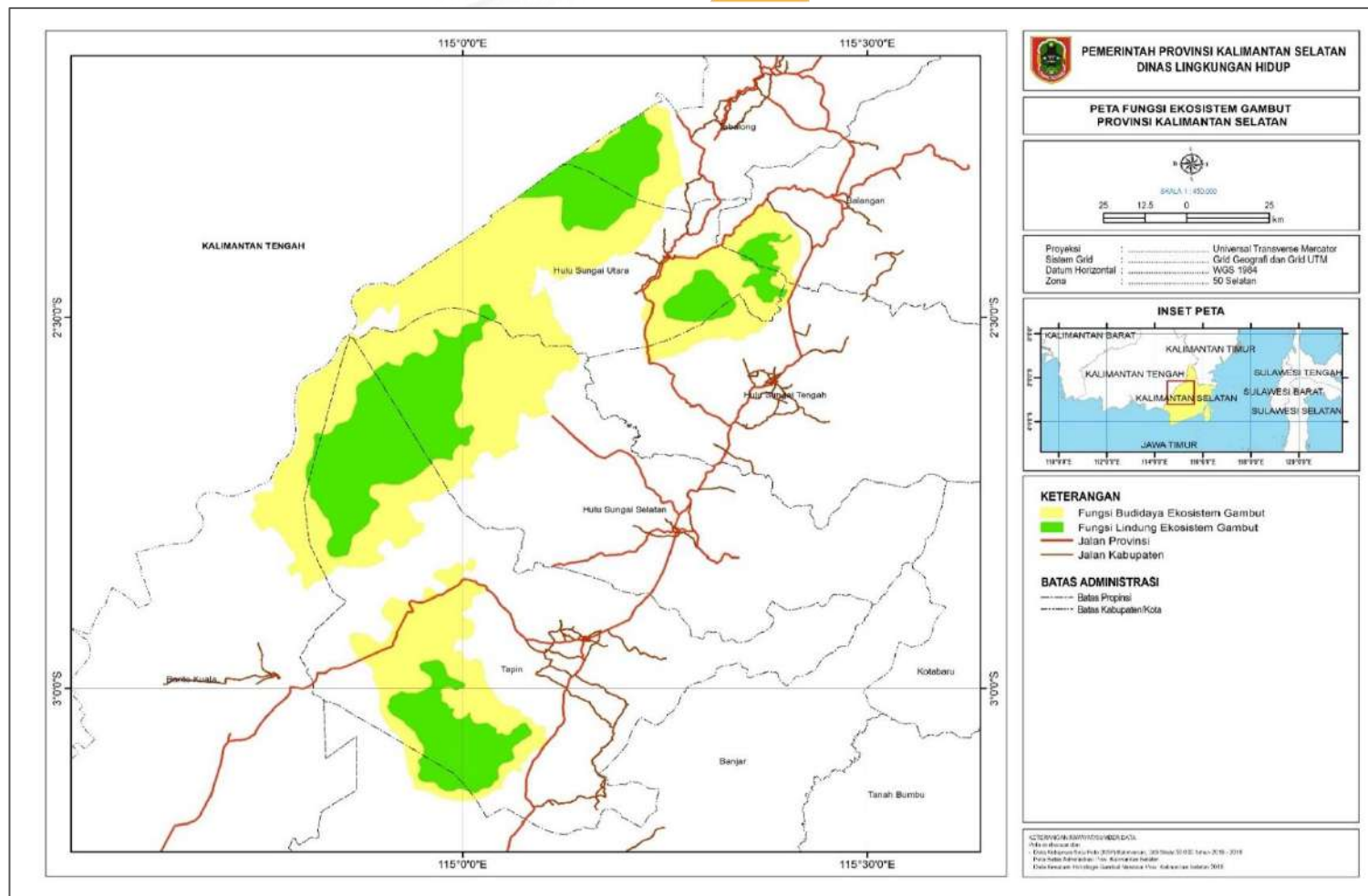
global. Ekosistem gambut merupakan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) apabila gambut terekspose atau terbakar menghasilkan gas CO₂, N₂O, dan CH₄ yang sangat kuat menyumbang terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Indonesia termasuk negara yang berkomitmen untuk melakukan penurunan tingkat emisi GRK 29% dengan sukarela atau 41% dengan kerjasama bilateral, di antaranya dari gambut antara 9,5-13,0% (Noor, 2010).

Secara spasial sebaran fungsi ekosistem gambut berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar II-47.



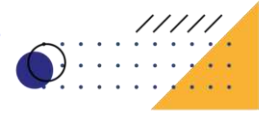
RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN





Gambar 2.47 Peta Fungsi ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan





Kawasan ekosistem gambut ditentukan berdasar pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut. Kawasan ini memiliki fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Gambut.

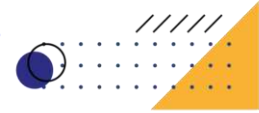
KHG di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi luas 238.609 hektar. Keseluruhan KHG, yang masuk ke dalam fungsi lindung sekitar 80.691 hektar (34%) dan fungsi budidaya sekitar 157.918 hektar (66%). Dengan demikian, maka seluruh ekosistem gambut yang masuk ke dalam kawasan KHG selain berupa tanah gambut, bergambut, dan juga tanah mineral masuk dalam areal KHG.

Tabel 2.100 Luas dan Sebaran Indikator Fungsi Ekosistem Gambut per Kabupaten

Kabupaten	Fungsi Ekosistem Gambut		Jumlah (ha)
	Fungsi Budidaya	Fungsi Lindung	
Balangan	5.090	1.999	7.089
Banjarnegara	1.997	1.810	3.808
Barito Kuala	14.325	467	14.792
Hulu Sungai Selatan	29.266	15.335	44.601
Hulu Sungai Tengah	5.541	633	6.174
Hulu Sungai Utara	51.385	14.909	66.294
Tabalong	5.172	8.074	13.246
Tapin	45.140	37.464	82.604
Jumlah	157.918	80.691	238.609

Sumber: KLHK, 2020

Reduksi emisi karbon menjadi isu utama dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam bidang mitigasi yang memiliki target total reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 29%-41%. Ekosistem Gambut menjadi penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca, khususnya karbon karena diperkirakan lahan gambut dapat menyimpan 550 giga ton karbon, atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut. Juga diperkirakan 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut, dan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis, bahkan untuk kondisi ekosistem yang masih berupa hutan alam.



Sebaran indikasi status kerusakan Ekosistem Gambut di tiap provinsi, baik pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya dapat dilihat pada Gambar 7 serta Tabel 2-102 dan Tabel 2-103.

Tabel 2.101 Sebaran Status Kerusakan Pada Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

Kabupaten	Fungsi Budidaya					Jumlah
	Tidak Rusak	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Sangat Berat	
Balangan	-	3.911,67	983,76	194,81	-	5.090,24
Banjar	-	194,94	478,45	959,11	364,94	1.997,43
Barito Kuala	44,60	12.209,50	1.895,02	176,02	-	14.325,14
Hulu Sungai Selatan	148,84	19.586,70	8.035,94	1.495,01	-	29.266,49
Hulu Sungai Tengah	-	4.026,90	1.514,59	-	-	5.541,49
Hulu Sungai Utara	225,31	48.149,85	2.656,10	346,99	7,05	51.385,31
Tabalong	1,57	5.114,62	55,49	-	-	5.171,68
Tapin	226,85	24.900,59	14.643,71	5.205,38	163,57	45.140,10
Jumlah	647,17	118.094,77	30.263,06	8.377,32	535,57	157.917,89

Sumber : KLHK, 2021

Tabel 2.102 Sebaran Status Kerusakan Pada Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut

Kabupaten	Fungsi Lindung				Jumlah
	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Sangat Berat	
Balangan	775,10	726,61	489,67	7,71	1.999,09
Banjar	292,40	483,08	885,35	149,33	1.810,15
Barito Kuala	237,30	56,61	173,30	-	467,22
Hulu Sungai Selatan	8.821,26	5.069,19	1.444,53	-	15.334,98
Hulu Sungai Tengah	399,80	233,18	-	-	632,98
Hulu Sungai Utara	11.069,28	3.678,03	161,35	-	14.908,66
Tabalong	7.591,96	481,90	-	-	8.073,86
Tapin	17.503,06	14.476,34	5.435,48	49,21	37.464,08
Jumlah	46.690,17	25.204,93	8.589,68	206,25	80.691,02

Sumber : KLHK, 2021

Kebakaran menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Selatan. Luas lahan gambut yang terbakar pada 2015 > 18.000 ha. Kebakaran menurun tajam pada tahun 2016- 2018 karena faktor kemarau basah. Akibat pengaruh kemarau panjang tahun 2019 terjadi peningkatan. Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan menyebutkan luas kebakaran hutan dan lahan pada 2019 mencapai 7.800 ha (2.400 hektare diantaranya adalah lahan gambut). Kementerian Lingkungan Hidup dan



Kehutanan yang menyebut luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan tahun 2019 lebih dari 10.000 ha.

Ekosistem Gambut memiliki beberapa isu pokok yang menjadi perhatian para pihak baik pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Isu pokok lingkungan untuk Ekosistem Gambut yaitu penyimpanan stok karbon, penyangga sistem hidrologi, keanekaragaman hayati. Isu strategis tambahan dari ekosistem gambut khususnya di Kalimantan Selatan adalah sebagai Kawasan penopang kehidupan sosial ekonomi masyarakat

1. Penyimpanan Stok Karbon

Reduksi emisi karbon menjadi isu utama dalam pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam bidang mitigasi yang memiliki target total reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 29%-41%. Ekosistem Gambut menjadi penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca, khususnya karbon karena diperkirakan lahan gambut dapat menyimpan 550 giga ton karbon, atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut. Juga diperkirakan 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut, dan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis, bahkan untuk kondisi ekosistem yang masih berupa hutan alam.

2. Penyangga Sistem Hidrologis

Keberadaan dan kondisi Ekosistem Gambut memiliki keterkaitan dengan keseimbangan sistem hidrologi keseluruhan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) maupun sistem hidrologi terestrial. Ekosistem Gambut terbentuk di daerah rawa yang pada umumnya merupakan posisi peralihan antara ekosistem daratan dan ekosistem perairan. Di Indonesia keberadaan Ekosistem Gambut sebagian besar terdapat di lahan rawa dataran rendah di sepanjang pantai, sehingga gangguan yang terjadi pada Ekosistem Gambut akan berpengaruh terhadap sistem hidrologi sungai, rawa, dan pantai antara lain dalam menyimpan air. Selain itu tentu saja sistem hidrologis Ekosistem Gambut menjadi penyangga flora dan fauna beserta habitatnya.

3. Keanekaragaman Hayati

Tidak kurang dari 50 jenis pohon sudah teridentifikasi di hutan alam Ekosistem Gambut, dan beberapa diantaranya mulai dilindungi karena hampir



habis karena penebangan hutan untuk berbagai kepentingan. Ekosistem Gambut juga menyediakan berbagai hasil hutan non-kayu seperti getah, rotan, madu, buah-buahan hutan, tanaman hias, serta bahan baku obat-obatan. Berbagai pohon dan tumbuhan bawah juga menyediakan berbagai sumber pangan bagi satwa liar. Berbagai jenis fauna juga terdapat di Ekosistem Gambut, tercatat 35 jenis mamalia, 150 jenis burung, dan 35 spesies ikan ditemukan di Ekosistem Gambut.

Ditemukan kelimpahan amfibi dan reptile serta biota perairan seperti plankton dan benthos yang merupakan indikator pencemaran perairan. Secara khusus, juga terdapat sejumlah spesies endemik yang hanya dapat tumbuh di Ekosistem Gambut. Beberapa fauna di Kawasan ekosistem gambut Kalimantan Selatan termasuk dalam spesies yang dilindungi, seperti orangutan, bekantan, berang-berang, elang, musang air dan beruang madu.

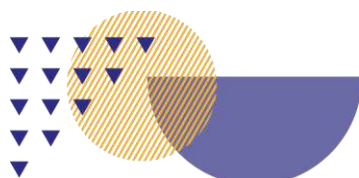
Kualitas tutupan lahan Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori sedang, hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas tutupan lahan dengan nilai 48,48. dengan trend nilai sebagai berikut.

Tabel 2.103 Kondisi Tutupan Lahan di Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Jenis	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tutupan Lahan	44	49,21	49,29	46,78	48,48

Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2021

Berdasarkan laporan dari KLHK Tahun 2018, Lahan kritis di Kalimantan Selatan mencapai 511.495 Hektar dan dalam kurun waktu tiga tahun (Tahun 2020) luas lahan kritis di Kalimantan Selatan sudah turun menjadi sekitar 500 ribu hektar. Penurunan luas lahan kritis ini berpengaruh pada peningkatan nilai IKL Kalsel yang naik dari 46.78 poin menjadi 48.48 pada tahun 2020. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama Tahun 2018 – 2020 dalam mengelola dan menghidupkan Kembali lahan-lahan kritis, terutama dengan Gerakan Revolusi Hijau yang di gaungkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Selain itu banyak juga upaya-upaya sinergis yang turut dilakukan oleh SKPD lain dalam rangka pengelolaan lahan terganggu, termasuk lahan gambut yang juga banyak tersebar pada lahan basah di Kalimantan Selatan.





Isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan adalah Pengelolaan persampahan dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) , Kualitas Air Sungai yang Rendah, Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat, potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal, Potensi Kerusakan Ekosistem Mangrove dan terumbu karang diwilayah pesisir serta Perubahan Iklim

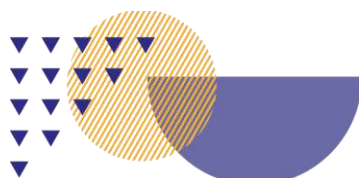
A. Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

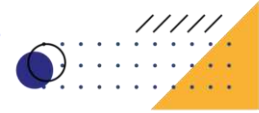
Permasalahan sampah di provinsi kalimantan selatan sudah dilaksanakan sesuai Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kalimantan Selatan (JAKSTRADA) namun demikian upaya -upaya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan masih belum optimal, berdasarkan data SIPSN pada tahun 2021 target pengelolaan sampah kalimantan selatan 97% dengan realisasi 78,31%.

Target Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tahun 2021 sebesar 24% dengan realisasi 14,57%. kondisi ini dapat terlihat di lapangan sampah masih berserakan pada wilayah tertentu yang ini memerlukan peran serta masyarakat didalam pengelolaan sampah. Sedangkan target Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga sebesar 74% dengan realisasi 63,74%, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

Sebagaimana data SIPSN Potensi timbulan sampah tahun 2021 di Provinsi Kalimantan selatan sebanyak 320.220,74Ton/Tahun,dengan Jumlah pengurangan sampah sebanyak 46.666,46 Ton/Tahun melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, sampah termanfaatkan di sumber sampah dan sampah didaur ulang di sumber.

Kegiatan Pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 14,57%, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Indikator kedua pada kinerja kedua mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase penanganan sampah rumah tangga





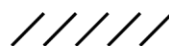
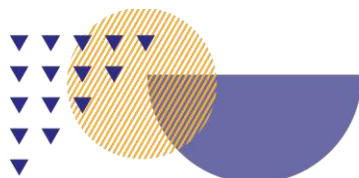
dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 63,74 %, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masalah persampahan di Kalimantan Selatan setiap tahun selalu mendapat perhatian penting mengingat perkembangan pembangunan dan ekonomi Kalimantan Selatan yang cenderung meningkat sehingga memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan berusaha di Kalimantan Selatan. Adanya urbanisasi dan peningkatan penduduk pada akhirnya akan menimbulkan masalah sampah. Berbagai upaya dan inovasi telah dilakukan selama Tahun 2020 meskipun kondisi pandemi Covid-19 menjadikan tekanan terhadap kinerja pengelolaan persampahan.

Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia. Limbah infeksius dari penanganan Covid-19 harus dikelola dan dilaporkan sesuai diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri LHK Tanggal 12 Maret 2021 revisi dari SE.2/MENLHK/PSLB3 /PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Covid-19. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah infeksius dari penanganan pasien dengan penyakit menular dikhawatirkan menjadi sumber penularan penyakit bagi pasien, petugas, dan masyarakat sekitar.

Menghadapi kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada permasalahan limbah B3 medis dan limbah infeksius seperti berupa masker, sarung tangan, perban, alat suntik, set infus bekas dan lainlain, tercatat timbulan limbah B3 medis pada tahun 2021 sejumlah 287.526,26 kg. Hal ini mengharuskan adanya penanganan khusus limbah B3 medis. Penanganan terhadap limbah infeksius telah dilakukan oleh berbagai rumah sakit, puskesmas, dan tempat karantina dibawah pengawasan dari DLH Provinsi Kalimantan Selatan untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan di insenerator dan Sebagian dikirim kepada pihak ketiga yang telah memiliki izin mengelola LB3, yaitu PT Balikpapan Environmental Services (PT BES). Untuk penanganan limbah B3 covid-19 sendiri dikelola melalui fasyakes yang memiliki izin operasional insinerator yang ada pada RSUD Ulin, Ansyari Saleh, RSUD Balangan, RSUD Tanah Bumbu dan RS Ciputra.

Kalimantan Selatan belum memiliki usaha jasa pengolahan Limbah B3 yg memiliki





perizinan berusaha untuk pengolahan Limbah B3, sehingga diluar dari keberadaan insenerator di RSUD maka untuk limbah B3 non medis dikelola dengan mengirim LB3 ke penyedia jasa yang ada di pulau Jawa dan Balikpapan. Kondisi ini tentu menyedot keuangan daerah, Selain itu tentu beresiko berdampak pencemaran lingkungan dari proses pengangkutan atau telatnya Limbah B3 utk di kelola. Dalam hal penanganan Limbah B3 medis, kab/ kota di Kalimantan Selatan belum memiliki sarana depo penyimpanan untuk menyimpan Limbah B3 dari berbagai fasyankes, padahal depo ini sangat penting untuk bisa menekan biaya pengangkutan LB3



RKPD 2023

KALIMANTAN SELATAN





Tabel 2.104 Timbulan Limbah Covid 19 Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

NO	KABUPATEN /KOTA	TIMBULAN LIMBAH COVID - 19 (Kg)												TOTAL
		Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
1	HST				111	1055	1242	820	1097	1748	1475			7548
2	Barito Kuala			24,7	23	917	3021	1000	1193,5	788	397,1	766		8130.3
3	Tanah Bumbu				1580,3		3549	1547,3	1364	1211	1211			10462.6
4	Balangan			30	40		238	622,92						930.92
5	Kotabaru				144									144
6	HSS				195,5		853	2265	4618	6339	4010	2791		21071.5
7	Tanah Laut				10	935								945
8	Banjarmasin	54634	14210,6	16236,4										85081
9	HSU													0
10	Banjarbaru				25									25
11	Tapin	1905	1722	1978			2006	1531	671	440,4	511	427	199,9	11391.3
12	Tabalong	4256	4256	4259	22,5	746,5	1360	1735		1296	1165	0,782	1713	20.809.782
13	Banjar	5733,9	5342,9	4605,4	213	381,7	2	1,5	1,5					16281.9
JUMLAH		66528.9	25531,5	27133,5	2364,3	4035,2	12271	9522,72	8945	11822,4	8769,1	3,984,782	1912,9	182821,3
TOTAL		182821,3												

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan





Tabel 2.105 Timbulan Limbah Covid 19 Provinsi Kalimantan Selatan s.d Bulan Oktober 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	TIMBULAN LIMBAH COVID - 19 (Kg)										
		Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	
1	HST	277	242,5	760	699	306,5	207,51		2922	3118		
2	Barito Kuala	420,3	787,6	801,7	262,2	335,2	340,1	596	586,7	337,6		
3	Tanah Bumbu	755,35	709	790	547,85				1470	786		
4	Balangan	972,04	917,44	1546,15	1068,12	627,46	940,91	1947	2345	2133		
5	Kotabaru	5118,82	5725,28	7063,11								
6	HSS	6131	3978	4769						2463,7	948	
7	Tanah Laut	5088	4427	5033,5	6449,5		1525	6355				
8	Banjarmasin	18664	20078	18130	16184	10542	544,85	1535	6537	12309,7	3113,2	
9	HSU	1085,4					5477					
10	Banjarbaru	12,612							43490	1236		
11	Tapin	2492,8	13,2	141,1	45,5	171,4	114,8	68	303,6	99,7		
12	Tabalong	1172	0,91						2943	381	97	
13	Banjar	2363,5	2167	3399,5	3153	2350	1859	5115	4498	8,35		
	JUMLAH	44.552.822	39045,93	42434,06	28409,17	14332,56	11009,17	15616	65095,3	22873,05	4158,2	
	TOTAL	287.526.26										

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan





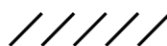
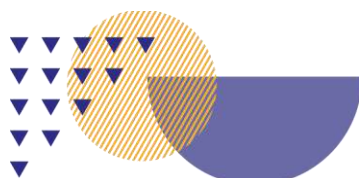
B. Kualitas Air Sungai Yang Rendah

Hasil pemantauan kualitas air sungai provinsi Kalimantan Selatan tahap pertama pada bulan Maret-April Tahun 2021 pada 38 titik pantau, ditemukan parameter-parameter yang dominan tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan pemerintah RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI untuk Kelas I antara lain BOD, Fecal coli, Total coliform, DO, COD, TSS, CI bebas, dan Besi (Fe). Parameter lain yang tidak memenuhi baku mutu antara lain : H₂S, Fenol, Sianida (CN), pH, Mangan (Mn). Jika dibandingkan dengan baku mutu Kelas I, maka 63,16 % kualitas air sungai di Provinsi Kalimantan Selatan tergolong dalam cemar sedang dan 36, 84% dalam status cemar ringan.



RKPD
2023

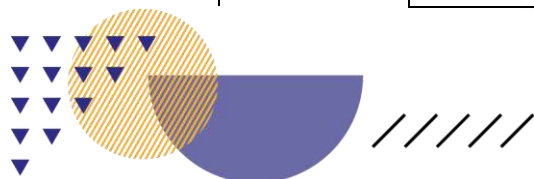
KALIMANTAN SELATAN





Tabel 2.106 Tabel Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel Tahun 2021

No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap I	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap II	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Rata-rata
1	Martapura	Kab. Banjar	1. Desa Tambak Anyar Ilir	Cemar Ringan (4,62)	Cemar Ringan (4,15)	Cemar Ringan (4,39)
			2. Desa Sungai Rangas	Cemar Ringan (4,05)	Cemar Ringan (2,95)	Cemar Ringan (3,50)
			3. Desa Sungai Lulut	Cemar Ringan (4,18)	Cemar Ringan (2,09)	Cemar Ringan (3,14)
		Kota Banjarmasin	4. Desa Basirih	Cemar Ringan (4,58)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (4,13)
2	Irigasi	Kab. Banjar	1. Desa Sungai Landas	Cemar Ringan (4,54)	Cemar Ringan (2,06)	Cemar Ringan (3,30)
		Kota Banjarbaru	2. Intake PDAM	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (3,39)	Cemar Ringan (3,98)
		Kab. Banjar	3. Desa Sungai Tabuk Keramat	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,26)	Cemar Ringan (3,81)
3	Riam Kanan	Kab. Banjar	1. Desa Pingaran Ulu	Cemar Ringan (4,41)	Cemar Ringan (4,59)	Cemar Ringan (4,50)
4	Riam Kiwa	Kab. Banjar	1. Desa Astambul Kota	Cemar Ringan (4,56)	Cemar Ringan (3,15)	Cemar Ringan (3,86)
5	Negara	Kab. H.S.Utara	1. Desa Jarang Kuantan	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (3,56)	Cemar Ringan (3,38)
			2. Desa Teluk Mesjid	Cemar Ringan (3,58)	Cemar Ringan (3,59)	Cemar Ringan (3,59)
		Kab. H. S.Selatan	1. Desa Hakurung	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (2,92)	Cemar Ringan (3,05)
			2. Desa Tumbukan Banyu	Cemar Ringan (2,98)	Cemar Ringan (4,27)	Cemar Ringan (3,63)
			3. Desa Bajayau-Daha	Memenuhi (0,76)	Cemar Ringan (3,36)	Cemar Ringan (2,06)
		Kab. Tapin	1. Desa Margasari	Cemar Ringan (2,43)	Cemar Ringan (2,45)	Cemar Ringan (2,44)
2. Desa Sei. Puting	Cemar Ringan (3,89)		Cemar Ringan (0,78)	Cemar Ringan (2,34)		
3. Desa Keladan	Cemar Ringan (3,10)		Cemar Ringan (1,20)	Cemar Ringan (2,15)		
6	Tapin	Kab. Tapin	1. Desa Baringin A	Cemar Ringan (3,19)	Cemar Ringan (1,82)	Cemar Ringan (2,51)
7	Barabai	Kab. H.S.Tengah	1. Desa Bulayak	Cemar Ringan (4,82)	Cemar Ringan (4,67)	Cemar Ringan (4,75)
			2. Desa Pajukungan	Cemar Ringan (3,20)	Cemar Ringan (4,48)	Cemar Ringan (3,84)
			3. Desa Kasarangan	Cemar Ringan (3,29)	Cemar Ringan (4,36)	Cemar Ringan (3,83)





No	Nama Sungai	Kab/Kota	Lokasi sampel	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap I	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Tahap II	Status Mutu dan Nilai Indeks Pencemar Rata-rata
			4.Des. Tabat	Cemar Ringan (2,70)	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (3,35)
8	Amandit	Kab. H.S. Selatan	1. Desa Muning Baru	Cemar Ringan (3,65)	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (3,42)
9	Tabanio	Kab. Tanah Laut	1.Intake PDAM Desa Bajuin	Cemar Ringan (4,84)	Cemar Ringan (4,57)	Cemar Ringan (4,71)
			2.Des. Angsau	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (4,83)	Cemar Ringan (4,28)
			3.Des. Panjaratan	Cemar Ringan (4,87)	Cemar Ringan (3,79)	Cemar Ringan (4,33)
10	Balangan	Kab. Balangan	1.Des. Tabuan	Cemar Ringan (2,88)	Cemar Ringan (3,60)	Cemar Ringan (3,24)
			2.Des. Kapul	Cemar Ringan (4,00)	Cemar Ringan (4,02)	Cemar Ringan (4,01)
			3.Des. Paringin Kota	Cemar Ringan (3,48)	Cemar Ringan (3,67)	Cemar Ringan (3,58)
11	Tabalong	Kab. Tabalong	1.Des. Suput	Cemar Ringan (2,89)	Cemar Ringan (2,28)	Cemar Ringan (2,59)
			2.Des. Pamarangan Kiwa	Cemar Ringan (2,76)	Cemar Ringan (2,58)	Cemar Ringan (2,67)
			3.Des. Halangan	Cemar Ringan (2,25)	Cemar Ringan (3,62)	Cemar Ringan (2,94)
12	Batulicin	Kab. Tanah Bumbu	1.Des. Sela Selilau	Cemar Ringan (4,21)	Cemar Ringan (1,83)	Cemar Ringan (3,02)
			2. Desa Karang Bintang	Cemar Ringan (3,64)	Cemar Ringan (2,13)	Cemar Ringan (2,89)
			3. Desa Maju Makmur	Cemar Ringan (3,85)	Cemar Ringan (1,93)	Cemar Ringan (2,89)
13	Cantung	Kab. Kotabaru	1. Desa Banua Lawas	Cemar Ringan (3,51)	Cemar Ringan (3,69)	Cemar Ringan (3,60)
			2.Des. Sungai Kupang	Cemar Ringan (2,80)	Memenuhi (0,997)	Cemar Ringan (1,90)
			3. Desa Karang Payau	Cemar Ringan (3,00)	Cemar Ringan (3,72)	Cemar Ringan (3,36)





Berdasarkan tabel diatas, dapat disajikan gambaran persentase titik pantau yang tidak memenuhi baku mutu beserta indikasi sumber pencemarnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.107 Parameter Indeks Kualitas Air (IKA)

No.	Parameter	Peruntukan	Persentase (%)		Indikasi Sumber Pencemar
			Tahap I	Tahap II	
1	Fecal coli *	Kelas I	94,74	100	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia
		Kelas II	42,11	81,58	
2	Total coliform	Kelas I	94,74	100	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia, kotoran hewan ternak lainnya, jasad makhluk hidup seperti burung mati, serta bakteri dari limbah rumah tangga
		Kelas II	73,68	89,47	
3	BOD *	Kelas I	100	92,1	Limbah organik dari aktivitas rumah tangga seperti limbah makanan dan minuman, detergen (sabun), aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan, sisa pakan ikan
		Kelas II	89,5	81,6	
4	DO *	Kelas I	89,47	76,32	BOD dan COD tinggi maka DO menjadi rendah
		Kelas II	31,6	23,7	
5	Cl Bebas	Kelas I	63,16	71,05	Klor dari proses klorinasi. Air bersih yang digunakan masyarakat melalui proses klorinasi oleh PDAM
		Kelas II	60,53	68,42	
6	COD *	Kelas I	68,42	60,53	Limbah organik baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri, aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan
		Kelas II	42,11	26,32	
7	H ₂ S	Kelas I	36,84	57,89	Sampah, limbah cair domestik
		Kelas II	36,84	57,89	
8	TSS *	Kelas I	63,16	42,11	Kikisan atau erosi tanah dipengaruhi musim hujan, aktivitas galian C, pertambangan batubara, perkebunan sawit
		Kelas II	55,26	36,84	
9	Besi (Fe)	Kelas I	60,53	21,05	Karakteristik alami, Pertambangan galian C dan batubara
		Kelas II	-	-	
10	Mangan (Mn)	Kelas I	5,26	10,53	Pertambangan galian C dan batubara
		Kelas II			
11	Amoniak	Kelas I		10,53	





No.	Parameter	Peruntukan	Persentase (%)		Indikasi Sumber Pencemar
			Tahap I	Tahap II	
		Kelas II		2,63	Air seni dan tinja, oksidasi zat organik secara mikrobiologis serta dari air buangan industri dan aktivitas masyarakat, limbah domestik, industri, dan limpasan pupuk pertanian.
12	Detergen	Kelas I	5,26	5,26	Kegiatan mencuci menggunakan detergen
		Kelas II	5,26	5,26	
13	Fenol	Kelas I	13,16		Limbah cair industri tekstil (kayu), bisa juga dari limbah domestik
		Kelas II	7,89		
14	Sianida (CN)	Kelas I	7,89		Limbah pertambangan emas
		Kelas II	7,89		
15	pH *	Kelas I	5,26		Air hujan, limbah industri pertambangan batubara
		Kelas II	5,26		

Keterangan = (*) parameter IKA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan kompleksitas persoalan tersebut bahwa sumber pencemar yang terindikasi dari berbagai sector yakni dari sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan domestik, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan harus melalui pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir oleh seluruh pemangku kepentingan.





C. Luas Lahan Kritis yang Berpotensi Terus Meningkat

Secara teori banjir dan bencana akibat banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh aktivitas manusia terhadap alam dan lingkungannya. Faktor alamiah yang utama yaitu elemen meteorologi, topografi, hidrologi, perubahan penggunaan lahan dan areal konservasi juga dapat memperbesar peluang terjadinya aliran permukaan (Afdhalia & Oktariza, 2019). Banjir secara umum juga terbagi menjadi dua dari faktor penyebabnya, yaitu banjir fluvial yang disebabkan karena limpahan air dari sungai (kadang disebut juga dengan banjir bandang) dan banjir pluvial yang disebabkan karena tingginya run-off (aliran permukaan) dan curah hujan ekstrim pada suatu lokasi.

Identifikasi Faktor Penyebab:

a. Anomali Curah Hujan

Berdasarkan klasifikasi curah hujan bulanan, Bulan Januari di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu bulan paling basah pada bagian barat pegunungan Meratus, sehingga potensi air limpasan di daratan cukup tinggi.

b. Morfologi Daratan

Pada daratan landai genangannya akan lama surut tetapi dayarusaknya kecil, sedangkan daratan yang terjal daya rusak tinggi tetapi genangannya akan cepat surut dikarenakan mengikut alur gravitasi dari hulu.

c. Pasang Laut

Terjadi pasang laut maksimum yang menambah lamanya durasi rendaman banjir di dataran karena air tidak bisa mengalir ke laut. Kondisi topografi di wilayah yang terendam banjir Januari 2021 ini umumnya berada di bagian hilir dengan ketinggian dibawah 12,5 mdpl. Wilayah pesisir di Kalimantan Selatan yang memiliki ketinggian 1 mdpl berpotensi mengalami banjir rob.

d. Sedimentasi Sungai

Dampak dari sedimentasi adalah kapasitas daya tampung sungai yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya sedimen di dalam sungai, sehingga ketika air limpasan (runoff) tinggi dan akan dibuang ke outlet berupa sungai akan tidak tertampung lagi. Hal inilah yang mengakibatkan meluapnya air sungai dan menggenangi kawasan permukiman, persawahan atau sekitarnya.

e. Alih Fungsi Lahan





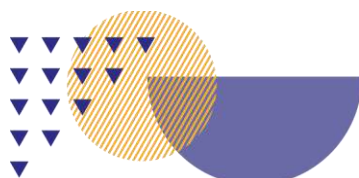
Berdasarkan peta perubahan guna lahan antara 2011 dan 2020 terlihat jelas adanya perubahan guna lahan dari kawasan berhutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan rawa/gambut) serta kawasan pertanian lahan kering menjadi kawasan perkebunan dan permukiman. Hal ini terjadi di DAS Barito, khususnya DTA pada Kajian ini. Alih fungsi lahan khususnya menjadi pertanian lahan kering, perkebunan sawit dan pertambangan yang berakibat infiltrasi rendah, sehingga air limpasan di permukaan semakin banyak berpotensi terjadibanjir.

Dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati, arah kebijakan konservasi kehati yaitu :

- Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian Kehati sosialisasi/ pencerahan);
- Memperlambat, mengurangi/menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan Kehati, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan;
- Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum;
- Mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK dan melestarikan kearifan lokal;
- Implementation of 3 Goals of the Convention on Biological Diversity (conservation, sustainable use, and benefit sharing). Indonesia has ratified CBD in 1994 (Act No. 5/1994);
- Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans (IBSAP), 2003 – 2020;
- Mewujudkan keadilan, keseimbangan peran/kepentingan dan memperkecil potensi konflik;.

Perencanaan Konservasi Kehati skala Provinsi

- Pengumpulan data flora dan fauna in-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data flora dan fauna ex-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data terkait lekat-lahan yaitu konservasi sumber daya alam yang ditanam dalam pekarangan Pengumpulan data ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan terkait konservasi sumber daya alam.



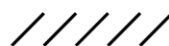
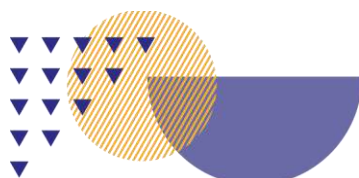


Jasa lingkungan pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan penutup lahan (landcover/ landuse) sebagai penaksir atau proxy. Oleh karena itu diperlukan proses transformasi data dari ekoregion dan penutup lahan menjadi nilai jasa lingkungan.

Menurut sistem klasifikasi jasa lingkungan dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa lingkungan dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pendukung (supporting) dan jasa kultural (cultural) serta jasa pengaturan (regulating).

Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan dari Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terdapat 20 jasa lingkungan yang disajikan sebagai berikut:

- Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan
- Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih
- Jasa Lingkungan Penyedia Serat
- Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik
- Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara
- Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
- Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam
- Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
- Jasa Lingkungan Pengaturan Aliran Air dan Banjir
- Jasa Lingkungan Penyerbukan Alami
- Jasa Lingkungan Pengendalian Hama
- Jasa Lingkungan Estetika
- Jasa Lingkungan rekreasi
- Jasa Lingkungan Warisan Budaya
- Jasa Lingkungan Warisan geologi
- Jasa Lingkungan Regenerasi Tanah dan Pemeliharaan
- Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara
- Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer
- Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman





Keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Selatan beragam jenis, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. Diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh tanaman khas Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Durian, Tebu, Kasturi, Rambutan, Langsat dll. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki fauna khas yang dilindungi.

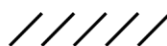
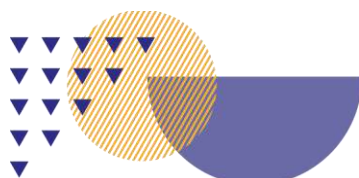
Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di berbagai habitat di berbagai wilayah, hutan lindung di Pegunungan Meratus. Jenis fauna khas Kalimantan Selatan yang dapat dipetakan sebarannya yaitu Bekantan, Burung, Orang Utan.

Dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan intensifnya kegiatan pembangunan dari beragam sektor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain pertambangan, industri, pelabuhan, perkebunan, pertanian, pemukiman, perikanan, pariwisata berkonsekuensi terhadap peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kompleksitas pembangunan di wilayah pesisir jika tidak diantisipasi secara hati-hati, dikhawatirkan mengganggu dan mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan ekosistem yang dapat menyangga kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa contoh ancaman nyata, misalnya perubahan ekosistem pesisir akibat reklamasi pantai, konversi lahan, penebangan hutan *mangrove*, tumpahan minyak (*oil spill*) dari pelabuhan, maupun pencemaran limbah dari berbagai kegiatan pembangunan dan rumah tangga penduduk.

Terkait dengan jenis pemanfaatan lahan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan dan pengaruhnya terhadap lingkungan pesisir dan perairan, maka isu dan permasalahan pokok yang teridentifikasi adalah terkait dengan ekologi, berupa potensi ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut yang hidup di sekitarnya.

Hal ini disebabkan karena secara ekologi laut merupakan tempat bermuaranya semua yang ada di darat baik melalui rembesan air hujan maupun mengalir melalui sungai-sungai yang cukup banyak bermuara di Selat Laut, Selat Sebuku maupun daratan Kalimantan. Akibatnya wilayah ini menjadi tempat



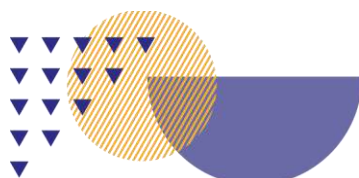


terakumulasinya segala sesuatu baik limbah industri dan domestik, penambangan, perkebunan, sedimen tersuspensi dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan kondisi perairan di lokasi studi yang memiliki tingkat kecerahan yang cukup rendah (dominan <50%) dan kekeruhan akibat sedimen tersuspensi sampai pada jarak 10-15 km dari garis pantai, baik di wilayah muara Sungai Barito (pesisir Kabupaten Banjar dan Barito Kuala) yang dampaknya sampai di wilayah Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut, perairan Selat Laut (Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru), Selat Sebuku maupun wilayah utara Kabupaten Kotabaru (daratan utama Kalimantan).

Pertambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka menyebabkan perubahan bentang lahan yang ekstrem. Penggalian lapisan batu bara yang terletak di bawah lapisan tanah dan lapisan lain menghasilkan lubang-lubang galian yang tidak dapat sepenuhnya ditutup kembali. Selain itu penimbunan lubang galian walaupun telah diupayakan menggunakan prinsip pengembalian lapisan tanah sebagai penutup terakhir pada waktu penataan lahan namun tetap saja menghasilkan kondisi lahan dengan material yang berbeda dibanding aslinya. Lapisan tanah yang dikembalikan sebagai lapisan penutup sudah tercampur aduk antara lapisan tanah atas dan bawah atau lapisan dari horizon A, B bahkan C, sehingga secara kimia terjadi pencampuran sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing horizon tersebut. Secara fisik jelas sangat berbeda dari kondisi awalnya karena terjadi perusakan struktur. Dengan kata lain tanah hasil penutupan kembali pada lokasi pertambangan batu bara memiliki Bobot Isi (BI) yang rendah. Dalam hal ini maka porositas lapisan tanah hasil penutupan kembali menjadi sangat kecil dengan akibat permeabilitas dan aerasi menjadi sangat buruk.

Potensi kerusakan lahan lain yang mungkin terjadi di areal pertambangan batu bara ialah terpotongnya drainase alamiah akibat perubahan bentang lahan. Dalam penataan kembali maka hal ini perlu dipertimbangkan. Kerusakan lahan lainnya ialah berupa erosi dan kemungkinan longsor. Untuk itu maka stabilisasi lereng dan recontouring merupakan bagian dari perencanaan penutupan tambang.

Sebagian besar masyarakat nelayan dan petambak menduga bahwa kegagalan usaha mereka tidak terlepas dari dampak kegiatan penambangan di wilayah hulu dan transportasi di sepanjang daerah aliran sungai maupun perubahan iklim global.





Dari kegiatan pertanian dan perkebunan di daratan, kelebihan unsur hara dari sisa-sisa pupuk bisa menyebabkan suburnya alga di lepas pantai dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, pada gilirannya bisa menyebabkan kematian biota laut secara massal. Sedangkan buangan residu pestisida dari pertanian dan perkebunan melalui aliran sungai dapat menyebabkan keracunan dan kematian biota laut.

Badan Informasi Geospasial mencatat bahwa luas Hutan Mangrove di Indonesia adalah 3,2 juta hektar (Ha). Jumlah itu merupakan 19% (2005) dari seluruh ekosistem sejenis di dunia, dan diperkirakan pada tahun 2013 luas Hutan Mangrove di Indonesia sudah jauh berkurang. Namun walau bagaimanapun, luasan hutan mangrove Indonesia relatif masih dianggap yang paling luas di dunia, sehingga meletakkan Indonesia sebagai penyangga ekosistem mangrove terpenting di dunia.

Kerusakan mangrove di sebagian wilayah pesisir Kalimantan Selatan dominan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk industri, pelabuhan, perikanan, perkebunan, pertambangan. Selain itu diakibatkan oleh pengaruh alam terutama gelombang.

Hasil analisis terhadap tekanan ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan menunjukkan dalam kategori tekanan sangat tinggi mencapai 6596,56 Ha atau 9,84%, kategori tinggi 137.34,87 Ha (20,50%), sedangkan kategori rendah masih yang terbesar yakni 24.692,24 Ha (36,85%). Secara wilayah kecamatan, Batulicin semua dalam kategori sangat tinggi, untuk semua kategori tinggi terdapat di Kecamatan Bumi Makmur, Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Tanjung Selayar. Beberapa wilayah yang memiliki tekanan tinggi >50% terdapat di Kecamatan Takisung, Kurau, Satui dan Pulau Laut Kepulauan. Wilayah ini disebabkan karena semakin tingginya aktivitas konversi lahan di sekitarnya terutama, pelabuhan, perkebunan, perikanan tambak dan permukiman.

Berdasarkan data pada Tabel 2-90 kondisi lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan mengalami tingkat kenaikan yang rendah. Kondisi terakhir Kalimantan Selatan secara peringkat naik ke peringkat 26 dari 34 provinsi di Indonesia. Pengaruh terbesar pada masih rendahnya indeks tutupan lahan akibat dari eksploitasi usaha yang membuka kawasan hutan dan akibat bencana kebakaran hutan.



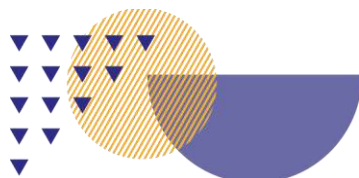
Kondisi kualitas air yang juga masih rendah berpengaruh besar terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan disajikan dalam table berikut:

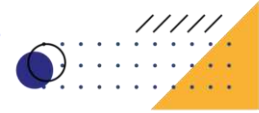
Tabel 2.108 Capaian Kinerja Urusan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017-2027 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,07	61,47	61,94	68,43	71,03
2.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	49,21	49,29	46,78	48,48	50,26
3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,02	87,75	88,78	88,93	89,15
4.	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,25	51,43	55,31	51,67	54,75
5.	Persentase Pengelolaan Sampah di Kalimantan Selatan	%	55	72,57	82,78	84,97	80,13
6.	Persentase parameter kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	%	65,44	66,27	71,59	76,57	-
7.	Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	98	95,19	93,27	100	100
8.	Persentase Penurunan emisi GRK dari Bussines as usual	%	4,2	2,8	11,47	13,11	16,50
9.	Persentase ketaatan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan	%	68	67	81	100	100
10.	Persentase perusahaan yang menerapkan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
11.	Persentase dokumen KRP yang mendapat rekomendasi lingkungan	%	100	100	100	100	100
12.	Luasan lahan terdegradasi yang dikelola	%	N/A	10.000	10.000	2000	-
13.	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang dihasilkan	%	1	1	1	2	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 s/d 2021 tercatat ada berbagai pengembangan kegiatan yang berlangsung di Provinsi Kalimantan Selatan baik pengembangan sektor ekonomi seperti pembukaan Lahan untuk industri





perkebunan, pertambangan, pertanian dan peternakan maupun pembukaan lahan untuk berbagai pemenuhan penyokong kehidupan lainnya yang tentu saja memiliki andil cukup besar terhadap perubahan kondisi lingkungan, diluar perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas domestik manusia. berkenaan dengan hal tersebut Gubernur Kalimantan Selatan sesuai kewenangannya menerbitkan izin lingkungan sebagai pengendalian atas pengelolaan lingkungan.

2.3.1.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembinaan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan adalah dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka menuju identitas tunggal. kegiatan yang dilakukan hanya terkait dengan upaya sosialisasi standarisasi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat seperti KTP. KK. dan lain sebagainya. Upaya pembinaan ini diarahkan pada upaya percepatan bagi kabupaten/kota mencapai identitas tunggal tersebut. Dalam mendukung pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil. Kabupaten Kota juga menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inventarisasi peraturan terkait penyelenggaraan urusan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.109 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Usia ≥17 Tahun atau Sudah Kawin yang Mempunyai KTP	%	0	0	0	83,00	92,00
2	Persentase Ketersediaan Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi	%	0	0	100	100	100
3	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	%	0	0	94,48	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.110 Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Nomor dan Judul Peraturan
1	Balangan	Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
2	Banjar	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perbup No. 17 tahun 2014 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil

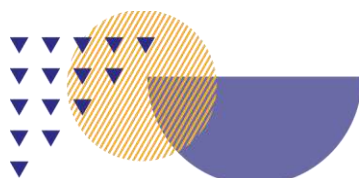


No	Kabupaten/ Kota	Nomor dan Judul Peraturan
3	Batola	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	HSS	Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5	HST	Peraturan Daerah Nomor : Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil
6	HSU	Peraturan Daerah Nomor : 20-Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah 17 2011 ttg Retribusi KTP dan Akta Catatan Sipil
7	Kotabaru	Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda
8	Tabalong	Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perbup Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2016
9	Tanah Bumbu	Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Penerbitan KTP
10	Tanah Laut	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
11	Tapin	Peraturan Daerah Kab. Tapin No. 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil Di Kab. Tapin
12	Kota Banjarbaru	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarbaru
13	Kota Banjarmasin	Peraturan Daerah Nomor : 21 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sumber : LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Pada tingkat kabupaten/kota telah dikembangkan sistem pelayanan terpusat pada kantor/lembaga yang menangani catatan sipil. sementara untuk beberapa kabupaten telah membagi kewenangannya kepada kantor kecamatan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan ini hanya berlaku untuk pembuatan KTP. sedangkan untuk KK, akte kelahiran dan lain sebagainya masih di kantor catatan sipil.

Secara kelembagaan semua kabupaten/kota sudah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun secara kualitas perlu adanya peningkatan dari berbagai sisi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang lebih memadai baik secara kuantitas dan secara kualitas. Hal ini mengingat tantangan yang masih cukup besar terutama terkait dengan upaya sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya identitas pada umumnya dan identitas tunggal pada khususnya.





2.3.1.2.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya pembangunan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah memberikan peran nyata untuk meningkatkan pendapatan keluarga yaitu dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi kader-kader PKK.

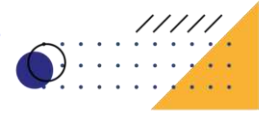
Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) telah dilaksanakan penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber Ekonomimelalui simpan pinjam kelompok perempuan. pengembanganBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa melalui pemberian bantuan stimulan dan pelatihan bagi pengurus. Jumlah kelompok simpan pinjam bagi perempuan dan Badan Usaha Milik Desa sudah dikembangkan di 11 kabupaten dengan hasil 1426 kelompok pada desa yang setiap tahunnya meningkat bisa di lihat peningkatan dari tahun 2015 ke 2020 pada Tabel 2-112.

Tabel 2.111 Pertumbuhan Jumlah Badan Usaha Milik Desa Kalimantan Selatan dari Tahun 2015 - 2020

TAHUN	JUMLAH BUMDES
2015	296
2016	627
2017	1069
2018	1246
2019	1268
2020	1426

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kalimantan Selatan 2021

Di bidang pemerintahan desa telah pula dilaksanakan pembinaan pembangunan desa seperti perencanaan desa dalam rangka menyusun RPJM desa. peningkatan kapasitas pelayanan desa dan kualitas aparatur dan kepala desa. agar memiliki kemampuan dalam mengelola sistem manajemen desa baik pemerintahan maupun keuangan desa. Berkaitan dengan hal ini telah dibina seluruh desa dengan pola pembinaan melalui percontohan yang kemudian



dikembangkan oleh kabupaten sesuai kondisi dan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan.

Di bidang teknologi, telah dilakukan berbagai upaya bersama-sama dengan kabupaten/kota. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dalam rangka mengembangkan pelayanan melalui Pos pelayanan teknologi yang tepat guna, tepat kapasitas dan tepat pembiayaan. Seluruh kabupaten/kota secara formal sudah terbentuk kelembagaan ini namun secara kualitas masih memerlukan peningkatan dan pembinaan lebih lanjut. Keberhasilan program ini memerlukan dukungan dari berbagai organisasi lain baik pemerintah maupun non pemerintah seperti pengembangan energi baru terbarukan pada skala desa, peralatan produksi dan lain sebagainya. Lebih detailnya bisa di lihat pada Tabel 2-113.

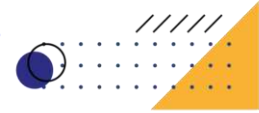
Tabel 2.112 Data Registrasi Bumdes Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH DESA	JUMLAH BUMDES	PERSENTASE
Kotabaru	198	151	76,26%
Banjar	277	183	66,06%
Tanah Bumbu	144	141	97,92%
Tanah Laut	130	84	64,62%
Barito Kuala	195	130	66,67%
Hulu Sungai Tengah	161	132	81,99%
Tapin	126	126	100,00%
Hulu Sungai Selatan	144	144	100,00%
Hulu Sungai Utara	214	137	64,02%
Balangan	154	94	61,04%
Tabalong	121	104	85,95%
	1864	1426	76,50%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.113 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	%	0	0	0	2,68	2,68
2	Persentase pemerintahan desa dengan administrasi yang baik	%	0	0	0	2,68	2,68
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%	0	0	0	14	14



4	Persentase sarana prasarana kawasan perdesaan yang terbentuk/berkembang	%	0	0	0	2	2
5	Persentase pengembangan kelembagaan desa	%	20	20	30	0	0
6	Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan desa	%	5	15	1	0	0
7	Persentase aparatur pemerintahan desa yang meningkat kapasitasnya	%	7	0	0	0	0
8	Persentase usaha ekonomi masyarakat yang telah berkembang	%	7	0	0	0	0
9	Persentase swadaya masyarakat untuk pembiayaan pembangunan	%	0	6	6	0	0
10	Jumlah organisasi masyarakat yang dibina	unit	0	20	40	0	0

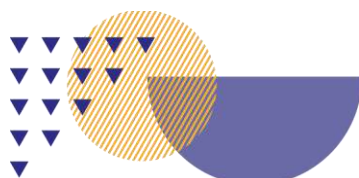
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dilihat dari cakupan kepesertaan KB di Kalimantan Selatan, masih memerlukan upaya keras, demi menuju masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kepesertaannya pada tahun 2020. Kondisi Kepesertaan KB di Kalimantan Selatan yang Ber-KB Aktif 2020 dapat dilihat pada Tabel 2-115.

Tabel 2.114 Perkembangan Kepesertaan KB di Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Peserta KB Aktif					Jumlah
	Implan	Suntikan	Pil	Kondom	IUD/MOW/MOP	
Tanah Laut	3.787	28.936	17.492	454	2.312	52.981
Kotabaru	4.382	20.373	21.338	924	1.329	48.346
Banjar	4.208	45.802	35.503	1.135	2.100	88.748
Barito Kuala	2.774	22.825	17.719	693	1.374	45.385
Tapin	3.956	15.955	12.665	500	1.021	34.097
Hulu Sungai Selatan	1.344	13.468	15.349	193	911	31.265
Hulu Sungai Tengah	2.564	16.763	18.581	628	1.023	39.559
Hulu Sungai Utara	1.515	19.069	14.316	458	1.194	36.552
Tabalong	3.698	18.356	14.567	418	1.637	38.676
Tanah Bumbu	5.403	24.214	18.193	1.124	1.341	50.275
Balangan	1.248	8.755	9.130	264	628	20.025
Banjarmasin	4.265	37.952	33.472	1.299	5.315	82.303
Banjarbaru	2.525	14.730	12.690	1.121	2.503	33.569





Kabupaten/Kota	Peserta KB Aktif					Jumlah
	Implan	Suntikan	Pil	Kondom	IUD/MOW/ MOP	
Kalimantan Selatan	41.669	287.198	241.015	9.211	22.688	601.781

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan. 2021

Tabel 2.115 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0	0	0	35	1,5
2	Usia Kawin Pertama	%	0	0	35	1,7	0
3	Persentase Kader GSI Aktif. (indikator kinerja yang dimaksud tidak ada)	%	0	0	67,51	0	0
4	Persentase BKB Aktif	%	0	0	0	90	97
5	Persentase Sub PPKBD Aktif	%	0	0	0	80	75

Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Prov. Kalimantan Selatan 2021

Grand Design Pembangunan Kependudukan sebenarnya sudah terbentuk di hampir 13 kab/kota pada Prov. Kalimantan Selatan, namun alasan belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan GDPK dikarenakan terkendala dengan regulasi dan perlu adanya penyesuaian dengan visi dan misi bupati terpilih dalam pilkada dan GDPK belum menjadi prioritas bagi kab/kota.

Berdasarkan data *Unmed Need* di Kalimantan Selatan sebesar 10,8% menunjukkan bahwa memang masih banyak PUS yang ingin berKB namun belum terlayani. Hal ini disebabkan oleh banyak factor, antara lain karakteristik demografi, social ekonomi, akses dan kualitas pelayanan. Hal ini diperparah dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai informasi KB.

Berdasarkan hasil Laporan Indeks Kinerja Utama BKKBN tahun 2020, dapat dilihat bahwa capaian mCPR di Kalimantan Selatan sebesar 80,26%. Angka ini menunjukkan bahwa kesertaan berKB PUS di Kalimantan Selatan sudah cukup tinggi, hanya memang pilihan yang kontrasepsi yang digunakan masih yang non MKJP.



Untuk menanggulangi hal tersebut, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan mitra kerja yaitu IBI dan TNI serta BKKBN juga menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi selalu ada.

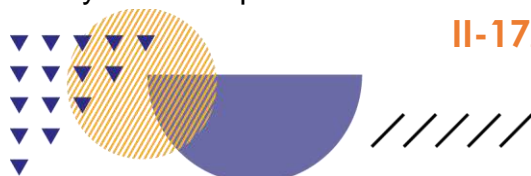
Masih tinggi PUS yang putus ber KB disebabkan karena :

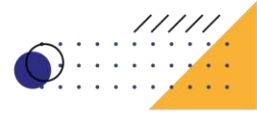
- a. Selama adanya Pandemi Covid 19 terdapat perubahan akses pelayanan KB. Akses pelayanan KB ada pembatasan pelayanan KB di Puskesmas maupun RS. Selain itu pada beberapa daerah masih terdapat kekurangan akses kesehatan.
- b. Masyarakat merasa takut untuk datang ke Puskesmas atau Klinik PMB maupun RS selama adanya Pandemi Covid-19
- c. Tingginya minat PUS untuk menggunakan KB Non MKJB. Capaian KB MKJP di Kalimantan Selatan masih rendah berkisar 11,02% berdasarkan data Laporan Statistik Rutin BKKBN, sampai dengan bulan September 2021
- d. Kurangnya KIE dari Pengelola Program KB
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KB MKJP

2.3.1.2.8 Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam sistranas yaitu terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif atau dapat diartikan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (angkutan darat dan ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut, maupun udara.

Pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur tentang transportasi umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan permasalahan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan

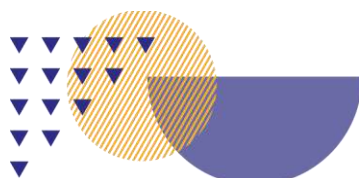




publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemerintah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. Dinas Perhubungan sendiri mengatur tentang peraturan lalu lintas dan sistem transportasi, pemberian ijin trayek, uji kir angkutan yang layak jalan, pemberian marka jalan, penyediaan halte dan jaringan sarana dan prasarana lainnya. Ditemuinya di lapangan bahwa kualitas fasilitas angkutan umum yang tersedia masih rendah dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap penyelenggara jasa angkutan umum untuk melakukan peremajaan terhadap usia angkutan lebih dari 10 tahun. Hal ini lah yang menjadi salah satu pemicu banyaknya moda angkutan umum mengalami penurunan performance dan pada akhirnya penumpang beralih kepada penggunaan kendaraan pribadi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 131.281 unit dan pertumbuhannya setara dengan 7,5% pertahun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan rata-rata, maka pertumbuhan perbulan mencapai kurang lebih 11.000 unit. Hal ini menyebabkan kemacetan dan penundanaan arus lalu lintas yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan dan menambah kesemrawutan kota. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara pada kota-kota besar juga mengalami peningkatan dimana kontribusinya telah mencapai 60-70%.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2009 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigasi (*business as usual*/BAU). Kemudian pada COP 21 di Paris Perancis, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen baru Indonesia tahun 2030 yang akan menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan skenario *fair*





(menggunakan kemampuan sendiri) dan menjadi 41% dengan skenario ambisius (jika mendapat dukungan Internasional)

Melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Peraturan gubernur No 14 Tahun 2013 tentang rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca.

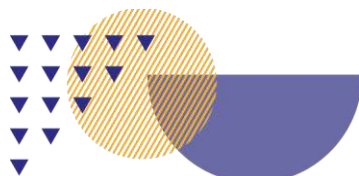
A. Angkutan Darat

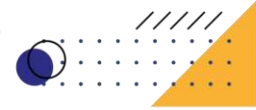
1. Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 tipe yaitu tipe A (kewenangan pusat) sebanyak 1 terminal dan tipe B (kewenangan provinsi) sebanyak 6 terminal. Berikut merupakan sejumlah terminal yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.116 Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Tipe Terminal	Nama Terminal	Lokasi	Aksesibilitas
1	Terminal Tipe A	Gambut Barakat	Kab. Banjar	Sebagai titik simpul transportasi keluar masuk Wilayah Regional Kalimantan yang berfungsi melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP)
2	Terminal Tipe B	Terminal Km 6 Kayuh Baimbai	Kota Banjarmasin	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Trisakti, Bandara Syamsudin Noor serta menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
3	Terminal Tipe B	Terminal Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Laut Batulicin, Pelabuhan Penyeberangan ke Kotabaru menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
4	Terminal Tipe B	Terminal Kotabaru	Kabupaten Kotabaru	Sebagai titik simpul akses menuju Tanah Bumbu- Tanah Laut- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam



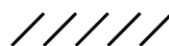
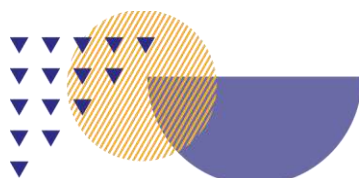


No.	Tipe Terminal	Nama Terminal	Lokasi	Aksesibilitas
				provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
5	Terminal Tipe B	Terminal Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sebagai titik simpul akses menuju Tanjung – Barabai-Kandangan – Rantau – Martapura-Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
6	Terminal Tipe B	Terminal Tabalong	Kabupaten Tabalong	Sebagai titik simpul akses menuju Paringin- Barabai-Kandangan- Rantau- Martapura- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, Tahun 2021

2. Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) merupakan layanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota pada provinsi yang berbeda dengan menggunakan kendaraan bus umum dan terikat dengan trayek angkutan. Bus AKAP memiliki jadwal yang tetap, pelayanan yang cepat, dilayani oleh bus umum, tersedia terminal tipe A pada awal pemberangkatan, persinggahan dan terminal tujuan.





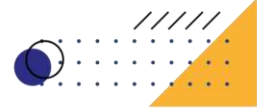
Gambar 2.48 Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan

Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan, 2021

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 10 unit dimana yang sampai sekarang masih aktif beroperasi yaitu sebanyak 8 unit dengan jenis kendaraan bus sedang. Trayek yang dilalui Bus AKAP sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.117 Trayek dan Tarif Bus AKAP

No.	Trayek / Jurusan
1.	Banjarmasin - Batulicin
2.	Banjarmasin - Sengayam
3.	Banjarmasin - Kerang
4.	Banjarmasin - T. Grogot
5.	Banjarmasin - Penajam
6.	Banjarmasin - Kuaro
7.	Banjarmasin - Balikpapan
8.	Banjarmasin - Samarinda
9.	Batulicin - Kerang



No.	Trayek / Jurusan
10.	Batulicin - T. Grogot
11.	Batulicin - Balikpapan
12.	Batulicin - Samarinda
13.	Sengayam - T. Grogot
14.	Sengayam - Balikpapan
15.	Sengayam - Samarinda
16.	T. Grogot - Balikpapan
17.	T. Grogot - Samarinda
18.	T. Grogot - Batulicin
19.	T. Grogot - Banjarmasin

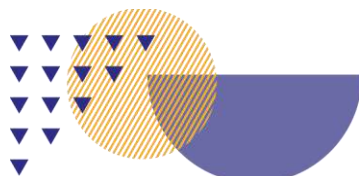
Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan, 2021

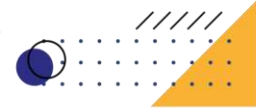
3. Bus Rapid Transit Banjarbakula

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan. BRT menggunakan jalur khusus dan pelayanan prima terhadap pengguna yang pada dasarnya adalah mengadaptasi karakteristik kinerja dan keandalan pelayanan dari sistem transit modern berbasis dengan biaya yang lebih rendah.

Tabel 2.118 Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula

No.	Koridor	Rute Koridor
1.	Koridor I	Km.0 Banjarmasin – Lambung Mangkurat – Jl. A. Yani – Terminal Km 6 Banjarmasin – Terminal Km 17 Gambut Barakat (Pulang Pergi)
2.	Koridor II	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Jl. A. Yani – Terminal Banjarbaru (Pulang Pergi)
3.	Koridor III	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Simpang 3 Trikora/A. Yani – Jl. Trikora – Simpang 3 Cempaka – Jl. Cempaka – Terminal Banjarbaru – Martapura (Pulang Pergi)
4.	Koridor IV	Handil Bakti Barito Kuala – Jl. Hasan Basri – Jl. Sultan Adam – Jl. Syarif Hidayatullah – Jl. Veteran – Jl. Pramuka – Terminal Km 6 Banjarmasin (Pulang Pergi)
5.	Koridor V	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. Gubernur Soebarjo – Pelabuhan Trisakti (Pulang Pergi)





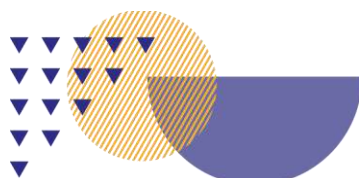
No.	Koridor	Rute Koridor
6.	Koridor VI	Handil Bakti – Jl. Trans Kalimantan – Jl. (Banjarmasin – Marabahan) – Terminal Marabahan (Pulang Pergi)
7.	Koridor VII	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. A. Yani – Bentok (Pulang Pergi)
8.	Koridor VIII	Bentok – Bati-Bati – Tambang Ulang – Pelaihari (Pulang Pergi)
9.	Koridor IX	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Bandara Syamsudin Noor (Pulang Pergi)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan, 2021

B. Angkutan Sungai dan Laut

Provinsi Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai provinsi yang memiliki jumlah sungai yang banyak dan digunakan sebagai jalur transportasi sejak zaman dahulu hingga sekarang akan sangat memiliki kerawanan akan terjadinya kecelakaan di sungai. Pengawasan lalu lintas sungai dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kelancaran pengguna lalu transportasi sungai. Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; pemuatan, dan status hukum kapal. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhadap pengawasan dan pengendalian lalulintas perairan sungai belum secara maksimal dilaksanakan, karena luasnya cakupan wilayah pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 pelabuhan yang beroperasi dengan 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang memiliki hirarki pelabuhan yaitu pengumpan. Lokasi pelabuhan tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut merupakan data eksisting pelabuhan yang status kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.





Tabel 2.119 Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan

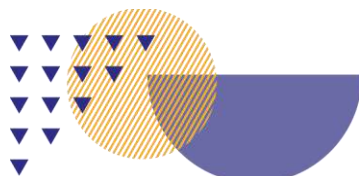
No	Nama Pelabuhan	Lokasi Pelabuhan	Status Aset/ Kepemilikan	Operator	Kondisi Pelabuhan	Aktivitas di Pelabuhan
1	Negara	Kab. HSS	Kab. HSS	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
2	Dermaga Sungai di Lok Baintan	Kab. Banjar	Kab. Banjar	-	NA	NA
3	Dermaga Alalak	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
4	Dermaga Jelapat	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
5	Dermaga Banjarraya	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
6	Dermaga Saka Kajang	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang&Barang
7	Pasar Baru	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	-	Baik	Penumpang&Barang

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota, Tahun 2021

Selama tahun 2019 jumlah barang yang terbongkar di seluruh pelabuhan mencapai 93.634.708 ton meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (112.076.221 ton). Barang yang dimuat sebanyak 262.500.114 ton, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya (317.525.112 ton). Arus kapal dalam negeri mengalami penurunan, dimana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami naik turun, meski tahun 2016 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 79.413 unit dari 15.431 unit pada tahun 2016. Berikut merupakan aktivitas pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015-2019.

Tabel 2.120 Aktivitas Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2019

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Bongkar Barang Ton	99.269.191	102.488.734	108.334.931	112.076.221	93.634.708
Muat Barang Ton	196.873.930	256.687.222	272.879.150	317.525.112	262.500.114
Arus Kapal Dalam Negeri Unit	32.000	15.431	22.261	70.034	79.413
Arus Kapal Luar Negeri Unit	4.124	135	63	2.552	14.097





Penumpang Turun Jiwa	60.219	42.664	51.618	91.642	184.380
Penumpang Naik Jiwa	27.009	26.554	38.233	57.010	121.770

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan 2020

C. Angkutan Udara

Jumlah pesawat yang datang di bandara pada tahun 2018 mencapai 15.956 unit dan menurun menjadi 13.760 unit pada tahun 2019. Demikian pula kondisi yang sama terjadi pada pesawat yang berangkat pada tahun 2018 sebanyak 15.946 unit dan menurun menjadi 13.735 unit pada tahun 2019. Dengan adanya penurunan jumlah pesawat yang datang dan berangkat, maka terjadi pula penurunan pada arus penumpang yang datang dan berangkat.

Arus penumpang saat datang pada tahun 2018 mencapai 1.964.788 orang dan menurun menjadi 1.640.407 orang pada tahun 2019, sedangkan arus penumpang saat berangkat pada tahun 2018 mencapai 1.885.170 orang dan menurun menjadi 1.576.199 orang pada tahun 2019. Adapun jumlah penumpang yang transit pada tahun 2018 sebanyak 78.117 orang dan menurun pula menjadi 75.691 orang pada tahun 2019. Berikut merupakan aktivitas bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013-2019.

Tabel 2.121 Aktivitas Bandara di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2019

Aktivitas Di Bandara Kalimantan Selatan		Jumlah			
Pesawat Terbang	Unit	2013	19.869		
		2014	18.359		
	Datang	2015	16.391		
		2016	16.662		
		2017	16.877		
		2018	15.956		
		2019	13.760		
		Berangkat	2013	19.881	
			2014	18.349	
	2015		16.393		
			2016	16.684	
			2017	16.887	
2018			15.946		
2019			13.735		
Arus Penumpang			Orang	2013	1.993.287
				2014	1.904.335
				2015	1.739.587



Aktivitas Di Bandara Kalimantan Selatan			Jumlah
		2016	1.844.196
		2017	1.909.536
		2018	1.964.788
		2019	1.640.407
	Berangkat	2013	2.006.783
		2014	1.912.858
		2015	1.731.874
		2016	1.843.559
		2017	1.889.999
		2018	1.885.170
	 Transit	2019	1.576.199
		2013	57.701
		2014	95.945
		2015	66.815
		2016	77.27
		2017	74.549
		2018	78.117
	2019	75.691	

Sumber: Statistik Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020

Tabel 2.122 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Moda Transportasi Angkutan Umum Terhadap Frekuensi Perjalanan	%	65	65	65	68	75
2	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Terpasang Fasilitas Keselamatan Jalan	%	16,78	18,57	20,35	23,84	32,85
3	Persentase panjang alur pelayaran sungai yang memenuhi standar	%	57	57	57	60	65

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

2.3.1.2.9 Komunikasi dan Informatika

Blank spot merupakan kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlindungi oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi *blank spot*, maka komunikasi dua arah menjadi terhambat.

Berdasarkan data sebaran desa bebas *blank spot* dan desa *blank spot* sebagaimana tercantum pada Tabel 2-106, ada 12 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih memiliki desa *blank spot*. Area *blank spot* terbesar



berada di Kabupaten Barito Kuala dengan jumlah desa *blank spot* mencapai 72 desa. Untuk Kota Banjarmasin secara keseluruhan sudah bebas *blank spot*.

Tabel 2.123 Persebaran Desa Bebas *Blank Spot* dan Desa *Blank Spot*

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Keseluruhan	Jumlah Desa Bebas Blankspot	Jumlah Desa Blankspot
Kabupaten Tanah Laut	130	90	40
Kabupaten Kotabaru	198	171	27
Kabupaten Banjar	277	231	46
Kabupaten Barito Kuala	195	123	72
Kabupaten Tapin	126	120	6
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	144	124	20
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	161	128	33
Kabupaten Hulu Sungai Utara	214	205	9
Kabupaten Tabalong	121	103	18
Kabupaten Tanah Bumbu	144	127	17
Kabupaten Balangan	152	137	15
Kota Banjarmasin	52	52	-
Kota Banjarbaru	20	18	2
Total	1934	1629	305

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Peningkatan teknologi sistem telekomunikasi seluler melalui penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) merupakan upaya dalam mengurangi *blank spot area* dan memaksimalkan cakupan area terlayani pada suatu wilayah. Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2-106, pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1.423 unit BTS, meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.595 unit BTS, dan pada tahun 2019 menjadi 1.725 unit BTS. Pada Tahun 2019 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, jumlah unit BTS terbanyak tersebar di Kabupaten Banjar sebanyak 254 unit, sedangkan jumlah yang terkecil berada di Kabupaten Hulu Sungai dengan jumlah BTS sebanyak 52 unit.

Tabel 2.124 Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 - 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (Unit)		
		2017	2018	2019
1.	Kabupaten Balangan	49	52	60
2.	Kabupaten Banjar	209	254	254



No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (Unit)		
		2017	2018	2019
3.	Kabupaten Barito Kuala	85	95	116
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	85	89	98
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	69	78	78
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	52	52	52
7.	Kabupaten Kotabaru	165	133	143
8.	Kabupaten Tabalong	N/A	113	140
9.	Kabupaten Tanah Bumbu	160	163	177
10.	Kabupaten Tanah Laut	168	187	214
11.	Kabupaten Tapin	75	85	85
12.	Kota Banjarbaru	124	105	129
13.	Kota Banjarmasin	182	179	179
	Kalimantan Selatan	1.423	1.585	1.725

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Berdasarkan data kepemilikan akses internet di masyarakat, jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet dan pelanggan telepon kabel semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak dari tingginya jumlah pengguna internet di masa sekarang dan adanya dampak Covid-19 yang menyebabkan peningkatan usaha yang menggunakan jasa online. Adapun jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa/lurah dan jumlah desa/kelurahan yang memiliki keluarga pelanggan telepon tetap kabel dapat dilihat pada Tabel 2-126 dan Tabel 2-128.

Tabel 2.125 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa)

Provinsi	TAHUN								
	Perkotaan+Perdesaan			Perdesaan			Perkotaan		
	2014	2018	2019	2014	2018	2019	2014	2018	2019
Kalimantan Selatan	139	985	1,037	75	767	798	64	218	239
Indonesia	9.279	38.646	42.118	4.254	25.802	28.560	5.025	12.844	13.558

Sumber: BPS RI Tahun 2021

Tabel 2.126 Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Keluarga Pelanggan Telepon Tetap Kabel Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (Desa)

Provinsi	TAHUN								
	Perkotaan+Perdesaan			Perdesaan			Perkotaan		
	2014	2018	2019	2014	2018	2019	2014	2018	2019



Kalimantan Selatan	290	204	178	85	51	46	205	153	132
Indonesia	16.485	11.701	10.395	5.093	3.297	2.899	11.392	8.404	7.496

Sumber : BPS RI Tahun 2021

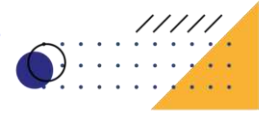
Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase layanan informasi publik berbasis IT	%	40	40	37	60	70
2	Persentase peningkatan pengelolaan sumberdaya komunikasi publik	%	18	18	18	30	40
3	Persentase peningkatan pengelolaan sumberdaya komunikasi publik	%	20	20	20	90	90
4	Persentase peningkatan pengelolaan sumberdaya komunikasi publik	%	15	15	15	30	45

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Beberapa urusan yang menjadi tugas dan wewenang bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah dimulai dari penyediaan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan hubungan komunikasi Pemerintah Daerah dan publik serta pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi Daerah termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Dalam hal penyediaan informasi penyelenggaraan daerah telah dilakukan monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah. Khusus untuk monitoring Opini telah dilakukan pengelolaan aduan masyarakat melalui sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang di Kalimantan Selatan lebih dikenal dengan istilah LAPORPAMAN. Tercatat dari tahun 2017 s/d tahun 2021 sebanyak 2.021 aduan masyarakat yang masuk melalui SP4N-LAPOR dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.128 Rekapitulasi Data Aduan Masyarakat yang Masuk Melalui SP4N-LAPOR (LAPORPAMAN) Tahun 2017 - 2021

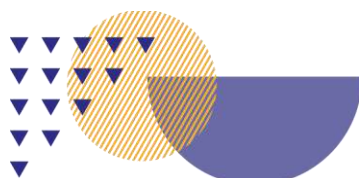
NO	Tahun	Trending Topik	Jumlah	Aduan yang Ditindaklanjuti	Aduan yang Diarsipkan
1.	2017	1. Kesehatan 2. Administrasi 3. Ruang publik	8	8	0
2.	2018	1. Perhubungan 2. Usulan Perbaikan 3. Kepegawaian	85	84	1
3.	2019	1. Infrastruktur 2. Lingkungan Hidup dan Kepegawaian 3. Pajak dan Retribusi	367	314	53
4.	2020	1. Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Transportasi Darat 3. Infrastruktur	679	583	96
5.	2021	1. Infrastruktur 2. Infrastruktur Pendukung 3. Hak Pekerja	882	776	106
TOTAL ADUAN : 2.021					

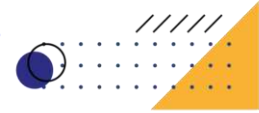
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2021

Adapun monitoring/ pemantauan terhadap isu publik tercatat sebanyak 2.768 isu publik yang beredar sepanjang periode tahun 2017 sd 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.129 Rekapitulasi Top Isu Publik yang Beredar di Masyarakat Tahun 2017 - 2021

No	Top Issue	Tahun	Jumlah
1.	Ekonomi	2017	288
2.	Lingkungan dan Satwa	2018	432
3.	Kebencanaan	2019	540
4.	Sosial dan Kesehatan	2020	684
5.	Sosial dan Kesehatan	2021	756
Total Isu : 2.768			





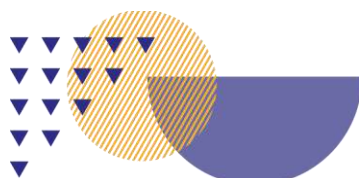
Sedangkan dalam hal penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui media komunikasi publik dan media layanan informasi publik yang tersedia antara lain: melalui Radio LPPL Abdi Persada FM , portal berita Media Center dan layanan PPID serta melalui media komunikasi luar ruang Videotron sebanyak 2 (dua) unit.

Adapun jumlah informasi yang telah di sebarluaskan hingga saat ini selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah berjumlah sebanyak **40.672** Informasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.130 TABEL JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DISEBARLUASKAN

No	Jenis Layanan Publik	Jenis Informasi Per Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Radio LPPL Abdi Persada FM	720	900	1.000	2.050	2.200	6.900
2	Media Center	4.786	3.321	5.109	3.075	5.054	21.327
3	PPID	0	0	40	100	306	446
4	Videotron	0	0	226	447	526	1.199
TOTAL							40.672

Informasi yang disebarluaskan terdiri dari informasi pembangunan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan pemerintah provinsi, baik itu menyangkut pendidikan, sosial dan budaya, hukum, kriminalitas, ekonomi, pariwisata, olahraga dan kesehatan. Khusus untuk layanan PPID Informasi yang dikecualikan, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Layanan PPID baru beroperasi pada tahun 2019 dikarenakan sebelumnya PPID melekat pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019. Adapun media informasi Videotron baru dioperasikan dari tahun 2019 sedangkan tahun sebelumnya masih dalam tahap pemasangan dan penyesuaian, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019.



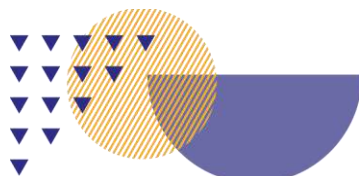


2.3.1.2.10 Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian rakyat. Pada tahun 2019, jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2.606 unit yang sebagian besar merupakan jenis koperasi pegawai negeri (437 unit), koperasi serba usaha (503 unit), dan koperasi unit desa (398 unit). Jumlah koperasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2019 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2-132.

Tabel 2.131 Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2020

Jenis Koperasi	2017	2018	2019	2020
Koperasi Unit Desa	383	385	385	384
Koperasi Pegawai Negeri	451	444	451	437
Koperasi Karyawan	213	214	212	207
Koperasi Industri Kerajinan	14	14	13	13
Koperasi Angkutan/ Darat/ Laut/Sungai	22	23	24	23
Koperasi Serba Usaha	482	489	497	503
Koperasi Generasi Muda/ Mahasiswa	30	27	30	28
Koperasi Veteran	12	11	10	10
Koperasi Wredatama	19	13	15	14
Koperasi Wanita	86	88	88	88
Koperasi Simpan Pinjam	66	70	73	75
Koperasi Jasa/Profesi	17	28	33	46
Koperasi Pasar	32	33	32	31
Koperasi Pondok Pesantren	69	68	68	67
Koperasi Pertanian	146	145	139	140
Koperasi Perikanan/Nelayan	14	15	19	21
Koperasi Perkebunan	58	58	62	62
Koperasi Peternakan	9	9	11	11
Koperasi Kehutanan	2	3	3	3
Koperasi Angkatan Darat	26	28	25	26
Koperasi Angkatan Laut	3	1	3	3
Koperasi Angkatan Udara	1	1	1	1
Koperasi Kepolisian	18	18	18	18
Koperasi Jamu Gendong	-	-	-	-
Koperasi PEPABRI	8	10	7	6
Koperasi Pertambangan	3	3	3	3
KJKS	59	59	58	62
Koperasi Produsen	2	28	29	30
Koperasi Konsumen	-	1	2	2
Koperasi Sekunder	25	25	25	25





Jenis Koperasi	2017	2018	2019	2020
Koperasi Lain-Lain	289	276	284	267
Jumlah	2.559	2.587	2.620	2.606

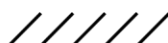
Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Usaha mikro dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang tersebar di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan meliputi Usaha Mikro sebanyak 376.233Unit.Usaha Menengah sebanyak 3.140 Unit. dan Usaha Kecil sebanyak32.533Unit. Jenis usaha untuk usaha keil dan mikro terbanyak adalah jenis usaha agribisnis yaitu 1.122 unit usaha. sedangkan untuk usaha menengah terbanyak adalah jenis usaha bidang lainnya sebanyak 267 unit usaha menengah di Kalimantan Selatan. Lebih lengkapnya diuraikan pada tabel dibawah Berikut;

Tabel 2.132 Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

N O	KABUPATEN / KOTA	KULINE R	FASIO N	PENDDIK AN	OTOMOTI F	AGRIBISNI S	TEKNI K		JUMLAH
							INTERNE T	LAINYA	
1	Tanah Laut	22.943	96	-	69	231	-	364	23.703
2	Kotabaru	625	586	15	118	1.305	-	5.543	8.192
3	Banjar	35.105	342	-	304	26.980	-	4.527	67.258
4	Barito Kuala	414	33	-	85	33.868	-	1.090	35.490
5	Tapin	317	60	-	51	44	18	706	1.196
6	H.S. Selatan	6.131	-	-	-	322	84	20.705	27.242
7	H.S. Tengah	3.930	892	44	105	854	3	19.821	25.649
8	H.S Utara	4.119	1.701	134	326	78.458	5	23.378	108.121
9	Tabalong	4.871	658	-	383	455		12.403	18.770
10	Tanah Bumbu	2.124	35		126	25		1.814	4.124
11	Balangan	4.879			162		144	6.032	11.217
12	Banjarmasin	7.984	2.985	1.099	1.884	3.456	1.885	15.928	35.221
13	Banjarbaru	3.127	1.743	133	1.513	714	97	2.723	10.050
	Jumlah	96.569	9.131	1.425	5.126	146.712	2.236	115.034	376.233

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2020





Tabel 2.133 Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No	Kabupaten Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
1	Tanah Laut	0	0	0	0	0	0	301	301
2	Kotabaru	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjar	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Barito Kuala	1	2	0	7	10	0	50	70
5	Tapin	0	0	0	0	0	0	0	0
6	H.S. Selatan	0	0	0	0	0	0	60	60
7	H.S. Tengah	0	104	0	0	0	0	44	148
8	H.S. Utara	0	63	0	112	0	0	725	900
9	Tabalong	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tanah Bumbu	0	0	0	0	0	0		0
11	Balangan	0	0	0	0	10		8	18
12	Banjarmasin	98	148	49	99	279	48	922	1643
13	Banjarbaru	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	99	317	49	218	299	48	2.110	3.140

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.134 Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

No	Kabupaten / Kota	Kuliner	Fashion	Pendidikan	Otomotif	Agribisnis	Teknik Internet	Bidang Lainnya	Jumlah
1	Tanah Laut	-	-	-	30	-	-	1.000	1.030
2	Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Banjar	10	5	-	3	69	1	120	208
4	Barito Kuala	15	20	-	35	200		222	492
5	Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-
6	H.S. Selatan	118	45	2	70	-	-	17.926	18.161
7	H.S. Tengah	54	885		109	373	-	1.723	3.144
8	H.S. Utara	452	576	-	385	-	-	3.030	4.443
9	Tabalong	731	-	-	-	-	-	-	731
10	Tanah Bumbu	13	30	2	32	10	2	100	189
11	Balangan	60	6	2	17	12	3		100
12	Banjarmasin	819	260	74	409	373	223	1.572	3.730
13	Banjarbaru	45	21	27	79	85	18	30	305
	Jumlah	2.317	1.848	107	1.169	1.122	247	25.723	32.533

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021



Tabel 2.135 Rekap Data UMKM Provinsi Kalimantan Selatan

No	Klasifikasi	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Usaha Mikro	147.070	157.096	290.335	320.557	333.919	376.233
2	Usaha Kecil	10.304	11.437	12.900	13.524	20.090	32.533
3	Usaha Menengah	2.438	2.676	2.778	2.994	3.308	3.140
	Total	159.812	171.209	306.013	337.075	357.317	411.906

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif Per Tahun		-	-	66	66,81	57,81
2	Persentase Koperasi yang menyelenggarakan RAT		-	-	84	34,85	37,84
3	Persentase Penumbuhan Koperasi Baru		-	-	3	3,28	10,81
4	Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Koperasi dan UK		-	-	6,93	3,56	4,91
5	Persentase Peningkatan Kemandirian (struktur) Permodalan Koperasi dan UK		-	-	93,63	72,97	88,74
6	Jumlah Koperasi dan UK yang memiliki Legalitas Usahanya	Unit	-	-	30	35	35
7	Jumlah Nilai Transaksi Promosi	Juta	-	-	360	750	0
8	Jumlah Usaha Kecil yang mampu mengakses Pasar Modern	Unit	-	-	20	25	20
9	Jumlah Jenis Produk Unggulan Koperasi dan UK yang mampu masuk ke Pasar Luar Daerah	Item	-	-	3	3	5
10	Persentase Koperasi yang Patuh pada Penerapan Perangkat Peraturan Perundangan		-	-	30	33	35
11	Persentase Koperasi Usaha Simpan Pinjam yang sehat		-	-	25	20	19
12	Persentase SDM yang memiliki Pengetahuan dan Pengalaman tentang Perkoperasian dan UK		-	-	70	70	70
13	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal dan Non Formal		69,15	72,77	56,54	50,64	94,52
14	Rerata Hasil Post Test PKB PAUD		67	68	69	0	0

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.11 Penanaman Modal

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Investasi berupa penanaman modal usaha di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai merata di setiap kabupaten/kota meskipun masih





terdapat beberapa kabupaten yang belum diminati investor secara umum. Berikut ini adalah data investasi daerah menurut kabupaten dan kota tahun 2020.

Tabel 2.137 Jumlah Proyek, Rencana, dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2020 PMA dan PMDN

Kab/Kota	PMA			PMDN		Total	
	Proyek	US\$ Ribu	Rp. Juta	Proyek	Rp. Juta	Proyek	Rp. Juta
KAB. TABALONG	22	102.477,70	1.475.678,88	118	334.935,00	140	1.810.613,88
KAB. BALANGAN	15	52.084,20	750.012,48	71	212.015,20	86	962.027,68
KAB. BARITO KUALA	28	7.348,00	105.811,20	37	189.990,20	65	295.801,40
KAB. BANJAR	16	9.879,20	142.260,48	227	434.744,60	243	577.005,08
KAB. TANAH LAUT	48	13.262,70	192.818,88	143	1.421.944,30	191	1.614.763,18
KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0	0	0	27	119.081,30	27	119.081,30
KOTA BANJARMASIN	61	2.846,30	41.077,86	309	497.985,10	370	539.062,96
KAB. TANAH BUMBU	42	19.303,60	278.234,70	321	724.410,60	363	1.002.645,30
KAB. TAPIN	12	3.010,30	43.484,40	52	125.574,50	64	169.058,90
KOTA BANJARBARU	30	7,6	111,48	214	88.605,00	244	88.716,48
KAB. KOTABARU	50	30.244,70	435.771,96	111	108.015,20	161	543.787,16
KAB. HULU SUNGAI TENGAH	3	328,5	4.730,40	35	28.359,40	38	33.089,80
KAB. HULU SUNGAI UTARA	0	0	0	7	654,2	7	654,2
TOTAL	327	240.792,80	3.469.992,72	1672	4.286.314,60	1999	7.756.307,32

Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka, 2021

Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Trilyun	9,50T	6,25T	11,70T	15,65T	7,75T
2	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	9,50T	6,25T	11,70T	15,65T	7,75T
3	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	B	B	B (82,61)	B (86,79)	A (88,35)

Sumber: Dinas Penanaman Modal Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.1.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Kalimantan Selatan Terus Mantapkan Persiapan Atlet Menuju PON Papua Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga



(Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat terus memantapkan persiapan para atlet yang akan dikirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua.

Selain terus menggenjot latihan para atlet dari berbagai cabang olahraga. Pemprov Kalimantan Selatan juga tengah menyiapkan alat-alat pertandingan yang akan digunakan atlet saat melakoni ajang olahraga bergengsi nasional tersebut. dan diharapkan agar Kalimantan Selatan Bisa meraih banyak gelar untuk mengharumkan nama baik Kalimantan Selatan di kanca level Nasional nantinya. berikut Data Tabel jumlah peserta yang ikut dalam PON nantinya bisa dilihat pada Tabel 2-120 di bawah:

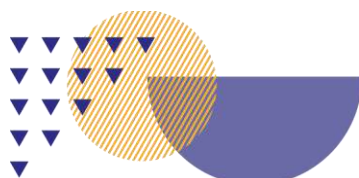
Tabel 2.139 Atlet Dan Pelatih Tahun 2021

No	Cabor	Atlet	Pelatih	Jumlah
1	Wushu	3	2	5
2	Billiar	4	2	6
3	Tinju	7	2	9
4	Pencak Silat	3	2	5
5	Kempo	1	1	2
6	Gulat	9	6	15
7	Karate	2	2	4
8	Dayung	28	8	36
9	Atletik	2	2	4
10	Menembak	12	4	16
Total		71	31	102

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Selatan

Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	0,00	0,00	0,00	47,33	47,43
2	Persentase Pemuda Yang Berperan Aktif di Masyarakat		0,00	0,00	0,02	0,04	0,02
3	Persentase Pemuda Yang Mempunyai Kapasitas Kepemimpinan		0,00	0,00	0,07	0,07	0,13
4	Persentase Pemuda Yang Berwirausaha		0,00	0,00	23,46	23,04	22,13
5	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif		0,00	0,00	16,46	18,99	37,97
6	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga		0,00	10,77	28	35,31	35,31





7	Jumlah Medali Yang Diraih di PON		0,00	15	-	37	-
8	Persentase Peningkatan Tenaga Keolahragaan Berprestasi		0,00	0,00	8,68	13,09	16,07
9	Persentase Atlet Binaan PPLP dan Sentra Olahraga		0,00	0,00	25,78	33,33	0,00
10	Persentase Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Yang Aktif		0,00	0,00	66,67	57,00	57,00
11	Persentase Pelaku Olahraga Mendapat Penghargaan		0,00	0,00	199,00	33,62	20,00
12	Persentase Kemitraan Dengan Pelaku Olahraga		0,00	0,00	111,60	89,80	88,94
13	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga-----delete		0,00	0,00	-	-	-
14	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Berstandar		0,00	72,77	73,75	75,00	76,25

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Selatan 2021

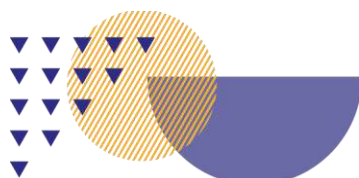
2.3.1.2.13 Statistik

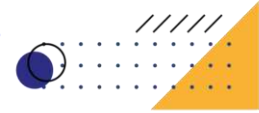
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. menggambarkan bahwa peran statistik sangat penting dalam perencanaan. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi pembangunan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Data yang tepat akan sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan. Pada undang-undang ini juga dijelaskan bahwa tugas penyelenggaraan statistic dilakukan oleh Badan Pusat Statistik khususnya terkait dengan data dasar pembangunan.

Sementara dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mendelegasikan data statistik kepada Pemerintah daerah. khususnya data Sektoral. Yang dimaksud dengan data sektoral adalah data yang diproduksi oleh pengampu urusan dan akan dimanfaatkan secara sektoral pula. sedangkan data dasar selain bersifat sektoral juga bersifat non sektoral. sehingga dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban membangun data sectoral sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014.

2.3.1.2.14 Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. urusan persandian merupakan urusan pemerintah daerah wajib non pelayanan dasar. Artinya pemerintah provinsi memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan ini sesuai dengan kewenangan. Salah satu kewenangan adalah pengamanan informasi pemerintah daerah. terlebih pada saat ini sistem informasi pemerintah daerah sudah bersifat paperless atau digital dan online yang dengan mudah diakses oleh siapa saja yang menguasai teknologi informasi.





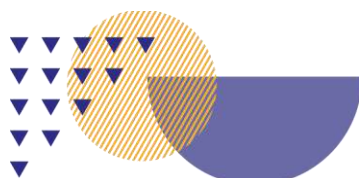
Berdasarkan arahan Kepala Lembaga Sandi Negara (LSN) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017. bahwa penyelenggaraan persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan. program dan kegiatan di bidang persandian yang meliputi perencanaan. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. pembiayaan dan pembinaan serta pengawasan. Kalimantan Selatan dalam melaksanakan urusan persandian dikaitkan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informasi daerah yang berkaitan dengan aplikasi informasi yang dikembangkan.

2.3.1.2.15 Kebudayaan

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kalimantan Selatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstelasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Seni dan budaya turut menghiasi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat menangkal pengaruh buruk dari kebebasan yang pesat arus informasi yang global. Oleh karena itu pelestarian budaya serta nilai-nilai luhur yang tercantum di dalamnya dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Beberapa deskripsi nilai-nilai luhur seni budaya sebagai berikut:

A. Deskripsi Warisan Budaya Takbenda (WBTb)

Kalimantan Selatan adalah Provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. karena kekayaan budaya Kalimantan Selatan sudah banyak ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia. Warisan Budaya Takbenda (WBTb) ini pada umumnya terdiri dari produk dan proses budaya yang dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa warisan itu mengambil bentuk kekayaan budaya. dibentuk oleh artefak berwujud seperti bangunan atau karya seni. Namun. banyak bagian budaya tidak berwujud. termasuk lagu. musik. tarian. drama. keterampilan. masakan. kerajinan tangan dan festival. Mereka adalah bentuk budaya yang dapat direkam tetapi tidak dapat disentuh atau disimpan dalam bentuk fisik. seperti di museum. tetapi hanya dialami melalui kendaraan yang mengekspresikannya.

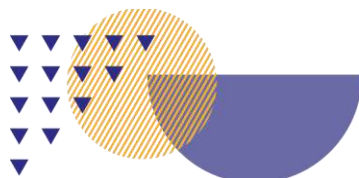


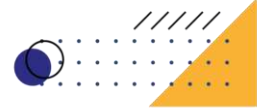


Dalam hal ini, Kalimantan Selatan khususnya di Bidang Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan sampai saat ini ada 33 Karya Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia dari tahun 2013 sampai 2020. sebagai berikut.

Tabel 2.141 Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan Tahun 2013 - 2020

No	Kode Tetap	Tahun	No. Penetapan	Nama Karya Budaya	Provinsi
1	39	2013	201300039	Sasirangan	Kalimantan Selatan
2	146	2014	201400146	Madihin	Kalimantan Selatan
3	147	2014	201400147	Aruh Baharin	Kalimantan Selatan
4	261	2015	201500261	Pasar Terapung	Kalimantan Selatan
5	262	2015	201500262	Lamut	Kalimantan Selatan
6	263	2015	201500263	Kuriding/ Guriding	Kalimantan Selatan
7	264	2015	201500264	Bubungan Tinggi	Kalimantan Selatan
8	265	2015	201500265	Ba'ayun Mulud/Maulid	Kalimantan Selatan
9	395	2016	201600395	Batatamba	Kalimantan Selatan
10	396	2016	201600396	Mamanda	Kalimantan Selatan
11	397	2016	201600397	Tari Baksa Kambang	Kalimantan Selatan
12	398	2016	201600398	Wayang Kulit Banjar	Kalimantan Selatan
13	399	2016	201600399	Air Guci	Kalimantan Selatan
14	542	2017	201700542	Tari Topeng Banjar	Kalimantan Selatan
15	543	2017	201700543	Kuda Gipang	Kalimantan Selatan
16	544	2017	201700544	Sinoman Hadrah	Kalimantan Selatan
17	545	2017	201700545	Wayang Gung	Kalimantan Selatan
18	546	2017	201700546	Balogo	Kalimantan Selatan
19	765	2018	201800765	Mappanretasi Pagatan	Kalimantan Selatan
20	766	2018	201800766	Tenun Pagatan	Kalimantan Selatan





No	Kode Tetap	Tahun	No. Penetapan	Nama Karya Budaya	Provinsi
21	767	2018	201800767	Damarulan/Damarwulan Banjarmasin	Kalimantan Selatan
22	1043	2019	201901043	Nasi Astakona	Kalimantan Selatan
23	1044	2019	201901044	Arsitektur Rumah Lanting	Kalimantan Selatan
24	1045	2019	201901045	Bagasing Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
25	1046	2019	201901046	Anyaman Purun Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
26	1047	2019	201901047	Kurung-kurung	Kalimantan Selatan
27	1048	2019	201901048	Bawanang	Kalimantan Selatan
28	1049	2019	201901049	Itatamba Banua	Kalimantan Selatan
29	1050	2019	201901050	Ma'iwuu	Kalimantan Selatan
30	1051	2019	201901051	Nimbuk	Kalimantan Selatan
31	1205	2020	202001205	Lampit Amuntai	Kalimantan Selatan
32	1204	2020	202001204	Bagandut	Kalimantan Selatan
33	1206	2020	202001206	Tlhang Bakambang	Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas Kebudayaan Prov. Kalimantan Selatan

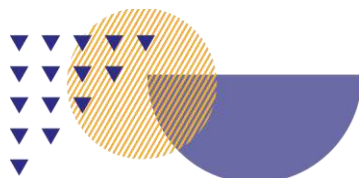
B. Deskripsi Kesenian

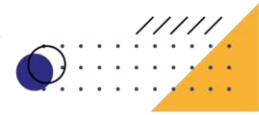
Lima buah tari Radap rahayu. mahelat lebo. tarung Mandau. Japin sigam dan bagandut. Misi kebudayaan ini mendapat apresiasi dan antusiasme dari masyarakat Finlandia. brand ambassador serta para dubes yang hadir karena menurut mereka kebudayaannya unik dan luar biasa. Dari KBRI Indonesia yang ada disana menjaditertarik untuk belajar kebudayaan masyarakat Banjar.

2.3.1.2.16 Perpustakaan dan Kearsipan

A. Perpustakaan

Masih rendahnya minat baca masyarakat Kalimantan Selatan memerlukan upaya keras agar masyarakat memiliki daya saing sebagai tenaga kerja. Untuk mendorong minat baca diperlukan berbagai fasilitasi baik secara persuasif maupun atraktif kepada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginisiasi pembuatan aplikasi iKalsel pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital perpustakaan.





Pada tahun 2020 terdapat pandemic Covid-19 yang menyebabkan layanan perpustakaan sempat ditutup sementara, namun para pemustaka dimudahkan apabila ingin meminjam dan membaca buku dengan layanan iKalsel. Aplikasi iKalsel memiliki koleksi sebanyak 4.036 judul. Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi selama kurun waktu tahun 2016-2020. Lebih lanjut mengenai perkembangan perpustakaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2-138 di bawah ini.

Tabel 2.142 Perkembangan Indikator Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Perpustakaan Umum Provinsi	2	2	2	2	2
Perpustakaan Umum Kab/Kota	13	13	13	13	13
Perpustakaan Desa	42	42	42	42	42
Jumlah Koleksi Buku	479.571	497.989	506.387	533.687	581.187
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	571.166	1.152.319	1.037.702	1.252.433	441.038

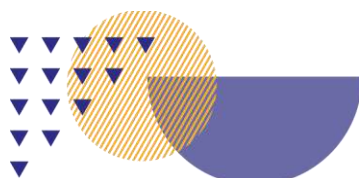
Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2020

B. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kalimantan Selatan dikembangkan berdasarkan klasifikasi arsip. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pengelolaan kearsipan, baik dari segi tenaga maupun teknologi peralatannya. Cakupan pelayanan kearsipan di lingkup instansi pemerintah dari tahun 2016 ke 2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berikut merupakan capaian cakupan pelayanan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2016-2020.

Tabel 2.143 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Rasio
		Mengelola Arsip Secara Baku	
2016	48	5	9,62
2017	52	8	15,38
2018	52	13	25
2019	52	7	13,46
2020	52	9	17,31





Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2020

Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Buku yang dipinjam		44,46	40,89	50,10	51,49	48,04
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan		8,26	16,28	24,81	29,51	10,25
3	Persentase SKPD yang mengelola Arsip berbasisi TIK		9,62	25	50	63,46	80,77

Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2021

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah. Potensi inilah yang menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi PDRB tahun 2018 sebesar 14.39 terhadap perekonomian daerah.

Perlu digaris bawahi bahwa sektor pertanian memiliki keunggulan dalam mewujudkan sustainability development karena sektor tersebut merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbarukan. Meskipun sekarang pertambangan dan penggalian mendominasi struktur perekonomian. namun sektor pertanian juga memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalian sehingga pergeseran sektor ekonomi dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bidang pertanian mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Kalimantan Selatan yaitu 14,39% untuk Tahun 2020. Namun kondisi ini bebanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan petani.

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Luas Baku Sawah untuk Tahun 2019 seluas 291.145 hektar. Namun dalam pengelolaannya, petani memiliki





tantangan dan hambatan tersendiri. Hal ini menjadi fokus utama dan terminologi melalui bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan kelembagaan pada skala ekonomi, efesensi usaha dan meningkatkan posisi tawar petani dari sub sektor hulu ke hilir.

Salah satu konsep dan model pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pengembangan *Food Estate* berbasis korporasi petani yang merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum baik itu berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. *Food Estate* sendiri menjadi salah satu program strategis pembangunan pertanian nasional yang merupakan solusi atau upaya menuju kedaulatan dan kemandirian pangan, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor sehingga ekonomi dapat tumbuh berkualitas dan masyarakat pertanian meningkat kesejahteraannya. Sejalan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi penyangga pangan dan pertanian Ibu Kota Negara baru melalui pengembangan *food estate* berbasis korporasi petani sesuai model karakteristik daerahnya dengan mengangkat potensi sumber daya lokal dan unggul dalam rangka tansformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian.

A. Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tanaman padi baik ladang maupun sawah yang memiliki produksi mencapai 553.143 ton dengan produktivitas 39,69 kuintal/ha untuk padi ladang pada tahun 2020. Selain itu, komoditas jagung juga cukup memiliki dominasi dalam produksi tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Selatan yakni memiliki panen sebanyak 338.311 ton pada tahun 2020 dengan produktivitas sebesar 55,03 kuintal/ha atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan produktivitas sebesar 59 kuintal/ha.

Tabel 2.145 Luas Panen, Produksi, serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018-2020

Jenis Tanaman	2018			2019			2020		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
Padi (sawah)	594.827	2.432.248	41	578.245	2.213.467	38	2.195.321	553.143	39,69



Jenis Tanaman	2018			2019			2020		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ku/Ha)
& ladang)									
Jagung	93.793	431.490	46	117.568	691.642	59	61.474	338.311	55,03
Kedelai	20.366	27.042	13	3.731	4.702	13	1.763	2.297	13,03
Kacang Tanah	5.214	5.432	10	4.368	4.186	10	3.006	3.512	11,68
Kacang hijau	594	720	12	196	226	12	303	324	10,69
Ubi kayu	2.612	89.136	341	2.127	70.730	333	1.686	53.539	317,59
Ubi jalar	1.086	26.120	240	766	17.434	228	575	9.042	157,18

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan. 2020

B. Hortikultura

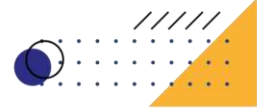
Pada sub sektor hortikultura. terdapat dua komoditas besar yakni komoditas buah-buahan dan sayuran. Pada komoditas buah-buahan prioritas adalah tanaman jeruk siam dengan produksi 158.462 ton. pisang dengan produksi sebanyak 78.772 ton. durian dengan produksi sebanyak 17.890 ton. dan nanas sebanyak 12.986 ton untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel 2-127. di bawah;

Tabel 2.146 Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018 - 2020(Dibuat Antar Wilayah)

Jenis Tanaman	2019			2020		
	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Jeruk siam	4.219	141.232	33,48	4.784	158.462	33,12
Pisang	1.885	62.813	33,32	1.484	78.772	53,74
Durian	2.110	27.422	13,00	1.447	17.890	12,36
Nanas	159	12.358	77,88	157	12.986	82,75

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan 2020

Pada komoditas sayuran utama. pada tahun 2020. yaitu bawang merah dengan produksi sebanyak 1.476 ton. Cabe Besar dengan produksi 12.969 ton dan Cabe Rawit dengan Produksi 15.616 ton. dan petai dengan produksi 2.250 ton untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut;



Tabel 2.147 Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018 - 2019

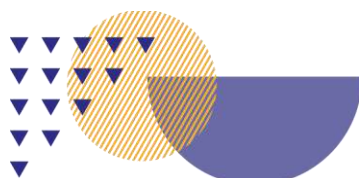
Jenis Tanaman	2019			2020		
	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
Bawang Merah	186	1.143	6,15	89	462	5,19
Cabe Besar	1.638	11.392	6,95	1.476	12.969	8,79
Cabe Rawit	2.428	3.768	5,67	2.329	15.616	6,71
Petai	401	1.736	4,33	453	2.463	5,44

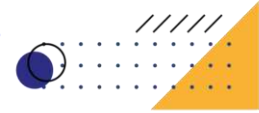
Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan 2020

Tabel 2.148 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Beras (SIMTP)	Ton	1.451.537	1.538.614	1.597.646	1.454.026	1.372.639
2	Beras (KSA)	Ton			781358	790555	677105
3	LPE Pertanian Tanaman Pangan		6.03	2.53	2.08	5.99	3.25
4	Persentase Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Pangan						
5	Padi		0.94	1.81	-4.96	-6.39	-0.32
6	Jagung		0.18	-11.52	-11.44	27.88	-14.49
7	Kedelai		4.4	-4.04	-2.86	-5.09	-1.29
8	Persentase Peningkatan Produksi Produktivitas Hortikultura						
9	Bawang Merah		-19.82	43.59	-22.18	17.12	-14.65
10	Cabe		20.35	-13.69	6.67	10.18	42.54
11	Jeruk		-4.17	9.07	12.07	-3.98	6.69
12	Persentase peningkatan luas tambah tanam 2/thn		7.09	4.12	4.36	-2.79	-4.63
13	Rendemen Gabah ke Beras		65.38	65.38	65.38	65.38	65.69
14	Persentase Peningkatan Penyuluh yang melaksanakan kaji terap yang dapat diterapkan petani		29	43	57	71	86
15	Persentase peningkatan Balai Penyuluhan dari UTAMA ke ADITAMA		23	38	54	69	85
16	Peningkatan Kelompok Tani dari MADYA ke UTAMA		49	45	58	71	86

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Prov. Kalimantan Selatan 2021





C. Perkebunan

Perkebunan di Kalimantan Selatan meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta, dengan luas seluruhnya meningkat dari 758.135 pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dengan luas 759.120 hektar, dengan rincian sebagaimana Tabel 2-150.

Tabel 2.149 Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2019

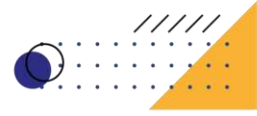
Jenis Perkebunan	Luas Tanaman Perkebunan		Produksi Tanaman Perkebunan Ton	
	2018	2019	2018	2019
Perkebunan Rakyat	412.584	410.928	459.023	460.095
Perkebunan Besar Negara (PTP)	20.421	19.811	24.144	24.856
Perkebunan Besar Swasta (PBS)	326.115	327.396	860.347	863.692
JUMLAH	759.120	758.135	1.343.514	1.348.643

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2020

Pada sub sektor perkebunan, dominasi tanaman kelapa sawit pada tahun 2019 masih tinggi yakni sebesar 1.117.144ton mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2018 sebesar 1.110.372 dan diikuti tanaman karet sebesar 193.366ton, serta diikuti lagi dengan Kebun Karet yakni 193.366 dan berikutnya untuk produksi kelapa 25.326 pada tahun 2019 dan bisa dilihat lebih jelasnya pada Tabel 2-151.

Tabel 2.150 Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2018 - 2019

Jenis Tanaman	2018			2019		
	Luas Tanam	Produksi	Produktivitas	Luas Tanam	Produksi	Produktivitas
	Ha	Ton	Ton/Ha	Ha	Ton	Ton/Ha
Kelapa Sawit	424.932	1.110.372	3.32	424.557	1.117.144	3.25
Karet	270.825	194.930	1.03	271.715	193.366	1.02
Kelapa	40.872	25.245	0.89	40.792	25.326	0.89
Kopi	3.053	1.517	0.63	2.996	1.414	0.61
Lada	490	157	0.53	486	153	0.53
Kemiri	3.783	1.951	0.64	3.815	1.942	0.64
Kayu Manis	2.744	2.457	1.63	2.755	2.457	1.63
Aren	2.682	2.114	1.35	2.675	2.105	1.35
Sagu/Rumbia	6.510	4.045	1.45	5.152	4.018	1.64
Purun	1.439	360	0.49	1.440	360	0.49
Kakao	685	88	0.38	685	88	0.38
Cengkeh	481	144	0.39	468	141	0.39



Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2020

Kebijakan nasional pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tanggal 22 Nopember 2019 berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024. Peraturan itu dimandatkan kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) dan 26 provinsi penghasil sawit di seluruh Indonesia. Lima sasaran RAN KSB yakni: 1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, 2) penyelesaian status dan legalisasi lahan, 3) pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, 4) meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, dan 5) mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Inpres ini menjadi momentum penting untuk perbaikan tata kelola sawit oleh semua pihak. Inpres ini memberikan mandat di antaranya: penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa, serta percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini telah menjadi penyokong PDRB utama dan diharapkan berkelanjutan. Aspek ekonomi yang telah dibangun perlu diarahkan untuk ikut serta dalam membangun perekonomian di Kalimantan Selatan. Sesuai amanat Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024 dan diturunkan melalui Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan atas Perda No.2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan akan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) pada Tahun 2022.

Kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Selatan untuk sektor pertanian (perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan) Tahun 2017 sebesar US \$ 1.026.862.000 (penyumbang devisa nomor 2 di Provinsi Kalimantan Selatan). Luas kebun kelapa sawit 538.064,48 ha (14,51% dari luas provinsi Kalsel) terdiri dari Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit (PBS-KS) 339.286,26 ha, kebun plasma (masyarakat/mitra) 94.746,22 Ha dan perkebunan swadaya masyarakat





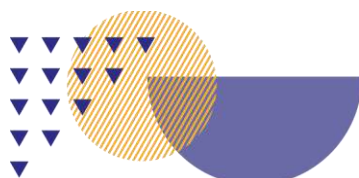
seluas 104.032 ha. Penyerapan tenaga kerja langsung di PBS-KS sebanyak 59.435 orang. Penerapan sertifikasi ISPO ataupun RSPO. Dari 97 PBS KS di Provinsi Kalsel terdapat 40 PBS-KS operasional (wajib ISPO). PBS-KS yang wajib ISPO ini telah mendapatkan sertifikat dari Lembaga Akreditasi Internasional sebanyak 23 perusahaan (57,50%), sedangkan 17 perusahaan masih dalam proses sertifikasi.

D. Peternakan

Sub sektor peternakan masih menjadi sektor penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Peran strategis sub sektor peternakan baik secara ekonomis maupun ekologis ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDRB yang termasuk dalam rumpun pertanian. Untuk sub sektor peternakan berdasarkan undang-undang No 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semua undang-undang tersebut juga berintikan untuk kesejahteraan masyarakat peternak yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak. Pelaksanaan Program peternakan dilakukan dengan pendekatan ekonomis, pendekatan agribisnis dan pendekatan teknis. Dengan pendekatan ekonomis yaitu perbaikan tataniaga ternak dan produk ternak, mendorong insentif peternakan dan pemberdayaan peternak.

Belum optimalnya peningkatan produksi dan pengembangan hilirisasi potensi unggulan sub sektor Peternakan, yang memiliki potensi yang begitu besar sebagai salah satu leading sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, perlunya upaya sejalan dengan arahan daerah yakni menitikberatkan pembangunan industri berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas (termasuk sub sektor peternakan).

Dalam rangka mewujudkan agenda besar tersebut, maka Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun pola/rancang bangun sebagai haluan dalam pembangunan sub sektor peternakan dari hulu sampai hilir dengan komoditas ternak yang diunggulkan adalah kerbau, itik alabio dan sapi. Dalam hal ini dikembangkan Food Estate untuk komoditas ternak berbasis korporasi peternak yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka sebagai daerah penyangga pangan untuk ibu kota negara yang baru melalui pemanfaatan sumber daya lokal.





Jenis ternak yang dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Informasi perkembangan jumlah populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.151 Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008-2019

Tahun	Jumlah Ternak Besar	Jumlah Ternak Kecil	Jumlah Unggas
2008	255.228	127.525	39.307.685
2009	262.833	132.575	48.661.987
2010	273.943	136.258	60.769.449
2011	162.755	115.845	62.777.387
2012	178.656	114.512	60.849.131
2013	155.793	72.507	69.497.801
2014	166.865	72.787	75.748.331
2015	175.245	69.456	84.465.566
2016	180.896	66.615	100.091.662
2017	188.395	71.901	106.239.308
2018	197.456	89.170	119.247.723
2019	206.732	85.555	126.334.793

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2020

Tabel 2.152 Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2010-2019

Tahun	Telur Itik	Telur Ayam Buras	Telur Ayam Ras
2010	27.733.704	11.161.859	28.990.293
2011	30.672.770	9.782.194	26.826.031
2012	31.640.856	10.511.677	29.219.878
2013	30.105.890	8.192.032	33.947.005
2014	29.489.975	7.509.220	47.650.943
2015	28.677.737	8.088.808	60.261.831
2016	27.421.680	7.738.093	64.574.213
2017	28.396.218	7.855.756	77.225.904
2018	29.245.681	7.924.743	85.061.393
2019	33.128.070	8.230.455	60.910.991

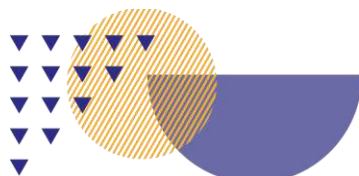
Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2020

Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	LPE Perkebunan		-4.13	5.60	0.52	0.67	-0.36

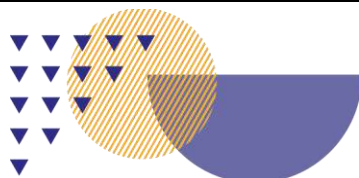


N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	LPE Peternakan		8.34	8.66	7.58	7.68	1.76
3	Persentase Peningkatan Produksi Daging (5)	Ton	89.648.00	105.826.00	106.001.00	84.435.00	79.130.00
4	Persentase Peningkatan Produksi Telur (7)	Ton	99.639.00	113.377.00	122.232.00	103.199.00	114.882.00
5	Persentase Peningkatan Produksi Susu (5)	Ton	126.00	112.00	260.00	202.00	112.00
6	Persentase Peningkatan Skala Usaha Ternak	Kelompok	40.00	68.00	53.00	30.00	0.00
7	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Peternakan		2.00	2.00	14.10	10.26	6.41
8	Persentase peningkatan nilai tambah hasil ternak		41.00	53.00	65.00	68.14	5.00
9	Persentase peningkatan revitalisasi lembaga pemasaran ternak		29.00	97.80	32.26	33.80	20.00
10	Persentase produksi ternak yg dipasarkan keluar daerah	Ekor	4.107.945.00	4.420.620.00	5.889.061.00	1.947.472.00	4.521.288.00
11	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak Sapi. sapi perah. kerbau dan kambing	<	3.02	2.27	2.48	2.78	2.00
12	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak Ayam buras dan itik	<	4.80	3.58	3.12	3.82	0.02
13	Persentase Penurunan Angka	<	3.16	2.83	2.53	2.94	0.02





N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Kematian Ternak Ayam ras pedaging dan petelur						
14	Persentase Unit Usaha yang Bersertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		44.00	16.00	13.79	13.79	20.61
15	Persentase peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan Karet	Kg/Ha	47.20	63.51	1.071.00	70.09	72.66
16	Persentase peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit	Ton/Ha	4.45	4.45	4.86	1.11	1.12
17	Persentase peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	10.326.00	45.258.00	1.354.00	44.455.00	43.550.00
18	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan		5.00	5.00	14.07	14.07	0.00
19	Persentase peningkatan produk hasil perkebunan karet yang berkualitas	Ton	35.98	65.20	30.151.00	26.960.00	35.410.00
20	Persentase penurunan konflik dan gangguan usaha perkebunan	Konflik	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
21	Persentase penambahan kemitraan pemasaran Tanaman perkebunan (UPPB)	UPPB	5.00	6.00	21.00	17.00	0.00
22	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani Utama	KT	75.00	76.00	81.00	73.00	81.00





NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
23	Persentase penurunan Gangguan OPT	Ha	18.561.00	5.453.00	32.685.00	1.000.00	5.172.00

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.2.2 Kelautan dan Perikanan

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan tahun 2020 berada pada posisi terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu 4,3%. Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) tahun 2020 mengalami defisit, yaitu berada pada angka 98,90. Nilai ekspor perikanan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25,90% dibanding capaian tahun 2019.

Status proporsi tangkapan laut di WPP-712 dan WPP-713 cenderung berada di atas batasan biologis aman (>100% dari JTB yang ditentukan). Produksi tangkapan laut tahun 2018 pernah mengalami kondisi lebih besar 28,63% dari JTB, dan lebih besar 2,90% dari potensi lestari (MSY).

Nelayan di Kalimantan Selatan masih banyak yang belum terlatih tentang teknologi terapan penangkapan ikan sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan. Dari 33.321 nelayan di Kalimantan Selatan, sd. tahun 2020 yang telah dilatih sebanyak 150 orang atau 0,45%.

Terbatasnya pembangunan dan pengembangan prasarana perikanan tangkap di titik sentra penangkapan ikan nelayan. khususnya dalam rangka mendukung penerapan sistem rantai dingin terhadap hasil tangkapan nelayan

Ketersediaan terbatas serta permintaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat, menyebabkan harga ikan gabus haruan cenderung mengalami peningkatan pada musim tertentu, sehingga menjadi sumber pemicu terjadinya inflasi daerah

Kawasan ekosistem pesisir kritis yang belum direhabilitasi masih luas. Dari total ekosistem kritis seluas 12.353,10 ha, kawasan yang telah direhabilitasi baru mencapai 75,80 ha atau 0,614%.

Pembudidaya ikan di Kalimantan Selatan masih banyak yang belum terlatih tentang teknologi terapan usaha pembudidayaan ikan sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan. Dari 29.292 pembudidaya ikan di Kalimantan Selatan, sd. tahun 2020 yang telah dilatih sebanyak 330 orang atau 1,13%. Demikian pula dengan



pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kalimantan Selatan yang belum terlatih tentang penerapan sistem standar mutu dan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai ketentuan teknis yang dianjurkan. Dari 3.087 pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kalimantan Selatan, sd. tahun 2020 yang telah dilatih sebanyak 180 orang atau 5,83%.

Kelompok usaha perikanan mandiri dan berprestasi dalam mengelola kelembagan kelompoknya masih rendah. Dari 1.831 kelompok, tercatat sd. tahun 2020 yang telah meningkat kelas kelembagaannya sebanyak 69 kelompok atau 3,77%. Proporsi kelompok usaha perikanan yang menerima paket bantuan hibah sd. tahun 2020 baru mencapai 12,18%. Tercatat dari 1.831 kelompok yang terbentuk di Kalimantan Selatan, jumlah kelompok usaha perikanan yang telah menerima dan memanfaatkan paket bantuan hibah sebanyak 223 kelompok.

Belum berkembangnya sistem pengembangan usaha perikanan berorientasi kemitraan berbasis CSR.

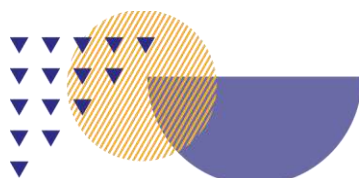
Belum efektifnya pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masih terbatasnya kegiatan restocking di kawasan reservaat perairan umum daratan. Sd. tahun 2020, tercatat baru 1 kawasan reservaat atau 16,67% dari 6 kawasan reservaat yang ada di Kalimantan Selatan.

Masih adanya pelaku usaha perikanan yang belum mematuhi ketentuan berusahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rerata kepatuhan pelaku usaha perikanan baru mencapai 70,20%.

Masih rendahnya kontribusi perikanan budidaya laut terhadap total produksi perikanan. Pada tahun 2020 hanya memberikan kontribusi sebesar 33 ton atau 0,023%. Oleh karena itu, dalam pengembangan industri perikanan terpadu berbasis komoditas budidaya laut masih terkendala pada ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku.

Masih diperlukannya ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan industrialisasi usaha perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu SKPT, SPTD, HPI, pengembangan ikan Gabus Haruan skala industri, serta Pengembangan fasilitas pelayanan UPTD Provinsi. Pada tahun 2020, total pagu anggaran yang tersedia untuk mendukung kelima





prioritas pembangunan industrialisasi usaha perikanan tersebut sebesar Rp. 15.321.691.173,00.

Masih adanya kawasan kluster sentra usaha perikanan yang belum difasilitasi pengelolannya. Saat ini terdapat 50 kluster, namun fasilitasi untuk pengembangan tangkahan nelayan sd. tahun 2020 belum pernah dilaksanakan.

Masih terjadinya kasus illegal fishing di WPPNRI 712 dan WPPNRI 713, terutama kasus dan konflik kapal nelayan cantrang yang berasal dari luar daerah. Selain itu, terbatasnya dukungan sumber daya pengawasan di lapangan menjadi permasalahan yang dijumpai sampai saat ini.

Masih terjadinya kasus illegal fishing di perairan umum seperti penggunaan stroom dan penangkapan anak-anak ikan. Luasnya jangkauan pengawasan masih terkendala dengan terbatasnya dukungan sumber daya pengawasan di lapangan menjadi permasalahan yang dijumpai sampai saat ini.

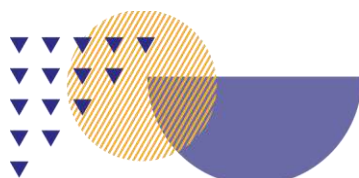
Mahalnya biaya pemberkasan perkara sd. Tahap P. 21. Sampai dengan 2020, APBD Provinsi Kalimantan Selatan belum pernah menganggarkan untuk mengakomodir proses pemberkasan tersebut.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, khususnya penerapan, keaktifan dan tingkat pemanfaatan/pendayagunaan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi pelaku usaha perikanan. Pada tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh nilai RB sebesar 80,00.

Terdapat 3 komponen penilaian SAKIP yang perlu ditingkatkan kualitas dan akuntabilitasnya, yaitu: Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Pada tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh nilai SAKIP sebesar 82,76.

Masih terjadinya penumpukan penyerapan anggaran pada triwulan IV setiap tahunnya. Selain itu besarnya selisih antara realisasi fisik dan realisasi keuangan setiap bulannya, dengan gap mencapai > 5%. Nilai kinerja anggaran tahun 2020 sebesar 80,00.

Jika dilihat dari produksinya. baik jumlah rumah tangga perikanan. produksi maupun nilainya juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian tertinggi berada pada tahun 2019 dimana jumlah rumah tangga perikanan mencapai 66.532 rumah tangga dengan produksi sebesar 434.765,00 ton dan nilai produksinya mencapai Rp 5.870.300.000.000,-.





Tabel 2.154 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga. Produksi. dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2010-2020

Tahun	Jumlah Ruta Unit	Produksi (Ton)	Nilai produksi (Rp)
2010	56.744	242.126,30	4.038.067.330
2011	60.919	247.741,10	4.581.337.731
2012	67.095	284.300,70	5.578.497.765
2013	67.191	339.437,28	6.376.406.906
2014	67.487	364.794,07	6.972.197.094
2015	67.980	368.451,70	7.954.889.861
2016	60.273	408.444,50	5.544.738.736
2017	66.435	412.326,10	5.571.503.232
2018	66.318	437.278,10	5.719.062.120
2019	66.532	434.765,00	5.870.300.000
2020 *)	127,799	451.598,51	6.856.223.371

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.155 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indek	5.33	7.75	7.93	5.01	4.30
2	Ikan (ton)	Ton	408.444.50	418.761.73	428.618.00	434.765.48	451.598.51
3	LPE Perikanan	Indek	5.33	7.75	7.93	5.01	4.30
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	160714.50	164715.03	177852.20	178277.36	185179.81
5	Angka konsumsi Ikan masyarakat	Kg/Kapita/Tahun	48.96	50.20	51.65	57.99	60.24
6	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	247730.00	254046.70	250765.80	256488.12	266418.70

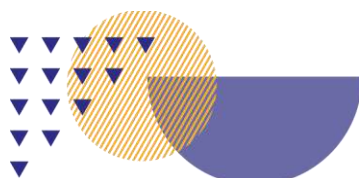


N O	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
7	Persentase Pelaku Usaha yang Patuh		58.00	67.00	95.00	96.00	100.00
8	Jumlah Kasus Illegal Fishing yang terjadi (usulan JFP tertangani)	Kasus	20.00	15.00	11.00	10.00	9.00

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.3.2.3 Kehutanan

Perkembangan produksi kayu bulat yang merupakan salah satu produk unggulan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya usaha izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun produksi kayu yang memang menurun. Namun demikian, sub sektor kehutanan terus melakukan perbaikan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan sehingga perkembangannya terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020.





Tabel 2.156 Perkembangan Produksi Kayu Bulat (m³) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN										JUMLAH	
		2016		2017		2018		2019		2020		BATAN G	VOLUME (M3)
		BATAN G	VOLUME (M3)	BATAN G	VOLUME (M3)	BATAN G	VOLUME (M3)	BATAN G	VOLUME (M3)	BATAN G	VOLUME (M3)		
I	IUPHHK-HA (HPH)												
A.	Kabupaten Tabalong												
1	PT. Aya Yayang Indonesia	3.60 7	17.356, 18	6.02 8	22.334,7 7	4.47 0	16.569, 08	4.76 2	17.624, 94	4.771	17.008, 49	23.63 8	90.893,4 6
2	PT. Elbana Abadi Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Hasnur Jaya Utama	-	-	363	1.630,79	-	-	-	-	-	-	363	1.630,79
B.	Kabupaten Kotabaru												
1	PT. Inhutani II (Pulau Laut)	-	16.619, 25	-	2.975,44	-	16.245, 55	-	8.985,7 1	-	7.176,4 5	-	52.002,4 0
2	PT. Inhutani II Unit Senakin	-	-	-	834,10	-	1.004,2 6	-	1.148,3 1	-	-	-	2.986,67
C.	Kabupaten Tanah Bumbu												
2	PT. Kirana Chatulistiwa	-	21.169, 66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.169,6 6
3	PT. Batulicin Bumi Bersujud (HTI)	-	2.759,2 1	-	9.275,98	-	5.653,7 4	-	1.169,3 1	-	1.243,6 1	-	20.101,8 5
4	PT. Jhonlin Agro Mandiri	-	-	-	325,56	-	2.308,9 2	-	4.235,2 8	-	1.559,2 5	-	8.429,01
D.	Kabupaten Tanah Laut												
1	PT. Hutan Rindang Banua	-	##### ##	-	80.148,6 7	-	7.866,8 1	-	9.463,8 9	-	3.793,6 3	-	205.146, 86
III	IPK/IPPKH/HGU/PERORANGAN												
A.	Kabupaten Tabalong												
1	PT. Adaro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	510,64	-	-	-	510,64
2	PT. Adaro SK.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360,03	-	360,03
B.	Kabupaten Kotabaru												
1	PT. Kalimantan Energi Lestari	-	-	-	209,29	-	635,24	-	624,14	-	9,39	-	1.478,06
2	PT. Banjar Asri	-	-	-	392,66	-	-	-	-	-	-	-	392,66
3	UD. Sarah Mulia	-	774,88	-	190,51	-	-	-	-	-	-	-	965,39
4	PHAT Abdul Basid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,43	-	130,43





NO	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN										JUMLAH	
		2016		2017		2018		2019		2020		BATAN G	VOLUME
		BATAN G	VOLUME	BATAN G	VOLUME	BATAN G	VOLUME	BATAN G	VOLUME	BATAN G	VOLUME		
			(M3)		(M3)		(M3)		(M3)		(M3)		(M3)
5	PHAT BAIHAQI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,79	-	73,79
C.	Kabupaten Tanah Bumbu												
1	CV. Hidup Hidayah Ilahi	-	-	-	43,65	-	-	-	231,26	-	-	-	274,91
2	PT. Tunas Inti Abadi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT. Borneo Indobara	-	1.559,97	-	-	-	-	-	2.401,80	-	23.348,36	-	27.310,13
4	PT. Mitra Setia Tanah Bumbu	-	-	-	-	-	323,69	-	194,26	-	-	-	517,95
5	IPPKH PT. Borneo Indobara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.190,14	-	6.190,14
D.	Kabupaten Tanah Laut												
1	CV. Faris Motor	-	431,50	-	655,72	-	-	-	-	-	-	-	1.087,22
2	PT. Anugerah Lumbang Energi	-	-	-	-	-	-	-	8,10	-	-	-	8,10
E.	Kabupaten Tapin												
1	PT. Binuang Mitra Bersama	-	-	-	-	-	-	-	149,72	-	-	-	149,72
2	PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,01	-	409,01
3	IPPKH PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	457,08	-	143,10	-	600,18
4	IPPKH SK808 PT. Bhumi Rantau Energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,44	-	7,44
	JUMLAH	3.607	60.670,65	6.391	119.017,14	4.470	50.607,29	4.762	47.204,44	14.691	61.453,12	24.001	442.826,50

KALIMANTAN SELATAN





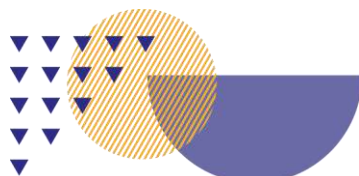
Tabel 2.157 Kondisi Lahan Kritis dan sangat Kritis di Kalimantan Selatan Tahun 2019

Kabupaten	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total (Ha)
Kab. Balangan	22.142.09	46.073.12	75.875.32	15.839.98	22.516.24	182.446.75
Kab. Banjar	141.608.24	103.690.24	105.675.57	31.917.79	71.351.96	454.243.80
Kab. Barito Kuala	178.931.93	62.102.61	212.68	139.53		241.386.75
Kab. Hulu Sungai Selatan	69.602.08	48.770.47	19.058.21	8.532.39	23.835.05	169.798.20
Kab. Hulu Sungai Tengah	41.080.67	20.777.10	51.690.75	6.327.02	25.810.99	145.686.53
Kab. Hulu Sungai Utara	48.667.30	41.872.98		70.19		90.610.47
Kab. Kotabaru	246.748.41	354.415.31	218.432.36	104.230.13	19.951.15	943.777.36
Kab. Tabalong	63.379.74	86.432.65	164.079.67	32.424.66	10.437.74	356.754.46
Kab. Tanah Bumbu	154.472.75	162.993.65	100.471.17	41.745.61	27.122.07	486.805.25
Kab. Tanah Laut	109.861.68	137.484.32	92.862.47	32.400.02	11.585.93	384.194.42
Kab. Tapin	117.129.61	57.232.79	24.666.84	6.390.98	11.757.14	217.177.36
Kota Banjarbaru	15.204.13	12.737.14	3.434.61	55.69	16.18	31.447.75
Kota Banjarmasin	8.698.54	1.056.18				9.754.72
Total (Ha)	1.217.527.17	1.135.638.56	856.459.65	280.073.99	224.384.45	3.714.083.82

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.158 Kondisi Lahan Kritis Dalam Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan Tahun 2020

Kabupaten	Cagar Alam	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Tahura	Jumlah Total
Kab. Balangan	-	20.389.05	18.309.56	-	23.69	-	38.722.31





Kab. Banjar	1.021.41	17.654.41	55.331.64	1.759.03	11.945.95	14.950.65	102.663.09
Kab. Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-
Kab. Hulu Sungai Selatan	228.51	18.468.26	9.564.80	-	-	-	28.261.58
Kab. Hulu Sungai Tengah	-	8.339.22	8.293.82	-	10.109.86	-	26.742.90
Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	70.19	-	-	70.19
Kab. Kotabaru	2.211.36	34.967.98	78.882.38	3.113.70	1.083.10	-	120.258.52
Kab. Tabalong	-	9.209.75	25.926.85	2.435.33	4.415.15	-	41.987.07
Kab. Tanah Bumbu	273.50	6.407.02	47.332.08	5.527.94	3.393.37	-	62.933.91
Kab. Tanah Laut	-	9.773.16	20.011.84	5.266.21	3.034.91	1.172.86	39.258.98
Kab. Tapin	-	9.136.24	4.820.50	-	933.28	-	14.890.02
Kota Banjarbaru	36.85	-	-	-	-	-	36.85
Grand Total	3.771.63	134.345.10	268.473.46	18.172.40	34.939.31	16.123.51	475.825.42

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Selatan 2021

Tabel 2.159 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan		10,76	10,77	10,93	10,94	10,95
2	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL			3,16	5,78	5,67	4,30
3	Persentase penurunan kasus ilegal logging			72	0	35,9	2
4	Persentase peningkatan pemanfaatan RPHJP di KPH				6,66	5,53	5,87
5	Persentase penambahan luas izin dan pengelolaan perhutanan sosial				45,68	35,19	17,59
6	Persentase penerimaan PNPB dan Retribusi Daerah		14,03	24,38	19,24	20,78	18,08
7	Persentase penurunan kejadian kebakaran atau hotspot dalam kawasan hutan		93,37	-4,78	-194,59	83,85	69,32



2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Alam

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertambangan yang didominasi oleh komoditas batubara, dimana sektor pertambangan dan penggalan memberikan kontribusi PDRB yang signifikan. Perkembangan produksi batubara PKP2B pada tahun 2020 sebesar 84,688,476.23 ton, sedangkan produksi batubara untuk IUP 63,186,892.03 ton.

Tabel 2.160 Jumlah Produksi Batubara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

No	Produk Batubara	2016	2017	2018	2019	2020
1	PKP2B (Ton)	91,606,240.22	77,504,581.87	84,165,741.28	79,159,505.21	84,688,476.23
2	IUP (Ton)	60,122,225.01	70,501,664.40	76,508,203.71	69,646,388.62	63,186,892.03
Total		151,728,465.23	148,006,246.27	160,673,944.99	148,805,893.83	147,875,368.26

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021

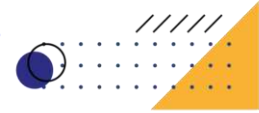
Tabel 2.161 Data Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan

No	Tahun	Keperluan	PKP2B (Ton)	IUP (Ton)	Total (Ton)
1	2016	Domestik	38,263,438.98	29,250,424.33	151,979,326.40
		Ekspor	55,565,267.17	28,900,195.92	
2	2017	Domestik	26,529,896.65	35,194,223.65	132,841,869.98
		Ekspor	37,378,771.67	33,738,978.01	
3	2018	Domestik	28,886,821.44	33,398,611.31	151,208,798.83
		Ekspor	47,303,998.18	41,619,367.90	
4	2019	Domestik	28,844,142.74	33,710,100.39	151,691,531.89
		Ekspor	54,105,491.00	35,031,797.76	
5	2020	Domestik	32,918,656.86	35,778,486.51	152,386,886.74
		Ekspor	56,461,786.68	27,227,956.69	

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021

Tabel 2.162 Jumlah IUP di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

IZIN USAHA PERTAMBANGAN	
-------------------------	--



No	Kabupaten	Batubara	Logam	Mineral Bukan Logam	Batuan	IUP PMA/Terbitalan Pusat	Jumlah IUP PMDN	Total IUP/Kabupaten
1	Tabalong	17	0	1	7	2	25	27
2	Balangan	10	2	0	2	3	14	17
3	Hulu Sungai Selatan	2	0	0	3	0	5	5
4	Hulu Sungai Tengah	0	0	0	3	0	3	3
5	Tapin	14	1	0	6	0	21	21
6	Banjarnegara	29	0	1	35	1	65	66
7	Barito Kuala	0	0	0	1	0	1	1
8	Tanah Laut	46	6	0	31	0	83	83
9	Tanah Bumbu	57	3	0	8	3	68	71
10	Kotabaru	25	4	9	16	3	54	57
JUMLAH		200	16	11	112	12	339	351

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2021

Perkembangan fasilitas listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan dimana terlihat pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Baik pelanggan rumah tangga, usaha, dan industri, maupun umum terjadi kenaikan yang cukup menjanjikan dimana jumlah pelanggan tahun 2016 sebanyak 1.046.405 pelanggan, dimana pada tahun 2020 jumlah pelanggan menjadi sebanyak 1.300.110 pelanggan. Perkembangan Jumlah Pelanggan listrik Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2020 bisa dilihat di tabel di bawah.

Tabel 2.163 Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020

Jenis Pelanggan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga [R]	963.395	1.017.787	1.086.302	1.142.557	1.192.400
Industri [I]	542	602	632	651	679
Bisnis [B]	48.497	53.449	55.840	57.433	59.841
Umum	33.971	37.337	-	-	-
Sosial [S]	-	-	32.617	35.520	37.721
Gedung dan kantor	-	-	5.439	5.696	5.693
Jalan umum	-	-	2.941	3.310	3.776
Jumlah	1.046.405	1.109.175	1.183.771	1.245.167	1.300.110

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2021



Tabel 2.164 Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2014 - 2020

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Laut	59.862	80.404	104.163	111.249	118.655	126.240	131.634
Kotabaru	36.955	49.409	39.268	40.189	50.737	55.303	59.373
Banjar	94.136	120.100	106.421	112.392	119.522	126.793	132.370
Barito Kuala	69.700	75.017	79.893	85.237	91.425	97.435	101.210
Tapin	55.798	50.911	61.344	65.437	69.696	73.294	76.381
Hulu Sungai Selatan	52.185	54.577	56.698	61.978	65.456	69.386	72.022
Hulu Sungai Utara	65.646	68.836	70.919	74.305	80.826	84.875	87.482
Hulu Sungai Tengah	64.936	54.562	72.149	75.470	78.301	82.267	84.467
Tabalong	53.342	69.472	58.567	61.729	64.938	68.282	71.043
Tanah Bumbu	95.193	70.315	65.214	72.389	77.814	83.905	88.617
Balangan	23.993	25.599	26.830	28.463	30.485	32.292	33.995
Banjarmasin	181.761	180.353	193.878	201.102	209.169	210.882	221.301
Banjarbaru	95.589	99.096	111.061	119.235	126.747	134.213	140.215
Kalimantan Selatan	949.096	998.651	1.046.405	1.109.175	1.183.771	1.245.167	1.300.110

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan dalam Angka 2021

Tabel 2.165 Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Elektrifikasi	%	88.34	92.12	97.36	99.27	99.25
2	Rasio Desa Berlistrik	%	96.35	96.41	97.61	97.4	98.31
3	Persentase penurunan muka air tanah dan kualitas air tanah	%	0	4.35	3.32	7.74	16.48
4	Persentase potensi energi baru terbarukan yang dapat dimanfaatkan	%	0	0	83.33	71.4	71.4
5	Persentase luas lahan terganggu yang telah direklamasi (IUP)	%	0	0	100	44.21	77.11
6	Persentase luas lahan terganggu yang telah direvegetasi (IUP)	%	0	0	0	20.2	26.76

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan 2021

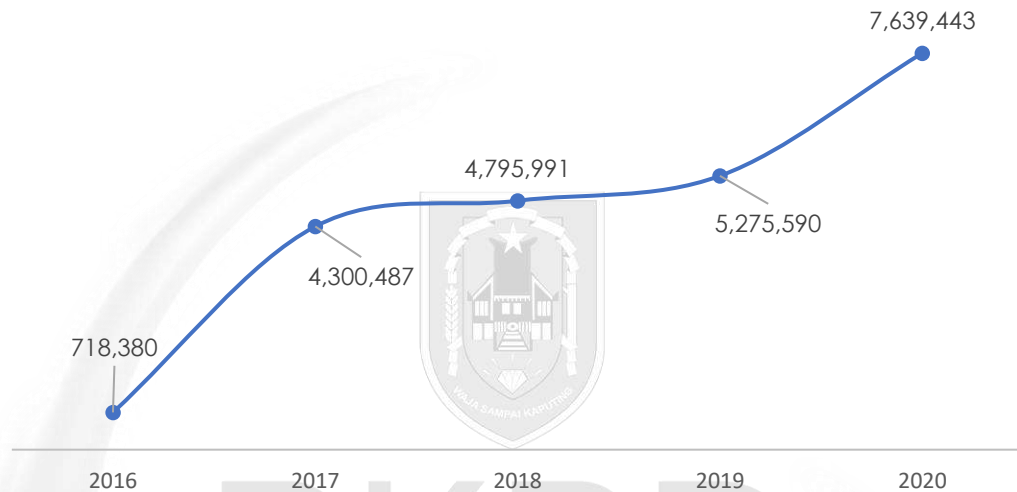
2.3.2.5 Pariwisata

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung yang terus





meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan baik domestik maupun mancanegara mencapai 718.380 wisatawan dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7.639.443.



Gambar 2.49 Kunjungan Wisata di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Dalam Angka. 2021

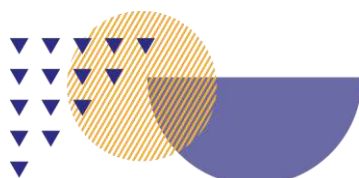
Tabel 2.166 Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Peningkatan Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang	718.380	4.300.487	4.795.991	5.275.590	7.639.443
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Hari	3	3	4	4	3

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan. 2021

2.3.2.6 Perdagangan

Nilai ekspor menjadi salah satu pilihan menarik dalam menumbuhkembangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus perekonomian nasional. Pada perkembangannya, komoditas produk tambang mendominasi ekspor di Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2020 sebesar 2.585.585.00 ton dimana angka tersebut memiliki nilai ekspor sebesar US\$ 36.097.854. dan di sektor Karet alam juga berkontribusi sebesar





108.787.036.65 ton dimana angka tersebut memiliki nilai US\$ 3.959.239.077 untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel dibawah;

Tabel 2.167 Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2020

Komoditas	Volume (Ton)	Nilai (000 US\$)
Kelapa Sawit	108.787.036.65	3.959.239.077
Karet Alam	1.127.844.15	781.783.869
Kayu	351.110.08	270.371.563
Rotan	56.493.42	33.416.085
Perikanan	2.585.585.00	36.097.854
Produk Tambang	177.167.74	22.073.697
Produk Lainnya	122.995.03	3.452.206
Total	103.035.88	826.517.384.00

Sumber: BPS. Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka. 2021

Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	LPE Perdagangan		8	7.62	8.26	7.48	7.33
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB		8	9.31	10.21	10.01	10.60
3	Laju Inflasi Harga		3.90				
4	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Dengan Ketentuan		65	80	80	65	81.01
5	Persentase Pelaku Usaha/Konsumen Yang Paham Akan Pentingnya Pengawasan Barang Beredar		100				
6	Peningkatan Bersih Nilai Ekspor		>60	12.36	16.78	14.08	12.62
7	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang		5				

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan 2021

2.3.2.7 Industri

Perindustrian di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian makro di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 cukup dominan dimana besarnya



mencapai 13.52 atau menurun dibandingkan tahun 2019 (13.64) dan data yang sekarang masih data sementara. Perkembangan sektor dikarenakan sejumlah potensi ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya alam yang melimpah. sumber daya manusia. hingga investor yang menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama.

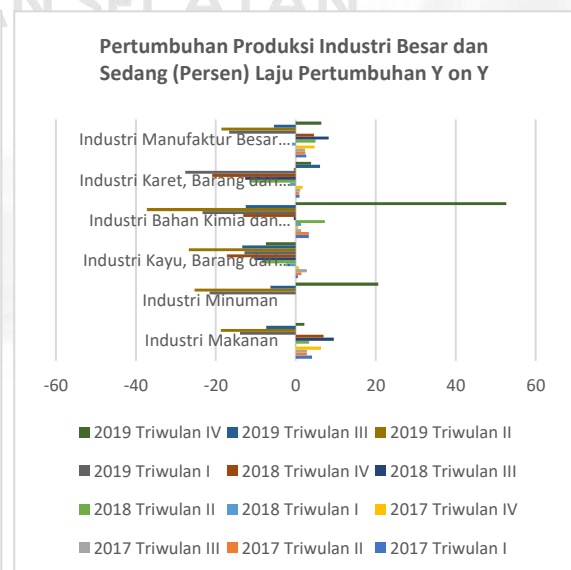
Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di dalam PDRB Kalimantan Selatan dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami fase naik turun dari 3.50 (2015) menjadi -3.38 (2020) dan meningkat menjadi 1.45 (2019). untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.169 Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertumbuhan (%)	3.50	6.42	6.61	4.23	1.45	-3.38
Kontribusi terhadap PDRB (ADHB)(%)	13.39	13.98	14.39	14.00	13.64	13.52

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2019

Pertumbuhan produksi dari Industri Kecil dan Mikro mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan 2019. sedangkan industri besar dan sedang cenderung mengalami penurunan dari grafik dibawah menunjukkan bahwa Pertumbuhan Produksi Industri Mikro Naik Turun dari tahun ke tahun. sedangkan Pertumbuhan Produksi Industri Besar juga mengalami penurunan yang signifikan bisa di lihat dari grafik di bawah ini.





Gambar 2.50 Pertumbuhan Produksi Industri Kecil dan Menengah serta Industri Besar dan Sedang Per Triwulan Tahun 2017 - 2019 (year to year)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan. 2021

Tabel 2.170 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2016-2020 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)		4.38	5.29	5.12	4.08	-1.81
2	LPE Industri		6.46	5.69	4.34	1.45	-3.38
3	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)		5.21	5.46	5.71	5.05	5.30
4	Persentase Pertumbuhan Sentra-Sentra industri		5	5	5	5	5
5	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri		5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perindustrian Prov. Kalimantan Selatan 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Setiap wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya yang menjadikan setiap daerah dapat berbeda dalam merencanakan pembangunannya. Terlebih lagi dalam hal daya saing daerah, dimana daya saing tersebut merupakan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah terutama sumber daya baik alam maupun manusianya. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan tujuan pembangunan daerah sehingga akan tercapai tujuan pembangunan daerah yang hakiki. Terkait dengan aspek daya saing daerah diuraikan tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah terkait dengan kapasitas ekonomi daerah dimana daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dimana semakin baik kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut dengan daerah lain.

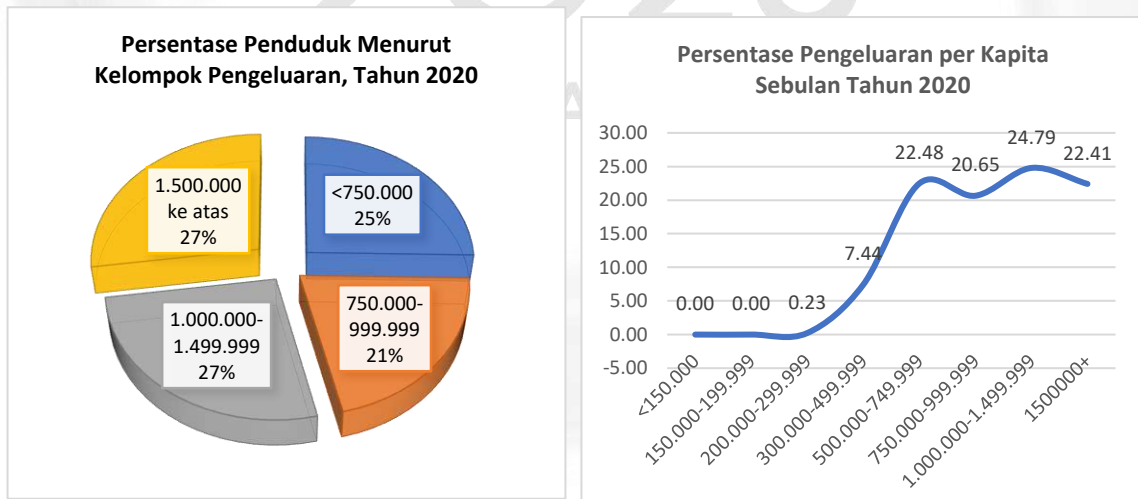


2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pada aspek kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator adalah pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan. Pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat.

Pada tahun 2017, Pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kalimantan Selatan sebagian besar terdapat pada golongan pengeluaran 500.000 – 749.999 rupiah yaitu sebanyak 24,83 persen.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kalimantan Selatan sebagian besar digunakan untuk pengeluaran makanan yaitu sebesar 22,41 persen sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan sebesar 24,79 persen, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih cukup tinggi upayanya dalam memenuhi kebutuhan primer.



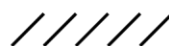
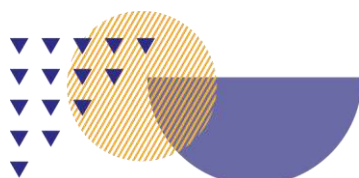
Gambar 2.51 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020 dan Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Sumber: BPS Prov.Kalimantan Selatan 2021



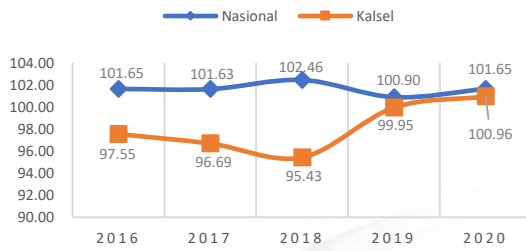
2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP. relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai Tukar Petani rata-rata Kalimantan Selatan dibandingkan dengan Nasional dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan. dimana NTP rata-rata tahun 2016 Kalimantan Selatan berada di bawah NTP Nasional yaitu sebesar 101.65 dan persentasenya pun naik turun hingga di tahun 2020 rata-rata NTP Kalimantan Selatan menjadi 101.65 atau berada di atas NTP Nasional dengan nilai sebesar 100.96. Jika dilihat berdasarkan sub sektor. sub sektor perikanan. peternakan dan hortikultura yang mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun 2018 sampai 2020. sedangkan subsektor tanaman pangan dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat cenderung menurun. NTP sub sektor perikanan mempunyai nilai paling tinggi dan NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat mempunyai NTP terendah pada tahun 2020. sebagaimana dapat dilihat pada Grafik II.53.

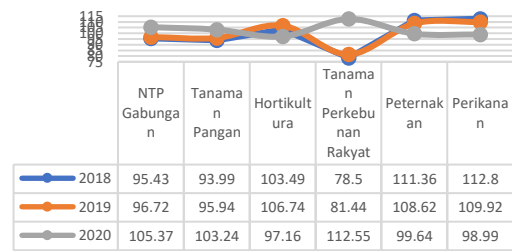




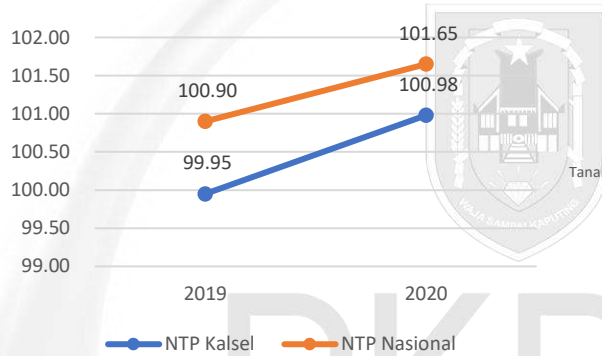
NILAI TUKAR PETANI KALIMANTAN SELATAN DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020



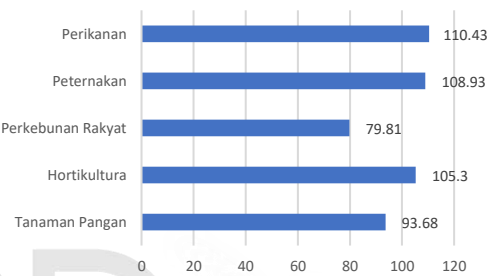
Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Kalimantan Selatan, 2016-2020



Nilai Tukar Petani dan Rata-rata Tahun 2019 - 2020



NTP Menurut Sektor Tahun 2020



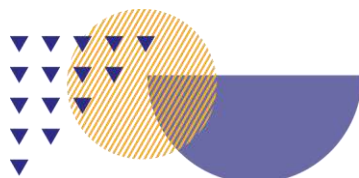
Gambar 2.52 Tukar Petani Kalimantan Selatan dan Rata-rata Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Energi

Perkembangan fasilitas listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan. terlihat dari terus meningkatnya jumlah pelanggan listrik. Baik pelanggan rumah tangga. usaha. industri. maupun umum terjadi kenaikan. Jumlah





pelanggan listrik tahun 2019 mencapai 1.249.891 pelanggan meningkat menjadi 1.300.110 pelanggan pada tahun 2020 atau meningkat 4.02.

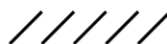
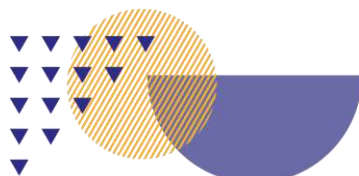


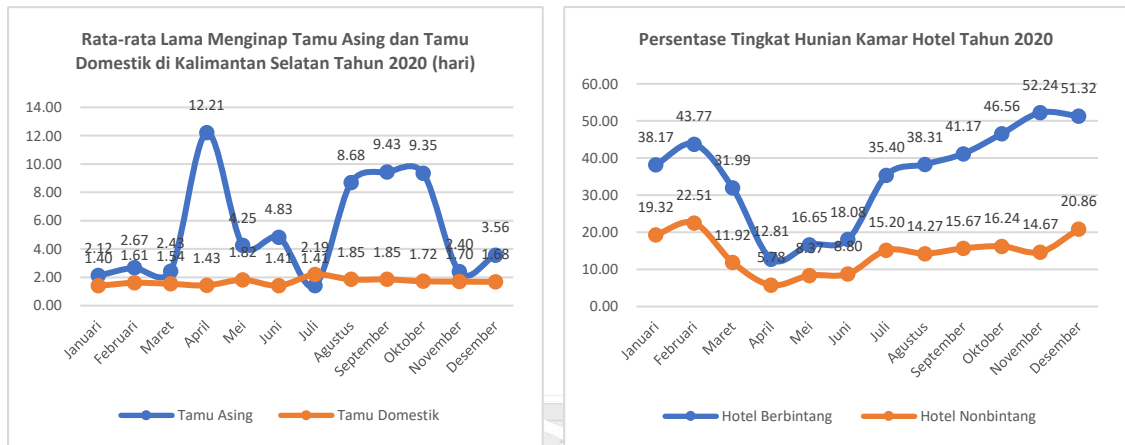
Gambar 2.53 Peningkatan Jumlah dan Persentase Pengguna Listrik Menurut Jenis Pelanggan di Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020

Sumber BPS Prov. Kalimantan Selatan 2020

2.4.2.2 Hotel

Tingkat hunian kamar hotel berbintang di Provinsi Kalimantan tahun 2020 rata-rata 51.32 untuk Hotel Berbintang dan 20.86 untuk Hotel Nonbintang pada Bulan Desember. atau secara umum berada di bawah 50 rata-rata per bulannya. Jika dilihat rentangnya, tingkat hunian kamar tertinggi pada hotel berbintang di Kalimantan Selatan sebesar 52.24 pada bulan November dan terendah sebesar 5.78 pada bulan April di karenakan adanya Pandemi Covid-19. Jika dilihat dari lama menginap tamu asing dan domestik, maka lama menginap tamu asing pada tahun 2020 rata-rata 3.30 malam dan tamu domestik rata-rata 1.67 malam.





Gambar 2.54 Tingkat Penghunian Kamar per Bulan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Rata-rata Lama Menginap tamu Asing dan tamu Domestik

Sumber: BPS Kalimantan Selatan. Diolah 2021

2.4.3 Sumber Daya Manusia

2.4.3.1 Ketenagakerjaan

Dependency Ratio atau rasio ketergantungan merupakan suatu indikator yang dapat mengindikasikan suatu wilayah apakah tergolong maju atau tidak dari segi demografi. Rasio ketergantungan menunjukkan ketergantungan antara penduduk produktif terhadap penduduk non produktif.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, rasio ketergantungan pada tahun 2014 mencapai 48.90 yang berarti dari 100 penduduk usia produktif akan menanggung beban sebanyak 48-49 penduduk usia non produktif. Rasio ketergantungan juga dibagi menjadi dua yakni rasio ketergantungan muda (43.30) dan rasio ketergantungan tua (5.61). Dari kedua rasio tersebut, terlihat bahwa beban tanggungan didominasi terhadap usia non produktif muda yang berumur 0-14 tahun yang mencapai 43-44 penduduk yang harus ditanggung. Penduduk usia non produktif tua hanya sebanyak 5-6 penduduk saja yang harus ditanggung bebannya oleh 100 penduduk usia produktif.



Tabel 2.171 Rasio Ketergantungan di Provinsi Kalimantan Selatan. 2020

Uraian	Nilai
Jumlah Penduduk	4.073.584
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	2.889.012
Penduduk Usia Non Produktif 0-14 tahun	975.056
Penduduk Usia Non Produktif 65+	179.968
Rasio Ketergantungan Muda	33.75
Rasio Ketergantungan Tua	6.23
Rasio Ketergantungan	39.98

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tabel Dinamis. 2021

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.5.1 Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2021

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi semua stakeholder.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada akhirnya memberi nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Hasil evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester II Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh bahwa total 47 SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengelola anggaran berkewajiban untuk memasukkan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021 per triwulan dan



menyampaikan pelaporan pelaksanaan DPA SKPD masing-masing sebagai bahan evaluasi.

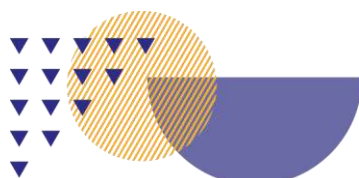
Total anggaran Belanja Seluruh SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.393.207.372.630 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebesar 93.00% atau Rp 6.875.609.016.206 dan untuk realisasi fisik sebesar 98.32%.

Dalam mengukur pencapaian hasil rencana kerja SKPD, dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan 4 Tahun 2021 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selengkapnya jumlah SKPD dengan kriteria kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.



RKPD 2023

KALIMANTAN SELATAN



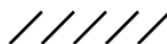
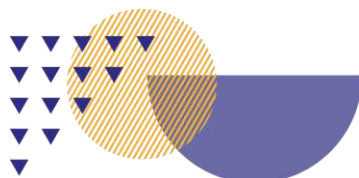


Tabel 2.172 Jumlah SKPD Berdasarkan Kriteria Kinerja dan Kriteria Anggaran

Kriteria	Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Capaian Keuangan	
	Jumlah SKPD	%	Jumlah SKPD	%
Sangat Tinggi	11	22.92	34	70.83
Tinggi	19	39.58	7	14.58
Sedang	11	22.92	3	6.25
Rendah	4	8.33	1	2.08
Sangat Rendah	3	6.25	3	6.25
Total	48	100.00	48	100.00

1. Sumber: Bappeda Prov. Kalsel. 2021.

RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN





Tabel 2.173 Rekapitulasi Hasil Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2020

No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.949.953.181.199	1.870.880.660.699	95,94	99,82	101,88	95,94
2	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	15.886.277.752	14.383.718.124	90,54	100	90,54	90,54
3	TAMAN BUDAYA	5.446.225.100	4.472.219.800	82,12	100	100	82,12
4	MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT	4.289.831.601	4.190.614.361	97,69	98,64	97,69	97,69
5	PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI	4.356.774.577	3.780.426.742	86,77	80,78	100	86,77
6	DINAS KESEHATAN	116.225.191.931	102.124.367.098	87,87	98,99	197,02	87,87
7	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	8.557.042.171	6.331.643.673	73,99	99,75	95,47	73,99
8	LABORATORIUM KESEHATAN	37.727.269.240	31.417.158.926	83,27	86,14	137,88	83,27
9	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT	1.754.609.897	1.569.530.132	89,45	95,69	95,47	89,45
10	INSTALASI FARMASI	4.273.501.000	3.599.809.771	84,24	100	205,77	84,24
11	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN	584.711.088.733	578.282.692.533	98,9	95,71	138,46	98,9
12	BLUD RSUD ULIN	407.123.581.783	407.123.581.783	100	100	80,24	100
13	RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM	49.287.583.016	47.470.896.172	96,31	100	128,45	96,31
14	BLUD RSJ SAMBANG LIHUM	20.916.559.737	19.079.135.852	91,22	100	100	91,22
15	RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH	81.606.429.934	77.813.953.283	95,35	98,13	95,35	95,35
16	BLUD RS ANSARI SALEH	171.297.839.403	137.305.616.008	80,16	100	91,35	80,16
17	RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN	16.628.774.327	14.627.544.625	87,97	99,01	94,3	87,97



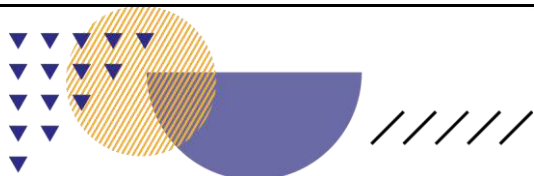


No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	735.917.112.117	683.171.603.480	92,83	98.56	105,58	92,83
19	LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	2.999.675.900	2.285.751.354	76,2	95.72	92	76,2
20	BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA	16.000.000.000	11.184.186.503	69,9	100	100	69,9
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28.089.197.000	26.551.879.510	94,53	100	300,62	94,53
22	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	12.509.094.940	10.450.202.023	83,54	100	130,17	83,54
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	34.132.395.847	32.480.952.190	95,16	100	100	95,16
24	DINAS SOSIAL	49.612.500.571	41.333.656.951	83,31	99.47	127,78	83,31
25	PANTI SOSIAL BINA NETRA FAJAR HARAPAN	3.571.894.300	3.332.735.225	93,3	100	93,3	93,3
26	PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI MULIA	8.457.432.771	7.797.041.385	92,19	100	100	92,19
27	PANTI SOSIAL BINA REMAJA BUDI SATRIA	9.082.410.436	8.587.986.144	94,56	99.68	106,9	94,56
28	PANTI SOSIAL BINA WANITA MELATI	5.430.662.100	4.978.135.108	91,67	100	94,67	91,67
29	PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI SEJAHTERA	8.202.277.200	7.600.511.049	92,66	100	100	92,66
30	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	34.376.096.086	30.291.687.439	88,12	99.29	88,12	88,12
31	LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	4.794.526.424	4.155.035.852	86,66	90.54	100	86,66
32	BALAI LATIHAN KERJA	5.470.582.500	4.242.495.228	77,55	94.83	100	77,55
33	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I	732.200.000	623.429.933	85,14	90.84	88	85,14
34	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II	572.000.000	501.716.277	87,71	98.64	100	87,71
35	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III	545.593.600	458.058.753	83,96	95.68	100	83,96
36	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV	698.750.000	652.580.587	93,39	99.14	96,37	93,39





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
37	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.004.911.900	9.693.815.809	88,09	94.22	109,54	88,09
38	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	982.697.100	531.433.228	54,08	99.63	125,85	54,08
39	DINAS KETAHANAN PANGAN	14.846.576.450	12.244.579.202	82,47	92.24	123,98	82,47
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.861.908.348	19.831.660.743	90,71	99.82	110,34	90,71
41	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	1.940.431.950	1.821.348.868	93,86	97.24	100	93,86
42	UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	6.981.284.600	5.908.371.041	84,63	93.61	105,74	84,63
43	DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA	9.515.263.100	7.965.057.192	83,71	99.71	83,71	83,71
44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.087.834.496	18.391.300.533	83,26	100	140	83,26
45	DINAS PERHUBUNGAN	30.572.572.246	26.222.950.338	85,77	99.71	116,67	85,77
46	UPTD TERMINAL TYPE B	2.491.443.900	2.090.131.323	83,89	90.66	225	83,89
47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.991.330.777	17.582.544.010	92,58	99.95	92,58	92,58
48	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.912.606.880	16.849.522.876	84,62	94.91	96,85	84,62
49	BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL	3.836.846.575	3.384.062.178	88,2	100	108,57	88,2
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.362.865.342	13.239.095.696	86,18	99.39	INF	86,18
51	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	100.784.215.941	94.231.012.894	93,5	93.16	137,81	93,5
52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	40.701.986.400	32.472.564.538	79,78	92.57	100	79,78
53	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.534.231.390	26.256.958.293	92,02	98.57	96,65	92,02
54	BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	1.719.531.620	1.546.911.700	89,96	100	100	89,96
55	PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KARANG INTAN	1.338.669.650	1.303.642.135	97,38	100	97,38	97,38





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
56	PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN	6.564.327.054	6.469.106.933	98,55	100	98,55	98,55
57	PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP	2.161.839.149	2.104.846.520	97,36	99,81	97,36	97,36
58	PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU	1.774.346.500	1.678.573.363	94,6	100	94,6	94,6
59	PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU	1.251.579.700	1.212.059.385	96,84	96,84	96,84	96,84
60	PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN	1.553.831.000	1.513.682.996	97,42	100	97,67	97,42
61	DINAS PARIWISATA	22.374.861.532	19.692.750.581	88,01	100	88,01	88,01
62	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	83.678.816.350	72.879.559.500	87,09	97,2	87,09	87,09
63	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2.571.371.600	1.994.839.874	77,58	98,61	88,81	77,58
64	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	2.609.380.116	2.412.175.542	92,44	96,12	92,44	92,44
65	BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	5.422.630.308	4.561.013.209	84,11	100	84,11	84,11
66	BALAI PELATIHAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	2.251.311.550	1.858.758.668	82,56	95,07	82,56	82,56
67	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	29.468.957.000	23.997.637.665	81,43	99,51	81,43	81,43
68	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	4.223.315.300	3.258.991.078	77,17	99,38	79,43	77,17
69	BALAI INSEMINASI BUATAN	3.287.779.838	2.985.053.796	90,79	100	51714,08	90,79
70	DINAS KEHUTANAN	77.910.080.989	71.250.414.863	91,45	99,34	710,24	91,45
71	TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM	11.903.860.074	11.155.001.006	93,71	99,7	22388	93,71
72	BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	6.449.601.100	5.878.139.960	91,14	99,79	96,8	91,14
73	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI	1.499.760.613	1.425.625.515	95,06	100	336,06	95,06
74	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG	1.844.167.350	1.762.470.229	95,57	100	556,08	95,57





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
75	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU	1.622.845.850	1.548.875.569	95,44	99,95	393,66	95,44
76	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG	2.110.389.930	1.891.414.594	89,62	99,72	359,46	89,62
77	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN	1.686.731.500	1.666.384.432	98,79	100	336,06	98,79
78	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT	1.621.403.500	1.433.084.162	88,39	100	463,32	88,39
79	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN	1.900.000.000	1.830.019.346	96,32	100	336,06	96,32
80	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI	2.307.476.000	2.249.360.010	97,48	100	332,43	97,48
81	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM	1.651.759.600	1.507.795.510	91,28	100	416,88	91,28
82	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21.622.562.906	20.053.416.369	92,74	99,89	103,09	92,74
83	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21.622.562.906	20.053.416.369	92,74	99,89	103,09	92,74
84	LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.960.202.665	1.726.042.601	88,05	100	100	88,05
85	LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.960.202.665	1.726.042.601	88,05	100	100	88,05
86	DINAS PERDAGANGAN	13.622.455.116	11.254.816.218	82,62	98,56	100	82,62
87	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	2.534.903.100	2.254.269.314	88,93	99,78	100	88,93
88	DINAS PERINDUSTRIAN	14.915.953.400	10.565.327.158	70,83	94,2	112,58	70,83
89	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM	1.195.462.288	1.091.885.927	91,34	100	100	91,34
90	SEKRETARIAT DAERAH	118.709.554.706	100.656.232.733	84,79	100	100	84,79
91	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.409.047.250	1.804.078.598	74,89	100	100	74,89
92	BIRO HUKUM	4.659.312.800	3.304.361.722	70,92	99,4	100	70,92
93	BIRO ORGANISASI	3.597.362.800	3.129.659.023	87	100	87	87





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
94	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.774.840.000	1.473.987.976	83,05	99.19	150	83,05
95	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.569.162.500	40.390.588.106	92,7	100	182,83	92,7
96	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	8.691.714.200	8.314.176.227	95,66	99.71	95,66	95,66
97	BIRO UMUM	28.239.669.808	25.527.335.464	90,4	97.68	100	90,4
98	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.491.946.150	4.691.199.070	85,42	99.08	160,24	85,42
99	BIRO PEREKONOMIAN	2.106.465.200	1.847.235.976	87,69	100	102,63	87,69
100	SEKRETARIAT DPRD	191.443.306.896	149.779.773.093	78,24	95.86	100	78,24
101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	28.075.875.350	24.472.281.205	87,16	100	100	87,16
102	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.626.516.205.039	1.526.975.469.543	93,88	97.27	166,43	93,88
103	UPPD BANJARBARU	2.559.957.865	2.392.387.230	93,45	98.54	94,72	93,45
104	UPPD PELAIHARI	2.557.977.100	2.196.140.377	85,85	100	100	85,85
105	UPPD KOTABARU	2.077.310.730	1.871.021.137	90,07	99.15	100	90,07
106	UPPD MARTAPURA	2.397.687.846	2.113.587.817	88,15	100	100	88,15
107	UPPD MARABAHAN	1.954.563.880	1.834.419.118	93,85	93.85	95,47	93,85
108	UPPD RANTAU	1.592.941.890	1.466.870.109	92,09	100	92,09	92,09
109	UPPD KANDANGAN	1.922.448.710	1.747.466.510	90,9	90.9	91,91	90,9
110	UPPD BARABAI	1.533.473.097	1.493.104.243	97,37	97.37	97,82	97,37





No	SKPD / Program	Realisasi Keuangan dan Fisik				Evaluasi Renja SKPD Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tw 4 Tahun 2021) (%)	
		Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan s.d Triwulan 4	% Realisasi Keuangan	% Realisasi Fisik	Kinerja (K)	Anggaran (Rp)
11 1	UPPD AMUNTAI	1.821.827.894	1.586.148.921	87,06	87,07	87,06	87,06
11 2	UPPD TANJUNG	1.688.313.800	1.456.273.895	86,26	100	100	86,26
11 3	UPPD BATULICIN	2.661.788.000	2.471.496.999	92,85	95,69	93	92,85
11 4	UPPD PARINGIN	1.722.141.124	1.446.942.468	84,02	100	85,25	84,02
11 5	UPPD BANJARMASIN I	4.800.186.070	4.495.787.521	93,66	98,06	93,66	93,66
11 6	UPPD BANJARMASIN II	3.673.295.400	3.435.208.639	93,52	100	94,15	93,52
11 7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	24.190.615.524	20.261.104.048	83,76	96,81	193,13	83,76
11 8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	37.165.204.432	27.707.024.577	74,55	98,35	188,08	74,55
11 9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	12.505.266.800	11.881.181.510	95,01	99,82	95,1	95,01
12 0	KEBUN RAYA BANUA	2.820.062.650	2.637.486.502	93,53	100	100	93,53
12 1	BADAN PENGHUBUNG	8.560.005.645	8.083.837.610	94,44	100	100	94,44
12 2	INSPEKTORAT DAERAH	24.424.212.946	20.345.573.692	83,3	99,95	86,67	83,3
12 3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	29.453.528.121	26.164.633.565	88,83	97,47	88,83	88,83

Sumber : Emonev Bappeda Kalsel,





2.5.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Tahun 2016-2021

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD.

Indikator kinerja makro merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.174 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2020	Target RPJMD 2021	Target P-RKPD 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan Capaian Tahun 2021		
						Capaian Dari Target RPJMD	Capaian Dari Target P-RKPD 2021	Capaian Dari Tahun Sebelumnya
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,91	71,0-71,8	71-71,27	71,28	Tercapai	Tercapai	Naik
2	Usia Harapan Hidup	68,66	69,64	69,64	68,83	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,68	13,7	13,7	12,81	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
4	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,29	9	9	8,34	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
6	Angka Pengangguran	4,74	3,6 - 4	5,06	4,95	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Turun
5	Pertumbuhan Ekonomi	-1,81	4,50-5,03	1,3	3,48	Belum Tercapai	Tercapai	Naik
6	Angka Kemiskinan	4,83	3,96 - 4,01	5,4	4,56	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
7	Indeks Gini	0,332	0,333	0,33	0,33	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Naik
8	IKLH	61,94	64	64	61,94	Belum Tercapai	Belum Tercapai	Turun
9	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,47	1,38	1,38	1,47	Tercapai	Tercapai	Turun

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel 2016-2021. P-RKPD 2020. BPS Kalsel 2020

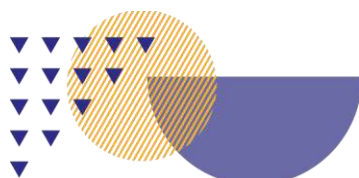


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa IPM pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 71,28. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Selama periode 2019 hingga 2021, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir pada tahun 2021 memiliki peluang untuk hidup hingga 68,66

tahun meningkat menjadi 68,83. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,81 tahun. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,34 tahun meningkat 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah memerlukan strategi percepatan atau akselerasi program dan kebijakan pembangunan daerah yang dapat mempercepat laju pertumbuhan angka IPM yang saat ini IPM Provinsi Kalimantan Selatan masih dibawah rata-rata IPM Nasional. Penguatan kebijakan sektoral yang perlu dimantapkan adalah sektor penguatan sistem Kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan keterampilan, dan penanganan masalah sosial

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 terkontrasi sebesar 3,48% mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020 (-1,81%). Pertumbuhan ekonomi 2021 jauh dibawah target RPJMD sebesar 4,50-5,03 dan sudah melampaui penyesuaian perubahan target dalam Perubahan RKPD 2021 sebesar 1,3%. Beberapa kebijakan di level nasional juga sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam merespon penanganan Pandemi Covid 19 sehingga perekonomian dapat terdongkrak naik. Di awal Tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum untuk penanganan Covid 19 di daerah.

Indeks Gini Rasio Kalimantan Selatan Per Maret tahun 2021 mengalami hasil yang lebih yaitu sebesar 0.330, lebih baik dibanding tahun 2020 sebesar mencapai 0.332. Capaian ini lebih baik dari target RPJMD untuk tahun 2021 sebesar 0.333. Diperlukan implementasi kebijakan strategis yang mampu mempertahankan angka gini rasio seperti mendorong pertumbuhan sektor produksi (pertanian dan industri), sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja di sektor formal dan meningkatkan akses UMKM terhadap kredit usaha yang diberikan oleh bank.



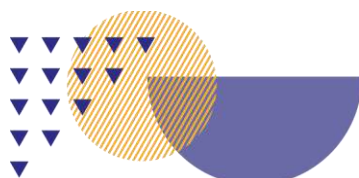


Target tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada RPJMD tahun 2021 adalah sebesar 3.6 – 4,0, sedangkan capaian TPT pada Agustus tahun 2021 lebih tinggi dari target dalam RPJMD yaitu sebesar 4.95%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang tidak terprediksi saat penyusunan dokumen RPJMD. Meskipun demikian, tingkat pengangguran terbuka Per Agustus tahun 2021 sebesar 4.95% lebih baik dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.74%. Capaian tingkat pengangguran ini masih berada dibawah target RPJMD untuk tahun 2021 yang ditargetkan antara 3.6 – 4,0%. Walaupun dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan, masih lebih baik dibandingkan capaian nasional yaitu sebesar 6,49 persen.

Target tingkat kemiskinan pada RPJMD tahun 2021 adalah sebesar 3.96 - 4.01, sedangkan capaian tingkat kemiskinan pada Agustus tahun 2021 lebih tinggi dari target dalam RPJMD yaitu sebesar 4.56%. Kondisi ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang tidak terprediksi saat penyusunan dokumen RPJMD. Kendati demikian capaian tingkat kemiskinan tahun 2021 mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 4.83% dan angka ini lebih rendah dari target RPJMD Tahun 2021 yaitu antara 3.96 - 4.01%. Tingkat Kemiskinan di seluruh Provinsi Kalimantan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 9.71% dan Kalsel merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Namun, walaupun Kalsel memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Tentunya diperlukan pemantapan pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengurangan jumlah penduduk miskin agar tingkat kemiskinan dapat diturunkan.

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “kesenjangan” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi pada saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan kebijakan pembangunan lima tahunan. Hasil analisis





permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan dan mencapai sasaran pembangunan daerah. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut

2.6.1 Permasalahan Daerah Berkaitan Dengan Pandemi COVID-19

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1.3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah tersebar di 34 provinsi. Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, Pandemi ini juga menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial.



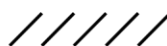
Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah jugatelah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Sebagai tindak lanjut peraturan perundangan terkait Covid 19. Pemerintah Provinsi Kalsel telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) Provinsi Kalsel melalui Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0244/KUM/2020. Sepanjang perjalanannya segala jenis pembatasan sosial dilaksanakan dari waktu ke waktu. Setelah PSBB di tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan PPKM di tahun 2021 hingga tahun 2022. Pertimbangan penerapan pembatasan sosial ini mengingat perkembangan kasus positif di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih bersifat masif dan fluktuatif. Menindak lanjuti hal tersebut, pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan perhatian pada eliminasi Coronavirus Pnumonia (COVID-19) sebagai masa dimana segala aspek yang sempat terbatas di masa pembatasan sosial diberikan kelonggaran untuk beraktivitas dengan berbagai catatan aturan yang melingkupi.

1. Penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 dalam rangka penanganan Covid-19

Persentase peningkatan pendapatan daerah tahun 2021 tercapai sebesar -20,48% dengan realisasi capaian terhadap target sebesar -3657,15%. Capaian tahun 2021 belum bisa melampaui capaian tahun 2019 disebabkan masih belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah yang ditunjang oleh penerimaan PAD dari sisi pajak daerah ada beberapa item pajak yang belum tercapainya maksimal



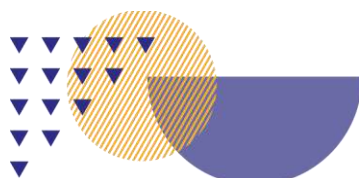


antara lain terhadap target 3 jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PBBKB (91,60%) dan pajak rokok (55,01%). Selain itu, dari sisi penerimaan dana perimbangan juga belum memberikan kontribusi maksimal sesuai target yang ditetapkan di dalam APBD perubahan tahun 2021 dengan capaian 93,52%, capaian ini dipengaruhi oleh penyaluran bagi hasil pajak/ bukan pajak dari pusat yang tidak tersalurkan maksimal pada tahun 2021, hal ini dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyaluran Dana Perimbangan di 2021. Pendapatan Asli Daerah kurang optimal karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung sehingga karena adanya pemulihan kesehatan, pembatasan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya, menyebabkan pembatasan mobilitas pelaku ekonomi yang menyebabkan daya beli masyarakat dan pelaku usaha menurun. Selain itu DITLANTAS juga memberlakukan pembatasan sehingga harus membatasi pelayanan unggulan yang langsung ke masyarakat.

Dalam melaksanakan ketentuan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813.SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid 19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Pandemi Covid-19 diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan penerimaan negara dan juga pendapatan daerah. Serta disisi lain kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial (bantuan sosial) semakin meningkat. Salah satu tujuan diterbitkannya SKB ini yaitu untuk acuan pemda dalam mengambil langkah-langkah strategis di daerah dalam rangka mencegah, menangani dan mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 melalui penyesuaian APBD.

Keputusan Bersama ini mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam APBD antara lain :

1. Penyesuaian Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah. dilakukan terhadap target pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan dampak menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian daerah akibat Covid 19.





3. Penyesuaian terhadap Belanja Daerah. dimana pemda diminta untuk merasionalisasikan belanja pegawai. Selain itu juga dilakukan rasionalisasi belanja modal dan belanja barang jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% belanja. Selisih antara penyesuaian pendapatan dan penyesuaian belanja pegawai. barang/jasa dan modal. diarahkan untuk mendanai belanja bidang kesehatan untuk pencegahan dan penangan COVID-19 (APD. sarana dan peralatan pelayanan. penanganan pasien). belanja social safety net. dan kegiatan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan UKM dan koperasi.

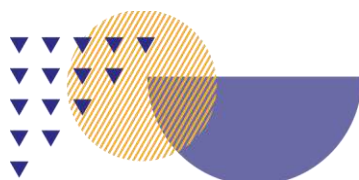
Selain penyesuaian APBD. Pemda juga diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan. antara lain (i) pengutamaan bantuan sosial bagi masyarakat sebagai dampak Covid-19 dengan memperhatikan bansos Pusat. (ii) penerapan padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur. dan (iii) penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pertemuan dan diklat serta workshop atau bimbingan teknis agar menghemat biaya dan sejalan dengan upaya untuk penerapan social and physical distancing.

2. Masih tingginya angka pencari kerja

Merebaknya Pandemi Covid 19 dari tahun 2020 hingga tahun 2022 di Indonesia membuat pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan besar untuk mengatasinya. Pemerintah telah meminta para ASN melakukan Work From Home, meliburkan perguruan tinggi dan se

kolah-sekolah untuk belajar secara daring, serta meminta perusahaan-perusahaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari rumah. Sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun pada tahun 2022 Pemerintah mulai menyiapkan kebijakan dasar serta rencana lainnya mengenai pembatasan sosial untuk menunjang kebangkitan kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Hal ini bertujuan guna mengeleminasi virus Corona yang menyebar di Indonesia dan membangkitkan siklus kehidupan sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2021 indikator kinerja Jumlah perusahaan yang menyediakan lowongan terealisasi sebanyak 56 perusahaan angka ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yaitu terealisasi sebanyak 57 Perusahaan, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada indikator kinerja tersebut.





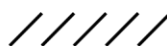
Pada indikator jumlah pencari kerja yang dapat mengisi lowongan kerja pada tahun 2021 terealisasi sebanyak 1920 Pencari Kerja angka ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang terealisasi sebanyak 1292 Pencari Kerja, pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 892 Pencari Kerja, pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 209 Pencari Kerja sedangkan pada tahun 2017 tidak ada indikator kinerja tersebut. Dimana realisasi Jumlah pencari kerja yang dapat mengisi lowongan kerja mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Pada indikator Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terlayani melalui LTSA dan penanganan PMI yang bermasalah tahun 2021 terealisasi sebanyak 93 orang sedangkan pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 101 Orang. Pada tahun 2018 dan 2019 tidak ada indikator kinerja tersebut.

Pada indikator jumlah pencari kerja yang dapat mengisi lowongan kerja mengalami peningkatan kinerja dikarenakan lebih banyak tenaga kerja dan perusahaan yang mengikuti jobfair dan lebih banyak tenaga kerja yang langsung ditempatkan diperusahaan. Pada tahun 2021 ini kegiatan job fair ini dilaksanakan digital yaitu melalui aplikasi Job Fair Kalsel yang dapat diakses dan diunduh melalui Playstore seluruh pengguna internet. Pada tahun 2021 indikator kinerja jumlah pencaker yang dapat mengisi lowongan kerja terealisasi sebanyak 1920 Pencari Kerja.

Untuk indikator Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terlayani melalui LTSA dan penanganan PMI yang bermasalah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kendala kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan yaitu :

- Masih adanya Calo/Sponsor yang masih memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dengan tujuan penempatan ke Negara Timur Tengah dan Tahun 2021 terdata di Kalimantan Selatan sebanyak 51 orang Calo / Sponsor.
- Bukan wilayah embarkasi, sehingga para Calo/Sponsor ilegal bisa dengan mudah mengelabui Petugas di Bandara Undara Syamsudin Noor, Banjarmasin.
- Lokus kejadian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural ke Luar Negeri terjadi di luar wilayah Kalimantan Selatan, sehingga yang terjadi di Kalimantan Selatan baru sebatas proses rekrut dan mobilisasi ke





luar daerah, sehingga mengalami kesulitan untuk diproses lebih lanjut (putusan pidana), karena kurangnya alat bukti.

- Belum adanya kantor pusat Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang berlokasi di Kalimantan Selatan, sehingga untuk penampungan (*shelter*) Pekerja Migran Indonesia tempatnya masih di luar daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Hampir semua Kepala Desa khususnya pada Desa-Desa kantong Pekerja Migran Indonesia belum mengetahui tentang jumlah warganya yang sedang bekerja di Luar Negeri, dan beberapa Kepala Desa tidak dapat memberikan informasi tentang warganya yang sedang Bekerja di Luar Negeri .

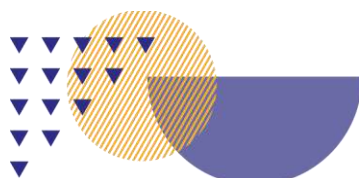
- Mengalami resistensi baik dari Calon Pekerja Migran Indonesia yang dicegah maupun dari pihak keluarga saat dilakukan fasilitasi pemulangan, karena dianggap telah menghambat rencana mereka mencari rezeki.

- Permasalahan utama penanganan pencegahan non prosedural adalah bahwa kebutuhan hidup masyarakat begitu tinggi tapi masih belum diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai dan terjangkau (lapangan pekerjaan hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi dan memiliki keahlian). Sedangkan masyarakat yang kurang berpendidikan dan tidak memiliki keahlian kurang bisa tertampung dalam lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia nekat untuk mencari pekerjaan di luar negeri meskipun ada resiko.

- Pekerja Migran Indonesia yang sudah lama di negara penempatan mengajak kerabat yang ada di daerah untuk bekerja tanpa melalui prosedur yang berlaku.

- Pandemi Virus Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021 sangat berdampak pada pelayanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia karena negara tujuan penempatan menutup diri dari kedatangan orang asing sehingga CPMI yang ingin bekerja di luar negeri untuk sementara waktu tidak ada penempatan kecuali bagi Pekerja Migran Indonesia mandiri/profesional.

- Negara tujuan utama PMI asal Kalimantan Selatan adalah kawasan Timur Tengah khususnya Arab Saudi, karena Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan moratorium pengiriman PMI di kawasan Timur Tengah sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 260 Tahun 2015 tentang





Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Kawasan Timur Tengah sehingga menyebabkan masih terjadinya CPMI non prosedural.

- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal sampai saat ini belum terealisasi.

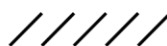
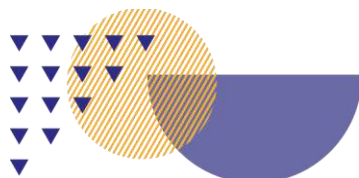
- Recofusing anggaran pada Tahun Anggaran 2021 sangat berdampak pada penanganan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan pada Tahun Anggaran 2022 akan terjadi lagi pengurangan anggaran daerah untuk kegiatan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga berdampak dalam pelaksanaan kegiatan.

Kondisi di tahun 2021 menjadi masa-masa eliminasi virus covid-19 sehingga diharapkan permasalahan-permasalahan yang timbul oleh perusahaan dalam menyerap tenaga kerja dapat membaik dan juga pengoptimalan sumber daya manusia dalam mempebaiki kualitas SDM tenaga kerja.

3. Meningkatkan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan

Penyebaran wabah Covid-19 berdampak juga terhadap pencapaian tingkat kemiskinan pada tahun 2021. Pemerintah terus berupaya menekan tingkat kemiskinan melalui pemberian stimulus fiskal berupa bantuan sosial yang cakupannya diperluas dan indeks bantuan yang dinaikkan. Meskipun telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan sebesar 1,56%, namun dalam perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial masih dihadapkan pada tantangan internal dan eksternal diantaranya : mutu manajemen yang masih harus ditingkatkan, serta kondisi eksternal seperti bencana alam dan sosial, dimana menimbulkan ekkses secara ekonomi, psikis, dan sosiologis sehingga perlu dilakukan upaya-upaya sistematis guna merespon ekkses atau perubahan sosial dimasyarakat. Isu strategis terkait pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih cukup tinggi
2. Kemandirian dan produktivitas penyandang disabilitas masih rendah
3. Peran Potensi Sumber Kesejahteraan sosial belum optimal.





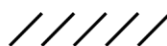
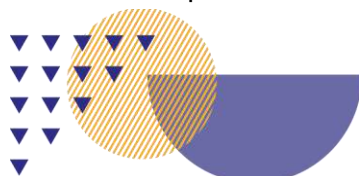
Berdasarkan Data dari LAKIP 2021 Dinas Sosial Provinsi Kalsel. Prioritas penurunan kemiskinan hanya dapat menyumbang angka dari penurunan kemiskinan tersebut dari sisi PMKS yang ditangani dengan target sebesar 0,39% dari target penurunan tingkat kemiskinan yaitu 4,50%-4,30%, sehingga perlu kerjasama dengan SKPD lainnya untuk mempercepat proses pencapaian target penurunan kemiskinan. Akibat pandemi Covid 19, banyak masyarakat yang terkena imbas sehingga kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Jumlah fakir miskin yang terentaskan keluar dari garis kemiskinan memiliki target sebesar 33.121 orang, dengan realisasi sebesar 12.936 orang.

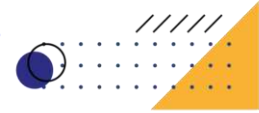
4. Menurunnya Kontribusi UMKM dan IKM dalam menunjang perekonomian

Pandemi COVID-19 memberikan beragam dampak pada berbagai sektor perekonomian seperti industri, pertanian, dan tidak luput sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku UMKM di Indonesia mengeluhkan beberapa hal antara lain : penjualan menurun, kesulitan bahan baku, distribusi terhambat, kesulitan permodalan dan proses produksi terhambat. Permasalahan di sektor UMKM ini diakibatkan pembatasan aktivitas secara masif yang berujung pada penurunan gerak perekonomian.

Penurunan nilai produktifitas sektor industri sebesar 3,67 Juta Rupiah berkenaan belum lengkapnya data IKM diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Dinas Perindustrian. Keterlambatan penyampaian data IKM ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten/Kota masih dalam proses pendataan yang dilakukan dipenghujung tahun 2021 (adanya wabah COVID 19 yang melarang untuk melakukan kunjungan/tatap muka kewilayah pelaku usaha instansi terkait dan juga masih proses rekapitulasi.

Menghadapi permasalahan yang ada, Kementerian Koperasi dan UKM merancang sejumlah program mitigasi bagi KUMKM yang bertujuan menghidupkan kembali perekonomian bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terdampak dengan memberikan berbagai fasilitas dan jenis bantuan dana secara simultan guna penguatan dan kelangsungan usaha. Beberapa program yang digelontorkan antara lain stimulus Daya Beli Produk UMKM/Koperasi; BLT bagi usaha ultra mikro dan mikro; restrukturisasi dan subsidi bunga usaha mikro dan koperasi; gerakan belanja di warung tetangga dan BUMN sebagai oftaker produk pangan dan bahan pokok.





Berdasarkan hasil pendataan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel. beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM yang ada di Kalimantan Selatan yaitu sulitnya mendapatkan bahan baku, menurunnya pendapatan, penunggakan kredit-kredit/ hutang usaha, dan beberapa UMKM melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai dampak Covid 19.

Jumlah SDM Industri yang difasilitasi sebanyak 141 IKM dari target sebanyak 60 IKM tercapai (235%). Seiring dengan adanya penyesuaian indikator kerja yang baru Tahun 2021 serta adanya hasil asistensi dan evaluasi dari PAN RB terhadap indikator sebelumnya yang masih dianggap belum berkinerja, maka untuk tahun 2021 telah ditetapkan target indikator kinerja persentase SDM Industri yang terampil sebesar 1% dan terealisasi sebesar 9,083% sehingga tercapai sebesar 908,273%.

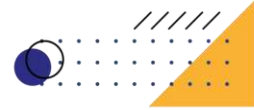
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja pada APBD ini tentunya memberikan pengaruh yang sangat besar pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan baik indikator target tujuan sasaran RPJMD dan RKPD, ataupun target kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan diawal tahun. Realokasi APBD untuk Penanganan Covid 19 dan jaring pengaman sosial (bantuan sosial) tentunya membuat beberapa target daerah perlu ditinjau kembali.

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

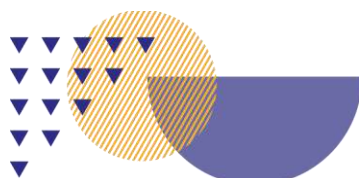
Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai berikut :

Tabel 2.175 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Pemprov Kalsel

URUSAN	PERMASALAHAN
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian APK terendah di Kalimantan dan di bawah rata-rata Nasional; ▪ Capaian APM dan APS berada di peringkat 3 Kalimantan, namun masih di bawah rata-rata Kalimantan dan Nasional. ▪ Belum optimalnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; ▪ Belum adanya pemetaan link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri;

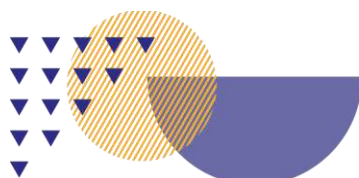


URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum meratanya penyebaran sekolah sesuai dengan penyebaran penduduk.
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">▪ Capaian Angka Harapan Hidup masih di bawah rata-rata nasional.▪ Angka Kematian Ibu masih relatif tinggi▪ Masih terjadinya kematian bayi dan balita.▪ Masih tingginya prevalensi penyakit menular▪ Masih tingginya kasus penyakit tidak menular▪ Angka Gizi buruk dan prevalensi stunting masih di atas rata-rata nasional.▪ Pemenuhan SPM pada pelayanan krisis kesehatan dan penanganan KLB belum berjalan optimal▪ Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dan vaksinasi covid 19 belum optimal.▪ Sumber daya manusia kesehatan yang sesuai standar masih rendah.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi yang belum dalam kondisi mantap dan memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton)▪ Jaringan jalan belum merata, konektivitas antar kawasan terutama daerah-daerah yang terisolir belum terhubung dengan baik, selain itu aksesibilitas pada kawasan- kawasan yang dianggap strategis daerah belum layak dan terhubung. Sehingga hal ini mengakibatkan tingkat mobilitas antar wilayah terbatas▪ Masih rendahnya penyediaan air baku di Kabupaten/Kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih.▪ Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi sehingga berpengaruh terhadap belum terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi▪ Masih rendahnya pembangunan infrastruktur dalam penanganan potensi abrasi pantai dan bencana banjir yang disebabkan daerah pengaliran sungai yang cukup luas dengan debit yang cukup besar▪ Belum terpenuhinya akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman ke seluruh masyarakat di Kalimantan Selatan▪ Belum optimalnya pelayanan sistem air minum dan persampahan regional di Kalimantan Selatan sebagai pendukung akses pelayanan infrastruktur daerah secara regional.▪ Masih kurangnya penataan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan perkotaan dan kawasan strategis daerah Provinsi Kalimantan Selatan▪ Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi yang ditandai masih rendahnya SDM bersertifikat secara professional.



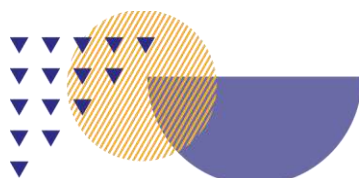


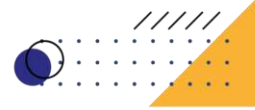
URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya keselarasan perencanaan penataan ruang antar stakeholder yang diakibatkan kurangnya koordinasi, sinkronisasi serta system pendataan dan informasi.▪ Masih diperlukan penyusunan rencana kawasan strategis provinsi yang aplikatif didukung dengan pemanfaatan dan pengendalian untuk mendukung kesesuaian dan keselarasan penataan ruang.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (Backlog Rumah) yang masih tinggi▪ Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penanganan rumah di daerah rawan bencana dan program pemerintah yang belum optimal▪ Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kalimantan Selatan sehingga perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.▪ Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak memenuhi standar, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman▪ Kurangnya kolaborasi antar SKPD terkait dalam penanganan masalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan di permukiman yang layak▪ Rendahnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak.
Ketenteraman. Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih tingginya pelanggaran K3;▪ Lambatnya pelayanan tindak lanjut (respon time rate) dari pengaduan masyarakat;▪ Masih tingginya indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan;▪ Masih rendahnya kapasitas penanganan risiko bencana;▪ Rendahnya literasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
Sosial	<ul style="list-style-type: none">▪ Kurangnya sinergitas dan koordinasi dari berbagai pihak untuk menangani kompleksitas permasalahan PPKS.▪ Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik, untuk SPM pelayanan PPKS dalam panti.▪ Penanganan rehabilitasi sosial belum maksimal;▪ Peningkatan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum maksimal.▪ Penanganan bencana masih belum optimal▪ Updating Data Kemiskinan belum optimal



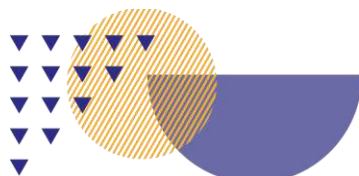


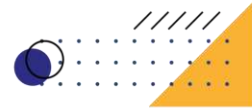
URUSAN	PERMASALAHAN
Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja sehingga jumlah penganggur relatif besar;▪ Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian sumber daya manusia yang ada;▪ Wirausaha baru kurang berkembang dan belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk kewirausahaan;▪ Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal angkatan kerja provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar, termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak pernah sekolah;▪ Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang hingga saat ini pada umumnya dirasakan masih jauh dari memadai;▪ Sarana dan prasarana belum mendukung untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan jaman maupun teknologi;▪ Dengan adanya revolusi industri 4.0 maka dapat tercipta pengangguran yang dipengaruhi oleh melebarnya ketimpangan ekonomi karena peran digitalisasi dapat menggeser peran konvensional dalam pasar;
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengarusutamaan Gender belum berjalan optimal;▪ Belum optimalnya pelayanan perlindungan perempuan;▪ Belum optimalnya upaya perlindungan anak;▪ Masih tingginya kasus perkawinan anak;
Pangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya;▪ Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil;▪ Terbatasnya kemampuan dalam mengantisipasi dinamika permasalahan ketahanan pangan;
Pertanahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya jumlah lahan bersertifikat, sehingga penanganan masalah pertanahan membutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).▪ Masih minimnya data layanan untuk urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi▪ Masih lambatnya proses penyelesaian pembebasan dan kasus pertanahan;
Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none">▪ Kualitas Air Sungai yang Rendah



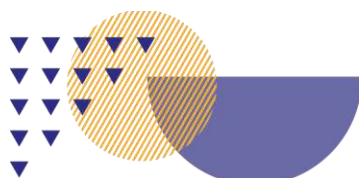


URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengelolaan persampahan dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);▪ Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat▪ Potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal▪ Potensi kerusakan ekosistem gambut, mangrove dan terumbu karang diwilayah pesisir▪ Perubahan Iklim
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none">▪ belum maksimalnya cakupan akta kematian;▪ belum maksimalnya cakupan akta perkawinan.▪ belum maksimalnya cakupan akta kelahiran;▪ Masih terdapat penduduk usia dewasa yang belum memiliki KTP;▪ Masih tingginya pasangan pernikahan yang tidak memiliki akte nikah;
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi perdesaan (Manajemen Usaha);▪ Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan;▪ Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal;▪ Rendahnya indeks desa membangun.
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum maksimalnya Penerapan Grand Desain Pembangunan Kependudukan;▪ Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ber KB;▪ Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang putus ber KB;▪ Masih banyak ditemukan usia kawin pertama di bawah rata-rata usia ideal (usia \leq 21 tahun) pada Pasangan Usia Subur (PUS), sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.▪ Kurangnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana yang ditujukan pada program pembangunan keluarga (KKBPK) untuk disesuaikan dengan program lini bawah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.
Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">▪ Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan jalan; belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antar kota, perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut juga dikarenakan masih kurang optimalnya penerapan peraturan sistem transportasi dan manajemen lalu lintas.▪ Belum optimalnya sarana dan prasarana angkutan masal (bus rapid transit) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas angkutan jalan dan pelayanan jasa transportasi daerah perkotaan.



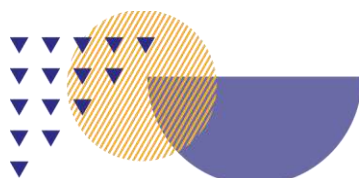


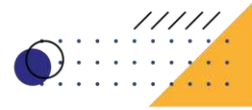
URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.▪ Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat dari kurangnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelayakan armada, ketiadaan rambu dan fasilitas keselamatan di jalan, serta rendahnya law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.▪ Belum berkembangnya transportasi laut dan sungai yang representatif yang digunakan untuk perlintasan regional, nasional maupun internasional yang dapat digunakan untuk pengembangan transportasi orang maupun barang. Diperlukan dukungan investasi baik dari pemerintah maupun swasta untuk pengembangan serta sarana dan prasarana transportasi laut dan sungai baik regional maupun internasional▪ Belum adanya Pembangunan transportasi perkeretaapian di Kalimantan Selatan sebagai pendukung perekonomian sebagai Pintu gerbang Ibu Kota Negara▪ Belum optimalnya pelayanan jaringan penerbangan Bandar Udara Syamsudin Noor dan bandara lainnya di Kalimantan Selatan dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Kalimantan Selatan.▪ Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan kebisingan) akibat dominannya pengguna lalu lintas kendaraan pribadi di jalan
Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi;▪ Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).▪ Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi public oleh pemerintah daerah.▪ Terbatasnya infrastruktur akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar SKPD.▪ Penerapan berbagi pakai data di SKPD belum maksimal▪ Masih terdapat area blankspot di Kalimantan SELatan
Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi;▪ Masih banyaknya koperasi tidak aktif;▪ Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur Koperasi;▪ Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan dan penjaminan);▪ Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM;▪ Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global;



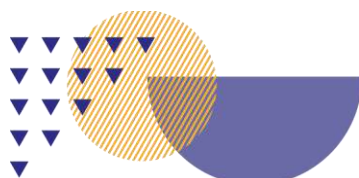


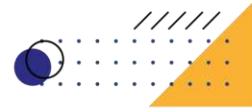
URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ UMKM menurun dikarena dampak pandemi covid-19 yang melanda dunia, terkhusus di Indonesia;
Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">▪ Kinerja realisasi investasi PMA/PMDN tidak tercapai terkendala akibat covid 19 sehingga banyak perusahaan yang menunda realisasi investasinya▪ Kurangnya Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN;▪ Belum optimalnya Promosi Investasi yang berkelanjutan;▪ Belum adanya Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha;
Kepemudaan dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none">▪ Sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki masih jauh dari ketentuan yang seharusnya;▪ Pembinaan dan pembibitan atlet berprestasi masih belum bisa dilakukan secara maksimal;▪ SDM dengan kompetensi dan pengalaman profesional bidang kepemudaan masih sangat terbatas;▪ Masih banyak organisasi pemuda yang pasif;▪ Masih sedikitnya Wirausaha muda;▪ Masih kurangnya kegiatan – kegiatan olahraga yang melibatkan peran serta masyarakat secara massal guna membudayakan olahraga di Kalimantan selatan.▪ Masih kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Statistik	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya SDM Perstatistikan;▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik;▪ Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;
Persandian	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih rendahnya SDM Perstatistikan;▪ Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik;▪ Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;
Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya penggalian potensi unsur budaya;▪ Belum optimalnya pengembangan unsur budaya;▪ Belum optimalnya aktualisasi unsur budaya;▪ Sarana dan prasarana seni budaya masih kurang;▪ Kurang produktifnya pelaku seni budaya daerah dalam berkarya▪ Belum maksimalnya publikasi dan promosi Kebudayaan;▪ Kurang optimalnya pembinaan terhadap lembaga budaya daerah
Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya perpustakaan digital;▪ Rendahnya minat masyarakat Kalimantan Selatan untuk melakukan aktivitas membaca



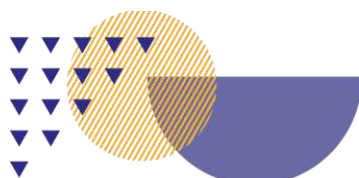


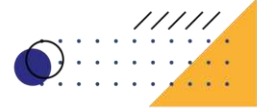
URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih Kurangnya Koleksi Bahan Pustaka yang terbaru untuk Layanan Umum, Referensi, Deposit, Layanan Anak, Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS).▪ Belum optimalnya kegiatan pembinaan perpustakaan dan promosi perpustakaan.
Kearsipan	<ul style="list-style-type: none">▪ Depo arsip belum berjalan optimal;▪ Kurangnya pemahaman ASN terhadap kearsipan;▪ Belum lengkapnya regulasi daerah tentang pengelolaan arsip.▪ Belum terlaksananya pengelolaan kearsipan secara handal dan komprehensif berbasis TIK▪ Rendahnya komitmen pencipta Kearsipan skala Provinsi dalam menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) KeKearsipan.▪
Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">▪ Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) yang hasil akhirnya adalah penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya. wisata belanja, wisata alam. wisata minat khusus. wisata edukasi. agro dan ekowisata▪ Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum menyatu Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait.▪ Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata▪ Keterbatasan dana dan fokus kabupaten/kota dalam mengembangkan objek-objek wisatanya menjadi objek.▪ Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang berkualitas masih belum memadai
Kelautan Dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya Pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya▪ Belum dimanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya ikan di laut di wilayah > 5 mil laut.▪ Terbatasnya pembangunan dan pengembangan prasarana perikanan tangkap di titik sentra penangkapan ikan nelayan. khususnya dalam rangka mendukung penerapan sistem rantai dingin terhadap hasil tangkapan nelayan▪ Belum berkembangnya kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang mandiri dan berbadan hukum





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih terbatasnya upaya pelestarian terhadap stock sumber daya ikan lokal. sehingga perlu adanya upaya pelepasliaran (restocking) di perairan umum▪ Pada umumnya usaha pembudidaya ikan masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif▪ Masih besarnya ketergantungan pembudidaya ikan terhadap pakan ikan pabrikan yang menyebabkan tingginya biaya produksi budidaya ikan hingga 60 % khusus untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan▪ Belum berkembangnya pengembangan usaha budidaya ikan lokal sebagai komoditas perikanan khas daerah▪ Pada umumnya para pembudidaya ikan masih belum memahami tentang ketentuan dan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)▪ Masih terjadinya serangan hama dan penyakit ikan/udang di kawasan sentra pembudidayaan ikan▪ Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan▪ Kesulitan pada akses permodalan usaha merupakan salah satu faktor yang membuat UMKM sektor kelautan dan perikanan terbatas pengembangannya dalam upaya peningkatan produktifitas dan kesejahteraannya▪ Masih terbatasnya penyebarluasan informasi tentang potensi. peluang usaha. dan pengembangan investasi sektor kelautan dan perikanan.▪ Masih terbatasnya penyebarluasan informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan. kekuatan. dan kecerdasan▪ Masih terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan umum maupun perairan laut di Kalimantan Selatan▪ Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki POKMASWAS dan aparat pengawas dalam mendukung pelaksanaan operasional pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan
Pertanian	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura▪ Belum optimalnya kelembagaan penyuluhan dan petani▪ Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta Dampak Perubahan Iklim▪ Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian▪ Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian▪ Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar▪ Masih rendahnya perlindungan terhadap petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani yang berbasis korporasi petani▪ Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura masih belum tertata dengan baik



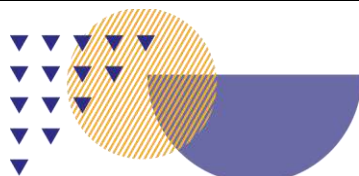


URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembangunan Perkebunan Ramah Lingkungan masih kurang efektif▪ Belum optimalnya Integrasi Sawit – Sapi▪ Belum optimalnya pengembangan Kawasan perkebunan/peternakan berbasis korporasi pekebun/peternak▪ Pemotongan ternak sapi betina produktif cukup tinggi▪ Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak Keluar Kalimantan Selatan Cukup Banyak namun belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap PAD.▪ Penyakit Hewan yang mempengaruhi pembangunan peternakan▪ Harga Pakan dan Bahan Ternak Unggas Cenderung Meningkat▪ Jaminan Keamanan Pangan yang ASUH masih rendah▪
Kehutanan	<ul style="list-style-type: none">▪ Masih luasnya lahan kritis▪ Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan berbasis Perhutanan Sosial;▪ Masih rendahnya produksi dan pemasaran hasil KUPS yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kelola Perhutanan Sosial▪ Belum maksimalnya penerimaan Retribusi dan PNPB sektor kehutanan karena sedikitnya izin usaha pemanfaatan dan belum digalinya sumber-sumber pendapatan baru
Energi Dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none">▪ Menurunnya cadangan air tanah akibat pengembalian air tanah yang berlebihan atau tidak sesuai kemampuan daya dukung air tanah serta pemanfaatan tata ruang pada zona imbuhan air tanah.▪ Kurangnya pengelolaan terhadap bukaan lahan tambang sehingga meninggalkan lubang bekas tambang (void) yang tidak/belum direklamasi. Salah satunya akibat pertimbangan tanpa izin yang masih marak sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan.▪ Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam hal peningkatan bauran energi untuk pemenuhan kebutuhan energi.▪ Kurangnya pembangunan infrastruktur ketegalistrikan di daerah terpencil yang lokasinya sulit terjangkau dan masih banyaknya rumah tangga miskin yang belum mendapatkan sambungan listrik.
Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">▪ Berlaku peraturan tentang larangan ekspor produk tambang menuntut adanya pergerakan investasi secara cepat dalam rangka hilirisasi produk – produk hasil tambang ;





URUSAN	PERMASALAHAN
	<ul style="list-style-type: none">▪ Maraknya barang beredar di pasaran yang belum memenuhi ketentuan standar dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen terutama produk elektronik dan mainan anak;▪ Peningkatan penggunaan dan cinta produk dalam negeri dalam rangka memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia sebagai potensi pasar yang besar ;▪ Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia khususnya Kalimantan Selatan yang berdampak signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi yang belum ada kepastian kapan akan berakhirnya ;▪ Masih terjadinya perang dagang antara Amerika dan Cina yang mengakibatkan penurunan produk ekspor Indonesia dan ini sudah barang tentu pasti berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ;▪ Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 31 Desember 2015 menyebabkan terjadinya beberapa deregulasi perdagangan luar negeri terutama menyangkut pembebasan bea masuk untuk barang – barang dari ASEAN selain itu di dalam 2015 terjadi deregulasi beberapa barang ekspor yang merupakan produk unggulan ekspor Kalimantan Selatan seperti batu bara, produk hasil hutan dan produk minyak sawit (CPO);
Perindustrian	<ul style="list-style-type: none">▪ Pemasaran yang terbatas.▪ Lemahnya struktur industri.▪ Terbatasnya IKM yang memiliki izin usaha industri.▪ Masih rendahnya kualitas SDM industri.▪ Belum tersedianya lahan clear dan clean untuk sentra IKM dan kawasan industri yang mendukung penumbuhan dan pengembangan industri.▪ Belum tersedianya data dan informasi industri yang memadai (valid dan up to date) untuk menarik investasi dan pengembangan industri.▪ Lambatnya investasi di sektor hilir industri.▪ Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal menjadi produk unggulan.▪ Masih rendahnya produktivitas industri.▪ Kurangnya jumlah wirausaha industri.
Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none">▪ Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria 2 C dan 3 terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria clean dan clear▪ Rendahnya aspek legalitas dalam status kepemilikan lahan transmigrasi▪ Kurang optimalnya kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi▪ Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi Kurang koordinasi dengan skpd lain dalam hal peningkatan pemberdayaan transmigrasi.





2.6.3 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

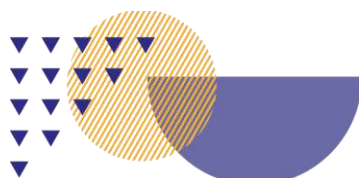
Belum optimalnya pelaksanaan dan pemerataan hasil pembangunan di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari koefisien gini. Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Indeks gini Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 yaitu 0.334 dan di tahun 2020 turun menjadi 0.332. Sedangkan pada tahun 2021 Indeks Gini Provinsi Kalimantan Selatan turun menjadi 0,330. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat secara horisontal di Kalimantan Selatan mengalami penurunan dan dapat dikatakan pemerataan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan semakin membaik dan masuk dalam kategori ketimpangan wajar. Namun jika dibandingkan dengan nilai rasio gini dengan Provinsi lain di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalsel masih menduduki urutan ketiga dari lima provinsi.

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, beberapa permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

1. Pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19)

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara di dunia untuk meresponsnya sangat bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan kemampuan recovery yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang kesehatan, sosial dan ekonomi.

Survei yang dilakukan kepada 100 eksekutif ASEAN menunjukkan bahwa 40% responden mempercayai bahwa akan ada serangan kedua virus covid-19

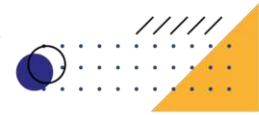




yang berdampak pada pertumbuhan jangka panjang yang lambat serta pemulihan ekonomi dunia yang terjadi perlahan. Pada skenario ini intervensi ekonomi dipercaya akan efektif dalam menopang konsumsi utama tetapi kemungkinan serangan kedua virus covid-19 akan mengarah ke lockdown putaran kedua (McKinsey 2020). Lockdown putaran kedua ini yang dipercaya akan memperburuk kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global.

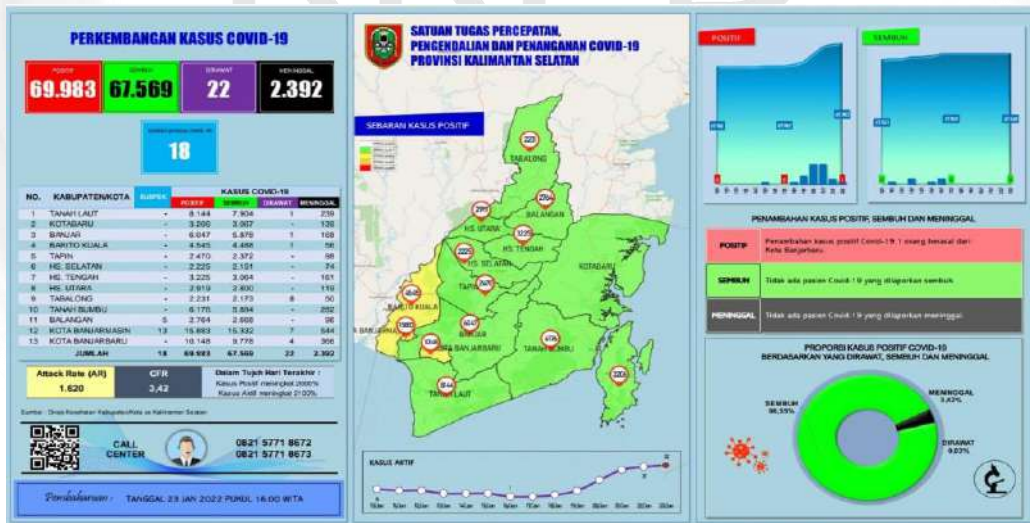
Berdasarkan prediksi berdasarkan skenario tersebut diatas, maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand (-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua Negara ini diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 (McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga terdampak sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%.

Keberlangsungan bisnis dan keselamatan karyawan merupakan tantangan utama saat ini. Metode work from home atau pekerjaan jarak jauh menjadi metode utama dimasa ini. Hampir semua lini bisnis mengalami perlambatan dalam aktivitas mereka. Dalam dunia pendidikan Institusi pendidikan beralih ke sistem belajar online sebagai upaya agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun ruang kelas fisik ditutup. Pada sisi lain, dunia usaha dan pemerintah dipaksa untuk memenuhi permintaan di area kritis yang mencakup makanan, persediaan rumah tangga, dan barang medis. Pandemi COVID-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian dengan memunculkan krisis ekonomi dan sistem keuangan yang tidak terduga sebelumnya. Di sisi moneter Bank sentral di seluruh dunia menghadapi tantangan likuiditas dan solvabilitas bagi hampir semua sektor industri yang ada di negara masing-masing. Hal ini menjadi fokus bank sentral dan pemerintahan hampir di seluruh dunia agar sistem



keuangan masing-masing negara tetap berfungsi dengan baik. Guncangan terhadap mata pencaharian atau ketenagakerjaan sebagai akibat besarnya tenaga kerja yang di PHK bisa menjadi yang terbesar dalam hampir satu abad (Mckinsey Global Institute, 2020).

Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang juga mengalami pandemi dan masuk pada bulan yang sama yaitu di bulan Maret. Saat ini, sudah hampir 2 tahun baik Indonesia maupun Kalimantan Selatan terus berupaya untuk melakukan pemulihan ekonomi dan pengawasan melalui berbagai peraturan dan kebijakan daerah untuk membatasi kegiatan yang beresiko tinggi terpapar COVID-19. Dengan masalah ini, maka sudah seharusnya isu pandemi masuk pada agenda program RPJMD Tahun 2021-2026 terutama untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan juga strategi dalam urusan kesehatan penduduk di Kalimantan Selatan. Untuk dapat memberikan gambaran isu pandemi saat ini, melalui website corona.kalselprov.go.id per Januari 2022, disebutkan data mengenai kondisi terbaru COVID-19 yang di update secara berkala oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut adalah infografisnya :



Gambar 2.55 Perkembangan Data Perkembangan Kasus Konfirmasi, Sembuh dan Meninggal (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : corona.kalselprov.go.id, 23 Januari 2022.

Pada data terbaru yaitu 23 Januari 2022, jumlah kasus positif tertinggi masih terdapat di dua kota besar di Kalimantan Selatan yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Rentang kasus positif dan sembuh adalah 69.983 orang (positif) dan 67.569 (sembuh) dimana dari angka tersebut dari tahun 2019 (awal



pandemi) sampai dengan saat ini sudah ada total 2.392 orang yang meninggal dan sisanya 22 orang masih dirawat. Untuk melihat perbandingan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan selama 3 tahun terakhir, di bawah ini adalah perbandingannya :

Tabel 2.176 Data Perbandingan Kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan

Periode Waktu	Jumlah Kasus COVID-19 (orang)				
	Suspek	Positif	Sembuh	Dirawat	Meninggal
21 Mei 2020	ODP : 938	424	77	-	56
(periode awal COVID-19 masuk ke Indonesia)	PDP : 85				
1 Januari 2021	277	15.399	13.875	938	586
1 Januari 2022	10	69.957	67.553	13	2.391

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Merujuk pada Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada periode Februari 2021, dilaporkan bahwa Pandemi virus Corona (COVID-19) berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Sejalan dengan dampak perlambatan ekonomi dunia dan nasional akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 berkontraksi 1,81%(yoy), lebih rendah dibandingkan 2019 yang tumbuh 4,08%(yoy). Pada triwulan IV 2020, kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Selatan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja pada triwulan IV 2019. Hal ini seiring dengan melemahnya pendapatan korporasi ditengah menurunnya aktivitas perekonomian pada masa pandemi. Selain itu juga, terjadi tekanan inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga merupakan dampak dari anjuran untuk melakukan aktivitas work from home (wfh) selama pandemi dimana adanya peningkatan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta penyediaan makanan dan minuman/restoran disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan serta makanan dan minuman siap saji. Disisi lain pada sektor pertambangan, para pengusaha cenderung wait and see dengan



mengamankan biaya untuk dapat bertahan dalam situasi pandemi. Namun, pada tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 diperkirakan secara perlahan dapat dikendalikan didukung oleh program vaksinasi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan secara keseluruhan tahun 2021 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Dari sisi permintaan, peningkatan terutama dipengaruhi oleh perbaikan kinerja konsumsi RT, investasi, dan ekspor. Peningkatan kinerja konsumsi RT sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat seiring peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang berangsur pulih.

2. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan Yang Masih Belum Kuat

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir masih didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 18,29%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,39%, industri pengolahan sebesar 13,52%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,46%, dan konstruksi sebesar 8,26%. Secara total, kelima lapangan usaha tersebut mencapai 64,92%, 12 lapangan usaha lainnya berbagi nilai sebesar 35,08%. Selain itu, upaya transformasi ekonomi dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektorsektor antara lain: sektor Pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, dan Perdagangan, sudah mulai terlihat meskipun belum optimal. Share Sektor Pertambangan tahun 2016 tercatat 20,98% dan turun menjadi 18,29% di tahun 2020. Namun demikian, peningkatan share dari sektor pengganti lainnya tercatat untuk 5 (lima) besar hanya sektor Perdagangan dari 9,41% menjadi 10,46%, dan Konstruksi dari 7,83% menjadi 8,26%. Share dari sektor unggulan yakni Pertanian (dalam arti luas) dan industri pengolahan masih menunjukkan kinerja yang menurun.

Dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian daerah menjadi salah satu yang membuat struktur ekonomi berkelanjutan masih belum kuat. Pada struktur perekonomian wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku turun dari 19,08% di tahun 2019 menjadi 18,29% di tahun 2020. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat



diperbaharui sumber dayanya, sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Pertanian dan Pariwisata dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk ke depannya.

Pada sisi pengeluaran, PDRB Kalimantan Selatan masih ditopang dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), baik untuk ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2020, komposisi PDRB ADHB yakni konsumsi rumah tangga 48,9%, konsumsi non rumah tangga 1,08%, konsumsi pemerintah 12,25%, PMTB 25,04% dan Nett Ekspor-Impor 12,68%. Sedangkan komposisi PDRB ADHK yakni konsumsi rumah tangga 47,31%, konsumsi non rumah tangga 0,95%, konsumsi pemerintah 10,23%, PMTB 22,98% dan Nett Ekspor-Impor 18,48%.

Produk tambang juga masih menjadi primadona dalam perdagangan ke luar negeri (ekspor) dimana pada tahun 2019 mencapai lebih dari US\$ 5,5 milyar dengan volume mencapai hampir 133 juta ton. Meskipun nilai ekspor tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan ekspor produk tambang pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari US\$ 6,49 Milyar dengan volume hampir mencapai 132 juta ton, perlu digarisbawahi bahwa ekspolrasi produk pertambangan sebagian meninggalkan degradasi kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. selain produk tambang, Provinsi Kalimantan Selatan juga masih didominasi ekspor bahan mentah dan setengah jadi seperti karet, sawit, kayu lapis dan lainnya. Oleh karenanya, pemberian ijin pertambangan maupun pengawasan melekat pada setiap perusahaan pertambangan dan penggalian harus menjadi titik tolak pengembangan pembangunan berkelanjutan.

Pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup rendah juga membuat perkembangan perekonomian mikro tidak tumbuh signifikan. Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya, pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh.

Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya



berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yaitu Rp 12.032.000,- sebagian besar digunakan untuk pengeluaran makanan yaitu sebesar Rp 628.902 rupiah atau 50,30% sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk non makanan sebesar 621.460 rupiah atau 49,70%. Pengeluaran per Kapita Provinsi Kalsel merupakan peringkat keempat jika dibandingkan Provinsi lain di Kalimantan, dan hanya berada diatas Kalimantan Barat.

3. Sumber Daya Manusia Yang Belum Berdaya Saing

Dalam mengkaji permasalahan pokok sumber daya manusia yang belum berdaya saing, maka dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Capaian pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian indikator indeks pembangunan manusia. IPM di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2014-2020 mengalami tren peningkatan di setiap tahunnya, dimana IPM pada tahun 2020 sudah mencapai 70,72. Meskipun begitu, angka IPM tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,94. Selain itu, jika dibandingkan dengan provinsi lain se-regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-empat di atas Kalimantan Barat (67,66) dan jauh dari peringkat pertama yakni Kalimantan Timur (76,24).

Salah satu permasalahan pembagunan SDM di Provinsi Kalsel yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan akan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2020 hanya mencapai 8,29 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kalimantan Selatan hanya mengenyam pendidikan sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8. Angka Rata-rata Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga ARLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM.

Belum optimalnya kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan seberapa tinggi atensi masyarakat



terhadap pendidikan sesuai usia sekolah pada umumnya. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka semakin tinggi pula masyarakat usia sekolah yang mengenyam bangku pendidikan. Namun secara umum, semakin tinggi usia sekolah maka angka partisipasi sekolah juga semakin rendah mengingat makin banyak hambatan dalam mengikuti jenjang pendidikan seperti biaya, cakupan sekolah, hingga masalah sosial lainnya.

Indikator yang mempengaruhi IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dimana tahun 2019, AHH di Kalimantan Selatan berada pada usia 68,49 tahun dan pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai usia 68,66 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2019 akan memiliki peluang hidup hingga usia 68,66 tahun. Meskipun mengalami peningkatan pelayanan kesehatan di setiap tahunnya, namun jika dibandingkan dengan angka harapan hidup se-regional Kalimantan, Kalimantan Selatan berada pada urutan kedua setelah Kalimantan Barat (70,56 tahun). Permasalahan kualitas kesehatan juga dapat dilihat dari masih tingginya angka kematian Ibu dan angka kematian bayi di Kalimantan Selatan.

Kenaikan jumlah penduduk setiap tahun secara otomatis juga meningkatkan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2020 mencapai 110 jiwa per km². Dibandingkan dengan Provinsi Lainnya, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki angka kepadatan penduduk yang paling tinggi di seluruh regional Kalimantan. Kalimantan Selatan diprediksikan akan mengalami bonus demografi, dimana penduduk dengan umur produktif sangat besar sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya adalah menyebabkan angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Jumlah penduduk usia kerja yang semakin meningkat akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Permasalahan bonus demografi ini harusnya bisa diselesaikan dan dipersiapkan dari sekarang. Pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang yang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Penduduk berkualitas akan mampu menjawab tantangan bonus demografi yang terjadi di Kalimantan Selatan. Usia produktif sudah mencapai 53,69% atau sebesar



2.186.967 dari total jumlah penduduk Kalimantan Selatan, namun dari jumlah penduduk tersebut terdapat 51,14% yang berkerja yaitu sebesar 2.083.319. Sementara perbaikan pendidikan, kesehatan dan status gizi masyarakat mendorong terjadinya peningkatan harapan usia hidup yang mana penduduk tidak bekerja usia 60 tahun ke atas masih memiliki kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa.

Permasalahan yang sering timbul dalam pembangunan suatu wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. rendahnya daya saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya manusia, dalam menghadapi tantangan kerja kedepan. Rendahnya daya saing tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga pengangguran.

Tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan cukup rendah yakni mencapai 4,31% pada tahun 2019, menurun dibandingkan tahun 2018 di angka 4,50%. Meskipun begitu, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kalimantan Selatan menurun dari 70,27 % menjadi 69,41% di tahun 2019. Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam menyongsong Industri 4.0 menjadi permasalahan pembangunan bidang sumber daya manusia yang perlu diperhatikan.

Salah satu indikasi rendahnya daya saing maupun kualitas tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan adalah variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Di Provinsi Kalimantan Selatan, penduduk bekerja hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar mencapai 43,03%. Hanya 12,07% dari angkatan kerja yang bekerja yang mengantongi ijazah Perguruan tinggi.





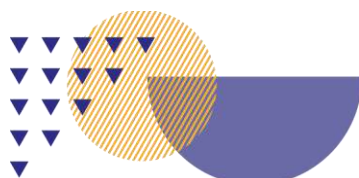
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Yang Belum Optimal

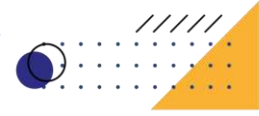
Sebagai bagian dari Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Potensi sumber daya tersebut selama ini cukup tinggi dieksploitasi sehingga menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Degradasi kualitas lingkungan mulai meningkat secara signifikan dan tentu saja akan berimbas pada kerentanan ekosistem yang berada di dalamnya.

Degradasi lingkungan dapat terjadi akibat pemanfaatan lahan dan masuknya bahan-bahan pencemar berbentuk padat dan cair ke lingkungan yang mana bahan-bahan ini bukan merupakan bagian dari komponen lingkungan asli. Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah, seperti yang terjadi pada proses penambangan timah, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Selain itu pembukaan lahan untuk usaha perekonomian mengakibatkan tutupan lahan semakin berkurang. Untuk kawasan pesisir pelestarian tanaman mangrove dan terumbu karang harus terus diupayakan untuk menghindari degradasi yang lebih parah akibat kerusakan lingkungan.

Dari capaian indeks lingkungan hidup menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan belum berjalan dengan baik mengingat nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalsel masih berada di urutan terbawah se Kalimantan. Berdasarkan rilis dari Kementerian LHK, Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel yaitu 68,78 terdiri dari komponen indeks kualitas air (IKA) 75,80, indeks kualitas udara (IKU) 87,75 dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) 49,29 dan menduduki peringkat 25 dari 34 Provinsi.

Dalam perspektif IKLH, Nilai indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan resultan dari upaya menjaga laju deforestasi, pengelolaan sampah dan limbah, upaya rehabilitasi dan pengendalian pencemaran dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang

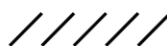
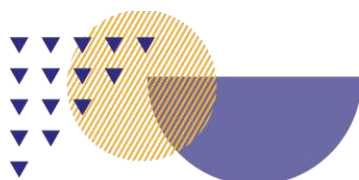




dilakukan. Beberapa potensi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup tersebut antara lain : industri kima, karet, plastik, makanan dan minuman, pengolahan kayu, tekstil, perkebunan, pertambangan, pertanian, peternakan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dari penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, dan timbunan sampah.

Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan tentunya tidak terlepas dari penurunan kualitas dan kuantitas air sungai. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, beberapa sungai yang dilakukan pengamatan sebagian besar terkategori sungai dengan pencemaran ringan, dan beberapa sungai tercemar sedang. Rendahnya indeks lingkungan hidup dibandingkan provinsi tetangga juga terlihat dari potensi bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, bencana kekeringan, kebakaran pemukiman dan kebakaran hutan lahan menjadi catatan kasus di tahun 2019 yang perlu mendapat perhatian untuk perencanaan selanjutnya. Penanganan bencana di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara berjenjang yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab utama dan sekaligus pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. Pada saat kejadian bencana, dukungan bantuan tanggap darurat oleh Pemprov. Kalsel dengan mempertimbangkan: jumlah korban manusia, kerusakan prasarana dan sarana, kerugian harta benda, luas areal terkena bencana dan dampak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Sepanjang tahun 2018 - 2020, Kalimantan Selatan telah mengalami 73 kali banjir. Jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, banjir melanda 15 kali, tahun 2019 sebanyak 20 kali dan tahun 2020 menjadi 38 kali. Banjir Kalimantan Selatan pada Januari 2021 adalah bencana banjir terbesar yang menimpa beberapa kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan dan banyak menimbulkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi dan korban jiwa. Luas genangan diperkirakan mencapai 695.114,65 ha dan tinggi genangan mencapai 0,5 – 5 meter (KLHK, 2021). Kerusakan fisik diperkirakan mencapai 102.340 rumah, 1.418 sekolah dan 847 tempat ibadah, sedangkan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar Rp19,2 T. Selanjutnya bencana puting beliung terjadi 129 kasus dengan taksiran kerugian kurang lebih Rp 664.500.000,-. Kebakaran pemukiman terjadi 353 kali dengan jumlah jiwa terdampak 4338 orang atau 1318 KK.





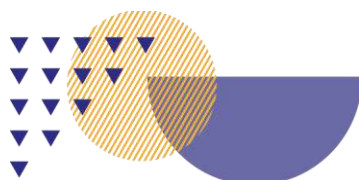
Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator penilaian indeks kualitas lingkungan hidup. Hasil review lahan kritis terbaru yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Provinsi Kalsel menyatakan bahwa pada Tahun 2018 ini luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan masih mencapai 511.594 Ha, angka ini turun dari data hasil review pada Tahun 2014 yang menyebutkan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai seluas 640.708 Hektar, dengan rincian di dalam kawasan hutan seluas 283.185,00 Ha (\pm 44,20 %) dan di luar kawasan hutan seluas 357.523,00 Ha (\pm 55,80 %). Selanjutnya pada Tahun 2019, Dinas Kehutanan mencatat telah terjadi 88 kali kasus kebakaran hutan dengan luasan terdampak 336,31 Ha.

Namun dibalik itu semua, penanaman pohon meningkat dari 68,43 pada 2020 menjadi 70,90 pada 2021 atau pada posisi sedang. IKLH Kalsel realisasi mencapai 71,35. IKLH Kalsel menjadi IKLH terendah dalam IKLH Regional Kalimantan Tahun 2021 berdasarkan sumber data IKLH Tahun 2020, Pusdatin KLHK. Sedangkan Perbandingan IKLH Provinsi Kalsel dengan Provinsi lainnya belum dapat dikomparasi karena data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2021 belum dirilis.

Untuk predikat ILH 2021 masih menggunakan nilai sementara pada Aplikasi KLHK 2021. Predikat Provinsi Kalimantan Selatan berada pada predikat bai. Nilai IKLH berada diatas IKLH Nasional (70,26). Sementara itu nilai IKA berada dibawah nilai IKA Nasional (57,91) dalam predikat kurang baik, nilai IKU berada diatas IKU Nasional (86,77) dalam predikat sangat baik, Nilai IKL berada diatas IKL Nasional (49,84) dalam predikat sangat kurang baik

Pembangunan berkelanjutan memang menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya Provinsi Kalimantan Selatan. Berkenaan dengan itu pula, berikut analisis data dan informasi pembangunan daerah sebagai kajian singkat terkait permasalahan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Isu strategis terkait pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan adalah : Provinsi Kalimantan Selatan rentan terhadap bencana alam dan sosial yaitu bencana banjir dan kebakaran.





5. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan adalah ketersediaan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin meningkat seiring dengan proyek-proyek strategis yang dicanangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain dari percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk mengatasi permasalahan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Di sisi lain Pemerintah Daerah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan fiskal. Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Dalam arti sempit, upaya pemenuhan pembiayaan pembangunan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menutup defisit anggaran. Usaha yang dilakukan mulai dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah hingga melalui sumber utang. Dalam arti luas pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBD saja, namun juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah seperti dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau melalui penggalian dana-dana CSR. Dari sisi APBD, postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, Provinsi Kalimantan Selatan masih tergantung transfer dari pusat.

Proporsi transfer Dana Perimbangan pada Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan masih cukup besar, sehingga diperlukan penguatan pembiayaan yang berasal dari potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD ini masih menggunakan instrumen generik seperti pajak dan retribusi. Maka, langkah memperbesar kegiatan investasi dalam komposisi PDRB Provinsi Kalimantan Selatan semakin diperlukan.

6. Perpindahan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur dan Penetapan Food Estate di Kalimantan Tengah

Pada 26 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan Timur. Sebagai Ibu Kota Negara baru. Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebelah timurnya berbatasan dengan sebagian (12 mil) Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Sementara itu. sisi selatannya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.



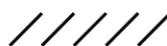
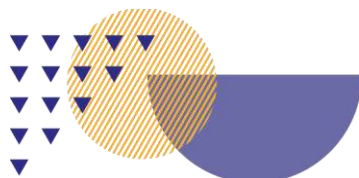


Pemindahan Ibu Kota Negara sudah termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan merupakan salah satu kegiatan prioritas pengembangan kawasan perkotaan. Salah satu yang mendasari pemindahan ibukota negara yaitu mengubah mind-set pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris sehingga merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) juga harus dimaknai sebagai pemicu pemerataan wilayah. Dalam jangka pendek, investasi infrastruktur untuk pembangunan ibu kota baru akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya, tidak terkecuali untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Tantangan sebagai daerah penyangga ibu kota negara. Pemerintah Provinsi Kalsel harus dapat merencanakan pembangunan infrastruktur untuk akses yang lebih strategis. Berdasarkan hasil capaian sasaran RPJMD 2016-2021, sampai dengan tahun 2019 persentase infrastruktur ke-PU an yang berkualitas Provinsi Kalsel hanya mencapai 69.27%. Penguatan pembangunan infrastruktur untuk menopang ibukota negara menjadi prioritas kedepannya.

Permasalahan lainnya yang mungkin muncul terkait pemindahan ibukota negara yaitu ketersediaan pangan. Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk menjadi lumbung padi Nasional. Kalimantan Selatan memiliki lahan sawah paling luas dibanding provinsi lain di Kalimantan, sehingga mungkin untuk Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi lumbung padi Nasional, karena kebutuhan pangan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, tentunya penyediaan pangan untuk ibukota negara baru menjadi tantangan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi tanaman pangan di Kalimantan Selatan perlu roadmap atau pemetaan pembangunan pertanian yang terstruktur. Kalsel sebagai penyangga pangan nasional dan daerah yang memiliki surplus beras harus mampu menjadi daerah penyuplai bahan pangan ke wilayah Ibukota Negara.

Pemindahan Ibukota Negara juga tentunya diiringi pemindahan penduduk pekerja secara masif baik dari sektor pemerintah ataupun sektor swasta. Penambahan penduduk baru ini tentunya membutuhkan pangan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Terkait penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas, rendahnya indeks pembangunan manusia Provinsi Kalimantan



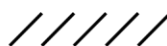
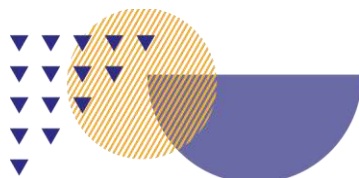


Selatan di regional kalimantan menjadi permasalahan pembangunan yang harus diatasi. Dalam perspektif birokrasi pemerintahan. pemindahan pusat pemerintahan harus dibarengi dengan meningkatnya kapasitas aparatur di lingkup Pemerintah Provinsi utamanya daerah-daerah penyangga kawasan ibukota kedepannya. Belum efektifnya reformasi birokrasi pemerintah daerah menjadi permasalahan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan.

Sesuai dengan Perpres 109 Tahun 2020. Food Estate merupakan salah satu Program Strategis nasional yaitu program peningkatan penyediaan pangan nasional. Penetapan food estate di Kalimantan Tengah merupakan respon pemerintah terhadap Pandemi global COVID-19 yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia. terutama terkait dengan kelangkaan dan krisis pangan di dunia dalam jangka menengah-panjang. Dalam KLHS cepat yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK. Kawasan Eks - PLG (Pengembangan Lahan Gambut) di Kalimantan Tengah yang dulunya dalam kondisi rusak berat setelah dilakukan pemulihan berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2016 membuahakan hasil kawasan terpulihkan sekitar 47 ribu hektar. KLHS cepat ini merekomendasi reposisi areal Eks-PLG sebagai PSN Pembangunan Wilayah Pertanian Pusat Pangan Nasional Terpadu. Modern dan Berkelanjutan. dengan tipe penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Padi sawah (Rice) sepanjang tahun;
2. MIX-FARMING: Padi-hortikultura;
3. Padi-jagung-semangka;
4. Padi estate atau usaha masyarakat untuk padi dan jagung dan Agro-forestry;
5. Padi estate atau padi rakyat dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
6. Padi dan palawija/sayuran serta Agro-forestry dan sapi;
7. Padi-palawija-sayuran;
8. Tanaman Purun pada Zona 3.4.

Penetapan food estate di Kalimantan Tengah tentunya merupakan suatu isu strategis yang harus direspon dengan baik oleh daerah tetangga termasuk Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa program (dari 20 program/kegiatan yang direncanakan) yang dapat dijadikan peluang oleh Kalsel antara lain : penguatan dan fokus litbang sektor pertanian. stimulasi pemuda tani moderns. Pusat





penelitian dan inovasi gambut-ITPC. serta program dalam investasi SDM yang modifikasi kebijakan transmigrasi dan penyebaran tenaga kerja masyarakat atau pemuda sebagai tenaga pelopor pembangunan.

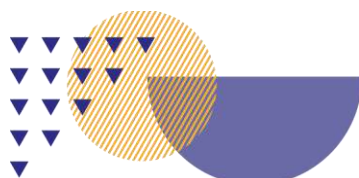
7. Belum efektifnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan. Sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berlandaskan pada pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan asas transparansi, profesionalitas, dan memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, makmur, merata, dan berkesinambungan.

Pembangunan daerah akan terlaksana melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi setiap tahapan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai domain penting dalam mengatur setiap langkah jalannya program dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itulah perlu adanya perwujudan good governance pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan agar capaian kinerja lebih optimal.

Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam artian seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik. Good governance juga didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam good governance mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai aparatur pemerintah daerah memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan pembangunan daerah.



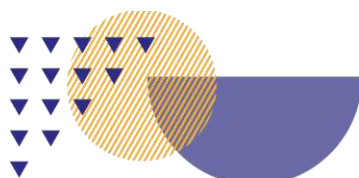


Namun demikian berdasarkan pengukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah masih berada pada posisi indeks RB sebesar 68,47. Angka capaian ini sangat dipengaruhi oleh kinerja yang lainnya seperti SAKIP, Indeks Pelayanan Publik, IPAK, IP ASN dan Indeks Pelayanan Publik. Tantangan dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah yaitu peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Pemda dalam mendukung akselerasi transformasi digital di Pemerintah Daerah.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan tentunya juga berkaitan dengan upaya membangun daya saing daerah. Salah satu indikator pada daya saing adalah permasalahan konflik, salah satunya diukur dengan Indeks kerukunan umat beragama. Angka capaian Indeks Kerukunan Umat beragama di Kalimantan Selatan pada Tahun 2019 menempati urutan ke 5 di pulau Kalimantan dengan nilai 72,51 berada dibawah Provinsi dengan capaian tertinggi se Kalimantan yaitu Kaltara dengan nilai 77,97. Keadaan ini dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, peran pemerintah dan implementasi kebijakan lokal yang adil pada berbagai tatanan masyarakat.

Dari permasalahan pembangunan yang ada. isu strategis pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Transformasi Struktur Ekonomi melalui hilirisasi industri dari bahan mentah / setengah jadi ke bahan jadi dan pengembangan sektor pertanian. pariwisata. dan UMKM.
2. Peningkatan SDM Melalui Perkuatan Sistem Kesehatan. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Peningkatan Keterampilan. dan Penanganan Masalah Sosial
3. Pemantapan Sistem Ketahanan Bencana (Banjir dan Karhutla) dan Perbaikan Lingkungan Hidup
4. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Pendukung Kawasan Perekonomian
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan. Terutama Kemudahan dalam Perizinan Berinvestasi
6. Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru





8. Perpindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru

Penetapan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Kalimantan Selatan memiliki harapan akan berdampak pada kemajuan daerah. Hal ini berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Sehingga Banjarbaru nantinya diharapkan akan menjadi daerah penyangga di wilayah Kalimantan Selatan sekaligus sebagai salah satu bentuk yang mengarah pada pembangunan di Kalsel. Sejauh ini juga, pusat perkantoran sudah mulai terpusat di Banjarbaru sejak Kantor Gubernur Kalsel dan beberapa dinas telah berpindah ke Banjarbaru dari tahun 2011.

Kedepannya berhubungan dengan perpindahan ibu kota Provinsi ini maka Kota Banjarmasin sebagai ibu kota terdahulu akan ditata sebagai pusat perdagangan termasuk pariwisata sungai untuk menunjang ibu kota negara (IKN). Sehingga Banjarbaru akan ditata kembali mengingat kawasannya masih luas dan banyak lahan kosong.

Perubahan undang-undang pemindahan ibu kota Provinsi Kalsel dilakukan karena undang-undang pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masih menggunakan undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 50 berdasarkan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada waktu itu. Dari hal tersebut, undang-undang diubah berdasarkan UUD 45 hasil amandemen sebagaimana konstitusi yang berlaku sekarang. Pemindahan itu tertuang dalam UU Provinsi yang disahkan DPR. UU yang baru ini bagi pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memetakan dan memaksimalkan peran dan potensi Provinsi Kalsel.

Perpindahan ibu kota Provinsi Kalsel ini terkesan mengejutkan, hal ini sebagaimana pernyataan masyarakat dan pemerintah daerah Kota Banjarmasin yang menanggapi dengan belum adanya pembahasan sebelumnya mengenai hal ini. Konteks ini diperkuat dengan belum ditemukannya mekanisme uji publik dengan mengundang kepala daerah masing-masing, demikian pula apabila RUU itu berkaitan daerah yang mana biasanya peran DPD sangat berpengaruh. Menurut Dr. Muhammad Pazri S.H, M.H, untuk mengambil keputusan pemindahan ibukota itu harus meliputi 3 landasan diantaranya landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Maka dari itu legislatif Provinsi, eksekutif Provinsi,





legislatif kedua Provinsi harus dilibatkan dalam pembahasan UU Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari berbagai keadaan dan problematika yang muncul menjadi sebuah permasalahan yang mengakar dari ketidaktahuan akan program dan rencana-rencana yang tidak disosialisasikan kepada khalayak umum ataupun dalam suatu rencana pembangunan daerah. Maka dari itu dari berbagai tindak lanjut problematika ini pada dasarnya adalah memiliki tujuan dalam penunjang ibu kota negara baru (IKN), yang mana UU perpindahan ibu kota Provinsi dibuat juga masih sejalan dengan masukan yang diberikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai sangat bagus yakni perspektif yang harus dilakukannya terkait kedudukan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga IKN baru. Hal tindak lanjut kedepannya yang bisa dilaksanakan adalah *judicial review* mengingat juga bahwa undang-undang merupakan buatan manusia yang harus melingkupi mekanisme hukum untuk meninjau kembali. Sehingga permasalahan program prioritas pembangunan daerah dapat sejalan dan berjalan dengan baik. Perpindahan ibu kota Provinsi ini juga pada dasarnya masih ada keterkaitan dengan rencana pembangunan daerah yakni Kawasan Metropolitan Banjarbakula. Hanya saja dalam prosesnya tidak dirasa terlibat oleh DPRD Provinsi Kalsel dan DPRD Kota Banjarmasin, termasuk segenap komponen elemen masyarakat lainnya.



Bab-III

**Kerangka
Ekonomi dan
Keuangan
Daerah**



RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab III ini dibahas tentang kondisi kerangka ekonomi dan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dan prospek perekonomian tahun 2022 serta proyeksi Tahun 2023, juga mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi PDRB Kalimantan Selatan, rencana target ekonomi makro Tahun 2023 dan kebijakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah tahun 2023, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Setiap adanya pergerakan kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah maka akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah dan juga mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah, oleh sebab itu penyusunan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Pada bab ini juga dirumuskan proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program dan kegiatan untuk tahun 2023.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai landasan untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan” dengan didukung 7 prioritas Nasional yaitu:





1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 yaitu:



Sumber: Rancangan RKP 2023

Gambar 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Proyeksi perekonomian nasional tahun 2023, yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,3% sampai dengan 5,9% tersebut, tentunya tidak lepas dengan asumsi pertumbuhan yang positif di berbagai sektor. Di sektor konsumsi rumah tangga, diharapkan dengan pandemi Covid-19 yang mulai terkendali, potensi *saving* masyarakat, khususnya kelas menengah atas, akan menjadi sumber pendorong



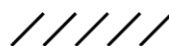
terhadap akselerasi konsumsi rumah tangga. Akselerasi juga akan terjadi pada konsumsi *leisure* – transportasi dan pariwisata. Sedangkan untuk konsumsi masyarakat bawah, masih akan tetap dibantu melalui penyaluran dana bansos, meskipun ditargetkan akan menurun jumlahnya.

Dorongan investasi diharapkan juga dapat lebih positif menggerakkan perekonomian, seiring dengan selesainya program vaksinasi Covid-19, serta akibat dampak reformasi melalui implementasi UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah. Selain itu, investasi juga didorong oleh tingginya likuiditas di sektor perbankan, yang memungkinkan kinerja kredit tumbuh tinggi. Namun demikian, bantuan tetap perlu diberikan kepada dunia usaha untuk bisa mengakselerasi proses pemulihan. Dengan kata lain, proyek infrastruktur dari pemerintah diharapkan dapat berjalan dengan normal.

Pada sisi konsumsi pemerintah, diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan konsolidasi fiskal dan dorongan belanja stimulus yang berkurang. Namun demikian, pertumbuhan diproyeksikan akan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan semakin melambat. Kinerja ekspor diperkirakan dapat mampu terjaga, didorong oleh peningkatan ekspor jasa, yang mulai kembali pulih secara perlahan, seiring dengan vaksinasi yang sudah meluas dan penerapan protokol CHSE di sektor pariwisata. Selain itu, kinerja impor diproyeksikan juga meningkat tajam seiring dengan peningkatan permintaan domestik.

Adapun tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Peningkatan Perekonomian Berkelanjutan” tema ini ini dibangun berdasarkan dengan kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang diarahkan untuk membangun Kalimantan Selatan yang MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara, dan berdaya saing melalui upaya transformasi ekonomi yakni dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan (sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui) ke arah sektor sumber daya alam yang bisa diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hilirisasi industri dan perdagangan, dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.





3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

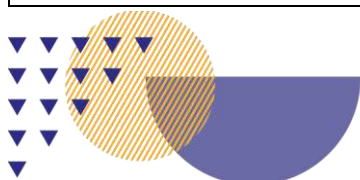
Dalam rangka mengetahui kondisi dan sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian maka tujuan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan, daya saing daerah dan hal ini dapat dilihat dari kondisi makro perekonomian daerah.

3.1.1.1 Produksi Domestik Regional Bruto

Kondisi PDRB Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020, PDRB Kalimantan Selatan atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp.179,15 triliun turun menjadi sebesar Rp.192,58 triliun pada tahun 2021. Adapun Nilai PDRB masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. PDRB Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2017 – 2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23.171,08	24.458,20	25.837,80	25.786,22	26.827,76
Pertambangan dan Penggalian	33.121,19	35.461,57	34.453,28	32.759,69	37.308,54
Industri Pengolahan	22.951,18	24.081,10	24.635,65	24.215,50	26.862,85
Pengadaan Listrik dan Gas	206,86	237,11	255,04	274,73	294,97
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	645,16	709,00	754,90	805,80	855,21
Konstruksi	12.393,79	13.675,86	14.910,49	14.803,23	15.742,37
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.483,03	17.220,84	19.031,70	18.731,97	19.798,25
Transportasi dan Pergudangan	10.345,47	11.387,10	12.469,23	11.796,54	12.116,84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.143,54	3.463,67	3.834,60	3.846,30	4.006,24
Informasi dan Komunikasi	5.535,38	6.065,46	6.570,31	7.032,16	7.586,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.738,71	6.207,19	6.450,60	6.569,43	6.933,86
Real Estate	3.531,10	3.795,37	4.118,67	4.352,93	4.676,17
Jasa Perusahaan	1.053,37	1.175,72	1.305,73	1.309,54	1.379,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.485,82	10.222,28	11.103,08	11.416,99	11.722,82
Jasa Pendidikan	7.278,69	8.008,70	8.816,48	9.093,59	9.464,28





Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.078,92	3.364,77	3.628,09	3.959,50	4.543,25
Jasa Lainnya	1.941,26	2.150,12	2.385,00	2.396,99	2.457,61
Total	159.104,55	171.684,06	180.560,65	179.151,11	192.576,58

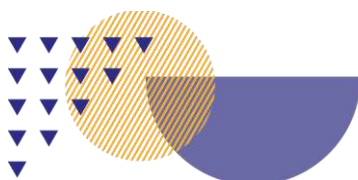
Sumber: BPS (2022)

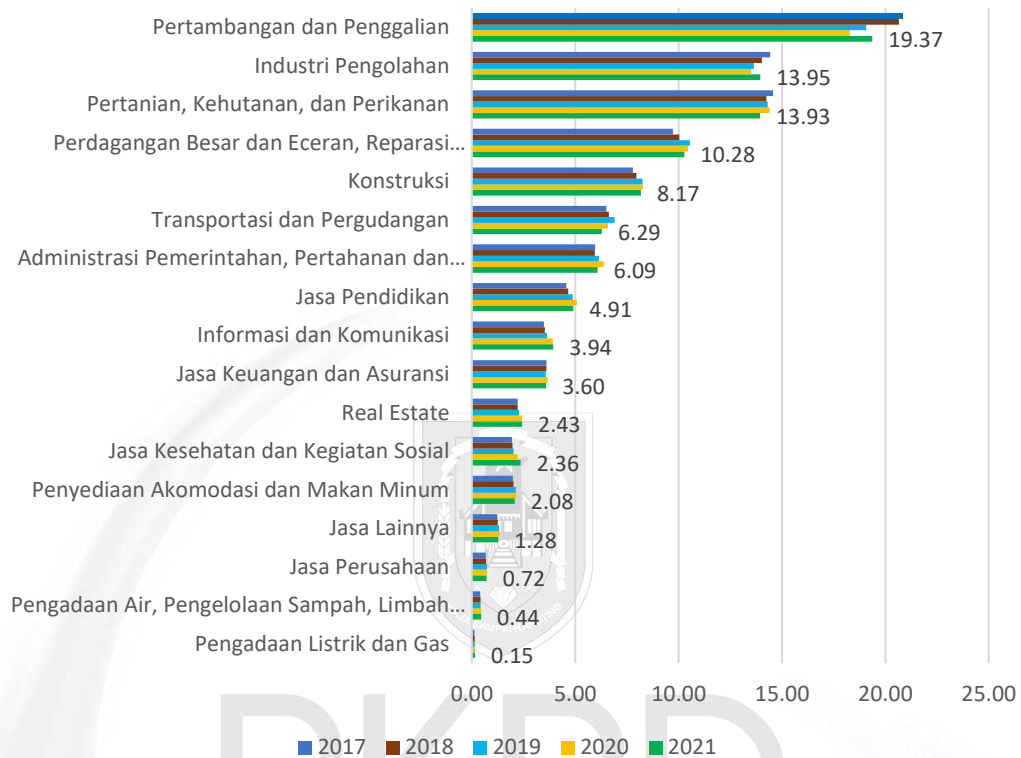
Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha selama tahun 2021 masih didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 19,37%, industri pengolahan sebesar 13,95%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,93%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,28%, dan konstruksi sebesar 8,17%. Secara total, kelima lapangan usaha tersebut mencapai 65,71%, 12 lapangan usaha lainnya berbagi nilai sebesar 34,29%.

Selain itu, upaya transformasi ekonomi dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan ke arah sektor-sektor antara lain:

sektor pertanian (dalam arti luas), Industri pengolahan, dan perdagangan, sudah mulai terlihat meskipun belum optimal.

Share sektor pertambangan tahun 2017 tercatat 20,82% dan turun menjadi 19,37% di tahun 2021. Namun demikian, peningkatan *share* dari sektor pengganti lainnya tercatat untuk 5 (lima) besar hanya sektor perdagangan dari 9,73% menjadi 10,28%, dan konstruksi dari 7,79% menjadi 8,17%. *Share* dari sektor unggulan yakni pertanian (dalam arti luas) dan industri pengolahan masih menunjukkan kinerja yang menurun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 3.2.





Sumber: BPS (2022)

Gambar 3.2 Perbandingan Share PDRB ADHB Sektor Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2021

Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pada tahun 2021 juga menunjukkan pertumbuhan positif setelah bangkit dari tekanan yang terjadi selama pandemi Covid-19 dari semula Rp.130,87 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.135,41 triliun pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. PDRB Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) 2017–2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.280,42	17.925,11	18.568,35	18.390,80	18.606,67
Pertambangan dan Penggalian	31.641,06	32.940,94	33.412,75	31.920,34	33.295,01
Industri Pengolahan	15.936,39	16.627,55	16.868,96	16.298,97	17.314,00
Pengadaan Listrik. Gas	138,78	149,29	156,34	163,76	171,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	479,85	512,64	541,31	572,86	601,69



Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Konstruksi	9.086,57	9.621,52	10.206,76	10.075,35	10.364,04
Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.726,03	11.534,60	12.390,88	11.972,12	12.235,52
Transportasi dan Pergudangan	7.246,43	7.751,31	8.210,08	7.773,29	7.913,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.333,90	2.497,51	2.682,55	2.628,49	2.688,92
Informasi dan Komunikasi	4.474,50	4.782,74	5.133,11	5.510,90	5.908,86
Jasa Keuangan	4.018,16	4.188,56	4.258,12	4.316,33	4.367,68
Real Estate	2.720,39	2.856,69	3.026,70	3.144,11	3.310,58
Jasa Perusahaan	712,08	766,72	822,58	806,23	835,41
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.315,38	6.553,66	6.989,22	7.045,53	7.138,27
Jasa Pendidikan	5.230,25	5.597,19	6.019,49	6.117,21	6.211,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.180,39	2.309,80	2.445,83	2.613,23	2.916,03
Jasa lainnya	1.337,95	1.436,75	1.538,50	1.516,07	1.533,73
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	121.858,52	128.052,58	133.271,55	130.865,59	135.412,85

Sumber: BPS (2022)

Pada sisi pengeluaran, PDRB Kalimantan Selatan masih ditopang dari sektor Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), baik untuk ADHB maupun ADHK. Pada tahun 2021, komposisi PDRB ADHB yakni konsumsi rumah tangga 46,74%, konsumsi non rumah tangga 1,04%, konsumsi pemerintah 12,02%, PMTB 24,06% dan Nett Ekspor-Impor 16,09%. Sedangkan komposisi PDRB ADHK yakni konsumsi rumah tangga 46,08%, konsumsi non rumah tangga 0,93%, konsumsi pemerintah 10,24%, PMTB 22,38% dan Nett Ekspor-Impor 20,32%. Adapun struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 menurut pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Struktur PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2016–2021 (Triliun Rupiah) Menurut Pengeluaran

Komponen	ADHK Tahun 2010					ADHB				
	2016	2017	2018	2019	2021	2016	2017	2018	2019	2021
1. Konsumsi rumah tangga	56,82	59,68	62,07	61,91	62,40	74,55	80,47	86,96	87,61	74,55
2. Konsumsi LNPRT	1,09	1,18	1,28	1,25	1,26	1,57	1,75	1,96	1,94	1,57
3. Konsumsi Pemerintah	13,03	13,36	13,74	13,38	13,87	19,76	21,25	22,16	21,95	19,76





Komponen	ADHK Tahun 2010					ADHB				
	2016	2017	2018	2019	2021	2016	2017	2018	2019	2021
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	26,55	28,68	30,5	30,07	30,30	36,56	40,8	44,99	44,86	36,56
5. Perubahan Inventori	0,29	0,92	0,49	0,05	0,07	0,36	1,21	0,68	0,07	0,36
6. Ekspor barang dan jasa	92,46	97,98	100,06	89,24	106,23	113,41	139,67	124,74	100,65	113,41
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	68,38	73,75	74,87	65,04	78,72	87,11	113,46	100,95	77,94	87,11
PDRB	121,86	128,05	133,27	130,87	135,41	159,1	171,68	180,56	179,15	192,58

Sumber: BPS (2022)

Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021, PDRB ADHK Perkapita mengalami kenaikan sebesar Rp.3,47 juta, yakni dari Rp.28,54 juta menjadi Rp.32,01 juta. Masih rendahnya kenaikan PDRB ADHK perkapita ini diakibatkan karena pada tahun 2021 terjadi penurunan PDRB ADHK dan jumlah penduduk mengalami kenaikan.

Tabel 3.4. PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2017 – 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (Rp. milyar)	159.104,55	171.684,06	180.560,65	179.151,11	192.576,58
PDRB ADHK (Rp. milyar)	121.858,52	128.052,58	133.271,55	130.865,59	135.412,85
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28	5,08	4,08	-1,81	3,47
Jumlah Penduduk (orang)	4.119.794	4.182.695	4.244.096	4.073.584	4.122.576
PDRB ADHK Perkapita (Rp. juta)	29,58	30,61	31,40	32,13	32,85
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Perkapita (%)	3,64	3,50	2,57	2,30	2,2

Sumber: BPS (2022) diolah

3.1.1.2 Inflasi

Pada mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Laju inflasi dalam kegiatan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan cukup fluktuatif. Sejak tahun 2015 terus mengalami penurunan dari sebesar 5,14% menjadi hanya sebesar 2,63% di tahun 2018. Akan tetapi akibat lonjakan permintaan ikan gabus yang tidak dapat





dimbangi oleh ketersediaan pasokan, selain itu inflasi tahun 2019 disebabkan oleh lonjakan harga tiket pesawat yang sempat mengalami kenaikan pada tahun 2019, inflasi tahun 2019 tercatat mengalami kenaikan namun masih terkendali, yakni sebesar 4,01%. Pada tahun 2021 relatif stabil sebesar 2,55%, yang didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta kelompok pakaian dan alas kaki.

Bank Indonesia mencatat inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 4,30% (yoy) dengan andil 1,26% (yoy), terutama didorong oleh minyak goreng, pepaya, dan mangga. Harga minyak goreng mengalami kenaikan sebesar 37,79% (yoy) seiring dengan peningkatan harga crude palm oil (CPO) yang terus berlanjut sejak triwulan III 2020 di tengah perbaikan permintaan CPO dan produk turunannya. Inflasi pepaya sebesar 182,42% terjadi akibat normalisasi harga sejalan dengan pengurangan pasokan oleh petani yang beralih ke komoditas lain setelah terdeflasi hingga 41,37% (yoy) pada Desember 2021. Hal serupa juga terjadi pada komoditas mangga setelah secara tahunan terdeflasi sepanjang tahun 2020 sehingga terdapat base effect berupa inflasi pada tahun berikutnya di samping pasokan yang berkurang di tengah peningkatan permintaan.

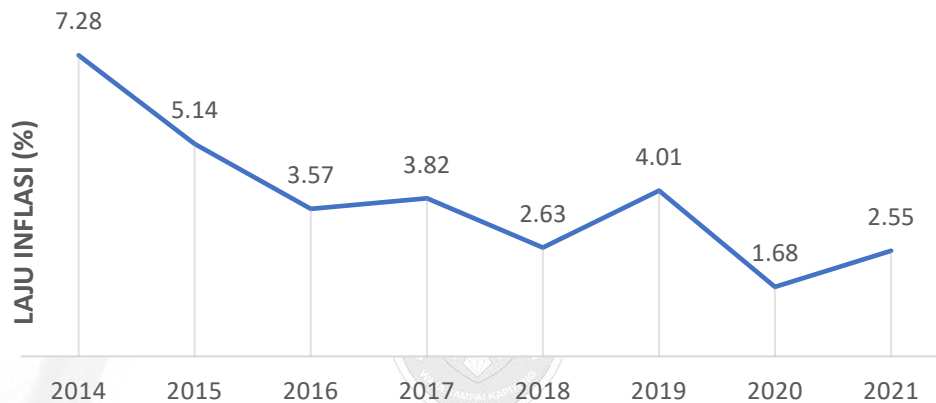
Selain itu kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran juga menjadi pendorong inflasi sebesar 2,59% (yoy) dengan andil 0,28% (yoy). Peningkatan terutama didorong oleh kenaikan harga nasi dengan lauk dan bubur sebagai dampak dari kenaikan harga bahan makanan seperti minyak goreng, ikan peda, ikan gabus, dan daging ayam ras. Selain itu, aktivitas perekonomian yang semakin membaik sejalan dengan program vaksinasi juga meningkatkan permintaan, sejalan dengan pelonggaran PPKM pada periode akhir tahun.

Laju inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok transportasi khususnya angkutan udara. Permintaan angkutan udara yang mulai pulih dan kapasitas pesawat yang diizinkan hingga 100% menurunkan harga tiket pesawat. Surat Edaran Kemenhub Nomor 88 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri yang ditetapkan pada 21 Oktober 2021 mengatur bahwa untuk daerah dengan kategori PPKM level 3 dan 4, diterapkan pembatasan jumlah penumpang transportasi darat maksimal 70 persen, sedangkan untuk



daerah dengan kategori PPKM level 1-2 kapasitas maksimal dapat mencapai 100 persen.

Angka inflasi Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2014 sampai 2021 disajikan pada gambar 3.3.



Sumber: BPS (2022) diolah

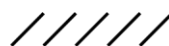
Gambar 3.3 Laju Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2021

Untuk melakukan pengendalian inflasi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Selatan, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) dan program lapangan. Beberapa langkah strategis juga telah ditempuh TPID dalam pengendalian inflasi daerah melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) antara lain dengan mendorong kerjasama antar daerah.

3.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

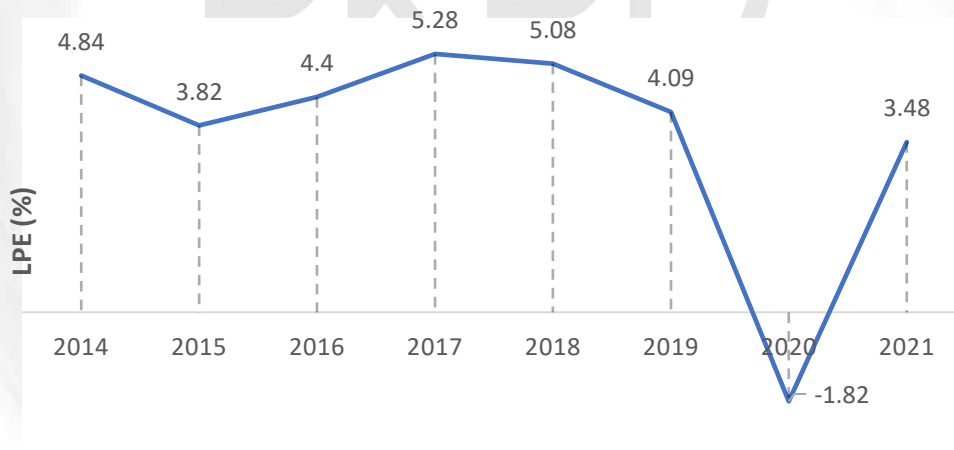
Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan salah satu indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah. Keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur melalui laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, indikator makro ini sering kali digunakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi tahunan maupun melihat pertumbuhan per sektor lapangan usaha yang potensial.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2013-2021 cenderung dinamis meskipun mengalami perlambatan, dimana pada tahun



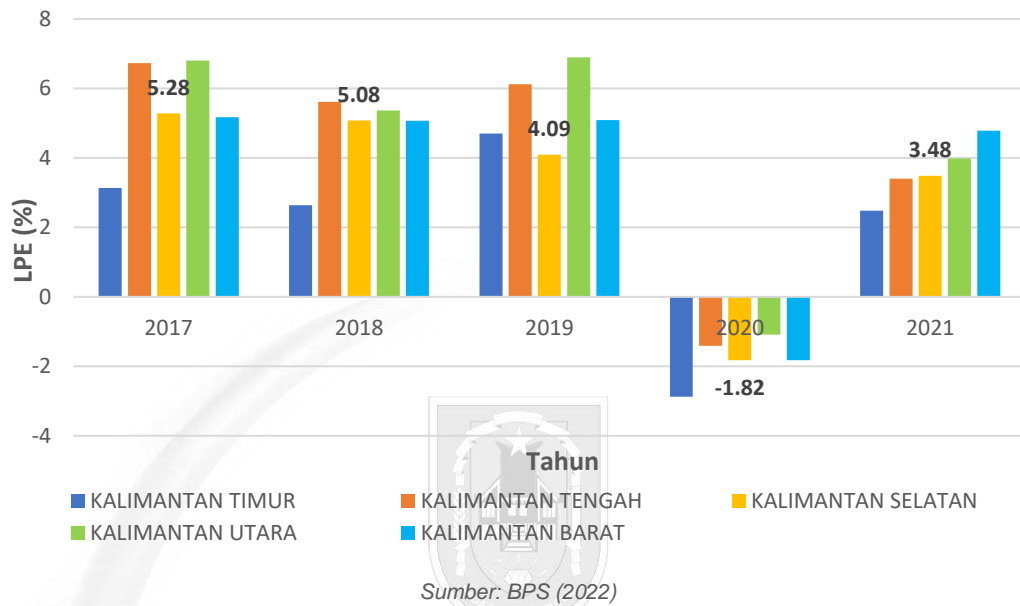


2013 memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33% dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2015 yang hanya mencapai 3,82%. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan mulai menunjukkan angka yang membaik dengan tumbuh sebesar 4,40% dan mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 5,28% akibat adanya fenomena *commodities boom*. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019, pertumbuhan ekonomi tercatat tumbuh melambat sebesar 5,13% dan 4,01%. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,81% sebagai akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tumbuh 3,48% secara *year on year* dibanding tahun 2020. Kondisi menunjukkan perekonomian di Kalimantan Selatan sudah mulai bangkit pasca pandemi Covid-19. Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 berada di urutan ke-3 setelah Kalimantan Utara (3,98%) dan Kalimantan Barat (4,78%). Lebih jelasnya sebagaimana pada gambar 3.5.



Sumber: BPS (2022)

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2021



Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi di Kalimantan Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 pada sisi pengeluaran dan lapangan usaha, bersumber dari sektor-sektor utama. Sebagaimana disajikan pada tabel 3.4, di sisi pengeluaran sumber pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor impor, dan konsumsi pemerintah. Pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat yang sempat menurun selama pandemi Covid-19 sudah menunjukkan perbaikan. Pada sisi penawaran (lapangan usaha), sebagaimana disajikan pada tabel 3.5, sumber pertumbuhan terbesar adalah di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor informasi dan komunikasi, dan dilanjutkan industri pengolahan, secara berurutan LPE tahun 2021 masing-masing sebesar 11,59%, 7,22%, dan 6,23%.

Tabel 3.5. LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen pengeluaran	LPE (%) / Growth (%)					Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1 Konsumsi Rumah tangga	4,82	5,03	4,01	-0,26	0,79	2,26	2,35	1,87	-0,12	0,38
2 Konsumsi LNPRT	5,58	8,74	7,97	-2,40	1,10	0,05	0,07	0,08	-0,02	0,01



Komponen pengeluaran	LPE (%) / Growth (%)					Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3 Konsumsi Pemerintah	1,02	2,53	2,91	-2,57	3,56	0,11	0,27	0,30	-0,27	0,37
4 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,3	8,01	6,37	-1,49	0,83	0,95	1,75	1,42	-0,32	0,18
5 Perubahan Inventori	-145,4	215	-47	-89,30	-	0,81	0,52	-0,34	-0,33	0,01
6 Ekspor Barang dan Jasa	8,96	5,97	2,12	-10,83	19,02	6,57	4,53	1,63	-8,16	12,98
7 Dikurangi Impor Barang dan Jasa	10,18	7,84	1,52	-13,15	21,01	5,46	4,41	0,88	-7,41	10,45
PDRB ADHK	5,28	5,08	4,08	-1,82	3,48	5,28	5,08	4,08	-1,81	3,48

Sumber: BPS (2022) diolah

Tabel 3.6. LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2016–2021 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan

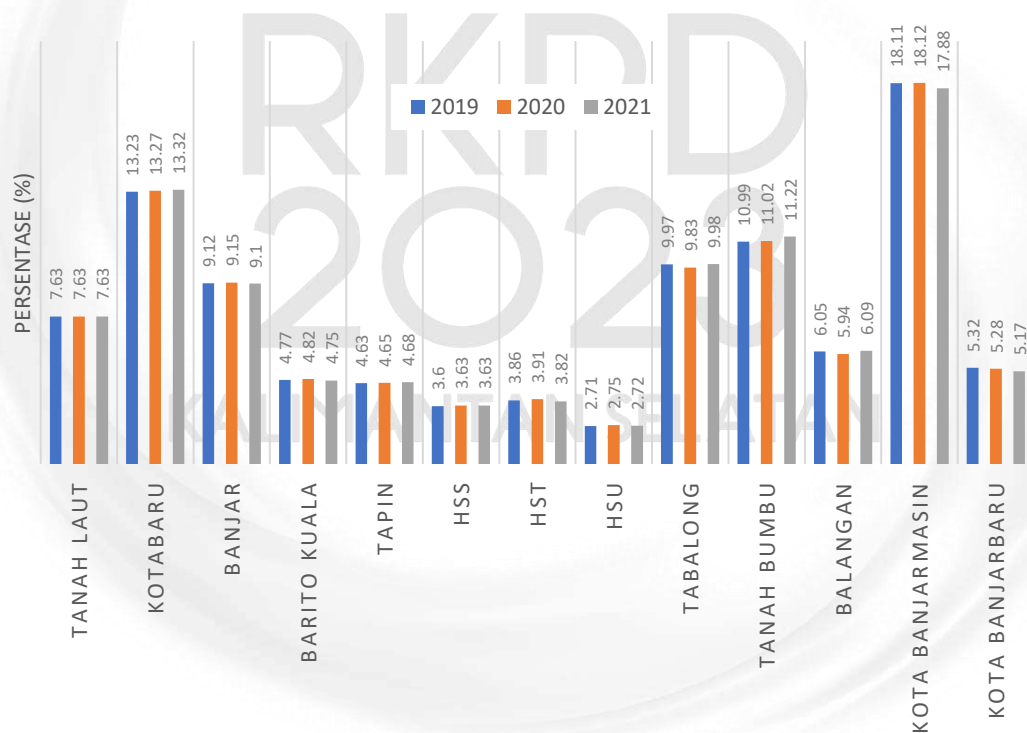
Komponen Lapangan Usaha	LPE (%) / Growth (%)					Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,73	3,59	-0,95	1,16	0,59	0,53	0,5	-0,13	0,16
Pertambangan dan Penggalian	4,09	4,11	1,43	-4,44	4,35	1,08	1,07	0,37	-1,12	1,05
Industri Pengolahan	5,69	4,34	1,45	-3,63	6,23	0,74	0,57	0,19	-0,43	0,78
Pengadaan Listrik, Gas	3,6	7,58	4,72	4,74	4,66	0	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,74	6,83	5,59	5,83	5,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	5,78	5,89	6,08	-1,29	2,87	0,43	0,44	0,46	-0,1	0,22
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,8	7,54	7,42	-3,38	2,2	0,67	0,66	0,67	-0,32	0,2
Transportasi dan Pergudangan	6,86	6,97	5,92	-5,32	1,81	0,4	0,41	0,36	-0,33	0,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,84	7,01	7,41	-2,02	2,3	0,13	0,13	0,14	-0,04	0,05
Informasi dan Komunikasi	7,94	6,89	7,33	7,36	7,22	0,28	0,25	0,27	0,28	0,3
Jasa Keuangan	6	4,24	1,66	1,37	1,19	0,2	0,14	0,05	0,04	0,04





Komponen Lapangan Usaha	LPE (%) / Growth (%)					Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Real Estate	5,14	5,01	5,95	3,88	5,29	0,11	0,11	0,13	0,09	0,13
Jasa Perusahaan	7,14	7,67	7,29	-1,99	3,62	0,04	0,04	0,04	-0,01	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	3,77	6,65	0,73	1,49	0,13	0,2	0,34	0,04	0,07
Jasa Pendidikan	6,61	7,02	7,54	1,62	1,54	0,28	0,3	0,33	0,07	0,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,56	5,94	5,89	7,51	10,89	0,1	0,11	0,11	0,13	0,23
Jasa lainnya	6,59	7,38	7,08	-1,46	1,16	0,07	0,08	0,08	-0,02	0,01
PDRB ADHK	5,3	5,1	4,1	-1,82	3,48	5,3	5,08	4,08	-1,81	3,48

Sumber: BPS (2022) diolah

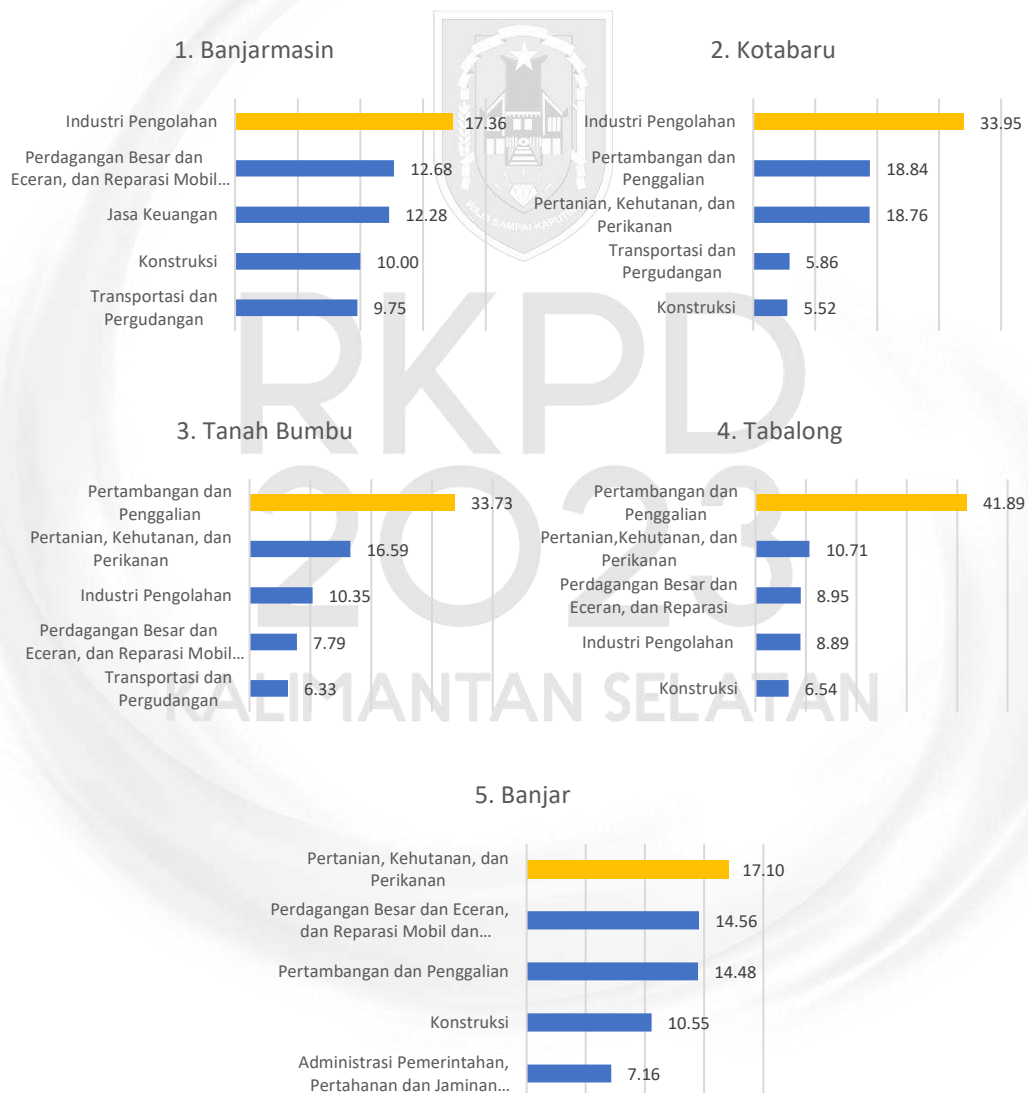


Sumber: BPS (2022) diolah

Gambar 3.6 Share Perekonomian (%) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021



Secara spasial, 5 (lima) kabupaten/kota penopang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 yaitu Kota Banjarmasin (17,88%), Kabupaten Kotabaru (13,32%), Kabupaten Tanah Bumbu (11,22%), Kabupaten Tabalong (9,98%), dan Kabupaten Banjar (9,10%). Apabila dilihat kontribusi per lapangan usaha untuk ke-5 (kelima) kabupaten/kota tersebut, sektor pertambangan masih merupakan lapangan usaha yang paling besar kontribusinya, disusul industri pengolahan dan pertanian. Lebih rinci disajikan sebagaimana pada gambar 3.7 dan gambar 3.8.



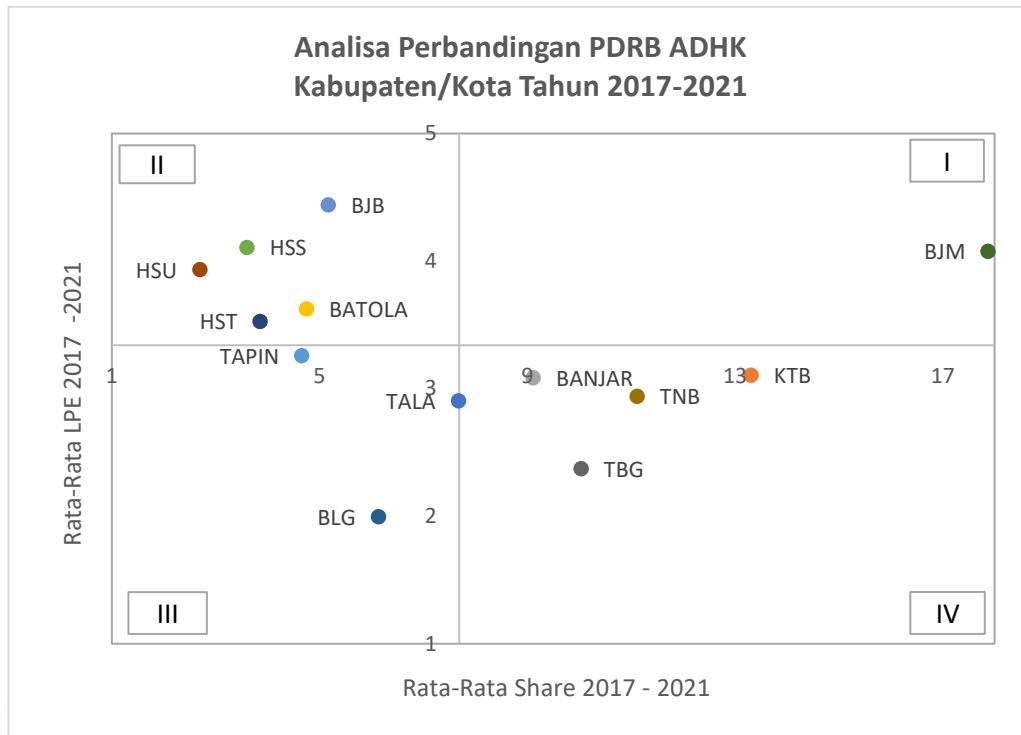
Sumber: BPS (2022) diolah

Gambar 3.7 Penopang Perekonomian (PDRB ADHB) Kabupaten/Kota Tahun 2021 berdasarkan 5 (lima) Sektor Lapangan Usaha terbesar



Perbedaan karakteristik wilayah menghasilkan keberagaman serta menentukan sektor prioritas mana yang perlu didahulukan pengembangannya. Daerah yang memiliki sumber daya melimpah akan diuntungkan dengan keunggulan komparatifnya. Sementara daerah yang relatif kecil dukungan sumber dayanya harus dapat menyusun strategi pembangunan melalui peningkatan produktivitas. Berdasarkan tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana pada gambar 3.8, didapatkan identifikasi pembagian wilayah pertumbuhan kabupaten kota, yakni:

- Kuadran I merupakan wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan kontribusi yang besar selama lima tahun terakhir (2017-2021). Daerah yang berada di kuadran I adalah Banjarmasin, yang ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekonomi sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan, dan jasa);
- Kuadran II merupakan wilayah daerah berkembang, yang memiliki rata-rata pertumbuhan relatif tinggi namun rata-rata kontribusi PDRB-nya masih relatif rendah. Daerah yang berada pada wilayah ini yakni Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Banjarbaru;
- Kuadran III merupakan daerah yang relatif tertinggal dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB yang relatif rendah. Daerah yang berada di wilayah ini adalah Tapin, Tanah Laut dan Balangan;
- Kuadran IV merupakan daerah maju namun tertekan, dimana kontribusi PDRB yang relatif tinggi namun pertumbuhan ekonominya relatif rendah. Adapun daerah yang masuk pada klasifikasi ini adalah Kotabaru, Banjar, Tabalong, dan Tanah Bumbu.



Sumber: BPS 2022 (diolah)

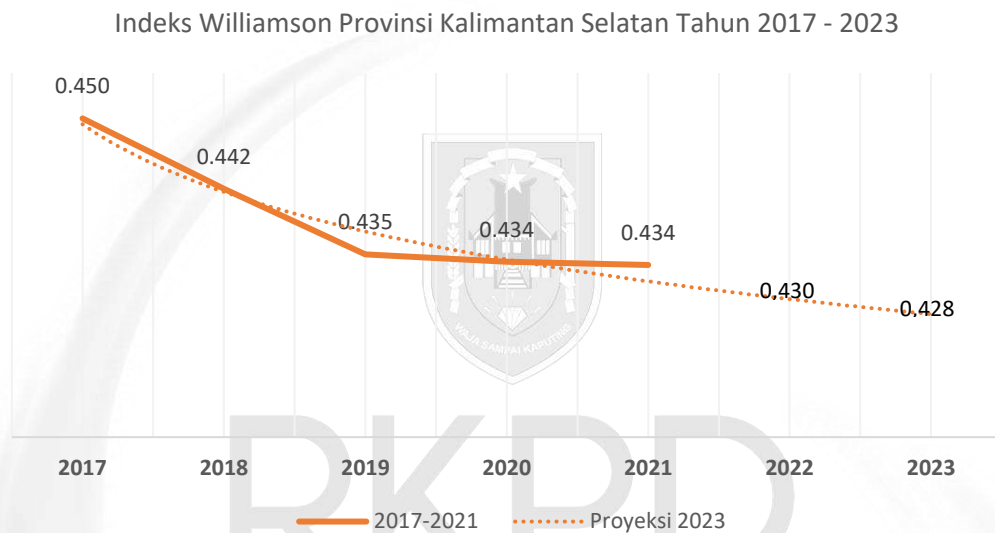
Gambar 3.8 Tipologi Klassen PDRB ADHK Kabupaten/Kota pada tahun 2017-2021 di Kalimantan Selatan

Analisa kesenjangan wilayah berdasarkan Indeks Williamson menunjukkan adanya ketimpangan atau kesenjangan yang menurun. Penghitungan indeks ini menggunakan koefisien variasi dari PDRB per kapita kabupaten/kota. Semakin kecil menunjukkan adanya ketimpangan atau kesenjangan yang menurun. Sebagaimana gambar 3.10, selama kurun waktu tahun 2016 sampai 2021, Indeks Williamson terlihat mengalami tren penurunan dengan rata-rata laju penurunan sebesar 1,95%.

Series Indeks Williamson memperlihatkan bahwa terjadi penurunan dari tahun 2017 ke 2021 dari sebesar 0,450 menjadi 0,434. Kabupaten/kota yang memiliki kontribusi ekonomi relatif kecil terhadap perekonomian provinsi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih cepat selama kurun waktu 2017-2021 dibandingkan daerah yang kontribusinya besar. Kondisi tersebut berdampak pada membesarnya *share* PDRB kabupaten/kota tersebut, sehingga berpotensi mempersempit ketimpangan. Ketimpangan pembangunan wilayah yang menurun diharapkan akan berlanjut pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.



Karena kondisi ini sangat berdampak pada kecepatan penurunan kemiskinan daerah. Semakin timpang pendapatan suatu wilayah, maka proses penurunan kemiskinan juga semakin melambat. Berdasarkan trend penurunan pada gambar 3.10, diproyeksikan Indeks Williamson tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 0,430 dan 0,428.



Gambar 3.9 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2023

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pemulihan ekonomi sangat bergantung pada seberapa cepat penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan dukungan semua pihak untuk terus mendorong vaksinasi agar terbentuk kekebalan komunal. Tahun 2021 perekonomian Kalimantan Selatan sudah menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,48 %, setelah tahun sebelumnya terjadi kontraksi hingga -1,81. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan sudah mulai membaik seiring tingkat vaksinasi sudah lebih dari 70%.

Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, kondisi perang Rusia dengan Ukraina juga membawa dampak yang cukup dirasakan di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Selatan. Perang tersebut berdampak pada lonjakan harga komoditas, dan harga energi. Kondisi ini akan mendorong peningkatan faktor produksi, yaitu bahan bakar. Di samping isu global yang terjadi, kelangkaan minyak goreng yang dialami di awal tahun 2022 menyebabkan lonjakan harga minyak goreng. Dampak dari kenaikan minyak goreng tersebut





mendorong peningkatan biaya produksi yang akan menyebabkan olahan bahan makanan akan mengalami peningkatan harga. Akhirnya, inflasi tidak dapat dihindari, sehingga perlu kebijakan dan kewaspadaan untuk menyikapi hal-hal tersebut.

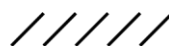
Inflasi yang diprediksikan akan terjadi dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang paling dominan sebagai pembentuk PDRB di Kalimantan Selatan. Tahun 2021 tercatat *share* konsumsi rumah tangga sebesar 46,74% dari total PDRB Rp 192,58 triliun rupiah, sehingga menjadi sangat penting menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

Peningkatan harga komoditas juga memberikan peluang kepada industri pertambangan dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan produksi, dan peningkatan ekspor komoditas. Selain itu, peningkatan investasi pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diproyeksikan akan tumbuh semakin efektif dan efisien dalam rangka menggerakkan semua sektor perekonomian. Dari sisi lapangan usaha, perlu perbaikan dari sisi industri manufaktur. Industri manufaktur harus didorong, salah satunya melalui strategi hilirisasi sumber daya alam. Selain industri manufaktur, peluang lain berasal dari sektor pariwisata.

Prospek dan proyeksi ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Pergerakan harga minyak dunia dipastikan akan dapat berdampak terhadap capaian pendapatan, dan dinamika angka inflasi.

Pembangunan perekonomian daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari pembangunan daerah, dilaksanakan untuk mendukung perwujudan dan pencapaian tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026, yakni meningkatnya perekonomian daerah.

Pembangunan perekonomian daerah juga didukung oleh sektor-sektor di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan. Sektor pertanian dan industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian Kalimantan Selatan selain sektor pertambangan. Diharapkan, prospek sektor

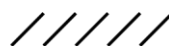




pertanian dan industri pengolahan akan memberikan *multiplier effect* terhadap sektor dominan lainnya seperti perdagangan dan transportasi.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan prospek perekonomian tersebut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 diproyeksikan akan kembali dapat tumbuh optimis, yakni dengan skenario *baseline* 4,00%, *moderat* 4,25% dan skenario *high* 4,50%. Proyeksi tersebut dengan asumsi bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan di tahun 2022 dapat optimis tumbuh sebesar 1,30%. Selain itu, nilai ICOR pada tahun 2023 diharapkan dapat terkendali turun di rentang 7,22 - 5,90, dengan asumsi di tahun 2022 angka ICOR diproyeksikan masih akan tinggi di angka lebih dari 10. Hal tersebut disebabkan pengeluaran atas Pembentukan Modal Tetap Bruto yang terjadi dimungkinkan belum cukup efisien dalam memberikan nilai tambah PDRB Tahun 2022. Penyebab utamanya yakni adanya bencana banjir yang melanda di 11 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2022, sehingga belanja modal dan infrastruktur dalam rangka pemulihan akibat dampak banjir, diperkirakan belum cukup efisien dalam menggerakkan perekonomian dalam kurun waktu tahun 2022.

Sebagaimana diproyeksikan pada tabel 3.7 dan tabel 3.8, sumber pertumbuhan LPE yang diperkirakan terbesar di tahun 2023 pada sisi pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan ekspor. Masing-masing diperkirakan akan memberikan pertumbuhan sebesar 0,49%-0,56%, 0,47%-0,54%, 16,77% - 19,37%, dengan asumsi sumber pertumbuhan tertinggi di tahun 2022 masih ditopang oleh ekspor sebesar 15,87%. Pertumbuhan tahun 2023 untuk konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor barang jasa diharapkan dapat tercapai masing-masing sebesar 0,49%-0,59%, 0,25%-0,28%, dan 16,83%-23,41%, dengan asumsi *outlook* tahun 2022 konsumsi rumah tangga dan ekspor barang jasa dapat tercapai masing-masing sebesar 0,46%, dan 14,50%. Dilihat dari distribusi komponen terhadap PDRB ADHB, komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah pada tahun 2022 dan 2023 diperkirakan masih cukup besar yakni masing-masing sebesar 47,24%-48,98 dan 11,52%-12,02%. *Share* dari Komponen PMTB diperkirakan akan konstan diangka 24,06% sampai dengan tahun 2023.





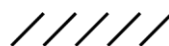
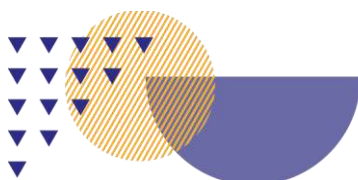
Proyeksi distribusi PDRB ADHB tersebut sangat dipengaruhi oleh asumsi inflasi atau indeks harga-harga. Inflasi tahun 2022 dan 2023 Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021. Perkiraan lebih tinggi tersebut ditopang oleh optimisme perbaikan ekonomi seiring dengan berlangsungnya program vaksinasi yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Tekanan inflasi diperkirakan juga bersumber dari adanya potensi gangguan cuaca seiring berlanjutnya fenomena La Nina yang dapat mempengaruhi produksi bahan pangan di wilayah sentra dan berdampak pada arus distribusi bahan pangan dari luar wilayah Kalimantan Selatan, sehingga dapat mengganggu kecukupan pasokan pangan.

Tekanan inflasi tahun 2022 dan 2023 diperkirakan akan bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut akan dapat ditahan oleh keberhasilan musim panen atas komoditas tanaman pangan. Selain itu, komoditas angkutan udara pada kelompok transportasi, diproyeksikan juga akan mengalami peningkatan permintaan seiring diterapkannya protokol kesehatan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2020, 2021, dan 2022, Pemerintah melalui Bank Indonesia berusaha menjaga angka inflasi di tahun 2021 dan 2022 pada tingkat yang rendah dan stabil masing-masing di angka 3%+1, sehingga diperkirakan tahun 2023, inflasi Kalimantan Selatan akan terjaga di angka sebesar 3,25%, dengan asumsi *outlook* angka inflasi tahun 2022 dapat terjaga di angka 2,75%.

Tabel 3.7. LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2020–2021 dan Proyeksi Tahun 2022–2023 Menurut Pengeluaran Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen pengeluaran	LPE (%) / Growth (%)						Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)					
	2020	2021	2022		2023		2020	2021	2022		2023	
			Out-look	Base-line	Mode-rate	High			Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1 Konsumsi Rumah tangga	-0,26	0,79	0,46	0,49	0,52	0,56	-0,12	0,38	0,46	0,49	0,52	0,56
2 Konsumsi LNPRT	-2,40	1,10	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
3 Konsumsi Pemerintah	-2,57	3,56	0,45	0,47	0,50	0,54	-0,27	0,36	0,45	0,47	0,50	0,54





Komponen pengeluaran	LPE (%) / Growth (%)						Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)						
	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2020	2021	2022	2023	2023	2023	
			Out-look	Base-line	Moderate	High			Out-look	Base-line	Moderate	High	
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-1,49	0,83	0,23	0,25	0,26	0,28	-0,34	0,19	0,23	0,25	0,26	0,28
5	Perubahan Inventori	89,30	30,16	0,01	0,02	0,02	0,02	-0,33	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
6	Ekspor Barang dan Jasa	-10,83	19,02	14,50	16,83	19,77	23,41	-8,13	12,97	15,87	16,77	17,88	19,37
6	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-13,15	21,01	12,78	13,50	14,40	15,60	-7,39	10,44	12,78	13,50	14,40	15,60
PDRB ADHK 2010		-1,82	3,48	4,26	4,50	4,80	5,20	-1,82	3,48	4,26	4,50	4,80	5,20
ICOR		-12,53	6,67	5,27	4,80	4,50	4,15						

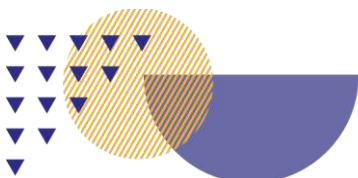
Sumber: BPS (2022) diolah, KEMD 2022

Tabel 3.8. Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2019–2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran	Share (%)						
	2020	2021	2022 Outlook	2023 Baseline	2023 Moderate	2023 High	
1	Konsumsi Rumah tangga	48,92	46,74	47,24	48,14	48,44	48,94
2	Konsumsi LNPRT	1,08	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
3	Konsumsi Pemerintah	12,26	12,02	11,52	11,12	11,52	12,02
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	25,07	24,06	24,06	24,06	24,06	24,06
5	Perubahan Inventori	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Ekspor Barang dan Jasa	55,99	76,83	77,13	77,23	77,63	77,93
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	43,36	60,74	61,04	61,64	62,74	64,04
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (2022) diolah, KEMD 2022

Pada sisi penawaran atau lapangan usaha, sumber pertumbuhan LPE diperkirakan terbesar di tahun 2023 adalah sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan informasi dan komunikasi. Masing-masing diperkirakan akan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,35%-0,45%, 1,19%-1,38%, 0,98%-1,07%, 0,30%-0,36%, 0,43-0,50 dan 0,39%-0,43%. Asumsi sumber pertumbuhan outlook tahun 2022 akan ditopang oleh

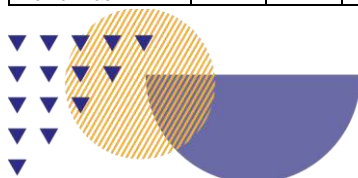




pertanian (0,30%), Pertambangan (1,16%), industri pengolahan (0,88%) dan Perdagangan (0,39%), serta informasi dan komunikasi (0,35%). Pertumbuhan tahun 2023 untuk sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, Akomodasi dan Konsumsi serta informasi dan komunikasi, diharapkan dapat tercapai masing-masing sebesar 2,44%-3,14% ; 4,57%-5,27% ; 7,05%-7,75% ; 4,52%-5,22% ; 4,53%-5,23% dan 8,18%-8,89% dengan asumsi outlook tahun 2022 pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 4,2%, pertanian sebesar 2,14%, dan pertambangan dapat tumbuh sebesar 4,64%. Apabila dilihat distribusi terhadap PDRB ADHB, pada tahun 2022 dan 2023 sektor Pertambangan diperkirakan dapat terjaga masing-masing sebesar 19,02% dan menurun ditahun 2023 menjadi 18,95%-18,69% dengan asumsi terjadi peningkatan permintaan dan perbaikan harga komoditas batu bara, dan CPO meskipun fluktuatif, diperkirakan berdampak pada distribusi sektor Pertanian dan Industri Pengolahan tahun 2023 masing-masing akan tertahan di angka 13,48%-13,91% dan 14,57%-14,75%. Lebih rinci proyeksi LPE per sektor lapangan usaha dan sumber pertumbuhannya, serta proyeksi distribusi (share) terhadap PDRB ADHB, disajikan pada tabel 3.9 dan 3.10.

Tabel 3.9. LPE (%) Kalimantan Selatan Tahun 2020–2021 dan Proyeksi Tahun 2022–2023 Menurut Lapangan Usaha Beserta Sumber Pertumbuhan

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%) / Growth (%)						Sumber Pertumbuhan (%) / Source of Growth (SOG) (%)					
	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2020	2021	2022	2023	2023	2023
			Out-look	Base-line	Mode-rate	High			Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	-0,96	1,17	2,14	2,44	2,74	3,14	-0,13	0,16	0,30	0,35	0,39	0,45
2. Pertambangan dan penggalian	-4,47	4,31	4,64	4,57	4,87	5,27	-1,12	1,03	1,16	1,19	1,27	1,38
3. Industri pengolahan	-3,38	6,23	6,75	7,05	7,35	7,75	-0,43	0,76	0,88	0,98	1,02	1,07
4. Pengadaan listrik, gas	4,75	4,66	4,89	5,19	5,49	5,89	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,83	5,03	5,72	6,02	6,32	6,72	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
6. Konstruksi	-1,29	2,87	3,45	3,75	4,05	4,45	-0,10	0,22	0,27	0,30	0,33	0,36
7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	-3,38	2,20	4,22	4,52	4,82	5,22	-0,31	0,20	0,39	0,43	0,46	0,50
8. Transportasi dan pergudangan	-5,32	1,81	3,57	3,87	4,17	4,57	-0,33	0,11	0,21	0,24	0,26	0,28
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	-2,02	2,30	4,23	4,53	4,83	5,23	-0,04	0,05	0,09	0,10	0,10	0,11
10. Informasi dan komunikasi	7,36	7,22	7,89	8,19	8,49	8,89	0,28	0,30	0,35	0,39	0,41	0,43





Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)/ Growth (%)						Sumber Pertumbuhan (%)/ Source of Growth (SOG) (%)					
	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2020	2021	2022	2023	2023	2023
			Out-look	Base-line	Moderate	High			Out-look	Base-line	Moderate	High
11. Jasa keuangan	1,37	1,19	1,46	1,76	2,06	2,46	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
12. Real estate	3,88	5,29	5,35	5,65	5,95	6,35	0,09	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17
13. Jasa perusahaan	-1,99	3,62	4,16	4,46	4,76	5,16	-0,01	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,81	1,32	1,75	2,05	2,35	2,75	0,04	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15
15. Jasa pendidikan	1,62	1,54	2,80	3,10	3,40	3,80	0,07	0,07	0,13	0,15	0,16	0,18
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,84	11,59	8,79	9,09	9,39	9,79	0,13	0,23	0,19	0,22	0,22	0,23
17. Jasa lainnya	-1,46	1,16	2,76	3,06	3,36	3,76	-0,02	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04
PDRB ADHK 2010	-1,81	3,48	4,26%	4,50%	4,80%	5,20%	-1,81	3,48	4,26	4,50	4,80	5,20

Sumber: BPS (2022) diolah

Tabel 3.10. Distribusi PDRB ADHB Kalimantan Selatan Tahun 2020–2021 dan Proyeksi Tahun 2022-2023 menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha		Share (%)					
		2020	2021	2022 Outlook	2023 Baseline	2023 Moderate	2023 High
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,39	13,93	13,59	13,48	13,70	13,91
2	Pertambangan dan Penggalian	18,29	19,37	19,02	18,95	18,82	18,69
3	Industri Pengolahan	13,52	13,95	14,24	14,57	14,64	14,75
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45	0,45
6	Konstruksi	8,26	8,17	8,19	8,13	8,08	8,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,46	10,28	10,49	10,59	10,71	10,83
8	Transportasi dan Pergudangan	6,58	6,29	6,31	6,23	6,19	6,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,08	2,11	2,12	2,10	2,09
10	Informasi dan Komunikasi	3,93	3,94	4,07	4,15	4,12	4,09
11	Jasa Keuangan	3,67	3,60	3,49	3,41	3,38	3,36
12	Real Estate	2,43	2,43	2,48	2,50	2,48	2,47
13	Jasa Perusahaan	0,73	0,72	0,73	0,73	0,73	0,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,37	6,09	6,02	5,86	5,82	5,78
15	Jasa Pendidikan	5,08	4,91	4,89	4,82	4,79	4,75





16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,36	2,48	2,59	2,57	2,55
17	Jasa lainnya	1,34	1,28	1,28	1,26	1,25	1,25
		100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS (2022) diolah

Secara ringkas, sasaran makro indikator ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2023 disajikan sebagaimana pada tabel 3.11.

Tabel 3.11. Sasaran Indikator Ekonomi Makro Tahun 2023

Indikator		Kondisi Kalsel 2021	Sasaran Kalsel 2023	Outlook 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,48	4,5 – 5,2	4,0 - 4,5
2	PDRB ADHK 2011 Perkapita (Juta rupiah/orang)	32,84	33,04-33,20	32,18
	PDRB ADHB Perkapita (Juta rupiah/orang)	46,71	46,29-46,55	44,48
	Asumsi:			
	- Jumlah Penduduk (orang)	4.122.810	4.230.700	4.176.410
	- Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,10	1,30	1,30
3	Angka Inflasi (%)	2,55	3,25	2,75
4	Share Sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB (%)	19,37	18,95-18,69	19,02
5	Share Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB ADHB (%)	13,93	13,48-13,91	13,59
6	Share Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB (%)	13,95	14,57-14,75	14,24
7	ICOR (Rasio PMTB terhadap Perubahan PDRB ADHK 2010)	6,65	4,80-4,15	5,27
8	Indeks Williamson	0,434	0,428	0,430

3.2 Arah Kebijakan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:



- a. Pendapatan daerah; dan
 - b. Penerimaan pembiayaan daerah.
2. Pengeluaran daerah pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:
- a. Belanja daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

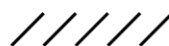
Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1) Pendapatan daerah;
- 2) Belanja daerah; dan
- 3) Pembiayaan daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan





pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

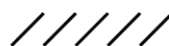
Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada RKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.
 - a. Optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui program kegiatan intensifikasi seperti penyesuaian tarif pajak daerah, pemutakhiran database potensi, serta upaya penagihan, kemudian mengintensifkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota juga stakeholder.





- b. Optimalisasi pendapatan retribusi daerah melalui pengembangan pengelolaan pungutan berbasis elektronifikasi/digitalisasi.
2. Identifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di luar pajak daerah.
 - a. Mendorong upaya optimalisasi pendapatan pada sektor Sumbangan Pihak Ketiga (SP 3) kepada pemerintah daerah yang terdiri dari dealer, Jasa Raharja, kelapa sawit, karet dan jasa Alur Barito, selepas pulihnya kesehatan dan perekonomian Kalimantan Selatan melalui sosialisasi, FGD dan penyesuaian *updating* regulasi (UU Ciptaker) bersama instansi terkait.
 - b. Rasionalisasi estimasi target penerimaan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Penghasil berdasarkan potensi.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan.
 - a. Mendorong pengembangan kualitas produk pelayanan pengelolaan pendapatan daerah pada semua Unit Kerja Penghasil secara bertahap dan berkesinambungan.
 - b. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) pelayanan dengan melengkapi dan atau penyesuaian terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang konvensional maupun berbasis digitalisasi, serta melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), khususnya pada Kantor Bersama SAMSAT se Kalimantan Selatan.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah
 - a. Percepatan penyampaian dan ketepatan penyajian pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi tepat guna dan berhasil guna.



- b. Peningkatan kapasitas pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah berbasis teknologi informatika.
- c. Pengukuran kinerja capaian pendapatan berdasarkan anggaran kas pendapatan berdasarkan cashflow (aliran kas) pada APBD tahun berjalan.

Memperhatikan realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 6.623.079.869.945,43 dan rencana pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 6.278.838.931.960,00, sedangkan komposisi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 diproyeksikan menjadi Rp 6.571.319.286.773,92 atau meningkat sebesar 4,45% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh optimisme pergerakan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan batubara dan perkebunan (CPO) yang diuntungkan oleh situasi geopolitik (perang Rusia dan Ukraina) yang mendorong tingginya permintaan kedua komoditas ini. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat mendorong penerimaan daerah dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – DTU juga semakin meningkat.

Selain itu, tahapan proses rekonsiliasi dan audit pada tahun anggaran berkenaan juga memperlambat penyaluran hak pemerintah daerah, sehingga penyampaian dana bagi hasil daerah di tahun berjalan dibayar pada tahun berikutnya. Kemudian, melalui optimalisasi program kegiatan pemerintah beserta stakeholder yang dapat mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta Kepariwisata Kalimantan Selatan tahun 2023 diperkirakan sudah mulai bangkit kembali, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat dengan tumbuh positif berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah dalam tahun berkenaan.



Tabel 3.12. Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Tahun 2021-2023 (Rp)

No	Uraian	2021		2022 - 2023		
		Realisasi	Target APBD Murni	Target APBD Murni 2022	Target APBD Murni 2023	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Pajak Daerah	2.631.763.313.358,56	2.810.094.128.867,00	2.827.361.450.856,00	2.935.210.000.000,00	2.984.815.049.000,00
1	Pajak Kendaraan Bermotor	770.624.936.511,00	753.000.000.000,00	850.000.000.000,00	805.710.000.000,00	832.815.049.000,00
2	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	465.053.893.287,00	542.000.000.000,00	557.000.000.000,00	542.000.000.000,00	542.000.000.000,00
3	Pajak Air Permukaan	4.981.243.779,60	4.500.000.000,00	15.000.000.000,00	50.000.000.000,00	25.000.000.000,00
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.137.955.122.367,96	1.252.500.000.000,00	1.110.000.000.000,00	1.252.500.000.000,00	1.300.000.000.000,00
5	Pajak Rokok	253.148.117.413,00	258.094.128.867,00	295.361.450.856,00	285.000.000.000,00	285.000.000.000,00
II.	Retribusi Daerah	38.361.907.103,23	42.368.639.000,00	42.368.639.000,00	29.061.817.000,00	15.634.749.360,00
1	Retribusi Jasa Umum	27.107.914.652,23	25.867.454.000,00	26.711.874.500,00	18.730.917.000,00	18.730.917.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.120.122.451,00	16.312.185.000,00	15.467.764.500,00	10.141.900.000,00	10.141.900.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	133.870.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00	189.000.000,00
III.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	42.456.065.688,00	51.600.000.000,00	51.600.000.000,00	42.854.009.600,00	66.598.876.058,00
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD	42.338.856.098,00	51.300.000.000,00	51.300.000.000,00	42.854.009.600,00	43.458.242.362,24
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah	117.209.590,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	120.000.000,00
IV.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	852.327.033.978,64	664.703.090.170,00	624.749.536.254,00	705.167.743.360,00	
1	Hasil Penjualan Aset Badan Keuangan Daerah	104.150.000,00			1.359.493.025,00	100.000.000,00
	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	913.748.248,00			-	1.000.000.000,00
2	Jasa Giro	7.974.220.548,67	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	39.000.000.000,00	8.000.000.000,00
3	Pendapatan Bunga	70.254.233.487,56	-	-	-	-
4	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan	314.441.681,05	-	-	-	-
5	Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-	-
6	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-	-
7	Pendapatan dari Pengembalian	567.917.739,20	-	-	-	-
8	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-	-
9	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan	-	-	-	-	-
10	BLUD	745.684.693.455,76	561.703.090.170,00	521.749.536.254,00	611.612.127.160,00	693.176.222.930,08
11	Penerimaan dari Dinas	-	-	-	-	-





No	Uraian	2021	2021		2022 - 2023	
		Realisasi	Target APBD Murni	Target APBD Perubahan	Target APBD Murni 2022	Target APBD Murni 2023
12	Pendapatan Denda Pajak	26.513.628.818,40	64.000.000.000,00	64.000.000.000,00	53.196.123.175,00	15.300.000.000,00
V.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTU	1.848.202.311.803,00	1.775.639.334.000,00	1.919.650.253.898,00	1.996.305.451.000,00	2.030.043.013.121,90
1	Bagi Hasil Pajak	213.921.641.598,00	136.116.422.000,00	136.116.422.000,00	171.614.157.000,00	172.000.000.000,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	540.936.919.388,00	510.357.362.000,00	690.183.803.898,00	731.335.680.000,00	743.695.252.992,00
3	Cukai Hasil Tembakau	7.817,00	6.296.000,00	6.296.000,00	11.871.000,00	5.000.000,00
4	Dana Alokasi Umum	1.093.343.743.000,00	1.129.159.254.000,00	1.093.343.732.000,00	1.093.343.743.000,00	1.114.342.760.129,90
VI.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - DTK	1.115.887.712.563,00	-	1.170.715.493.400,00	500.949.763.000,00	695.783.790.858,50
1	Dana Alokasi Khusus	1.115.887.712.563,00	-	1.170.715.493.400,00	500.949.763.000,00	695.783.790.858,50
VII.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian	8.086.243.000,00	8.086.243.000,00	8.086.243.000,00	4.834.348.000,00	4.916.048.481,20
1	Dana Penyesuaian - DID	8.086.243.000,00	8.086.243.000,00	8.086.243.000,00	4.834.348.000,00	4.916.048.481,20
VIII.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	85.995.282.451,00	73.673.837.500,00	83.467.302.331,00	64.455.800.000,00	65.545.103.020,00
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintahan Pusat	1.382.233.000,00	-	1.509.851.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	21.800.264.430,00	15.023.837.500,00	16.023.837.500,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga	62.812.785.021,00	58.650.000.000,00	65.933.613.831,00	53.455.800.000,00	54.545.103.020,00
TOTAL		6.623.079.869.945,43	5.426.165.272.537,00	6.727.998.918.739,00	6.278.838.931.960,00	6.571.319.286.773,92

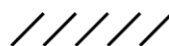




3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas:
 - a. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
 - b. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat;
 - d. Mengakomodir program pembangunan yang dijarah melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
 - e. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD;
2. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)





3. Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Selain untuk pemberian uang/barang atau jasa, belanja hibah dialokasikan untuk Belanja Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta dan SMA Swasta. Untuk BOS SMA Negeri dan Pendidikan Khusus dialokasikan pada belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada SOPD Dinas Pendidikan. BOS ini pengalokasiannya merupakan yang terbesar dalam belanja hibah.

Tabel 3.13. Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2021 (Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Bertambah (kurang)	Pertumbuhan (%)
Belanja daerah	5.179	5.846	6.083	7.006	6.631	362.989	(6,69)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Tabel 3.14. Proyeksi Anggaran Belanja Daerah TA 2022 dan TA 2023 (Rp)

No	Uraian	Proyeksi APBD Murni 2022	Proyeksi APBD Murni 2023	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5
5.	BELANJA DAERAH	6.243.838.931.960,00	6.535.727.786.774	291.888.854.814
5.1.	BELANJA OPERASI	4.011.736.519.999,00	4.429.866.441.540	418.129.921.541
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.791.532.508.622,00	2.165.550.226.791	374.017.718.169
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.930.241.209.177,00	1.974.685.257.192	44.444.048.015
5.1.05.	Belanja Hibah	283.322.802.200,00	288.110.957.557	4.788.155.357
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	6.640.000.000,00	1.520.000.000	(5.120.000.000)
5.2.	BELANJA MODAL	941.952.411.961,00	617.861.345.234	(324.091.066.727)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	178.398.782.427,00	80.984.919.250	(97.413.863.177)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.285.775.569,00	102.879.703.663	(26.406.071.906)





No	Uraian	Proyeksi APBD Murni 2022	Proyeksi APBD Murni 2023	Tambah/ Kurang
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.101.652.400,00	119.923.621.821	31.821.969.421
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	492.125.553.165,00	302.837.967.900	(189.287.585.265)
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.040.648.400,00	8.435.132.600	(45.605.515.800)
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	0	2.800.000.000	2.800.000.000
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	80.000.000.000	88.000.000.000	8.000.000.000
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	80.000.000.000,00	88.000.000.000	8.000.000.000
5.4.	BELANJA TRANSFER	1.210.150.000.000,00	1.400.000.000.000	189.850.000.000
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.120.000.000.000,00	1.400.000.000.000	280.000.000.000
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	-	-
	JUMLAH BELANJA	6.243.838.931.960,00	6.535.727.786.774	

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang mana penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

Tabel 3.15. Anggaran Pembiayaan Daerah TA 2016-2021 (Dalam Juta Rupiah)

No.	Uraian	APBD TA.2016	APBD TA.2017	APBD TA.2018	APBD TA.2019	APBD TA.2020	APBD TA.2021
3	Pembiayaan Daerah	357.370	366.088	130.244	490.020	391.307	260.339
3.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	382.370	397.588	130.244	640.300	241.043	248.339
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	382.370	397.257	129.951	640.300	150.000	248.339
03.01.02	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
03.01.03	Penerimaan kembali dana talangan	-	331	293	21	26	-
03.01.04	Penerimaan kembali investasi daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	382.370	397.588	130.244	640.300	391.307	-
3.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.000	31.500	-	150.300	-	12.000





03.02.01	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000	31.500	-	300	-	12.000
03.02.02	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	150.000	-	-
03.02.02	Dana Talangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000	31.500	-	150.300	-	12.000
	Pembiayaan netto	357.370	366.088	130.244	490.020	391.307	236.339
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	382.370	397.257	129.951	640.300	150.000	-

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

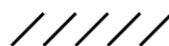
Tabel 3.16. Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2022 dan 2023 (Rp)

No	Uraian	Proyeksi APBD Murni 2022	Proyeksi APBD Murni 2023	Tambah (Kurang)
1	2	3	4	5
6.	Pembiayaan Daerah	50.000.000.000	99.408.500.000	49.408.500.000
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000	99.408.500.000	49.408.500.000
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	50.000.000.000	99.408.500.000	49.408.500.000
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	99.408.500.000	49.408.500.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.000.000.000	135.000.000.000	50.000.000.000
6.2.02.	Penyertaan Modal	10.000.000.000	35.000.000.000	25.000.000.000
6.2.03.	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000	100.000.000.000	25.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.000.000.000	135.000.000.000	50.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	(35.000.000.000)	(35.591.500.000)	(591.500.000)
6.3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam penyusunan APBD di Kalimantan Selatan salah satunya untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus dari selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka untuk menutupinya digunakan dana yang bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dan jumlah pembiayaan netto.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan yang komprehensif dengan memperhatikan potensi pendapatan dan alokasi belanja. Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan pembiayaan. Beberapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut:





1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
6. Penerimaan piutang daerah;
7. Penerimaan kembali dana talangan;
8. Penerimaan kembali penyertaan modal.

Pada APBD TA 2023 direncanakan sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Pencairan dana cadangan untuk Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Pengeluaran pembiayaan dilokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja, seperti pembayaran utang pokok, pembentukan dana cadangan, dan lain-lain.

1. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
2. Pembentukan dana cadangan;
3. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
4. Pembayaran utang pokok;
5. Pemberian pinjaman daerah;
6. Dana talangan.

Kebijakan untuk tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 dikarenakan Pemerintah Provinsi Kalimantan fokus kepada pemenuhan kepada belanja/urusan wajib.

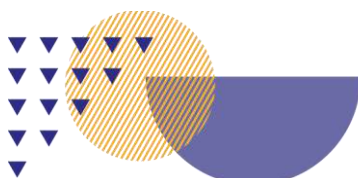
Tabel 3.17. Proyeksi Target RAPBD TA 2022 dan 2023 (Rp)

NO	URAIAN	TARGET APBD MURNI 2022	PROYEKSI 2023	Tambah/Kurang	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.278.838.931.960,00	6.571.319.286.773,92	292.480.354.813,92	4,45





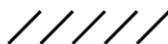
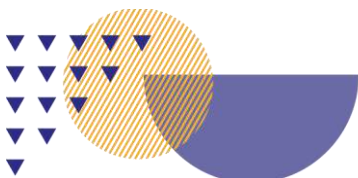
NO	URAIAN	TARGET APBD MURNI 2022	PROYEKSI 2023	Tambah/Kurang	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.712.293.569.960,00	3.775.031.331.292,32	62.737.761.332,32	1,66
4.1.01	Pajak Daerah	2.935.210.000.000,00	2.984.815.049.000,00	49.605.049.000,00	1,66
4.1.02	Retribusi Daerah	29.061.817.000,00	29.061.817.000,00	-	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah yang Dipisahkan	42.854.009.600,00	43.578.242.362,24	724.232.762,24	1,66
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	705.167.743.360,00	717.576.222.930,08	12.408.479.570,08	1,73
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.502.089.562.000,00	2.730.742.852.461,60	228.653.290.461,60	8,37
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.502.089.562.000,00	2.730.742.852.461,60	228.653.290.461,60	8,37
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	64.455.800.000,00	65.545.103.020,00	1.089.303.020,00	1,66
4.03.01	Pendapatan Hibah	64.455.800.000,00	65.545.103.020,00	1.089.303.020,00	1,66
	JUMLAH PENDAPATAN	6.278.838.931.960,00	6.571.319.286.773,92	292.480.354.813,92	4,45
5.	BELANJA DAERAH	6.153.838.931.960,00	6.571.319.286.773,92	417.480.354.813,92	6,35
5.1.	BELANJA OPERASI	4.011.736.519.999,00	4.465.457.941.539,92	453.721.421.540,92	10,16
5.1.01	Belanja Pegawai	1.791.532.508.622,00	2.201.141.726.791,05	409.609.218.169,05	18,61
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.930.241.209.177,00	1.974.685.257.191,69	44.444.048.014,69	2,25
5.1.05	Belanja Hibah	283.322.802.200,00	288.110.957.557,18	4.788.155.357,18	1,66
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.640.000.000,00	1.520.000.000,00	(5.120.000.000,00)	-336,84
5.2.	BELANJA MODAL	941.952.411.961,00	617.861.345.234,00	(324.091.066.727,00)	-52,45
5.2.01	Belanja Modal Tanah	178.398.782.427,00	80.984.919.250,00	(97.413.863.177,00)	-120,29
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.285.775.569,00	102.879.703.663,00	(26.406.071.906,00)	-25,67
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.101.652.400,00	119.923.621.821,00	31.821.969.421,00	26,54
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	492.125.553.165,00	302.837.967.900,00	(189.287.585.265,00)	-62,50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.040.648.400,00	8.435.132.600,00	(45.605.515.800,00)	-540,66





NO	URAIAN	TARGET APBD MURNI 2022	PROYEKSI 2023	Tambah/Kurang	%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	100,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	80.000.000.000,00	88.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9,09
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	80.000.000.000,00	88.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9,09
5.4.	BELANJA TRANSFER	1.120.150.000.000,00	1.400.000.000.000,00	279.850.000.000,00	19,99
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.120.000.000.000,00	1.400.000.000.000,00	280.000.000.000,00	20,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	150.000.000,00	-		
	JUMLAH BELANJA	6.153.838.931.960,00	6.571.319.286.773,92	417.480.354.813,92	6,35
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	50.000.000.000	99.408.500.000	49.408.500.000	49,70
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	99.408.500.000	49.408.500.000	49,70
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	50.000.000.000	99.408.500.000	49.408.500.000	49,70
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	99.408.500.000	49.408.500.000	49,70
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.000.000.000	135.000.000.000	50.000.000.000	37,04
6.2.02	Penyertaan Modal	10.000.000.000	35.000.000.000	25.000.000.000	71,43
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000	100.000.000.000	25.000.000.000	25,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85.000.000.000	135.000.000.000	50.000.000.000	37,04
	PEMBIAYAAN NETTO	(35.000.000.000)	(35.591.500.000)	(591.500.000)	1,66
6.3.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)			-	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2022



Bab-IV

**Sasaran dan
Prioritas
Pembangunan
Daerah**



2023
KALIMANTAN SELATAN



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman dan berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJPD Kalsel) Tahun 2005-2025
2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026
3. Dokumen Sustainable Development Goals
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023
5. Pokok-pokok pemikiran DPRD Kalimantan Selatan

4.1.1 Tahapan Pembangunan Tahun 2023 Berdasarkan RPJPD 2005 – 2025

Penyusunan RKPD Kalsel Tahun 2023 dilakukan dengan melalui proses penelaahan terhadap RPJPD Kalsel 2005-2025. Penelaahan ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan konsistensi RKPD untuk mencapai visi jangka panjang daerah sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJPD. Penelaahan juga dilakukan dengan maksud untuk menyesuaikan RKPD dengan tahapan yang ditetapkan pada RPJPD

Visi RPJPD 2005-2025 adalah Kalimantan Selatan 2025 "Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri". Dalam rangka menuju visi tersebut, RPJPD seyogyanya dibagi menjadi empat tahap RPJMD dengan pembagian sebagai berikut:





1. RPJMD pertama untuk Tahun 2005-2010 yang ditujukan untuk menata ulang fondasi pembangunan daerah.
2. RPJMD kedua untuk Tahun 2011-2016 yang ditujukan untuk memantapkan fondasi pembangunan daerah
3. RPJMD ketiga untuk Tahun 2016-2021 yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing
4. RPJMD keempat untuk Tahun 2021-2026 yang ditujukan untuk mewujudkan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri dalam rangka mencapai masyarakat maju dan sejahtera.

Tahun 2023 ini termasuk dalam tahapan RPJMD keempat (periode 2021-2026) yang secara umum tujuannya adalah terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri yang maju dan sejahtera dengan daya saing yang tinggi dalam menyongsong era globalisasi.

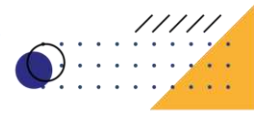
Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahapan RPJMD keempat ini adalah sebagai berikut.

- Sumber Daya Manusia : 50% Sekolah bertaraf internasional
- Ekonomi : Pemantapan daya saing
- Infrastruktur : Pemeliharaan
- Sumber Daya Alam : Terwujudnya pengelolaan sumber daya berwawasan lingkungan
- Pemerintahan yang baik : Terwujudnya penerapan yang konsisten
- Tata Ruang : Terwujudnya pola ruang sesuai RTRWP

4.1.2 Tahapan Pembangunan Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 yang memuat visi "**KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA**" dan dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:





1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur.
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata.
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik.
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode 5 tahun dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang terintegrasi, sinkron dan sinergis dengan pembangunan nasional serta dinamikanya.

4.1.3 Tahapan Pembangunan Berdasarkan Dokumen *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB, *Sustainable Development Goals/SDGs*) memuat sasaran pembangunan yang harus dicapai secara global termasuk Pemerintah Kalimantan Selatan di masa datang pada Tahun 2030. Dokumen SDGs ini juga digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023.

Indikator TPB sebanyak 235 indikator yang menjadi kewenangan provinsi telah dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 217 indikator, dimana 111 indikator telah mencapai target nasional (kategori A) yang ditetapkan dalam Perpres 59 Tahun 2017. Sedangkan 71 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (kategori B), 11 indikator yang belum dilaksanakan (kategori C) dan 24 indikator belum ada data (kategori D). Secara umum, jumlah indikator TPB berdasarkan kategori di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 4.1. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	A	B	C	D	Jumlah
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	13	7	1	2	23
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	9	1	0	1	11
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	19	11	0	4	34
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	6	4	0	0	10
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5	7	0	3	15
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	12	4	1	0	17
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	1	1	2	6
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	4	12	0	3	19
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	5	3	2	1	11
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	3	3	0	3	9
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	4	3	0	11
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1	0	1	3	5
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	2	0	0	3
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	4	0	0	0	4
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	3	4	0	0	7
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	13	4	0	0	17
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	7	4	2	2	15
	111	71	11	24	217

Sumber: Dokumen Sustainable Development Goals





4.1.4 Tahapan Pembangunan Tahun 2023 Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan Rancangan Awal RKP Tahun 2023.

Salah satu wujud penyelarasan proses pembangunan antar tingkat pemerintahan adalah dengan memastikan keselarasan proses perencanaan pembangunan dalam hal ini perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang diwujudkan dalam RKP Tahun 2023 dengan perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang diwujudkan dalam RKPD Kalsel Tahun 2023. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai keselarasan antara RKP dan RKPD adalah tema, fokus, prioritas, sasaran dan target, serta program pembangunan.

Adapun tema RKP Tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Berdasarkan tema tersebut, ada 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pada RKP 2023. Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Dan terakhir, pembangunan Ibukota Nusantara.

Adapun indikator sasaran pembangunan Tahun 2023 secara nasional disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023

Indikator	Sasaran
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0-8,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,29-73,35
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27
Nilai Tukar Petani (nilai)	103-105
Nilai Tukar Nelayan (nilai)	105-107

*Sumber: Ranwal RKP Tahun 2023





4.1.5 Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan

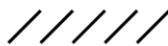
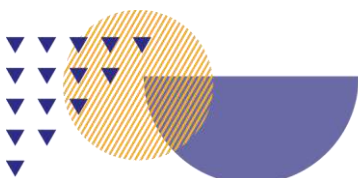
Pokok - pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Saran dan masukan dimaksud diperoleh dari hasil pelaksanaan proses perencanaan yaitu pada tahapan Pembukaan dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum SKPD, Musrenbang Provinsi dan Dialog Interaktif Rancangan Akhir RKPD serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, masukan yang telah masuk dalam SIPD kemudian di seleksi berdasarkan kewenangan Provinsi yang kemudian akan dipilah berdasarkan prioritas. Usulan yang terseleksi tersebut dijabarkan dalam urusan sebagai berikut:

Tabel 4.3. Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan yang terseleksi Tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
1	Pendidikan Dan Kebudayaan	77	Peningkatan sarana – prasarana sekolah seperti printer, komputer, lemari, kursi, meja dan rehabilitasi ruang kelas, parkir dan jembatan titian. Selain itu usulan juga diarahkan pada upaya pembangunan gedung sekolah SMA di Desa Balawaian Rt.3 Kecamatan Piani Kab. Tapin. Usulan bantuan beasiswa pendidikan kepada siswa tidak mampu menjadi salah satu usulan yang di sampaikan
2	Kesehatan	48	Pengusulan berupa hibah Provinsi dalam bentuk mobil ambulans kepada masyarakat, Bantuan alat kesehatan / alat penunjang medik untuk fasilitas layanan kesehatan di klinik kesehatan masjid muhammadiyah Al-Muhajirin Jl. HKSNI Kota Banjarmasin.
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	315	Pembangunan/Rehabilitasi jalan desa dan jembatan seperti Desa Jambu Baru, Desa Sungai Punggu, Desa Patih Muhur Baru (Batola), RT.1 sampai RT.19 Kelurahan Kertak Hanyar, Desa Sungai Arfat, Desa Belayung Baru (Kab. Banjar), Desa Sungai Riam RT 07, Pembangunan/Rehabilitasi jalan desa dan jembatan dan Perbaikan Titian seperti jembatan irigasi sungai landas Kec. Karang Intan, Perbaikan jembatan danau tamiyang di mandikapau barat, jalan wisata batarung desa



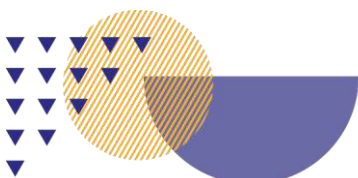
No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
			balau, Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Provinsi : Tanjung - Muara Uya, Kandungan -Negara.
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	126	Pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi dengan usulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) seperti : Desa Sepakat Bersama, desa anjir muara lama (Batola), Desa Banua Batung, Banua Supanggal, Desa Kias, (HST) (Banjarmasin)
5	Perhubungan	64	Usulan di dominasi dalam upaya penerangan jalan pengadaan lampu penerangan jalan, Faskes keselamatan jalan, warning light dll seperti : jalan margasari, Kab. Tapin, jalan a. yani, Kab. Tanah Laut, Jalan H.M.Ruslan, Kab. Barito Kuala, Desa Anjir Serapat Muara, Kab. Barito Kuala untuk keselamatan jalan.
6	Kehutanan	6	Pengusulan berupa Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7	Energi Dan Sumber Daya Mineral	23	Pengusulan berupa Bantuan Penambahan jaringan Listrik (tiang, kabel, daya) untuk jalan dan desa.
8	Pertanian (Tanaman Pangan Dan Hortikultura & Perkebunan dan Peternakan)	405	Pengusulan berupa pengadaan sarana prasarana pertanian Bantuan (traktor, hand tracktor, excavator, panen padi/mesin perontok padi, alat semprot, sadap karet, pupuk, obat2an pertanian/peternakan, pembangunan JUT (jalan Usaha Tani).
9	Ketahanan Pangan	2	Berupa bantuan Rahabilitasi Lumbung Pangan Kelompok Mekarsari Ketua Mataraja Desa Danau Karya Kecamatan Anjir Pasar
10	Kelautan Dan Perikanan	4	Berupa Bantuan Budidaya perikanan laut (Rumput Laut, Mangrove)
11	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8	KPPI / Kaukus Perempuan Politik Indonesia mengajak kerjasama dalam rangka sosialisasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik berupa pelatihan-pelatihan untuk kaum perempuan di 13 kabupaten kota bersamaan dengan di bentuknya KPPI di Kab/Kota Se Kalsel
12	Kepemudaan dan Olahraga	26	Berupa bantuan perlengkapan olahraga Sepak Bola berupa baju seragam dan Jaring untuk Gawang Kiper, bantuan alat dan pakaian seragam untuk Pencak Silat (Kuntau) di desa Bakarangan, bantuan alat olahraga kepada karang taruna di Kab. Tanah Laut.
13	Kesatuan Bangsa dan Politik	3	Berupa Hibah kepada LSM Peduli Tanah Air





No	Urusan	Jumlah Usulan	Penjabaran Usulan
14	Kebencanaan	6	Berupa Pelatihan Penanggulangan Bencana beserta bantuan peralatannya di Kota Banjarmasin
15	Perdagangan	5	Pengelolaan Operasi pasar harga pangan pokok kewenangan provinsi
16	Tenaga Kerja	7	Bantuan Program Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster kompetensi, Bantuan Pelatihan Keterampilan (koperasi, menjahit, mesin, dll).
17	Sekretariat Daerah	201	Pengcoran jalan menuju Kuburan Muslimin, Pemagaran Kuburan Muslimin, Mohon Urukun dan Pasa Paving Blok untuk halaman Taman al-Qur'an, permintaan perbaikan pagar langgaar al-machfuz jalan kuin utara, rehab kembali langgar cahaya iman di jalan pandan sari kota Banjarmasin.
18	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	19	Hibah Kendaraan Pemadam Kebakaran
19	Komunikasi dan Infromatika	1	Mohon pemasangan jaringan untuk telekomunikasi untuk mempermudah akses antara masyarakat dan pemerintah desa Belawian di Kab. Tapin
20	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20	Usulan berupa Pengadaan Gerobak untuk Pedagang Laut (Belta), Pengadaan Peralatan Pembuatan Kue, Pengadaan peralatan pengembangan Usaha Pentol Ikan.
21	Lingkungan Hidup	13	Bantuan Hibah untuk Bank Sampah Induk (BSI) Dewa Ruci. Bank sampah ini merupakan bank sampah induk yang melayani bank sampah di sekitarnya di Kab. Tabalong.
22	Pariwisata	20	Permohonan pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif pada objek wisata air terjun rambut di desa batu bini kecamatan padang batung Provinsi Kalimantan Selatan
23	PMD	3	Bantuan berupa pelatihan ekonomi kreatif untuk masyarakat desa Pulau Laut Timur Kab. Kota baru
24	Penanaman Modal	3	kepada pemerintah daerah dan provinsi agar dapat membantu memberikan usaha bagi warga dalam usaha peternakan dan perikanan
25	Pertanahan	1	Usulan berupa pengerukan sungai di kel. Cempaka sampai ke desa banyu irang
26	Sosial	2	bantuan kebutuhan dasar sebagai fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga untuk para lansia binaan LB2T dan LP2LU Kalsel, Kegiatan dalam rangka Day Care Lansia

Sumber: SIPD, data diolah kembali





4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Isu-Isu Strategis

Pada sub-bab sebelumnya dijelaskan keterkaitan antara RKPD Kalsel Tahun 2023 dengan beberapa dokumen perencanaan lain beserta analisisnya yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RKPD Kalsel Tahun 2023. Pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud diperlukan untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan keselarasan antar dokumen perencanaan.

Selain itu pertimbangan terhadap dokumen-dokumen perencanaan, penyusunan RKPD Tahun 2023 ini juga mempertimbangkan kondisi obyektif dan fakta permasalahan, baik yang bersifat lokal maupun yang berskala makro beserta perubahan-perubahannya. Kondisi aktual dan perubahan-perubahan yang berpotensi membawa pengaruh terhadap proses pembangunan di Kalimantan Selatan kemudian dianalisis dan dijabarkan menjadi uraian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Adapun permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dipertimbangkan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 ini secara garis besarnya terdiri dari tujuh poin. Tujuh poin permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pandemi Novel *Coronavirus-2019 (Covid-19)*.

Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada seluruh sektor perekonomian masyarakat, terutama mengakibatkan :

- Terjadinya peningkatan angka pengangguran Kalimantan Selatan.
- Terjadinya peningkatan angka kemiskinan Kalimantan Selatan
- Terjadinya penurunan perekonomian di lapisan masyarakat menengah kebawah terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2. Struktur Perekonomian Daerah Berkelanjutan yang masih belum kuat.

Ada dua hal utama yang menjadi tantangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- Masih ketergantungan dengan komoditas bahan mentah/setengah jadi. Komoditas utama Kalimantan Selatan seperti batubara, sawit, karet dan kayu lapis kebanyakan langsung dijual tanpa pengolahan sehingga Ketika



harga menurun sangat berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan.

- Belum maksimalnya potensi investasi yang masuk ke Kalimantan Selatan.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum berdaya saing.

Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Selatan masih menjadi isu strategis yang harus di jawab oleh Pemerintah Daerah. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih dibawah rata- rata Nasional perlu ditingkatkan lagi.

- Belum optimalnya Kualitas Pendidikan
- Belum optimalnya Kualitas Kesehatan
- Belum optimalnya Keterampilan SDM

4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan yang belum optimal.

Masih rendahnya kualitas lingkungan dan masih terjadinya bencana merupakan indikator yang menjadi perhatian dalam penanganan sektor Lingkungan hidup. Tiga hal yang menjadi perhatian utama yaitu :

- Pencemaran sungai yang mempengaruhi Kualitas air (IKA)
- Masih terjadinya banjir di berbagai wilayah, yang terbaru terjadi banjir besar di 11 Kabupaten/Kota pada awal tahun 2021 yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi masyarakat
- Masih terjadinya Kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah

5. Keterbatasan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 51,51% atau berada pada skala interval sedang, selanjutnya proyeksi pada tahun 2023 proporsi kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah / derajat desentralisasi berada pada kategori sedang atau diproyeksikan sebesar 58,09% dan Dana Transfer dikucurkan oleh Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar 41,64% dari total Pendapatan Daerah, proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan pertimbangan alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang sesuai dengan Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio



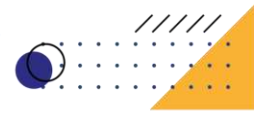


indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang masih cukup dan kemandirian keuangan daerah pada kategori sedang. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan dengan gap sebesar 24,06%. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif karena peningkatan Pendapatan Asli daerah dan total pendapatan daerah tidak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, tetapi diikuti oleh belanja rutin. Kontribusi PAD terhadap APBD, berada pada posisi sedang yaitu sebesar 58,09%. Dengan melihat hasil analisis tersebut, perkembangan kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dianggap masih cukup untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan.

6. Perpindahan Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur dan Penetapan *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

Dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk memindahkan Ibukota Negara akan mempengaruhi daerah – daerah sekitar termasuk hal ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga adanya *big project* Pemerintah di Kalimantan Tengah akan mempengaruhi pola kebijakan Kalimantan Selatan yang tepat berbatasan di Kawasan *food estate*. Terdapat 3 hal utama terkait yang menjadi pokok permasalahan yang harus menjadi perhatian Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya menjadi pintu Gerbang Ibukota Negara yaitu :

- Perlunya akses yang strategis antara Provinsi Kalimantan Selatan keseluruhan dengan lokasi IKN di Kalimantan Timur dan Kawasan *food estate* di Kalimantan Tengah .
- IKN sebagai Kawasan baru akan membutuhkan supply pangan yang diharapkan dapat di akomodir Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu lumbung pangan Nasional
- IKN sebagai Kawasan baru membutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menopang kinerja IKN. Kalimantan Selatan sebagai Kawasan penyangga diharapkan mampu menjadi pemasok SDM yang berkualitas tersebut.



7. Belum efektifnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan Pemerintahan menjadi poin utama agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berbenah dalam upaya menjadikan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel disertai dengan modernisasi Pemerintahan melalui perkuatan digitalisasi.

4.2.2 Tema, Fokus Dan Prioritas RKPD Tahun 2023

Berdasarkan pertimbangan yang dihasilkan dari analisis dokumen-dokumen perencanaan serta isu-isu strategis yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, maka ditetapkan Tema, Fokus dan Prioritas RKPD Tahun 2023. Adapun Tema Pembangunan yang ditetapkan untuk RKPD Tahun 2023 yaitu:

“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”

Tema tersebut dapat diturunkan menjadi 4 fokus pembangunan sebagai berikut.

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan

Fokus terhadap bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan adalah penjabaran dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk pembangunan manusia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Fokus terhadap tiga hal ini adalah upaya untuk memantapkan kondisi sosial budaya masyarakat Kalimantan Selatan. Dalam jangka pendek, fokus terhadap tiga hal, terutama fokus pada bidang kesehatan ini diharapkan dapat jawaban untuk menanggulangi dampak pandemi. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, pemantapan kondisi sosial budaya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kalimantan Selatan dalam menghadapi tekanan globalisasi.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Ketenagakerjaan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan yang paling terdampak dalam dua tahun terakhir akibat adanya pandemic Covid-19. Dengan mengupayakan perkuatan perekonomian pada skala masyarakat diharapkan perekonomian dapat





tumbuh lebih cepat sehingga keselarasan dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.

3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata

Pada perekonomian skala besar terus diupayakan transformasi perekonomian Kalimantan Selatan yang masih bertumpu pada sector pertambangan agar dapat berbagi kontribusi dengan tiga sector yang akan dikembangkan. Investasi akan diarahkan pada perkuatan hilirisasi industry terutama kawasan-kawasan industry yang telah ditetapkan baik skala Nasional maupun skala daerah. Begitu pula pada sector pertanian secara luas akan dilakukan peningkatan produktivitas dan peningkatan nilai produk dengan tetap memperhatikan kesejahteraan para petani sebagai subjek utama pada sector ini. Yang terakhir adalah sector pariwisata dengan pengembangan ekowisata dan edu-wisata di objek-objek wisata yang bersifat budaya lokal dan alam lingkungan yang memperkuat ke-khasan Kalimantan Selatan. Tidak lupa perkuatan Geopark Meratus yang telah ditetapkan menjadi Geopark Nasional agar dapat ditingkatkan menjadi *Unesco Global Geopark (UGG)*.

4. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Covid-19

Fokus pembangunan selanjutnya diharapkan pada tahun 2022 untuk meminimalisir bencana yang terjadi seperti Banjir, kebakaran hutan dan lahan serta puting beliung. Program-program diarahkan mampu menanggulangi banjir agar kejadian banjir awal tahun 2021 tidak terjadi lagi. Selain itu mawas diri terhadap pandemic covid 19 terus menjadi perhatian mengingat kepastian terselesaikannya pandemic ini belum bisa diprediksi.

Berdasarkan tema dan fokus tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan. Adapun prioritas pembangunan daerah beserta sub-prioritasnya dijabarkan pada Tabel 4.4 berikut :





Tabel 4.4. Prioritas dan Sub-Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas
1.	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah2. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda3. Penurunan Penyakit Melalui Gernas4. Pengendalian Prevalensi Stunting5. Penurunan Angka Pernikahan Anak6. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan7. Peningkatan Prestasi Olahraga
2.	Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan2. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja3. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark4. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital5. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Perekonomian Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar2. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah3. Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan Reformasi Birokrasi2. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif3. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik4. Pengembangan Satu Data Kalsel
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup2. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
6.	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN2. Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN

4.2.3 Prioritas Dan Sasaran RKPD Tahun 2023

Konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan





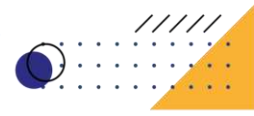
pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif dan spasial, yaitu:

- **Tematik:** Tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKPD 2023 tema utama adalah “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan” yang dilaksanakan dalam 6 Prioritas Daerah;
- **Holistik:** Penjabaran tematik dari program prioritas ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
- **Integratif:** Upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran Perangkat Daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
- **Spasial:** Kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah;

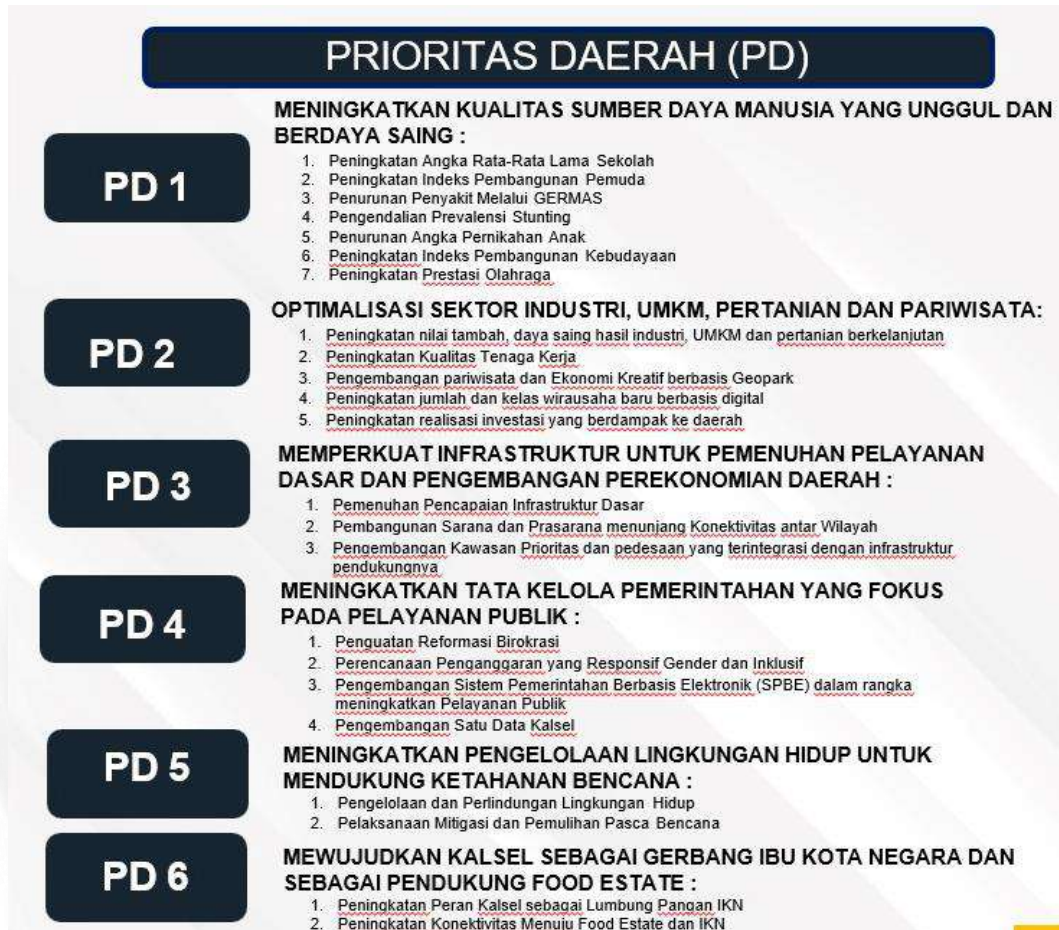
Pendekatan Perencanaan berbasis *Tematik, Holistik, Integrated dan Spasial (THIS)* di atas tetap memperhatikan pada perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKPD 2023, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, perkuatan integrasi sumber pendanaan, dan pengembangan bersifat inklusif dan dengan pendekatan pengarusutamaan gender. Pendekatan prinsip “Inklusi Sosial” sebagai usaha kepedulian untuk memberdayakan masyarakat marjinal, meningkatkan kesejahteraan, dan memberantas kemiskinan. Usaha kepedulian dimaksud adalah melalui program pemberdayaan masyarakat yang bermitra dengan lembaga masyarakat sipil untuk menjangkau penerima manfaat yang selama ini mengalami eksklusi dari program pemerintah yang disebabkan diskriminasi dan prasangka. Terkait hal tersebut Provinsi Kalimantan Selatan dalam dimensi pembangunan tahun 2023 berusaha melingkupi semangat pembangunan inklusi dalam sektor-sektor Pembangunan lainnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan daerah





Nomor 17 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibuat 6 Prioritas Pembangunan pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar 4.1.



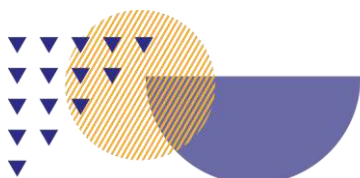
Gambar 4.1 Prioritas Pembangunan pada Dokumen RKPD 2023

Berbagai macam metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Pada dokumen RKPD tahun 2023 sasaran prioritas dan subprioritas perencanaan pembangunan, antara lain:



Tabel 4.5. Sasaran prioritas dan subprioritas RKPD tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Sasaran	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,56 tahun
		Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	52,66
		Penurunan Penyakit Melalui Germas	Usia Harapan Hidup	71,05 Tahun
		Pengendalian Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	26%
		Penurunan Angka Pernikahan Anak	Angka Perkawinan Anak	13,77%
		Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,67 indeks
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	37%
2.	Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,5 % - 3,45 %
			LPE Sektor Industri Pengolahan	2,5 % - 3,65 %
			LPE Sektor Perdagangan	7,2 % - 7,85 %
		Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,94%
		Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark	LPE Sektor Peny. Akomodasi dan Mamin	6,61-7,10%
			Kenaikan Jumlah Wisnus	10%
			Kenaikan Jumlah Wisman	5%
			Tingkat Hunian Akomodasi	44%
		Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital	Pengeluaran perkapita	12,2 juta rupiah
			Persentase usaha kecil menjadi wira usaha	18,17%
			Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan	26,03%
		Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	12,55 Triliun Rupiah
3.	Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian Daerah	Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar	Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	94,34%
			Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	93%
			Cakupan Pelayanan Persampahan	50,27%
			Luas Genangan yang Tertangani (Drainase)	7%
			RTLH yang Ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni	43,75%





No	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Sasaran	Target
			Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	34,97%
			Kapasitas Penyediaan Air Baku	23,16%
			Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga Tidak Mampu	88,84%
			Wilayah Bebas Blankspot	91%
		Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi	Tingkat Kemantapan Jalan	81%
			Tingkat Aksesibilitas Jalan	43,75%
			% Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100%
			% Sarpras Bangunan & Lingkungannya dalam Kondisi Baik	100%
			% Ruas Jalan Provinsi yang Dilakukan Manajemen Rekayasa	30%
			% Terangkutnya Penumpang dan Barang	70%
			% Penurunan Kejadian Kecelakaan Penggunaan Jalan di Kalsel	2,60%
			% Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	54,43%
		Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan	Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang 82%	82%
			Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu 40%	40%
			Persentase Luas Sisa Areal Hpl Yang Dapat Dikembangkan Oleh Pemda 40%	40%
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	73,24 indeks
			Opini BPK	WTP
			SAKIP	A
			Indeks Profesionalitas ASN	75 indeks
		Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,04 indeks
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,33 indeks
		Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,25 indeks
		Pengembangan Satu Data Kalsel	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	93%





No	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Sasaran	Target
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	93%
			Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral yang Akurat	240
5.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,9 indeks
			Indeks Tutupan Lahan	52,64 indeks
			Indeks Kualitas Air	56,04 indeks
			Indeks Kualitas Udara	88,63 indeks
			Indeks Kualitas Air Laut	69,86 indeks
		Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	22,20%
			pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	100%
			penanganan pra bencana dan penanganan tanggap darurat bencana	100%
			% Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	33,30%
			% Kawasan hutan yang bebas kebakaran hutan	99,20%
6.	Mewujudkan Kassel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate	Peningkatan Peran Kassel sebagai Lumbung Pangan IKN	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	
			- Padi	1.544.873 Ton
			- Bawang	504 Ton,
			- Cabe Rawit	17.216 Ton,
			- Cabe Besar	13.951 Ton,
			- Jeruk	121.055 Ton
			- Produksi Daging	128.749 Ton
			- Produksi Ikan Tangkap	211.000 Ton
			- Produksi Ikan Budidaya	167.419 Ton
			- Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	75 (Skor)
		- Stok Minimal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi	420 Ton	
		- Lumbung Pangan	181 buah	
		Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN	Tingkat Kemantapan Jalan	81%
			Tingkat Aksesibilitas Jalan	43,75%
% Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	100%			

Sumber: Analisa Bappeda, 2022

4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Antara RKPD 2023 Dan RKP 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat





dengan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, maka telah dirumuskan program/kegiatan prioritas tahun 2023. Program prioritas tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan yang berusaha untuk diselesaikan. Program Prioritas tersebut juga tidak lepas dari program prioritas Nasional yang pada Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari 6 Prioritas Daerah. Penjabaran Program prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung prioritas pembangunan Nasional tahun 2023. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6. Sandingan Prioritas Nasional / Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Daerah /Program Prioritas Provinsi Tahun 2023

No.	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi / Program Prioritas Provinsi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1	OPTIMALISASI SEKTOR INDUSTRI, UMKM, PERTANIAN DAN PARIWISATA
1.1	Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1.2	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program Penanganan Kerawanan Pangan
1.3	Peningkatan Pengelolaan Kemitraan, Perikanan, dan Kelautan		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
1.4	Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pengembangan UMKM. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.



No.	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi / Program Prioritas Provinsi
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1.5	Peningkatan Nilai Tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector rill, dan Industrialisasi		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Program Promosi Penanaman Modal. Program Pelayanan Penanaman Modal. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Program Pemasaran Pariwisata. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1.6	Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)		Program Pengembangan Ekspor. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2	Meningkatkan Kualias Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
2.1	Pembangunan Wilayah Kalimantan		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya. Program Penataan Bangunan Gedung. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Program Penataan Desa. Program Peningkatan Kerjasama Desa. Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang Food Estate Dan Ibukota Negara Baru Program Penyelenggaraan Jalan Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Pelayaran Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2.2	Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter)		Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan



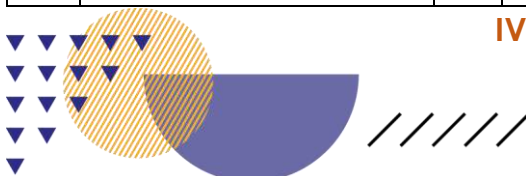


No.	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi / Program Prioritas Provinsi
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing
3.1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan tata Kelola Kependudukan		Program Pendaftaran Penduduk. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial		Program Pemberdayaan Sosial. Program Rehabilitasi Sosial. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3.3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Program Perlindungan Khusus Anak. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program Pengelolaan Persampahan
3.4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		Program Pengelolaan Pendidikan Program Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Kurikulum
3.5	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program pengelolaan Pendidikan. Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Program Perlindungan Khusus Anak. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
3.6	Pengentasan Kemiskinan		Program Pemberdayaan Sosial. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
3.7	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program Perencanaan Tenaga Kerja. Program Pengelolaan Pendidikan. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING





No.	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi / Program Prioritas Provinsi
4.1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	4.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Program Pengembangan Kurikulum
4.2	Meningkatkan Kemajuan dan Pelestarian Kebudayaan		Program Pengembangan Kebudayaan. Program Pembinaan Sejarah. Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya. Program Pengelolaan Permuseuman
4.3	Memperkuat Moderasi Beragama		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Program Kesejahteraan Rakyat
4.4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas		Program Pembinaan Perpustakaan.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	5	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH
5.1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	5.1	Program Pengembangan Perumahan. Program Kawasan Permukiman. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
5.2	Infrastruktur Ekonomi		Program Penyelenggaraan Jalan. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program Pengelolaan Pelayaran. Program Pengelolaan Perkeretaapian. Program Pengelolaan Perkeretaapian
5.3	Infrastruktur Perkotaan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
5.4	Energi dan Ketenagalistrikan		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
5.5	Transformasi Digital		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Mendukung KETAHANAN BENCANA
6.1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).





No.	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi / Program Prioritas Provinsi
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian. Program Pengelolaan Hutan. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Program Pengelolan Persampahan 8 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 10 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6.2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		Program Penggulangan Bencana. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Program Penanganan Bencana. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6.3	Pembangunan Rendah Karbon		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7	Memperkuat Stabilitas Polkhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK
7.1	Konsolidasi Demokrasi	7.1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
7.2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri		
7.3	Penegakan Hukum Nasional		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
7.4	Reformasi Birokrasi dan tata Kelola		Program Kepegawaian Daerah. Program Penyelenggaraan Pengawasan. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Penataan Organisasi. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.



No.	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi / Program Prioritas Provinsi
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7.5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional		

4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada subbab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi. Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Selatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.7. Inovasi Daerah

No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi	Penjabaran Inovasi
1	Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalimantan Selatan SSKA KU INTIP (Sawit-Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma	Program Integrasi Sawit-Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SSKA KU INTIP),	Dalam upaya percepatan swasembada pangan khususnya sapi potong. Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalimantan Selatan melakukan program Integrasi Sawit-Sapi berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SSKA KU INTIP), telah mampu meningkatkan produksi anak sapi (padet) di Kalsel. Dari populasi sapi di Kalsel sekitar 148 ribu ekor, selama ini menghasilkan anak sapi setiap tahun 22 ribu ekor. Tetapi setelah program SSKA KU INTIP tahun 2020 meningkat menjadi 27 ribu ekor, dan tahun 2021 naik lagi menjadi 30.500 ekor. Program SSKA KU INTIP telah melakukan kajian sejak tahun



No	Urusan/Unit Kerja	Bentuk Inovasi	Penjabaran Inovasi
			2016, dan hingga tahun 2024 mendapat support dari Australia serta mendorong peternak dan pekebun di Kalsel untuk melakukan integrasi sawit-sapi tersebut, karena terbukti mampu meningkatkan produksi anak sapi. Agar dapat mempercepat swasembada sapi potong 2026, dan menjadi pemasok sapi di wilayah Kalimantan, Program SISKAKU INTIP, dapat mendorong perkebunan kelapa sawit di Kalsel. Karena sektor perkebunan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meraih devisa nomor dua di Kalsel setelah batubara.

4.5 Tahapan Proses Perencanaan

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan melalui beberapa tahapan dengan kegiatan yang sangat ketat dan padat. Hal tersebut tertuang dalam agenda kerja yang rinci dalam tiap tahapannya sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

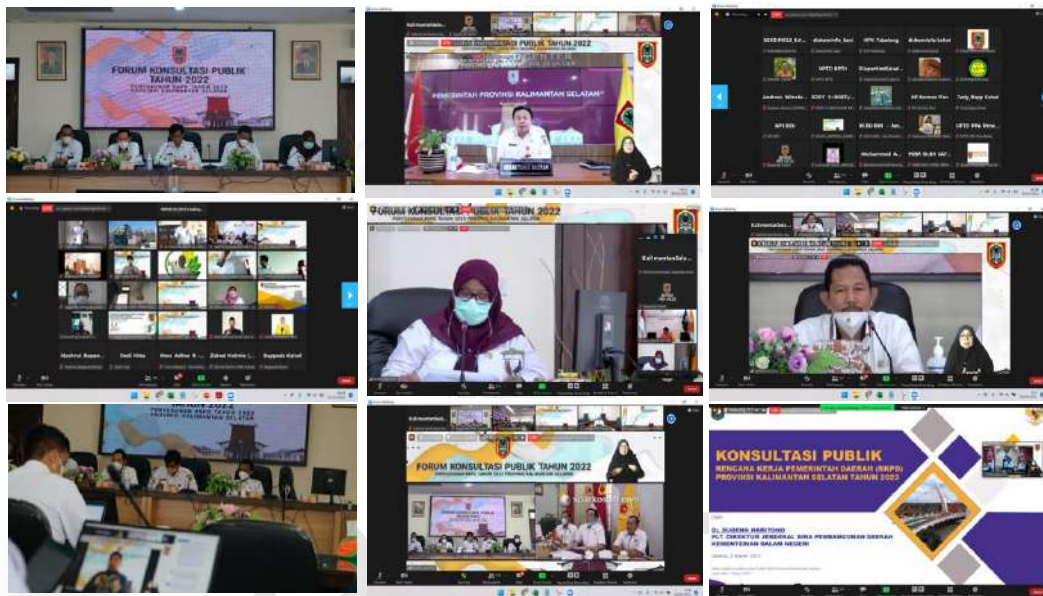
4.5.1 Forum Konsultasi Publik

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Rencana Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 2 Maret 2022 bertempat di Ruang Kerja SKPD masing-masing, dikarenakan rapatnya bersifat Online via Zoom. Dalam kegiatan dilaksanakan konsultasi program/kegiatan/sub kegiatan prioritas pembangunan yang akan dimasukkan dalam perencanaan dokumen RKPD Tahun 2023. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKP



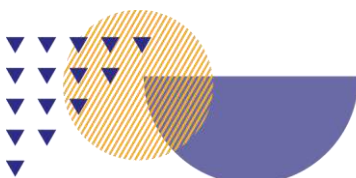


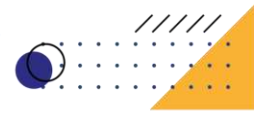
banyak memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan Tahun 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan FKP Tahun 2022.



Gambar 4.2 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan FKP Tahun 2022

RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN



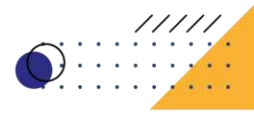


4.5.2 Forum Lintas Perangkat Daerah

Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2022 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilaksanakan pada Tanggal 30 s.d 31 Maret 2022 di Ruang Kerja SKPD masing-masing, dikarenakan rapatnya bersifat Online via Zoom. Sedangkan pelaksanaan desk pembahasan dilaksanakan secara tatap muka langsung yang bertempat di ruang rapat Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mensinkronkan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dalam perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.3 Dokumentasi pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah



4.5.3 Musrenbang Penyusunan RKPD

Kegiatan Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 memiliki tema **“PENGUATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERKELANJUTAN”**. Kegiatan ini telah terlaksana pada Tanggal 13 April 2022, dihadiri oleh berbagai stakeholder di Kalimantan Selatan serta Perwakilan Pemerintah yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta kementerian yang terkait dengan prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan Tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan via online / zoom.

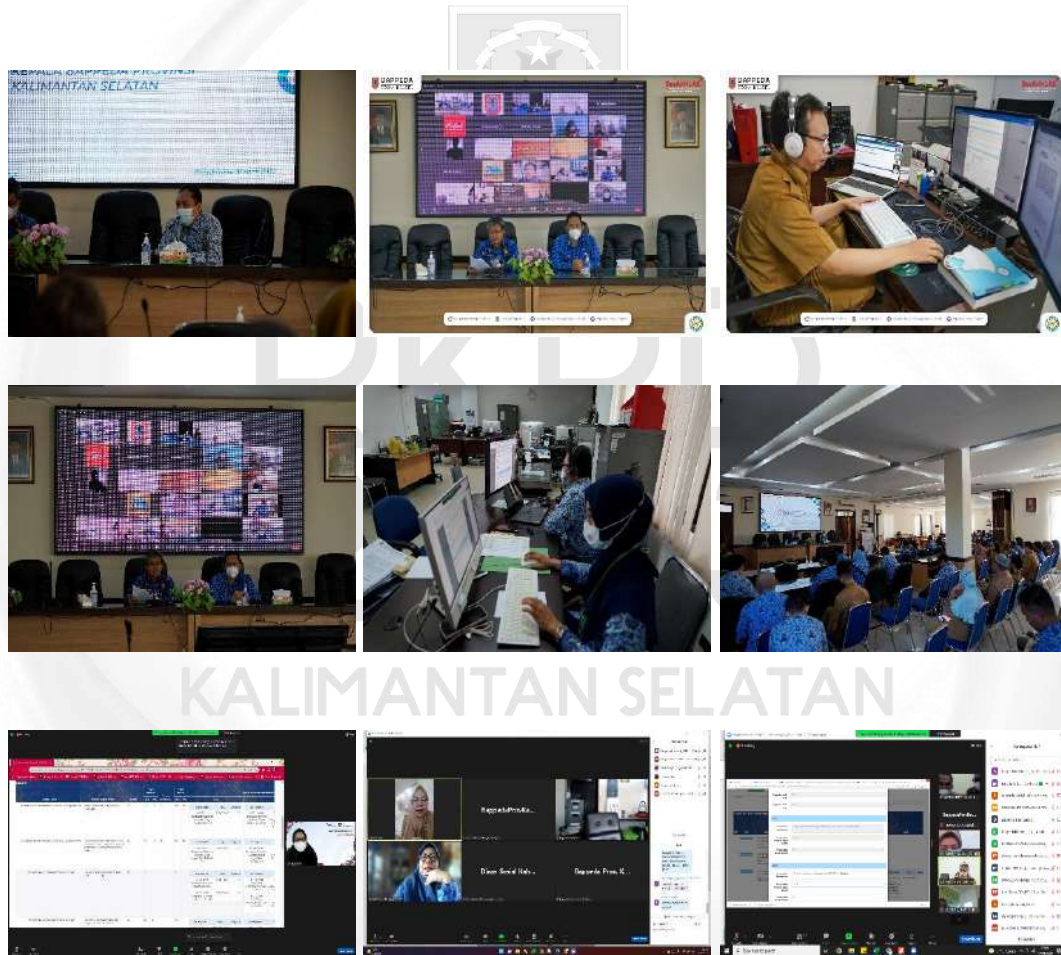


Gambar 4.4 Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD



4.5.4 Trilateral Desk Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan Trilateral Desk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 dilaksanakan pada Tanggal 18 s.d 21 April 2022, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan ini dilakukan sinkronisasi usulan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dalam perencanaan pembangunan Tahun 2023 antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Kalimantan Selatan.

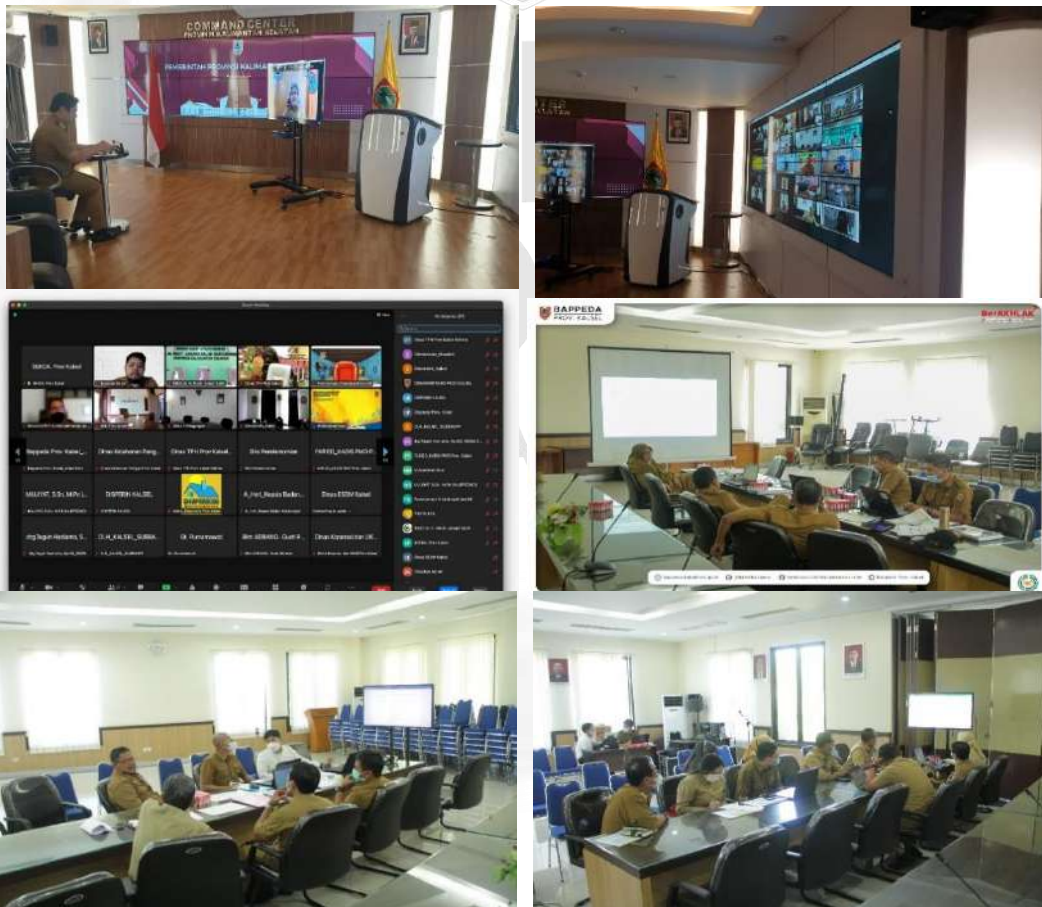


Gambar 4.5 Dokumentasi Pelaksanaan Trilateral Desk Tahun 2022



4.5.5 Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD

Pelaksanaan Pasca Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 yang mana sesi Pembukaan dibuka oleh bapak Sekretaris Daerah sekaligus Pengarahan kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan via *Zoom Meeting*. Dan di lanjutkan Kembali pada tanggal 12 dan 13 Mei 2022 dengan agenda masing-masing SKPD berkoordinasi dengan bidang mitranya di Bappeda terkait penyesuaian jadwal dan mekanisme pelaksanaan. Kegiatan bertempat di Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk finalisasi usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2023. Pelaksanaan pasca musrenbang dihadiri oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.6 Dokumentasi Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD

Bab-V

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota



KALIMANTAN SELATAN



BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

5.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan target pembangunan di setiap daerah. Perekonomian Kalimantan Selatan saat ini masih bertumpu pada sektor pertambangan.. Pada tahun 2018 dan 2019 sektor tambang menjadi sektor yang mendominasi, menyumbang PDRB Kalimantan Selatan sebesar 20,61 persen dan 18,69 persen. Pada tahun 2020 sektor pertambangan mengalami penurunan proporsi yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 16,70 persen. Pelemahan kinerja sektor pertambangan ini mengisyaratkan sudah saatnya Kalimantan Selatan mulai mengubah tumpuan dan mentransformasi ekonominya dari sektor primer ke sektor Pertanian, Industri pengolahan (hilir) dan Pariwisata. Perubahan struktur ekonomi penting karena sektor primer sangat bergantung pada sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dan memiliki produktivitas yang rendah. Posisi Kalimantan Selatan yang dilewati oleh jalur ALKI II, serta adanya kebijakan nasional rencana pembangunan Ibu Kota Negara(IKN) di Kalimantan Timur dan rencana pengembangan Food Estate, di Kalimantan Tengah, memberikan peluang dan potensi untuk mewujudkan ruang wilayah yang efisien dan berkelanjutan guna mendukung visi Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN).

Meskipun terbatas, lahan di wilayah Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, khususnya tanaman pangan dan perkebunan. Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tabalong merupakan wilayah yang memiliki potensi besar bagi pengembangan





pertanian tanaman pangan. Kedepannya Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengembangan sektor pertanian memfokuskan kepada lembaga pengelola, peningkatan kualitas SDM, progres Kawasan, perkuatan teknologi, regulasi dan perijinan serta konektivitas Kawasan.

Di sektor industri, Kalimantan Selatan memiliki potensi industri baik yang berbasis sumber daya alam, khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil pertanian, maupun yang memanfaatkan dan mengandalkan teknologi seperti industri mesin serta industri kimia dasar yang potensial untuk dikembangkan. Pembangunan industri diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri dikembangkan secara bertahap melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian dan jasa, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam maupun budaya yang dapat dikembangkan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan kekayaan alam propinsi yang terdiri atas sungai, hutan, serta latar belakang sejarah dan keanekaragaman seni dan budaya. Pengembangan sektor pariwisata akan mendorong industri ekonomi kreatif dan menarik sektor-sektor lainnya seperti transportasi, akomodasi, dan rumah makan. Pengembangan sektor ini juga dapat mengungkit ekonomi rakyat.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah pengembangan infrastruktur Kalimantan Selatan difokuskan kepada optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota, pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai primer over seperti Bandar Udara, Pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer dan pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.





Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting untuk menyelaraskan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Arah pengembangan SDM Kalimantan Selatan difokuskan kepada SDM yang mendukung dalam sektor prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah Kalimantan Selatan yaitu industri, pertanian dan pangan, pariwisata, dan digital.

5.1.1 Arah Kebijakan Kewilayahan

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah mengembangkan dan memperkuat infrastruktur ekonomi pada enam Kawasan pusat pertumbuhan ekonomi provinsi. Keenam kawasan tersebut terbagi menjadi :

1. Kawasan pendukung sekitar Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur yang meliputi wilayah Banua Anam, Cantung Sengayam, Kawasan Industri Batulicin dan Kawasan Industri Jorong.
2. Kawasan pusat perdagangan meliputi lima daerah yaitu, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut (Banjarbakula).
3. Kawasan penyangga pangan untuk mendukung produksi pangan daerah dimana daerah yang akan dikembangkan adalah kawasan rawa batang banyu (Kabupaten Barito Kuala, sebagian Kab.Banjar, sebagian Kab. Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian Kabupaten Tabalong)
4. Kawasan strategis lingkungan dan pariwisata yang akan fokus pada kawasan Geopark Meratus dan Loksado.
5. Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mekar Putih di Kabupaten Kotabaru yang diharapkan dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, terutama dalam menunjang percepatan pembangunan ekonomi Ibukota Negara Baru di Kalimantan Timur.

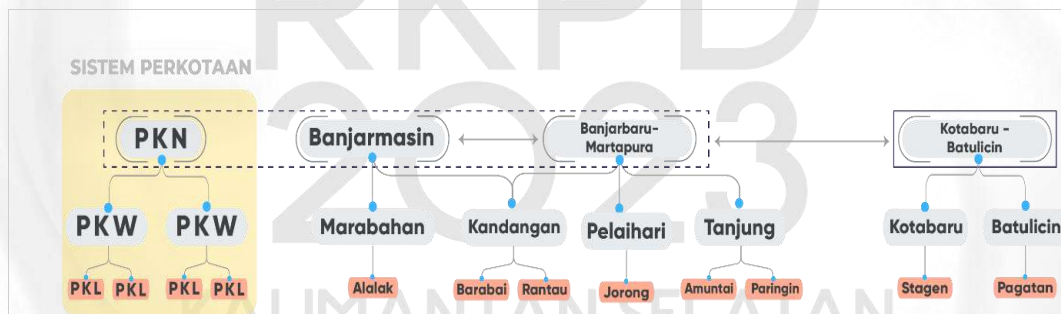




6. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diharapkan dapat mendorong Kalimantan Selatan menjadi sentra kelautan dan perikanan terpadu.

Dengan memperhatikan distribusi penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota, peran kawasan perkotaan yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) dibagi menjadi :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berada di wilayah provinsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di wilayah provinsi merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.



Gambar 5.1 Diagram Pohon Sistem Perkotaan di Kalimantan Selatan

Kawasan Metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula) berperan sebagai pusat di barat daya Kalimantan Selatan, yang fungsinya lebih menjadi gerbang dari aktifitas nasional. Lalu, akan ada jaringan jalan yang ditingkatkan dan juga dibangun sebagai koneksi antar pusat baru antara Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Masing-masing jalur ini dibentuk agar ada konektifitas untuk distribusi barang logistik bagi IKN dan Food Estate. Dengan koneksi antara Banjarbakula, Kandangan dan Batulicin, maka jaringan jalannya akan berbentuk seperti kupu-kupu yang akan menyatukan semua wilayah di Kalimantan Selatan.

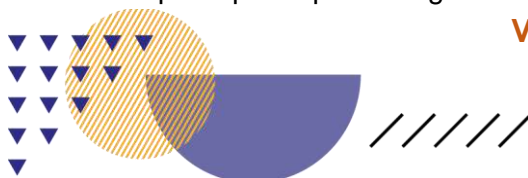


Kandangan yang berdekatan dengan Tanjung, Amuntai, Rantau dan Marahaban fungsinya akan ditingkatkan lagi menjadi titik pusat bergerak jaringan jalan yang nantinya akan terkoneksi menuju Food Estate dan IKN. Wilayah ini nantinya akan menjadi pusat baru yang lebih berkonsep pada alam karena posisinya yang berada pada jalur sungai dan rawa sehingga tidak memungkinkan untuk direncanakan sebagai kawasan yang padat bangunan dan penduduk dan berperan sebagai pusat di utara Kalimantan Selatan bergabung dengan Tanjung.

Pelabuhan di Kotabaru akan difungsikan untuk menangkap arus barang masuk maupun keluar Kalsel berupa barang-barang dari pasar global sedangkan yang di Banjarmasin hanya akan difokuskan sebagai tempat menangkap arus barang nasional. Lalu dengan adanya KEK Mekar Putih, maka wilayah ini berpotensi untuk menjadi kawasan baru yang difungsikan menjadi maritime center dan gerbang masuk menuju Pulau Kalimantan maupun yang ingin ke IKN. Mekar Putih, Kotabaru dan Batulicin akan dikonsepsikan menjadi Kota Sedang karena dari sistem perkotaan dan jumlah penduduknya sudah memenuhi kriteria. Kedua wilayah ini jika di gabungkan akan lebih fokus pada fungsinya sebagai pusat aktifitas ekonomi dan logistik karena posisi geografisnya yang berada di dekat ALKI II yang berbasis kemaritiman. Selain itu kawasan ini juga bisa menangkap arus barang baik masuk-keluar dari jalur internasional. Maka perannya nanti akan berbeda dengan Banjarmasin (nasional) sedangkan Kotabaru (internasional). Tapi dikarenakan posisi geografisnya yang memiliki cagar alam yaitu Terumbu Karang dan bukan berada di laut dalam, maka harus ada cara agar kapal-kapal besar tidak harus berlabuh di Kotabaru maupun Batulicin. Agar distribusi barang dari Kotabaru ini masuk dan terkoneksi dengan jaringan jalan di Kalimantan Selatan, memungkinkan dibangun jembatan untuk membuat aktifitas di kedua wilayah ini menjadi satu kesatuan.

5.2 GAMBARAN UMUM KINERJA MAKRO DAERAH

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2023.

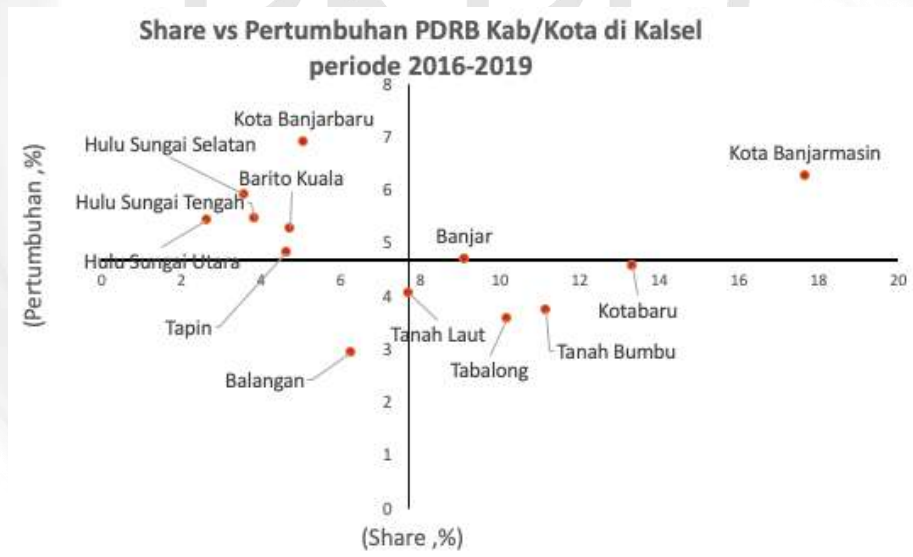




Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi, serta capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

5.2.1 Dimensi Perekonomian

Perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan secara regional dilihat dengan menganalisis share dan pertumbuhan PDRB dari 13 kabupaten/kota dengan membagi daerah ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai share dan pertumbuhan PDRB masing-masing. Perpotongan sumbu vertikal dan sumbu horizontal merupakan nilai share dan pertumbuhan rata-rata. Artinya kabupaten/kota yang berada di sebelah kanan sumbu vertikal (Kuadran 1 dan 2) merupakan kabupaten/kota yang memiliki share di atas share rata-rata seluruh kabupaten/kota, sedangkan kabupaten/kota yang berada di sebelah atas sumbu horizontal adalah kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan PDRB rata-rata di atas share rata-rata seluruh kabupaten/kota (kuadran 1 dan 4).



Gambar 5.2 Share dan Pertumbuhan PDRB Kab/Kota Tahun 2016-2019

Kuadran 1 adalah Kab/Kota dengan pertumbuhan dan share yang tinggi, yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Kuadran 2 merupakan Kab/Kota dengan pertumbuhan rendah namun share tinggi, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Kuadran 3 adalah daerah dengan pertumbuhan dan share yang rendah, yaitu Kabupaten Balangan. Sedangkan Kuadran 4 merupakan Kab/Kota dengan



pertumbuhan tinggi namun share rendah, yaitu Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tapin.

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran 1 dan 2 merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah-daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah wilayah yang berada pada kuadran 3. Pada kuadran ini tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

Sektor yang dikembangkan di setiap kabupaten/kota berbeda tergantung kepada potensi wilayah masing-masing. Untuk melihat sektor kunci dan potensi sektor yang dapat dikembangkan dilakukan analisis berdasarkan dua kriteria yaitu Location Quotient (LQ) dan Shift-Share Analysis (SSA). Data yang digunakan adalah data PDRB pada setiap Kabupaten dan Kota dan PDRB Kalimantan Selatan periode 2016 - 2019 untuk melihat kondisi terkini dalam lima tahun terakhir. Sektor kunci Kabupaten/Kota terpetakan pada empat kuadran yaitu Kuadran A yang menunjukkan daerah dengan sektor prioritas utama atau basis yang memiliki pergeseran sektoral yang cepat. Kuadran B yaitu daerah dengan sektor yang bukan sektor basis tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat. Kuadran C daerah dengan sektor prioritas ke 2, dimana sektor basis namun memiliki perkembangan sektoral yang lambat. Kuadran D daerah dengan sektor-sektor yang tidak diprioritaskan untuk dilakukan ekspansi karena sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan memiliki pergeseran sektoral yang lambat.

5.2.2 Dimensi Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator yang penting untuk melihat pembangunan dari sisi manusia. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM bersama dengan indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, rasio gini, dan pengangguran menjadi indikator penting dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) untuk memastikan arah pembangunan berjalan



sesuai koridor yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan daerah (RPJMD).

Ada tiga dimensi pembentuk IPM dalam penggambaran kualitas hidup manusia. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut adalah: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (decent standard of living). UNDP menggunakan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator pada dimensi standar hidup layak. Akan tetapi, data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah sehingga digunakan indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan sebagai alternatif. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari kegiatan ekonomi. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan lamanya waktu (dalam tahun) yang dapat dijalani oleh seseorang selama hidupnya. Dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator tersebut merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun, sementara rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal.

Tabel 5.1. Capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)				
		2019	2020	2021	PERTUMBUHAN	KATEGORI
1	KALIMANTAN SELATAN	70,72	70,91	71,28	0,28	TINGGI
2	KAB. TANAH LAUT	69,04	69,38	69,87	0,415	SEDANG
3	KAB. KOTABARU	68,95	68,86	69,13	0,09	SEDANG
4	KAB. BANJAR	68,94	69,18	69,89	0,475	SEDANG
5	KAB. BARITO KUALA	66,24	66,22	66,64	0,2	SEDANG
6	KAB. TAPIN	70,13	70,11	70,31	0,09	TINGGI
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	68,80	68,85	69,21	0,205	SEDANG





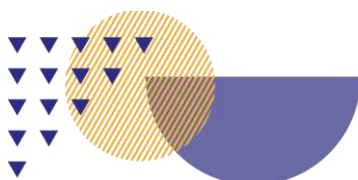
NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)				
		2019	2020	2021	PERTUMBUHAN	KATEGORI
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	68,80	68,84	69,05	0,125	SEDANG
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	65,49	65,59	66,12	0,315	SEDANG
10	KAB. TABALONG	71,78	72,19	72,6	0,41	TINGGI
11	KAB. TANAH BUMBU	70,5	70,71	71	0,25	TINGGI
12	KAB. BALANGAN	68,39	68,82	69,11	0,36	SEDANG
13	KOTA BANJARMASIN	77,16	77,10	77,57	0,205	TINGGI
14	KOTA BANJARBARU	78,83	79,22	79,1	0,135	TINGGI

Capaian IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan tahun 2019-2021 menunjukkan masih terjadinya disparitas pembangunan manusia. Lima daerah masuk kategori tinggi, 8 daerah masih pada kategori sedang. Pertumbuhan IPM paling rendah terjadi di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tapin, dengan tingkat pertumbuhan 0,09. Sedangkan pertumbuhan IPM tertinggi ada di Kabupaten Banjar sebesar 0,475.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik

Tabel 5.2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT KEMISKINAN			PERTUMBUHAN
		2019	2020	2021	
1	KALIMANTAN SELATAN	4,47	4,83	4,56	(0,27)
2	KAB. BANJAR	2,72	2,55	3,04	0,49
3	KAB. TAPIN	3,41	3,06	3,60	0,54
4	KAB. KOTABARU	4,49	4,22	4,26	0,04
5	KOTA BANJARBARU	4,30	4,01	4,40	0,39
6	KAB. TANAH LAUT	4,51	4,26	4,57	0,31
7	KAB. TANAH BUMBU	4,85	4,60	4,82	0,22
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	5,33	5,17	4,84	(0,33)
9	KOTA BANJARMASIN	4,20	4,39	4,89	0,50
10	KAB. BARITO KUALA	4,63	4,51	5,11	0,60
11	KAB. BALANGAN	5,55	5,32	6,07	0,75
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	5,93	5,64	6,18	0,54





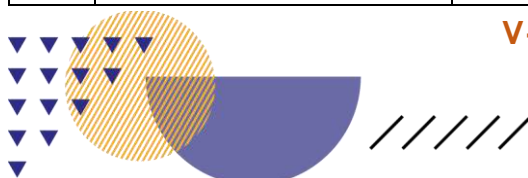
NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT KEMISKINAN			PERTUMBUHAN
		2019	2020	2021	
13	KAB. TABALONG	6,01	5,72	6,27	0,55
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	6,50	6,14	6,83	0,69

Kemiskinan Kalimantan Selatan pada tahun 2021 merupakan yang terendah di seluruh Indonesia. Turunnya angka kemiskinan Kalimantan Selatan terutama disumbang oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berhasil menurunkan kemiskinan di masa pandemi sebesar 0,33%. Sedangkan Kabupaten/Kota yang lainnya masih berjuang mengentaskan kemiskinan akibat pandemi. Tujuh daerah mengalami kenaikan jumlah orang miskin lebih dari 0,5%. Daerah dengan peningkatan jumlah orang miskin, hampir semuanya mengalami banjir besar di awal tahun yang banyak merusak perumukiman dan areal pertanian tempat mereka mencari nafkah. Ada satu daerah dengan peningkatan orang miskin sebesar 0,04% dan empat daerah dengan peningkatan kemiskinan berkisar dari 0,2 - 0,49%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan perbandingan antara jumlah pencari kerja terhadap angkatan kerja. Kondisi TPT pada tahun 2021 cenderung masih mengalami kenaikan, yang salah satu penyebabnya belum berakhirnya pandemi covid-19. Di seluruh kab/kota, tiga daerah mengalami penurunan TPT, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Balangan. Peningkatan TPT terbesar terjadi di Kab. Hulu Sungai Tengah. Sebagaimana kita ketahui, awal tahun 2021 kabupaten Hulu Sungai Tengah diterpa banjir besar yang mengakibatkan banyaknya warga kehilangan mata pencahariannya. Selain Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru juga mengalami peningkatan TPT lebih dari 0,50%, ini menandakan bahwa geliat pertambangan belum mampu menyerap tenaga kerja di kabupaten Kotabaru

Tabel 5.3. TPT Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

NO.	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			PERTUMBUHAN
		2019	2020	2021	
1	KALIMANTAN SELATAN	4,18	4,74	4,95	0,21
2	KAB. TANAH LAUT	3,41	3,57	3,52	-0,05
3	KAB. KOTABARU	4,94	4,96	5,57	0,61
4	KAB. BANJAR	3,01	3,87	3,98	0,11
5	KAB. BARITO KUALA	2,45	2,93	3,22	0,29
6	KAB. TAPIN	3,79	3,73	4,96	1,23
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2,43	2,24	2,44	0,20





NO.	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			PERTUMBUHAN
		2019	2020	2021	
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	3,63	2,96	3,76	0,80
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	3,48	4,49	4,80	0,31
10	KAB. TABALONG	3,29	3,07	3,43	0,36
11	KAB. TANAH BUMBU	6,18	6,95	6,83	-0,12
12	KAB. BALANGAN	2,33	2,46	2,44	-0,02
13	KOTA BANJARMASIN	7,69	8,32	8,47	0,15
14	KOTA BANJARBARU	4,93	5,54	5,70	0,16

Indikator Indeks Gini menggambarkan ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk. Secara umum, ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 dalam kategori rendah sampai moderat. Ketimpangan terendah ada di Kabupaten Tanah Laut, dan tertinggi di Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Tabel 5.4. Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2019-2021

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	GINI RASIO		
		2019	2020	2021
1	KALIMANTAN SELATAN	0,334	0,351	0,325
2	KAB. TANAH LAUT	0,271	0,250	0,232
3	KAB. KOTABARU	0,335	0,287	0,306
4	KAB. BANJAR	0,330	0,320	0,340
5	KAB. BARITO KUALA	0,285	0,277	0,260
6	KAB. TAPIN	0,270	0,270	0,289
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,288	0,300	0,275
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,288	0,285	0,331
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,325	0,319	-
10	KAB. TABALONG	0,306	0,346	0,288
11	KAB. TANAH BUMBU	0,346	0,300	0,281
12	KAB. BALANGAN	0,273	0,298	0,277
13	KOTA BANJARMASIN	0,370	0,340	0,350
14	KOTA BANJARBARU	0,357	0,381	0,361





5.3 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA

5.3.1 Kota Banjarmasin

Berdasarkan tata ruang, Banjarmasin merupakan bagian dari Metropolitan Banjar Bakula menjadi pusat kegiatan nasional yang berperan sebagai pusat yang fungsinya lebih menjadi gerbang dari aktifitas nasional. Sebagai kota dapat diidentifikasi bahwa mayoritas sektor ekonomi di Kota Banjarmasin adalah sektor kunci yang berdayasaing. Tingkat pertumbuhan dan share PDRB yang tinggi menjadikan Banjarmasin sebagai tulang punggung perekonomian daerah Kalimantan Selatan. Beberapa sektor mencakup Industri Pengolahan, pengadaan listrik dan gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Konstruksi, Penyediaan akomodasi dan makan minum, konstruksi, Real estate, Jasa perusahaan, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta Jasa lainnya.

Dapat dikatakan perekonomian kota Banjarmasin bergantung pada sektor *manufacturing* dan jasa. Sektor yang masih merupakan sektor basis namun memiliki perkembangan sektoral yang lambat yaitu Perdagangan besar dan eceran, Informasi dan komunikasi, serta Jasa keuangan dan asuransi. Selanjutnya, beberapa sektor yang berada pada yang bukan merupakan sektor basis tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat di antaranya yaitu, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Dari sisi pembangunan manusia, Kota Banjarmasin memiliki angka IPM tertinggi kedua, setelah Kota Banjarbaru. Harapan Lama sekolah di Kota Banjarmasin telah melampaui angka 13 tahun, artinya setiap penduduk yang baru lahir memiliki kesempatan untuk bersekolah sampai dengan bangku kuliah, minimal diploma I. Rata-rata lama sekolah di Kota Banjarmasin berada pada angka 10,2 tahun atau baru sampai dengan kelas 1 SMA, artinya masih banyak anak-anak yang putus sekolah yang perlu diidentifikasi penyebabnya. Akibat pandemi, persentase orang miskin meningkat cukup signifikan seiring dengan meningkatnya angka pengangguran.





Berdasarkan analisa kerangka ekonomi makro daerah dan rencana tata ruang wilayah, arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarmasin tahun 2023, antara lain:

1. Sebagai Kota yang berfokus pada kegiatan penduduknya (Program kegiatan diarahkan ke penataan permukiman, sarana dan prasarana transportasi, perdagangan dan jasa dan pusat ekonomi).
2. Pengembangan dan pembinaan destinasi wisata;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi UKM dan pembinaan wirausaha baru;
4. Dukungan terhadap pembangunan pusat distribusi regional dan pasar rakyat.
5. Pengembangan industri pengolahan.
6. Program-program penanggulangan kemiskinan

5.3.2 Kota Banjarbaru

Banjarbaru yang baru saja ditetapkan sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan berperan sebagai pusat pemerintahan yang fungsinya menjadi pusat aktivitas kegiatan pemerintahan. Perekonomian Kota Banjarbaru berada di kuadran 3, artinya pertumbuhan cukup tinggi namun share terhadap PDRB Provinsi rendah. Mayoritas sektor ekonomi di Kota Banjarbaru merupakan sektor kunci yang berdayasaing. Beberapa sektor yang diidentifikasi sebagai leading sector dan sumber pertumbuhan mencakup Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Informasi dan komunikasi, Real estate, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan Jasa lainnya. Perekonomian kota Banjarmasin bertumpu pada penyediaan jasa.

Kualitas daya saing sumberdaya manusia kota Banjarbaru merupakan yang terbaik di Kalimantan Selatan, dengan angka IPM 79,26, dari 3 dimensi pembentuk IPM, hanya angka pengeluaran per kapita yang lebih kecil dari Kota Banjarmasin. Angka kemiskinan Kota Banjarbaru cukup rendah, meskipun angka pengangguran tinggi akibat pandemi covid. Gini Ratio Kota Banjarbaru cukup tinggi, berada di



posisi kedua dibandingkan 13 kabupaten/kota di Kalsel. Artinya, perbedaan pendapatan penduduk masih cukup tinggi.

Berdasar analisa kerangka ekonomi makro dan kewilayahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarbaru tahun 2023, antara lain:

1. Sebagai bagian dari Metropolitan Banjarbakula dan ibukota provinsi, fungsi dari kota berfokus pada kegiatan permukiman, sarana dan prasarana, transportasi, perdagangan dan jasa dan perkantoran pemerintah.
2. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan wisata budaya Banjar, pendulangan intan, wisata buatan dan pelaksanaan festival budaya.
3. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan melanjutkan program/kegiatan SPAM regional dan TPA regional Banjarbakula
4. Pada bidang koperasi, UMKM dengan pembinaan dan pelatihan menjadi wirausaha baru.
5. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pembangunan dan rehabilitasi SMK pendukung pariwisata dan penerbangan

5.3.3 Kabupaten Banjar

Sektor basis yang memiliki pergeseran sektoral yang cepat di Kabupaten Banjar yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta jasa pendidikan. Sektor yang masih merupakan sektor basis namun memiliki perkembangan sektoral yang lambat yaitu konstruksi; pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Sedangkan sektor yang bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Banjar tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat di antaranya yaitu industri pengolahan, transportasi dan pergudangan. Pertambangan dan penggalian di Kabupaten Banjar berada pada kuadran D menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak diprioritaskan untuk dilakukan ekspansi karena sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan memiliki pergeseran sektoral yang lambat. Sektor





lainnya yang berada di kuadran D yaitu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan.

Kualitas SDM dilihat dari dimensi pendidikan pada tahun 2021 masih rendah dengan angka RLS 7,5 atau terendah di Kalimantan Selatan. Meskipun sarana prasarana pendidikan yang ditunjukkan oleh angka HLS cukup baik 12,7, hal ini menggambarkan masih banyak masyarakat yang mengabaikan pendidikan formal. Kabupaten Banjar dikenal juga dengan serambi Mekah, dimana masih ditemukan pondok-pondok pesantren yang dikelola secara informal, sehingga para santri lulusan pondok tersebut walaupun menempuh pendidikan lebih dari enam tahun masih belum diperhitungkan dalam penghitungan angka IPM.

Kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Banjar merupakan yang terendah di Kalimantan Selatan. Ada 3,04% penduduk miskin di Kabupaten Banjar, dengan tingkat pengangguran terbuka 3,98%. Kesenjangan pendapatan di Kabupaten Banjar juga cukup tinggi, yaitu 0,344.

Dengan kondisi sebagaimana diuraikan sebelumnya, arah kebijakan provinsi untuk perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Banjar tahun 2023, antara lain:

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pariwisata; dan program kejar paket B-C.
2. Pada bidang koperasi UMKM dan perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil hasil hutan.
3. Pada bidang pekerjaan umum dan pertanahan dengan program/kegiatan penyelesaian TORA; dan sertifikasi lahan hutan.
4. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pembangunan masyarakat desa; dan pemberdayaan kelompok tani.
5. Pada bidang kehutanan dengan program/kegiatan penyediaan bibit pohon, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya hutan; dan pelaksanaan perhutanan sosial.
6. Pada bidang pertanian dengan pengembangan kawasan lahan basah komoditas unggulan padi dan hortikultura, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tadah hujan, sentra produksi pangan dan sentra agribisnis hortikultura.
7. Pengembangan sentra industri dan perdagangan batu permata





5.3.4 Kabupaten Tanah Laut

Berdasar analisis SSA dan LQ, Kabupaten Tanah Laut tidak memiliki sektor basis yang memiliki pergeseran sektoral yang cepat. Sektor basis di Kabupaten Tanah Laut memiliki perkembangan sektoral yang lambat yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; serta perdagangan besar dan eceran. Sedangkan untuk sektor yang bukan merupakan sektor basis tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat di antaranya yaitu sektor industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa pendidikan. Sektor-sektor yang bukan sektor basis dan memiliki pergeseran sektoral yang lambat yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; real estate; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya.

Kualitas sumberdaya manusia masih dalam kategori sedang, yaitu 69,87 pada tahun 2021. Persentase orang miskin di Tanah Laut hampir sama dengan persentase Provinsi yaitu 4,54% dengan TPT sebesar 3,52%. Rendahnya pengangguran meskipun rata-rata lama sekolah masih rendah menunjukkan bahwa sektor yang banyak menyerap tenaga kerja masih banyak di sektor informal. Perbedaan pendapatan di Tanah Laut cukup kecil, yaitu 0,232 atau terendah di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data-data tersebut, kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kab. Tanah Laut diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor yang memiliki pergeseran sektoral cepat, sebagai berikut :

1. Industri pengolahan, dengan dukungan pada KI Jorong yang telah ditetapkan sebagai proyek prioritas pemerintah;
2. Pengadaan listrik dan gas, dengan dukungan pembangunan PLTU asam-asam unit 5, 6 dan 7; dan dukungan pembangunan PLT Bayu.
3. Bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
4. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; pemantapan pelaksanaan IB; dan pengendalian pemotongan ternak produktif.





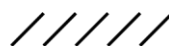
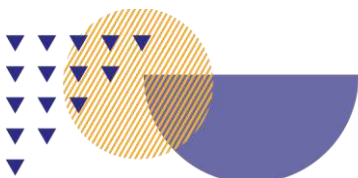
5. Bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan peningkatan perikanan tangkap; dan pembangunan unit pengolahan ikan.
6. Bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.

5.3.5 Kabupaten Tanah Bumbu

Dapat diidentifikasi bahwa sektor kunci di Kabupaten Tanah Bumbu adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara spesifik, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor pertanian merupakan sektor basis namun memiliki perkembangan sektoral yang lambat. Hal ini menjadi justifikasi bagi urgensi akselerasi sektor baru di dalam perekonomian daerah. Daya saing sektor Kabupaten Tanah Bumbu terkonsentrasi di Kuadran B yang merepresentasikan sektor non basis tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat di antaranya yaitu Industri Pengolahan, Pengadaan listrik dan gas, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Perdagangan besar dan eceran, Transportasi dan pergudangan, Jasa keuangan dan asuransi, Real estate, Jasa perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan Jasa lainnya. Skor SSA > 0, menunjukkan bahwa mayoritas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu tersebut didorong oleh push factor yang menyebabkan sektor tersebut lebih cepat perkembangannya dibanding sektor yang sama di daerah lainnya

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Tanah Bumbu tahun 2023, antara lain:P

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan pembangunan jalan bebas hambatan Batulicin – Banjarbaru;
3. Pembangunan jembatan penghubung pulau Kalimantan dengan pulau laut; dan pembangunan bendungan kusan.





4. Untuk bidang perhubungan dengan dukungan pengembangan bandara bersujud; dan dukungan pengembangan pelabuhan.
5. Pada bidang perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri batulicin.
6. Pengembangan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan.
7. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan dan kelautan.

5.3.6 Kabupaten Kotabaru

Analisis shift share dan LQ Kabupaten Kotabaru menunjukkan bahwa sektor basis prioritas di Kabupaten Kotabaru adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Sektor yang bukan sektor basis namun pergeserannya cepat yaitu pertambangan dan penggalian; konstruksi; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan sektor bukan basis dan bergerak lambat yaitu sektor pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa lainnya.

Berdasarkan analisa tersebut, arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Kotabaru sebagai berikut:

1. Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan mengembangkan Sentra Kelautan Terpadu sebagai upaya peningkatan pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian secara luas;
2. Bidang industri pengolahan, dengan mendukung pengembangan KEK Mekar Putih;

5.3.7 Kabupaten Tapin

Hasil plot analisis shift share dan LQ Kabupaten Tapin menunjukkan bahwa pada periode 2016 s.d. 2019 sektor yang merupakan leading sector dan sumber pertumbuhan perekonomian yaitu pertambangan dan penggalian dan jasa pendidikan. Sektor yang masih merupakan sektor basis namun memiliki perkembangan sektoral yang lambat yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan





perikanan; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa pendidikan. Sektor jasa keuangan dan asuransi berada di kuadran B yang menunjukkan bahwa sektor tersebut bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Tapin tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat. Sedangkan sektor yang berada di kuadran D yaitu sektor informasi dan komunikasi; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; real estate; serta jasa perusahaan.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tapin tahun 2019, antara lain:

1. Pendidikan vokasi/SMK pertanian
2. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; dan pengembangan budidaya ikan lokal.
3. Pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian untuk bidang koperasi UKM dan perindustrian.
4. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan dukungan pembangunan bendungan tapin; dan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.
5. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
6. Pengembangan pada kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit, kopi, lada dan karet serta mengembangkan kawasan budidaya peternakan unggas, kambing dan sapi.

5.3.8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Hasil analisis shift share dan LQ Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan bahwa pada periode tersebut sektor yang berada di kuadran A yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya. Hal ini



menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan leading sector yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada prioritas II yaitu, sektor yang masih merupakan sektor basis namun memiliki perkembangan sektoral yang lambat berada pada kuadran C yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; real estate; serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sedangkan untuk kuadran B yaitu sektor yang bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat diantaranya yaitu, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019, antara lain:

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat; dan peningkatan jalan kandangan-lumpangi-batulicin.
2. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pelaksanaan festival bamboo rafting; pengembangan akomodasi pendukung pariwisata; penyiapan daya Tarik wisata; dan pengusulan taman nasional loksado.
3. Pada bidang koperasi UKM dan perdagangan dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pendukung pariwisata.
4. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu, sentra penghasil hutan non kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.

5.3.9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Hasil plot analisis shift share dan LQ Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa pada periode tersebut sektor yang menjadi leading sector dan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sektor industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; informasi dan komunikasi; real estate serta jasa pendidikan. Sektor pertanian kehutanan dan perikanan berada di kuadran C yang menunjukkan bahwa sektor ini masih merupakan sektor basis namun memiliki perkembangan sektoral yang lambat. Sektor lain yang juga berada di kuadran C yaitu konstruksi; penyediaan akomodasi dan makan minum; administrasi pemerintahan,





pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya. Sektor pertambangan dan penggalian serta jasa keuangan dan asuransi meskipun bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2019, antara lain:

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
2. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
3. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian.
4. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan bendungan batang alai; dan pembangunan pengendali banjir.
5. Pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program/kegiatan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan SDA dan LH.
6. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata

5.3.10 Kabupaten Hulu Sungai Utara

Hasil plot analisis shift share dan LQ Kabupaten Hulu Sungai Utara Periode 2016 s.d. 2019 terpetakan pada Gambar 35. Hasil menunjukkan bahwa pada periode tersebut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi leading sector yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor yang masih merupakan sektor basis namun memiliki





perkembangan sektoral yang lambat yaitu konstruksi; transportasi dan pergudangan; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; serta jasa lainnya. Sedangkan sektor yang bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Hulu Sungai Utara tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat di antaranya yaitu, pertambangan dan penggalian; serta jasa keuangan dan asuransi. Sektor-sektor yang tidak diprioritaskan untuk dilakukan ekspansi karena sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan memiliki pergeseran sektoral yang lambat yaitu industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; serta jasa perusahaan

Arah Kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), antara lain:

1. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; peningkatan produksi daging unggas dan petelur; serta pengendalian pemotongan ternak produktif.
2. Pada bidang kesehatan dengan program/kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; pelayanan kesehatan inklusi, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan usia dini.
3. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian; dan program kejar paket b-c.
4. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; pengembangan budidaya ikan lokal papuyu dan haruan.
5. Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkaran barat Kalsel.
6. Pada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal.
7. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan peternakan dan perikanan.
8. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas



sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.

9. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan ecotourism swimming buffalo dan orang utan.

5.3.11 Kabupaten Balangan

Berdasarkan pemetaan dapat diidentifikasi bahwa Kabupaten Balangan tidak memiliki sektor kunci. Sedangkan untuk kuadran B yaitu sektor yang bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Balangan tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat di antaranya yaitu, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Jasa keuangan dan asuransi, real estate dan Jasa perusahaan. Selanjutnya, tipologi kuadran D merupakan daerah dengan sektor-sektor yang tidak diprioritaskan untuk dilakukan ekspansi karena sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan memiliki pergeseran sektoral yang lambat. Cukup banyak sektor yang diklasifikasikan dalam tipologi tersebut yakni pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

1. Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi di Kabupaten Balangan pada tahun 2019, antara lain:
2. Bidang pendidikan dan tenaga kerja dengan pendidikan vokasi/SMK pertanian dan program kejar paket B-C.
3. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
4. Pada bidang pertanian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
5. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan.





5.3.12 Kabupaten Tabalong

Hasil analisis shift share dan LQ Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa sektor kunci yang berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tabalong adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor yang masih merupakan sektor basis namun memiliki perkembangan sektoral yang lambat yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan sektor yang bukan merupakan sektor basis di Kabupaten Tabalong tetapi memiliki perkembangan sektoral yang cepat di antaranya yaitu, pertambangan dan penggalian,; industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan,; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa Pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya. Sektor-sektor yang tidak diprioritaskan untuk dilakukan ekspansi karena sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan memiliki pergeseran sektoral yang lambat yaitu pengadaan listrik dan gas; jasa perusahaan; serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tabalong pada tahun 2019, antara lain:

1. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin.
3. Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Tabalong.
4. Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkar barat.
5. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
6. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.



5.3.13 Kabupaten Barito Kuala

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Barito Kuala tahun 2019, antara lain:

1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman; dan pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian.
2. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
3. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan dukungan pengembangan jalan lingkar barat kalsel; dan rehabilitasi jalan dan jembatan.
4. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian/perkebunan.
5. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan hasil hutan, perabot dan kayu.

RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN





Tabel 5.5. Kinerja Makro Kabupaten/Kota Tahun 2021 Dan Target Kinerja Tahun 2022-2023

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA			TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA			PERTUMBUHAN EKONOMI			TINGKAT KEMISKINAN			GINI RASIO		
		2021	2022	TARGET 2023	2021	2022	TARGET 2023	2021	2022	TARGET 2023	2021	2022	TARGET 2023	2021	2022	TARGET 2023
1	KALIMANTAN SELATAN	71,28	71,70	72,20	4,95	4,22	4,22	3,48	4,5 - 5,2	4,5-5,2	4,56	4,60 - 4,40	4,60-4,40	0,325	0,324	0,326
2	KAB. TANAH LAUT	69,87	70 - 70,19	70,4 - 70,73	3,52	3,21 - 2,50	2,8	3,47	4,0 - 5,0	4,50	4,57	4,35 - 4,30	4,33	0,232	0,220	0,225
3	KAB. KOTABARU	69,13	69,67	69,98 - 70,31	5,57	4,84	4,84	3,36	4,05-5,5	5,00	4,26	4,07	4,07	0,306	0,288	0,288
4	KAB. BANJAR	69,89	70,18	70,64 - 70,97	3,98	3,09	3,1	3,21	2,80	3,42 - 4,51	3,04	2,72	2,72	0,340	0,312	0,310
5	KAB. BARITO KUALA	66,64	67,06	67,48 - 67,81	3,22	2,98	2,93	1,79	4,13	4,23	5,11	4,68	4,68	0,260	0,260	0,255
6	KAB. TAPIN	70,31	71,1 - 72,4	71,7 - 72,03	4,96	4,21-3,35	3,65	3,41	4,2	4,50	3,6	3,1-3,3	3,1	0,289	0,250	0,250
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	69,21	71,02-71,86	72,2 - 72,53	2,44	1,86-1,75	1,8	4,18	5,50-5,90	5,75	4,84	4,65-4,28	4,4	0,275	0,265-0,260	0,263
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	69,05	70,00	70,6 - 70,93	3,76	3,6	3,6	3,01	4 - 5,5	5,00	6,18	6,01	5,8	0,331	0,298	0,298
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	66,12	66,50	66,9 - 67,5	4,80	4,50	4,1	3,23	4,1	5,00	6,83	6,73	6,5	-	0,313	0,310
10	KAB. TABALONG	72,60	71,70	74,33 - 74,66	3,43	3,0 - 4,0	3,2	3,28	2,2 -3,0	4,00	6,27	5,60	5,5	0,288	0,28-0,31	0,284
11	KAB. TANAH BUMBU	71,00	71,00 - 71,36	72,21 - 72,57	6,83	5,87-5,69	5,87 - 5,66	4,23	4,51-5,00	4,80	4,82	4,18-4,04	4,1	0,281	0,280	0,280
12	KAB. BALANGAN	69,11	69,71	70,16 - 70,49	2,44	2,40	2,4	3,26	3,3	3,30 - 3,50	6,07	5,7-5,5	5,2	0,277	0,28 - 0,26	0,260
13	KOTA BANJARMASIN	77,57	77,49 - 77,85	78,35 - 78,68	8,47	6,21-8,44	7,8 - 6,21	3,41	4,50 - 5,00	5,00	4,89	4,35	4,35	0,35	0,310	0,310
14	KOTA BANJARBARU	79,10	79,35	79,5 - 79,83	5,70	5,09	5,09 - 4,93	3,32	4-5	4,50	4,4	4,30	4,20	0,361	0,355	0,350



Bab-VI

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah



PKPD
2023

KALIMANTAN SELATAN



BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah berpedoman pada RPJPD Provinsi 2005-2025, memperhatikan RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2023 serta RPJMD 2021-2026. Selain hal tersebut Penyusunan RKPD 2023 memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan aspek-aspek teknokratik (Holistik, Tematik, Integrasi dan Spasial) dan politis yang antara lain memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil masukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Pusat, masyarakat, dan masukan dari hasil proses perencanaan secara keseluruhan maka direncanakan program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut.

6.1 Prioritas Dan Sub Prioritas RKPD Tahun 2023

Bab Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah ini mencakup program prioritas dan kegiatan prioritas, indikator kinerja serta pagu pendanaan indikatif Tahun 2023. Sesuai tema RKPD Tahun 2023 **“Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan”** maka pada Tahun 2023 ditetapkan 6 Prioritas RKPD 2023 dibagi menjadi 23 sub prioritas. Prioritas dan sub prioritas tersebut antara lain:

1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2023 yaitu:

- a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
- c. Penurunan Penyakit Melalui Germas
- d. Pengendalian Prevalensi Stunting
- e. Penurunan Angka Pernikahan Anak
- f. Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
- g. Peningkatan Prestasi Olahraga





2. OPTIMALISASI SEKTOR INDUSTRI, UMKM, PERTANIAN DAN PARIWISATA

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2023 yaitu:

- a. Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan
- b. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
- c. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
- d. Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
- e. Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah

3. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2023 yaitu:

- a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
- c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya

4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2023 yaitu:

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi
- b. Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
- c. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
- d. Pengembangan Satu Data Kalsel

5. MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA

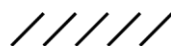
Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2023 yaitu:

- a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- b. Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

6. MEWUJUDKAN KALSEL SEBAGAI GERBANG IBU KOTA NEGARA DAN SEBAGAI PENDUKUNG FOOD ESTATE

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2023 yaitu:

- a. Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN





b. Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN

Berdasarkan tema, sub tema, prioritas, dan sub prioritas di atas maka ditetapkan program-program prioritas sebagai berikut:

**PRIORITAS #1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**

1. Sub Prioritas Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
 - c. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2. Sub Prioritas Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
3. Sub Prioritas Penurunan Penyakit Melalui Germas dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 - c. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
 - d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
4. Sub Prioritas Pengendalian Prevalensi Stunting dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - b. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 - c. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - d. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK





- e. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - f. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - g. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 - h. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - i. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - j. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - k. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 - l. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
5. Sub Prioritas Penurunan Angka Pernikahan Anak dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - b. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
6. Sub Prioritas Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
 - c. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
 - d. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
 - e. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
 - f. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
 - g. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
 - h. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
7. Sub Prioritas Peningkatan Prestasi Olahraga dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
- PRIORITAS #2 OPTIMALISASI SEKTOR INDUSTRI, UMKM, PERTANIAN DAN PARIWISATA**
1. Sub Prioritas Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan dengan program prioritas sebagai berikut:

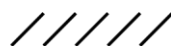




- a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
- b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
- c. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
- d. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
- e. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
- f. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
- g. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
- h. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
- i. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
- j. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
- k. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
- l. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
- m. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
- n. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
- o. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
- p. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- q. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
- r. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- s. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- t. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

2. Sub Prioritas Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dengan program prioritas sebagai berikut:

- a. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA





- b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - c. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - d. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - e. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - g. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3. Sub Prioritas Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - b. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
 - d. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - e. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
 - f. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - g. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - h. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
4. Sub Prioritas Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - c. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
 - d. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - e. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 - f. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
 - g. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN





5. Sub Prioritas Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah dengan program prioritas sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
- b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
- c. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- d. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
- e. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

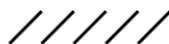
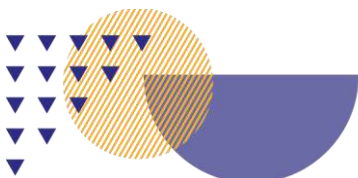
PRIORITAS #3 MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

1. Sub Prioritas Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar dengan program prioritas sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
- b. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
- c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
- d. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
- e. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
- f. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
- g. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
- h. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
- i. PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
- j. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
- k. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2. Sub Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah dengan program prioritas sebagai berikut:

- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

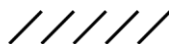
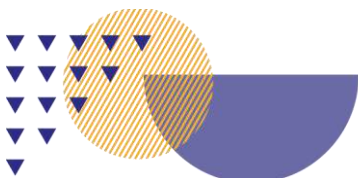




- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - c. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
 - d. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
3. Sub Prioritas Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukungnya dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - c. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 - d. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
 - e. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
 - f. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
 - g. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
 - h. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
 - i. PROGRAM PENATAAN DESA

PRIORITAS #4 MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK

1. Sub Prioritas Penguatan Reformasi Birokrasi dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 - b. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
 - c. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - d. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 - g. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 - h. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 - i. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
2. Sub Prioritas Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif dengan program prioritas sebagai berikut:

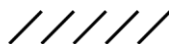
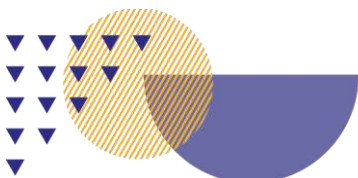




- a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - b. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 - c. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
 - d. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
3. Sub Prioritas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
 - c. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 - d. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4. Sub Prioritas Pengembangan Satu Data Kalsel dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 - b. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

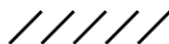
**PRIORITAS #5 MENINGKATKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN BENCANA**

1. Sub Prioritas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - c. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - d. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
 - e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)





- f. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - g. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - h. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - i. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - j. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - k. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - l. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
 - m. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
 - n. PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
 - o. PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
 - p. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - q. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - r. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 - s. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
2. Sub Prioritas Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 - d. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
 - e. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN



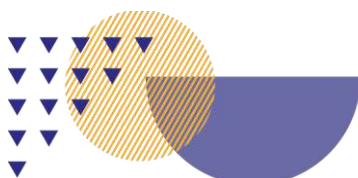


**PRIORITAS #6 MEWUJUDKAN KALSEL SEBAGAI GERBANG IBU KOTA
NEGARA SEBAGAI PENDUKUNG FOOD ESTATE**

1. Sub Prioritas Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
 - b. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - c. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - d. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - e. PENYULUHAN PERTANIAN
 - f. PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 - g. PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2. Sub Prioritas Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 - c. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

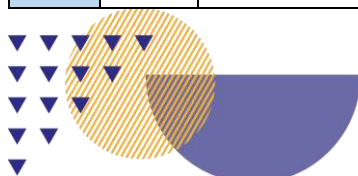


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
TEMA : Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan				
#01	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing			
	01.01	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	528.668.500.130
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	587.292.700
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.175.392.800
	01.02	Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.168.332.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	18.579.999.958
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	525.000.000
	01.03	Penurunan Penyakit Melalui Germas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.580.464.772
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	35.170.299.731
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	405.235.600
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.661.400.300
	01.04	Pengendalian Prevalensi Stunting	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.681.500.000
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.680.115.550
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.580.464.772
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	804.457.000
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.168.332.000
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.205.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			793.598.100	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			749.016.400	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.837.637.400			



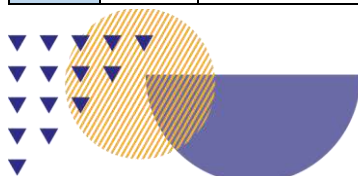


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.274.740.270
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.986.565.290
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.241.053.100
	01.05	Penurunan Angka Pernikahan Anak	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	749.016.400
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	804.457.000
	01.06	Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.686.302.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	1.200.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	4.822.000.000
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.955.000.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	4.466.899.380
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	6.026.302.100
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	667.365.800
	01.07	Peningkatan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.499.949.300
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	116.027.389.000
	#02	Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata		
02.01	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	375.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.681.500.000	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	457.500.000	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	650.000.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	55.397.303.645	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	18.961.954.000	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	1.293.315.900	



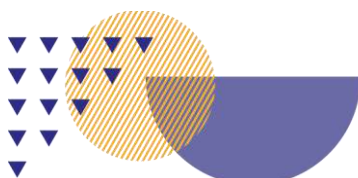


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3.586.198.905
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	227.531.100
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.682.702.300
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.937.520.850
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.680.115.550
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	361.303.400
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	433.201.400
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	216.351.900
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	9.322.672.256
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	148.218.000
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	670.119.600
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.028.901.800
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	603.761.000
			02.02	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.847.786.000		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	885.399.300		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.012.937.300		
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.834.169.700		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	528.668.500.130		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	587.292.700		
	02.03	Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.058.265.429
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.199.999.612



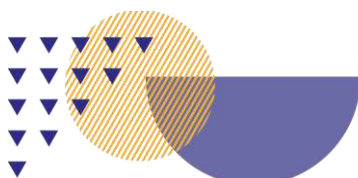


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
		berbasis Geopark	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	649.999.800
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.469.991.600
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	4.081.531.815
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	382.999.955.504
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.841.899.000
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	44.363.628.200
			02.04	Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.155.270.800		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	589.950.000		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	885.399.300		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.680.115.550		
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	7.983.151.200		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	18.579.999.958		
	02.05	Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	456.375.900
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	763.166.600
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.163.635.100
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	184.980.700
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	212.545.800
	#03	Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian Daerah		
	03.01	Pemenuhan Pencapaian	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.837.637.400



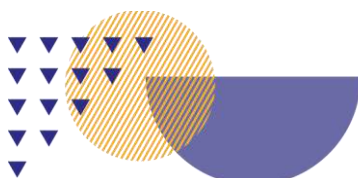


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / PROGRAM PRIORITAS				PAGU		
		Infrastruktur Dasar	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.986.565.290		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.274.740.270		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	781.700.000		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	17.560.000.000		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.637.023.600		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.805.000.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.519.605.500		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	90.763.341.965		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	581.946.400		
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.673.288.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.241.053.100		
			03.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	382.999.955.504
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.841.899.000
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.859.186.600					
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	700.000.000					
03.03	Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	20.000.000.000			
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	90.763.341.965			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	52.009.477.540			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	44.363.628.200			
		PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	1.320.590.000			
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.814.247.260			
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	139.410.008.367			



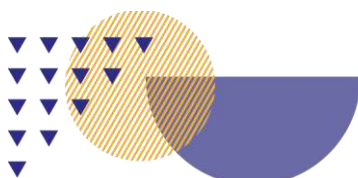


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	901.949.900
			PROGRAM PENATAAN DESA	82.257.000
#04	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik			
	04.01	Penguatan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.813.508.300
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.618.337.400
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.831.931.400
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.643.667.270
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.215.322.854.332
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.776.384.300
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	16.514.759.700
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	11.682.596.950
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	9.451.953.200
	04.02	Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.205.000.000
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	793.598.100
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	284.733.300
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	209.369.400
	04.03	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.677.995.400
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.519.605.500
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	625.385.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.221.678.589
	04.04	Pengembangan Satu Data Kassel	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	625.385.000
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.831.931.400



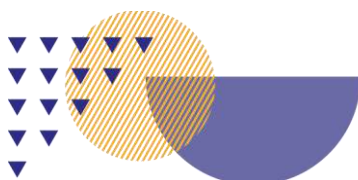


TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / PROGRAM PRIORITAS			PAGU
#05	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana		
05.01	Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	460.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8.398.127.900
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.221.534.600
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	384.155.200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	600.000.000
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	250.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.161.154.000
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	396.244.600
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	290.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.241.053.100
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.208.692.200
		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	400.000.000
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	4.081.531.815
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	586.185.000
		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	814.491.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	900.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	3.825.518.000		





TEMA / SUB TEMA / PRIORITAS / SUB PRIORITAS / PROGRAM PRIORITAS				PAGU
	05.02	Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	2.200.000.000
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.750.370.580
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	72.580.464.772
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	90.763.341.965
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	17.560.000.000
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.073.160.900
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.439.999.600
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	23.208.692.200	
#06	Mewujudkan Kalsel Sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan Sebagai Pendukung Food Estate			
	06.01	Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	375.000.000
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.681.500.000
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	55.397.303.645
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	18.961.954.000
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	8.783.585.399
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.682.702.300
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.937.520.850
	06.02	Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	382.999.955.504
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	16.841.899.000
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	700.000.000



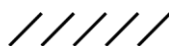


6.2 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Tahun 2023 untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan pada Buku II RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Untuk pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2023 selain bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan dapat juga dibiayai dari CSR, KPBU, dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Untuk program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 secara terinci dapat dilihat pada buku II RKPD tahun 2023.

RKPD
2023
KALIMANTAN SELATAN



Bab-VII

**Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah**



RKPD
2023

KALIMANTAN SELATAN

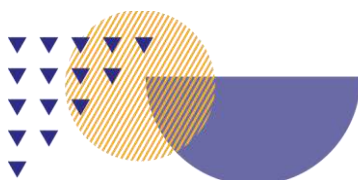


BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada RPJMD. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian





kinerja pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

7.1 Indikator Kinerja Makro Daerah

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Memperhatikan dampak Pandemi COVID 19

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2023 dapat diuraikan dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Makro Daerah

No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2021)	Target Thn 2022 (RPJMD 2021-2026)	RKPD Tahun 2022	Target Capaian Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	Kalimantan Selatan	71,28	72,46	71,2 - 72,6	72,95
	Nasional (RKP)				73,29 – 73,35
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
	Kalimantan Selatan	4,95	4,39	3,9 – 4,2	4,22
	Nasional (RKP)				5,3 – 6,0
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	Kalimantan Selatan	3,48	4,0 – 4,5	4,0 – 4,5	4,5 – 5,2





No	Indikator Kinerja Makro Daerah	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2021)	Target Thn 2022 (RPJMD 2021-2026)	RKPD Tahun 2022	Target Capaian Tahun 2023
	Nasional (RKP)				5,3 – 5,9
4	Tingkat Kemiskinan (%)				
	Kalimantan Selatan	4,56	4,80 -4,60	3,99 -4,35	4,50 -4,00
	Nasional (RKP)				7,0 -8,0
5	Indeks Gini				
	Kalimantan Selatan	0,325	0,328	0,330	0,324
	Nasional (RKP)				0,375-0,378
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)				
	Kalimantan Selatan	N/A	21	11.09	22,2
	Nasional (RKP)				27,02
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
	Kalimantan Selatan	71,03	70,58	62,63	70,9
	Nasional (RKP)				69,48

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026

7.2 Indikator Kinerja Utama

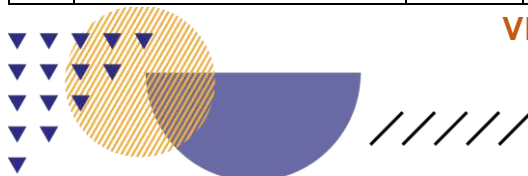
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Tabel 7.2.



Tabel 7.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2021)	Target Capaian Thn 2023	SKPD
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	69,1 (sumber: Website Kemenag)	73,32	Biro Kesra, Bakesbangpol
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,28	72,95	Disdikbud, Dinkes, RSUD Ulin, RSUD MAS, RSJ Sambang Lihum, RSGM GHA
3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	51,33	52,665	DP3A, Dispora, Disdikbud, Dinkes, Disdukcapil KB, Disnakertrans, Diskop & UMKM
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,48	4,5 - 5,2	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPH, Disbunnak, Dislutkan, Dinas Perindustrian, Disdag, Dispar, Dishut, DPMPSTSP, Biro Perekonomian
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,56	4,60 -4,40	Dinas Sosial, Dinkop & UKM, DPMD, Biro Kesra, Biro Perekonomian, Disdag, Dinas TPH, Disbunnak, Dislutkan, Dishut
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,95	4,22	Disnakertrans, Dinas PUPR
7	Indeks Williamson	Indeks	0,383*	0,367	Dinas PUPR, Disperkim, Diskominfo, Disnakertrans, DESDM, DLH, Dishub
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,48	73,24	Biro Organisasi, Inspektorat, BPSDM, Diskominfo, Bappeda, Bakeuda, BKD, Satpol PP Damkar, Disdukcapil KB, DPMD,





No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Thn 2021)	Target Capaian Thn 2023	SKPD
					Dispersip, Biro Pem & Otda, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro PBJ, Biro Adpem, Sekrt DPRD, Balitbang, Badan Penghubung, Bakesbangpol.
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,03	70,9	DLH, Dishut, Dinas ESDM, Dislutkan
10	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	141,66	135	Dinkes, DPUPR, Disperkim, BPBD, Dinsos, Dishut
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	18	22,2	DLH, DPMD, Dinas ESDM, Dislutkan

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026

7.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolak ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk indikator kinerja tahun 2023 menyesuaikan dengan indikator kinerja nasional akibat dampak Pandemi COVID 19, indikator makro ditetapkan berdasarkan hasil analisis Kebijakan Ekonomi Makro Daerah (KEMD) Tahun 2022. Selain itu indikator kinerja daerah yang ditetapkan disusun berdasarkan rencana prioritas pembangunan dimana 6 (enam) prioritas tersebut dilaksanakan secara terintegrasi.

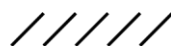
PRIORITAS I - Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. Sub prioritas terdiri atas : Peningkatan Angka Rata-Rata Lama





Sekolah, Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda, Penurunan Penyakit Melalui GERMAS, Pengendalian Prevalensi Stunting, Penurunan Angka Pernikahan Anak, Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, Peningkatan Prestasi Olahraga, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Indeks Pembangunan Manusia
 - b. Indeks Gini
 - c. Tingkat Kemiskinan
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Pendidikan
 - ii. Kesehatan
 - iii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - iv. Sosial
 - v. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
 - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Tenaga Kerja
 - ii. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - iii. Pangan
 - iv. Lingkungan Hidup
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - vi. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - vii. Kebudayaan
 - viii. Perpustakaan
 - ix. Kepemudaan dan Olahraga
 - c. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Kelautan dan Perikanan
 - ii. Pariwisata
 - iii. Pertanian

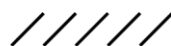




PRIORITAS II - Optimalisasi Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata. Sub prioritas terdiri atas : Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan, Peningkatan kualitas tenaga kerja, Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark, Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital, Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada.

1. Seluruh Aspek kesejahteraan masyarakat
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Pendidikan
 - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Tenaga Kerja
 - ii. Pangan
 - iii. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - iv. Koperasi dan UKM
 - v. Penanaman Modal
 - vi. Perhubungan
 - c. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Kelautan dan Perikanan
 - ii. Pertanian
 - iii. Pariwisata
 - iv. Kehutanan
 - v. Perdagangan
 - vi. Perindustrian
 - vii. Energi dan Sumber Daya Mineral

PRIORITAS III - Memperkuat Infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian Daerah, dengan sub prioritas Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar, Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi, Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan yang Terintegrasi dengan Infrastruktur, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada.

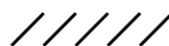




1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Indeks Gini
 - c. Tingkat Kemiskinan
 - d. Inflasi
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Kesehatan
 - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - iii. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - iv. Sosial
 - b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Tenaga Kerja
 - ii. Pangan
 - iii. Lingkungan Hidup
 - iv. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - v. Perhubungan
 - vi. Komunikasi dan Informatika
 - c. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Kelautan dan Perikanan
 - ii. Pariwisata
 - iii. Perindustrian
 - iv. Kehutanan
 - v. Energi dan Sumber Daya Mineral

PRIORITAS IV - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada pelayanan publik. Sub prioritas terdiri atas : Penguatan Reformasi Birokrasi, Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif, Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik, Pengembangan Satu Data Kalsel, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada.

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Pertumbuhan Ekonomi
 - b. Indeks Gini





2. Aspek Pelayanan Umum

- a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - ii. Pertanahan
 - iii. Penanaman Modal
 - iv. Komunikasi dan Informatika
 - v. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - vi. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - vii. Statistik
 - viii. Persandian

PRIORITAS V - Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung ketahanan bencana. Sub prioritas terdiri atas : Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Pelayanan Umum

- a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Kesehatan
 - ii. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - iii. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - iv. Ketentraman Umum, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat
 - v. Sosial
- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Lingkungan Hidup
- c. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Kelautan dan Perikanan
 - ii. Kehutanan
 - iii. Energi dan Sumber Daya Mineral





PRIORITAS VI - Pengembangan Kalsel Sebagai Gerbang Food Estate dan Ibukota Negara dengan sub prioritas Membuka Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN, Mengembangkan Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN, Pembangunan SDM Pendukung IKN dan Food Estate, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada.

1. Aspek Pelayanan Umum

- a. Pelayanan Urusan Wajib Dasar
 - i. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- b. Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
 - i. Pangan
 - ii. Perhubungan
- c. Pelayanan Urusan Pilihan
 - i. Kelautan dan Perikanan
 - ii. Pertanian

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Tabel 7.3.



Tabel 7.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
1	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
01.01	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
01.01.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,9	3,48	4,0 – 4,5	4,5 – 5,2
01.01.02	Laju Inflasi	%	2,4	2,5*	2,0 - 4,0	2,0 - 4,0
01.01.03	PDRB Perkapita (ADHB)	(Juta rupiah/org)	N/A	46.712	47,50-49,61	49,61 - 51,60
01.01.04	PDRB Perkapita ADHK	(Juta rupiah/org)	N/A	32,85	33,16-34,16	34,16 - 35,70
01.01.05	Indeks gini	Indeks	0,375-0,378	0,325	0,328	0,324
01.01.06	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 -8,0	4,56	4,80 -4,60	4,50 -4,00
01.02	Fokus Kesejahteraan Sosial					
01.02.01	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,29-73,35,	71,28	71,70	72,20
01.02.02	Harapan Lama Sekolah	Tahun	N/A	12,81	12,94	13,07
01.02.03	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	N/A	8,34	8,47	8,56
01.02.04	Angka Harapan Hidup	Tahun	N/A	68,83	70,64	71,05
01.02.05	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	N/A	N/A	N/A	1,19
01.02.06	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	N/A	N/A	N/A	10,02
01.02.07	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,52 - 6,24	4,95	4,39	4,22
2	ASPEK PELAYANAN UMUM					
	Pelayanan Urusan Wajib Dasar					
02.01	Pendidikan					





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.01.01	Jumlah Warga Negara Usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%	100	69,3	69,37	69,43
02.01.02	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	100	31,78	33,35	35,02
02.01.03	Rata – rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	2	1,86	1,85	2,16
02.01.04	Rata – rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,9	1,7	1,75	1,9
02.01.05	Rata – rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	2	1,89	1,85	2
02.01.06	Rata – rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,9	N/A	1,8	1,9
02.01.07	Rata – rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,9	N/A	1,8	1,9
02.01.08	Rata – rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,8	N/A	1,7	1,8
02.01.09	Rata – rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	2	N/A	1,85	2
02.01.10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,9	N/A	1,75	1,9
02.01.11	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,9	N/A	1,8	1,9





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.01.12	Rata – rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	1,8	N/A	1,7	1,8
02.01.13	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	56	47,78%	49,08%	50,38%
02.01.14	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	80	N/A	66.00%	70,00%
02.01.15	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Menengah)	Nilai	1,95	N/A	1,80	2,10
02.01.16	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Khusus)	Nilai	1,88	N/A	1,77	2,06
02.02	Kesehatan					
02.02.01	Persentase Rumah Sakit Rujukan Terakreditasi	%	N/A	100	100	100
02.02.02	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	%	90	26,3	90	90
02.02.03	Jumlah Penurunan Kematian Ibu	Kematian Ibu	3274	-14,42	5,5	5,5
02.02.04	Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	90	69,3	73	90
02.02.05	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita (persen)	%	7,3	N/A	N/A	8,3





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.02.06	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	93	85,01	85	87
02.02.07	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan KTR	Kab/Kota	474	5	5	6
02.02.08	Jumlah Kab/Kota >40% FKTP yang Menyelenggarakan UBM	Kab/Kota	275	6	5	6
02.02.09	Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kab/Kota	385	9	10	11
02.02.10	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Ratio TT.1000 penduduk	1,4	1	1,4	1,4
02.02.11	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang Terakreditasi	%	N/A	100	100	100
02.02.12	Jumlah Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	%	100	100	100	100
02.02.13	Jumlah kab/kota dengan minimal 80% posyandu aktif	%	60	15	35	38
02.02.14	Persentase kab/kota dengan ketersediaan obat esensial	%	83	N/A	81	83
02.02.15	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Griya Sehat	%	42	N/A	N/A	1
02.02.16	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	380	10	13	13
02.02.17	Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kinerja Baik dalam 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	%	90	N/A	N/A	90
02.02.18	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan perizinan sarana pelayanan	%	79	N/A	N/A	N/A





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	kefarmasian (Apotek, toko obat dan usaha mikro obat tradisional) sesuai standar					
02.02.19	Jumlah Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100
02.02.20	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen)	%	16	30	29	20
02.02.21	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	%	83	64	63	73
02.02.22	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Pada Usia 12-23 Bulan	%	94,6	N/A	93,5	94
02.02.23	Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria	Kab/kota	385	9	10	11
02.02.24	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 penduduk	N/A	104	112	111
02.02.25	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	%	83	N/A	65	66
02.02.26	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	%	100	N/A	80	82
02.02.27	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Per 1.000	N/A	104	112	111
02.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
02.03.01	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Alih Fungsi Lahan Sawah	daerah	12	N/A	N/A	N/A





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.03.02	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase	86.03	87	91,33	90
02.03.03	Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persentase	1.49	13	15,03	1
02.03.04	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Ha	30447	667	1.016	337
02.03.05	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Ha	110672	3.358	538	425
02.03.06	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	Persentase	92.21	82.67	91,39	83
02.03.07	Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada DAS	Daerah Aliran Sungai (DAS)	6	N/A	N/A	N/A
02.03.08	Pelaksanaan Fasilitasi Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kawasan Sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kasus	15	N/A	N/A	N/A
02.03.09	Pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	daerah	6	N/A	N/A	N/A
02.03.10	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	Persentase	91.80	N/A	N/A	100
02.03.11	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100	30.56	44.45	58.34





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota					
02.03.12	Persentase kondisi mantap jalan provinsi	%	73	80.05	80	86
02.03.13	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persentase	97.55	78.42	88.68	93.27
02.03.14	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase	14.22	47,33	57,65	15.01
02.03.15	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase	28.01	62,97	65,41	49.96
02.03.16	Tambahan Debit Air Baku	Liter/Detik	2.86	0,9	0,9	6,3
02.03.17	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	189	N/A	1	6
02.03.18	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	43	N/A	1	1
02.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman					
02.04.01	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	43.93	45.16	46.41
02.04.02	Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	-	220000	12875	13500	N/A
02.04.03	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan	-	135000	21874	20500	N/A





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.04.04	Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)	-	10000	N/A	N/A	N/A
02.04.05	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha	-	291400	5238	N/A	N/A
02.04.06	Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitas Pemerintah	-	241415	N/A	N/A	N/A
02.04.07	Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar	-	62500	867	800	N/A
02.04.08	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	-	8	2	3	N/A
02.04.09	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	-	1000	11	80.46	N/A
02.04.10	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas	-	208765	N/A	256	N/A
02.04.11	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
02.04.12	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.04.13	Persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak dan terjangkau	%	67.88	38.97	39.47	62
02.04.14	Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang ditangani	Ha	1459	36.19	30	32
02.04.15	Jumlah Kabupaten/Kota yang menerbitkan PBG dan SLF	kabupaten/kota	seluruh	13	13	13
02.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
02.05.01	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan	Perda/Perkada	10	3	5	7
02.05.02	Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Satgas Linmas	1	1	1	1
02.05.03	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1
02.05.04	Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	%	50	100	80	90
02.05.05	Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100
02.05.06	Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	%	20	14	14	14
02.05.07	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Orang	5	5	7	9





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.05.09	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	50	N/A	100	50
02.05.10	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	50	50	50	50
02.05.11	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	25	N/A	N/A	10
02.05.12	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	%	100	100	100	100
02.05.13	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N/A	100	100	100
02.05.14	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	%	100	79,83	100	100
02.05.15	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perdan dan Perkada	%	80	79,83	100	100
02.05.16	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100
02.05.17	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100
02.05.18	Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.05.19	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	%	50	N/A	100	50
02.05.20	Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	%	50	50	50	50
02.05.21	Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di prov/kab/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	%	20	100	100	100
02.05.22	Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial	%	20	100	100	100
02.05.23	Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota	orang	20	N/A	N/A	50
02.06	Sosial					
02.06.01	Jumlah lembaga di bidang Kesos yang mendapatkan peningkatan kualitas pelayanan	Lembaga	850	114	114	114
02.06.02	Jumlah SDM PKH yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	39351	100	100	100
02.06.03	Jumlah daerah yang melaksanakan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial	Provinsi	34	5	6	6
02.06.04	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan pendampingan kewirausahaan sosial	KPM	15000	52	52	60
02.06.05	Jumlah daerah yang melaksanakan pemantauan dan pengawasan izin	Provinsi	34	N/A	N/A	N/A





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
	tanda daftar lembaga di bidang kesejahteraan sosial					
02.06.06	Jumlah TJSLBU (tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha) yang mendapatkan penguatan	Badan Usaha	200	30	30	30
02.06.07	Jumlah daerah yang aktif melakukan pemantauan dan pengawasan undian gratis berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang dan barang (PUB)	Provinsi	34	50	50	50
02.06.08	Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	N/A	514	N/A	N/A	N/A
02.06.09	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang disediakan	N/A	133000	83	N/A	N/A
02.06.10	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	N/A	133000	237420	N/A	N/A
02.06.11	Jumlah kelompok rentan yang mendapatkan paket permakanan	N/A	1000	395701	N/A	N/A
02.06.12	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	N/A	10230	644	N/A	N/A
02.06.13	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	N/A	1000	474841	N/A	N/A
02.06.14	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%	70	50	50	50
02.06.15	Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (psm)	Orang	3000	60	60	60





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.06.16	Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	Orang	7230	153	154	154
02.06.17	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	%	100	60	60	60
02.06.18	Jumlah keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat	KPM	10000000	6140	13000	13000
02.06.19	Peningkatan kapasitas pendamping pkh	Orang	39351	100	100	100
02.06.20	Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos	Lembaga	850	114	114	114
02.06.21	Jumlah sdm kesos yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan profesional	Orang	38000	403	406	406
02.06.22	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100
02.06.23	Jumlah warga negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100	100	100	100
02.06.24	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	204330	395701	14000	14000
02.06.25	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	Kelompok Masyarakat	250	200	200	200





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.06.26	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	Kelompok Masyarakat	375	500	500	500
02.06.27	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Orang	50000	8431	600	600
02.06.28	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Orang	1000	72	100	100
02.06.29	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100	100	100	100
02.06.30	Jumlah warga negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100	9,68	10,18	10,68
02.06.31	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100	1,42	1,92	2,42
02.06.32	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	%	100	2,05	2,55	3,05
02.06.33	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Unit	136	23	23	23
02.06.34	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10	10	15	20





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.06.35	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	210	210	210
02.06.36	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	110	110	110
02.06.37	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	50	47	47	47
02.06.38	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	Orang	50	60	60	70
02.06.39	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	Orang	100	10	10	10
02.06.40	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1360	54	54	54
02.06.41	Jumlah pekerja social profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Orang	2	5	5	5
02.06.42	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Orang	50000	8431	600	600
02.06.43	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	511	511	511





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.06.44	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2720	9	9	9
02.06.45	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	100	100	100
02.06.46	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	100	40	40	40
02.06.47	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran, tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	90	90	100
02.06.48	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	25	40	40	40
02.06.49	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	Orang	100	1	1	2
02.06.50	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Orang	100	40	40	40
02.06.51	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	3400	511	511	511
02.06.52	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	110	110	120





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.06.53	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	N/A	68	60	60	60
02.06.54	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan di dalam panti	Orang	50	47	47	47
02.06.55	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1700	160	160	160
02.06.56	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jiwa	204330	395.701	14000	14000
02.06.57	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	N/A	136	55	55	55
02.06.58	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	340	511	511	511
02.06.59	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Orang	680	511	511	511
02.06.60	Jumlah lanjut usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulsuran keluarga	Orang	25	10	15	20
02.06.61	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100
02.06.62	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, KTP, akta kelahiran, surat nikah dan/atau KIA di dalam panti	Orang	100	40	40	40





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.06.63	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	N/A	136	2	2	2
02.06.64	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	100	40	40	40
02.06.65	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	340	40	40	40
	Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar					
02.07	Tenaga Kerja					
02.07.01	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	N/A	100	100	100
02.07.02	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	N/A	21.30	21.33	21.43
02.07.03	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	N/A	6.20	6.22	6.23
02.07.04	Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan	%	N/A	0.50	24.87	26.03
02.07.05	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	%	N/A	9.20	11.49	12.48
02.07.06	Persentase perusahaan yang menerapkan Peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	N/A	9.20	18.96	22.21





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.07.07	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	45.000	26.108	108.968	107.968
02.07.08	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	72	17,15	23,1	23,73
02.07.09	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	Orang	227.500	262	464	576
02.07.10	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	7.056.010	257.337	270.203	283.714
02.07.11	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosia	Orang	7.056.010	257.337	270.203	22.007
02.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
02.08.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	Meningkat minimal 25% dari kondisi 2021	29	30	37,5
02.08.02	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	90	100	100	100
02.08.03	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	Meningkat minimal 0,1 point dari kondisi 2021	88,86	88,87	88,88
02.08.04	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	Provinsi menyesuaikan dengan hasil proyeksi tahun	65,11	68	72,83





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
			2023; Kab/Kota meningkat minimal 2 Point dari kondisi 2021			
02.08.05	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	75	100	100	100
02.08.06	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	Meningkat minimal 0,1 point dari kondisi 2021	88,86	88,87	88,88
02.09	Pangan					
02.09.01	Persentase cadangan pangan	%	-	20.19	20.22	20.32
02.09.02	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	%	-	71.98	74.18	76.37
02.09.03	Koefisien Variasi (CV) harga beras di tingkat konsumen (%)	%	-	7.3	7.2	7.1
02.09.04	Konsumsi beras per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	-	95.3	93.6	91.9
02.09.05	Konsumsi pangan lokal per kapita per tahun (Kg/Kap/Th)	Kg/Kap/Th	-	20.03	20.94	21.85
02.09.06	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	%	-	16.19	16.09	15.99
02.09.07	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	%	-	80	80	82
02.09.08	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	85	81.36	80	82
02.09.09	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	29.930	386.8	389	394





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.09.10	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	12	27,36	16.09	15.99
02.09.11	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94	85,9	87,1	88,15
02.10	Pertanahan					
02.10.01	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	355157	4.268	6.164	4.000
02.10.02	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	144200	5100	3000	4.400
02.11	Lingkungan Hidup					
02.11.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69.48	71.03	68	70.90
02.11.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	%	1800 Lembaga (target pusat) 20-30% ketaatan penanggung jawab usaha dari 75% usaha yang dilakukan pengawasan	98.41	100	100
02.11.03	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	1800 Lembaga (target pusat) 75% penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dari total izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
02.12.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	100	100	100	100
02.12.02	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	98	95,01	96	98
02.12.03	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.04	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.05	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	%	100	100	100	100
02.12.06	Pemanfaatan data kependudukan	%	80	18	25	30
02.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
02.13.01	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	13494	N/A	80	80
02.13.02	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	7500	N/A	80	80
02.13.03	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar	%	7500	N/A	80	80
02.13.04	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	5444	28	38	47
02.13.05	Jumlah Desa Berkembang	Desa	58291	1334	1234	1134





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.13.06	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	11652	98	68	38
02.13.07	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Berkembang	Desa	9000	552	592	632
02.13.08	Jumlah BUMDes bersama (BUMdesma) berkembang	Desa	270	N/A	N/A	5
02.14	Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana					
02.14.01	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	59	58	58	58
02.14.02	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	32	33,97	37	24
02.14.03	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,16	2,45	2,42	2,30
02.14.04	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	67,56	81,8	70	70
02.14.05	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,75	9,26	7,4	7,75
02.15	Perhubungan					
02.15.01	On Time Performance Layanan Transportasi	%	80.26	34	58.5	58,5
02.15.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	88.4	77,5	81,3	81,5
02.15.03	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio	0.725	0,5987	0,59	0,61
02.15.04	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Rasio	26.39	2,73	2,65	2,6





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.16	Komunikasi dan Informatika					
02.16.01	Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan Dinas dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	%	80	11	13	20
02.16.02	Persentase layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik dan terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	%	65	100	100	100
02.16.03	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	2	N/A	3	2
02.16.04	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional, (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	85	75	80	75
02.16.05	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	74	60	70	74
02.16.06	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.16.07	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	80	96	97	90
02.16.08	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	100	100	100
02.16.09	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	%	80	45	50	70
02.16.10	Jumlah ASN pengelola SPBE di Pemda termasuk ASN di Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	Orang	100	N/A	N/A	100
02.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
02.17.01	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	-	20	25	30
02.17.02	Persentase usaha kecil yang menjadi Wirausaha	%	-	15.00	16.67	18.17
02.17.03	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	-	30	35	40





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.17.04	Persentase usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan Wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	%	-	30	33	36
02.17.05	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	-	10	12	14
02.17.06	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	-	23	25	25
02.17.07	Persentase usaha kecil yang diberikan Pendampingan kelembagaan dan usaha	%	-	1	1.8	2
02.17.08	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	-	1	1.8	1.9





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.17.09	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	18	15,73	10	15
02.17.10	Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4	-	0,46	0,65
02.17.11	Terfasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke dalam Rantai Pasok dan Ekspor	%	70	-	3	3
02.17.	Pertumbuhan Wirausaha	%	3,5	0,14	0,25	0,31
02.18	Penanaman Modal					
02.18.01	Persentase Peningkatan calon investor	%	-	30	30	32
02.18.02	Persentase realisasi pelaksanaan kemitraan	%	-	100	100	100
02.18.03	Persentase Potensi Investasi Daerah berbasis lingkungan	%	-	20	20	25
02.18.04	Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan	Poin	-	85	88.25	88.5
02.18.05	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	%	-	100	100	100
02.18.06	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	%	-	30	35	40
02.18.07	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	%	-	100	100	100
02.18.08	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp	1.128 - 1.200 triliun	12.715.504.480.000	11,660,000,000,000	12,550,000,000,000





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.19	Kepemudaan dan Olahraga					
02.19.01	Jumlah Perolehan Medali Emas Kejuaraan Nasional dan Internasional	Medali	N/A	45	30	40
02.19.02	Persentase penduduk 10 tahun ke atas di provinsi yang berolahraga dalam seminggu terakhir	%	38,46	27,58	35,5	35,87
02.19.03	Jumlah Atlet yang berasal dari Provinsi yang masuk Pelatnas	orang	10	14	6	10
02.19.04	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan di tingkat Provinsi	dokumen	1	N/A	1	1
02.19.05	Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan di tingkat Provinsi	orang	100	500	500	500
02.19.06	Persentase Wirausahawan Muda di tingkat Provinsi	%	0,5	0,24	0,4	0,41
02.19.07	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh kwarda	orang	300	50	50	150
02.20	Statistik					
02.20.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	81.25	90	100
02.20.02	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	%	100	4.17	10	15
02.20.03	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	%	100	45.83	30	50





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.20.04	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	81.25	90	100
02.21	Persandian					
02.21.01	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor pemerintah daerah	daerah	3	N/A	N/A	N/A
02.21.02	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	Orang	100	N/A	2	1
02.21.03	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT	Orang	100	N/A	2	1
02.21.04	Persentase Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) pada Sektor Pemda dengan Tingkat Kematangan Keamanan Siber pada Skor Minimal 2,59	%	69,2	62	63	64
02.22	Kebudayaan					
02.22.01	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,99	1,50	1,80	2,9
02.22.02	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	58,86	18,11	21,06	35
02.22.03	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	36	12	15	36





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.22.04	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	12	11,96	12,39	11,7
02.22.05	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	0,50	0,80	1	0,50
02.22.06	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,96	1,50	1,80	1,90
02.22.07	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	22,82	16	20	24
02.23	Perpustakaan					
02.23.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67,3	10,25	45	67,3
02.23.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Index	14	48,04	60	58,13
02.24	Kearsipan					
02.24.01	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang menerapkan e-arsip terintegrasi	Provinsi/Kab/Kota	165	62	62	62
02.24.02	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B ke atas	Provinsi/Kab/Kota	32	3	4	5
02.24.03	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Kearsipan yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi	Rekomendasi	123	33	22	25





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.24.04	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Orang	411095	450	400	4050
02.24.05	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	8051	7439	25000	8100
Pelayanan Urusan Pilihan						
02.25 Kelautan dan Perikanan						
02.25.01	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota diwilayah provinsi	ton	21.580.000	155.000	157.000	325.769
02.25.02	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (%)	%	-	100	100	100
02.25.03	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional	Ha	15.800.000	237.678,59	237.678,59	237.678,59
02.25.04	Materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Provinsi	34	0	1	-
02.25.05	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	8.735.580	239.818,89	264.476,48	211.000
02.25.06	Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	61,02	61.74	62.06	63.00
02.25.07	Operasi kapal/speedboat pengawas	Hari	100	4	5	10
02.25.08	POKMASWAS yang ditumbuhkan dan dikembangkan	Kelompok	1150	100	100	200





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.25.09	Pelaku usaha kelautan dan perikanan izin Provinsi yang diawasi atau diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	2870	130	130	130
02.25.10	Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Provinsi	Forum	1	-	-	1
02.26	Pariwisata					
02.26.01	Persentase pertumbuhan jumlah Wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	-	5	5	5
02.26.02	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	-	10	10	10
02.26.03	Tingkat hunian akomodasi	%	-	38	40	44
02.26.04	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4.4	2,3	2,25	2,27
02.26.05	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	300.000.000-3 15.000.000	2.924.434	3.300.000	3.630.000
02.27	Pertanian					
02.27.01	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	%	-	-	0,78 (TP) dan 1,83 (Hortikultura)	1.2179
02.27.02	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun	Kg/ha	-	72	75.33	75.5
02.27.03	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	-	4	5	6
02.27.04	Persentase penurunan kejadian jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-	75	80	85





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.27.05	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (padi dan jagung)	%	2.78	Padi 2.64% ; Jagung 6.68	Padi 1% ; Jagung 1%	Padi 1% ; Jagung 1%
02.27.06	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (cabai dan bawang merah)	%	1.85	Bawang Merah 3.03% ; Cabe Besar -13.21% ; Cabe Rawit -15.29%	Bawang Merah 1% ; Cabe Besar 2.50% ; Cabe Rawit 2.50%	Bawang Merah 1% ; Cabe Besar 2.50% ; Cabe Rawit 2.50%
02.27.07	Persentase peningkatan Produktivitas Perkebunan (kopi, kelapa, kakao, karet, lada)	%	2.05	6.26	7.2	0,45
02.27.08	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4.647.800	124.466,22	124.603	128.749
02.27.09	Jumlah Produksi Susu	Ton	986.370	121	77	123
02.27.10	Jumlah Produksi Telur	Ton	5.831.500	107.272	116.689	119.865
02.27.11	Rasio Luas Serangan OPT yang Dapat Ditangani Terhadap Luas Serangan OPT (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%	71.87	Hortikultura 141% ; Tanaman Pangan 100% ; Perkebunan 48,60%	Hortikultura 97.50% ; Tanaman Pangan 97.50% ; 100%	91,7
02.27.12	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	%	50.2	Hortikultura 98.00% ; Tanaman Pangan 98.75%	Hortikultura 97.50% ; Tanaman Pangan 97.50%	92





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.27.13	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	81	100	100	100
02.28	Kehutanan					
02.28.01	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	200.000	17849.26	32.000	32.000
02.28.02	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Ha	1.172.000	8354.00	7.000	3.000
02.29	Energi Sumber Daya Mineral					
02.29.01	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	-	13.82	17.89	21.95
02.29.02	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	98.36	98.40	98.46
02.29.03	Rasio elektrifikasi	%	100	99,35	99,45	99,52
02.29.04	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional	%	17,9	13,24	15,61	16,42
02.30	Perdagangan					
02.30.01	Tertib Usaha	%	75 - 90	100	100	75 - 90
02.30.02	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90	96	90	90
02.30.03	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	5.96 - 7.86	57.71	5.96	8
02.30.04	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	50 - 75	100	100	100
02.30.05	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	55	100	100	100





No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.30.06	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5,9	0,013	0.1	5,9
02.30.07	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%		10.28	10.5	11
02.30.08	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	100	100	100
02.30.09	Inflasi Pangan Bergejolak	%	3 - 5	1,87	3,5	3 - 5
02.31	Perindustrian					
02.31.01	Persentase Pertumbuhan Industri	%	-	5	5.75	6
02.31.02	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	16	18.75	20.56
02.31.03	Persentase Tersedianya informasi industry secara lengkap dan terkini	%	-	65	100	100
02.31.04	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	7.70	5.70	4.75	5.65
02.31.05	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18,40	13.09	13.28	14.44
02.31.06	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	160,64	161,33	10,30	10,78
02.31.07	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	21.34 juta	334,049	294,172	307,496
02.31.08	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	544.59 Triliun	2,17	2,36	2.52





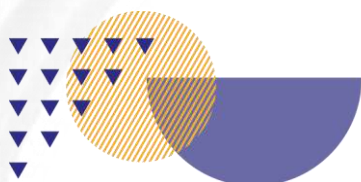
No	Aspek/ Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Nasional Tahun 2023	Kondisi Kinerja Tahun Awal (Capaian Tahun 2021)	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
02.32	Transmigrasi					
02.32.01	Persentase Luas Sisa Areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda	%	N/A	0	20	40
02.32.02	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri	%	N/A	100	100	-
02.32.03	Persentase satuan permukiman yang Difasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	%	N/A	-	-	100
02.32.04	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	44.08	47,21	48,54	49,88
02.32.05	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisas	Index	55.31	64,57	68,06	71,54
3	ASPEK DAYA SAING					
03.01.01	Nilai Tukar Petani	%	103 - 105	101,58*	102.23	102.7
03.01.02	Keterbukaan Ekonomi (Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB ADHK)	Rasio	N/A	0.203	0.194	0.195
03.01.03	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	N/A	49.72	50	50.28
03.01.04	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR	Rasio	N/A	1.11	1.2	1.24
03.01.05	Rasio Elektrifikasi	%	100	99,35	99,45	99,52
03.01.06	Rasio Konektivitas	Rasio	N/A	0.57	0.59	0.61
03.01.07	Indeks Infrastruktur Dasar Wilayah	Indeks	N/A	76.57	79.33	81.21
03.01.08	Konflik antar dan inter umat beragama yg ditangani	Kasus	N/A	0	0	0

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2021 – 2026, Rakortekrenbang Prov. Kalsel thn 2022 dan Permendagri No. 59 thn 2021



Bab-VIII

Penutup



RKPD 2023

KALIMANTAN SELATAN



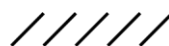
BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Untuk pelaksanaan dokumen RKPD 2023, baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan wajib dilaksanakan secara professional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2023 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di provinsi Kalimantan Selatan. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan





Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR





**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

2023